



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN



LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

TAHUN
ANGGARAN
2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 ini, kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK);
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sehingga terwujud tata kelola keuangan daerah yang baik.

Pangkalan Balai, Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, SH., MH



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948
Palembang 30137

14 Mei 2019

Nomor : 22.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Bupati Banyuasin
di Pangkalan Balai

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018, yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah tidak tertib;
- b. Piutang PBB-P2 belum divalidasi;
- c. Penatausahaan dan pengelolaan Persediaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah belum tertib;
- d. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai;
- e. Klasifikasi penganggaran Belanja Modal pada empat Organisasi Perangkat Daerah tidak tepat;
- f. Laporan pertanggungjawaban Dana Hibah terlambat dan belum diterima; dan
- h. Penyaluran Dana Desa dan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa terlambat.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Potensi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dikenakan minimal sebesar Rp30.300.000,00;
- b. Kelebihan pembayaran Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli pada Bappeda sebesar Rp32.010.000,00;
- c. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada tiga Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp2.827.944.925,59; dan
- d. Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Obat-obatan DAK pada Dinas Kesehatan mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda sebesar Rp22.985.418,00


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin agar menindaklanjuti temuan-temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019; Nomor 22.B/LHP/XVIII.PLG/05/2019; dan Nomor 22.C/LHP/XVIII.PLG/05/2019 masing-masing bertanggal 14 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Banyuasin, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Plt. Kepala Perwakilan


Teguh Prasetyo, S.E., MAB., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA 19589

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Banyuasin.



BUPATI BANYUASIN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Neraca; (f) Laporan Arus Kas (g) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xvi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xviii
LAPORAN OPERASIONAL.....	xix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xxi
NERACA KOMPARATIF.....	xxii
LAPORAN ARUS KAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL DAN EKONOMI MAKRO.....	6
2.1 Kebijakan Keuangan.....	6
2.1.1 Kebijakan Pendapatan.....	6
2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	7
2.2 Ekonomi Makro.....	10
2.2.1 Struktur Ekonomi.....	11
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.2.3 Laju Inflasi PDRB.....	12
2.2.4 Pendapatan Perkapita.....	12
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	14
3.1 Anggaran.....	14
3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan.....	15
3.2.1 Pendapatan.....	15
3.2.2 Belanja dan Transfer.....	16
3.3 Dana Diluar APBD.....	17
3.3.1 Dana Tugas Pembantuan.....	17

3.3.2 Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	19
4.1 Entitas Akuntansi.....	19
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	19
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	19
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	19
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	19
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Piutang	22
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka	27
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan	27
4.4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi	29
4.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	35
4.4.7 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	49
4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya	52
4.4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban	57
4.4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	64
4.4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA	65
4.4.12 Kebijakan Akuntansi Beban	66
4.4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja	68
4.4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer	69
4.4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.....	71
4.4.16 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan.....	73
4.4.17 Kebijakan Akuntansi BLUD	74
4.4.18 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan	79
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	82
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	82
5.1.1 Pendapatan - LRA	82
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA	83
5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA	84
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	85
5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	86
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	88
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu – LRA	89
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA..	90
5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA	91
5.1.1.2 Pendapatan Transfer Daerah - LRA	95
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA.....	95
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	99

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah/Provinsi - LRA.....	99
5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan - LRA	100
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	100
5.1.2 Belanja	101
5.1.2.1 Belanja Operasi	102
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	102
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa.....	102
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	103
5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Uang (SKPKD).....	103
5.1.2.1.3.2 Belanja Barang/Jasa Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (SKPKD).....	104
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial.....	104
5.1.2.2 Belanja Modal	105
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	105
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	106
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	107
5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	108
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	110
5.1.3 Transfer.....	110
5.1.3.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	110
5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.....	112
5.1.4 Pembiayaan.....	113
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	113
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	113
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	113
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)	114
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	114
5.2.2 Koreksi Kesalahan Saldo Anggaran Lebih Awal.....	114
5.2.3 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	114
5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	114
5.2.5 Lain-lain	114
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO).....	115
5.3.1 Pendapatan - LO	115
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO.....	116
5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO	117
5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	118
5.3.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO	120
5.3.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO	120
5.3.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu - LO	121
5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan - LO ..	121
5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	122

5.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO	123
5.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	124
5.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	127
5.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	127
5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	129
5.3.2 Beban Daerah	130
5.3.2.1 Beban Pegawai	131
5.3.2.2 Beban Persediaan	135
5.3.2.3 Beban Jasa	139
5.3.2.4 Beban Pemeliharaan	143
5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas.....	146
5.3.2.6 Beban Subsidi	148
5.3.2.7 Beban Hibah	148
5.3.2.8 Beban Bantuan Sosial	151
5.3.2.9 Beban Penyusutan dan Amortasi	152
5.3.2.10 Beban Penyisihan Piutang	154
5.3.2.11 Beban Lain-lain	154
5.3.2.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	155
5.3.2.13 Beban Transfer Bantuan Lainnya	156
5.3.3 Kegiatan Non Operasional	156
5.3.3.1 Surplus Non Operasional Lainnya	156
5.3.3.2 Defisit Non Operasional Lainnya	156
5.3.4 Pos Luar Biasa	156
5.3.4.1 Pendapatan Luar Biasa	157
5.3.4.2 Beban Luar Biasa	157
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	158
5.4.1 Ekuitas Awal	158
5.4.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional.....	158
5.4.3 Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar	158
5.4.3.1 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	158
5.4.3.2 Penilaian Aset Tetap.....	159
5.4.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	159
5.4.3.4 Koreksi Hutang Lain-lain	159
5.4.3.5 Koreksi Pendapatan Tahun Lalu	159
5.4.3.6 Koreksi Saldo Awal Piutang Tahun Lalu.....	159
5.4.3.7 Koreksi Saldo Awal Hutang Beban	160
5.4.3.8 Koreksi Lebih Salur Dana Bagi Hasil	160
5.4.3.9 Koreksi Kurang Salur Dana Bagi Hasil	160
5.4.3.10 Koreksi Penyisihan Piutang	161
5.4.3.11 Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang	161
5.4.4 Ekuitas Akhir	161
5.5 Penjelasan Pos-pos Neraca	162

5.5.1 Aset	162
5.5.1.1 Aset Lancar.....	163
5.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas	163
5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	163
5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	164
5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	164
5.5.1.1.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum	164
5.5.1.1.1.5 Kas pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama)	164
5.5.1.1.1.6 Setara Kas	165
5.5.1.1.1.7 Kas di Bendahara Sekolah.....	166
5.5.1.1.2 Piutang	166
5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak	166
5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi	170
5.5.1.1.2.3 Piutang Dana Transfer.....	170
5.5.1.1.2.4 Bagian Lancar Penjualan Angsuran	172
5.5.1.1.2.5 Piutang Lain-lain	172
5.5.1.1.2.6 Penyisihan Piutang	176
5.5.1.1.2.7 Beban Dibayar Dimuka	177
5.5.1.1.2.8 Persediaan	177
5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang	178
5.5.1.3 Aset Tetap	179
5.5.1.4 Aset Lainnya.....	190
5.5.2 Kewajiban	194
5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek.....	194
5.5.3 Ekuitas	197
5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)	198
5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	198
5.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	199
5.6.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	200
5.6.2 Aktivitas Investasi	201
5.6.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	201
5.6.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	202
5.6.3 Aktivitas Pendanaan	202
5.6.4 Aktivitas Transitoris	202
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON	
KEUANGAN	206
6.1 Struktur Organisasi.....	207
BAB VII PENUTUP	210

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin Menurut Sektor (%) 2017	12
Tabel 2.1.2	Pendapatan Perkapita Kabupaten Banyuasin Tahun 2017	13
Tabel 3.1.1	Rincian Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018	15
Tabel 3.1.2	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018	15
Tabel 3.1.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2018	15
Tabel 3.1.4	Realisasi Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018	16
Tabel 3.1.5	Realisasi Belanja dan Transfer Per SKPD Tahun Anggaran 2018.....	16
Tabel 3.1.6	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018.....	17
Tabel 3.1.7	Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018	17
Tabel 3.1.8	Realisasi Belanja Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat Tahun Anggaran 2018	18
Tabel 5.1.1	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LRA Tahun 2018	82
Tabel 5.1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun 2018.....	83
Tabel 5.1.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2018	84
Tabel 5.1.4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2018.....	86
Tabel 5.1.5	Rincian Retribusi Jasa Umum - LRA Tahun 2018.....	86
Tabel 5.1.6	Rincian Retribusi Jasa Usaha- LRA Tahun 2018.....	88
Tabel 5.1.7	Rincian Retribusi Perizinan Tertentu -LRA Anggaran 2018	89
Tabel 5.1.8	Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2018.....	91
Tabel 5.1.9	Daftar Nilai Bunga Deposito yang Diterima RKUD Tahun 2018.....	92
Tabel 5.1.10	Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2018.....	92
Tabel 5.1.11	Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2018	93
Tabel 5.1.12	Rincian Realisasi Pendapatan Lelang Lebak Lebung Tahun 2018	93
Tabel 5.1.13	Rincian Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dari BPJS Per Puskesmas dan RKUD Tahun Anggaran 2018	94
Tabel 5.1.14	Rincian Pendapatan Transfer- LRA Tahun Anggaran 2018	95
Tabel 5.1.15	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun Anggaran 2018	95
Tabel 5.1.16	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA Tahun Anggaran 2018	96
Tabel 5.1.17	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2018	98
Tabel 5.1.18	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2018	99
Tabel 5.1.19	Rincian Bantuan Keuangan Provinsi ke RKUD Tahun Anggaran 2018	100
Tabel 5.1.20	Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.....	101
Tabel 5.1.21	Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018.....	102
Tabel 5.1.22	Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018.....	103

Tabel 5.1.23	Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018.....	103
Tabel 5.1.24	Rincian Belanja Hibah Uang Tahun Anggaran 2018	104
Tabel 5.1.25	Rincian Setoran Pengurangan Belanja Atas Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018	104
Tabel 5.1.26	Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2018.....	105
Tabel 5.1.27	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018	106
Tabel 5.1.28	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018	107
Tabel 5.1.29	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018	107
Tabel 5.1.30	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018	108
Tabel 5.1.31	Daftar Belanja Modal menjadi Aset Tetap Tahun Anggaran 2018	108
Tabel 5.1.32	Rincian Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap Per SKPD Tahun Anggaran 2018.....	109
Tabel 5.1.33	Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2018.....	110
Tabel 5.1.34	Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018	111
Tabel 5.1.35	Rincian Realisasi Dana Per Kecamatan Tahun Anggaran 2018.....	112
Tabel 5.1.36	Rincian Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2018	113
Tabel 5.1.37	Rincian Koreksi SAL Awal Tahun Anggaran 2018.....	114
Tabel 5.3.1	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan – LO 2018 dan 2017	115
Tabel 5.3.2	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan – LO dan LRA tahun 2018	115
Tabel 5.3.3	Realisasi Pendapatan – LO per SKPD 2018.....	116
Tabel 5.3.4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2018 dan 2017.....	116
Tabel 5.3.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO dan LRA tahun 2018	116
Tabel 5.3.6	Pajak Daerah _ LO Tahun 2018 dan 2017	117
Tabel 5.3.7	Pajak Daerah – LO dan Pajak Daerah – LRA Tahun 2018.....	117
Tabel 5.3.8	Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2018 dan 2017.....	118
Tabel 5.3.9	Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA	119
Tabel 5.3.10	Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD 2018 dan 2017	119
Tabel 5.3.11	Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA per SKPD 2018	119
Tabel 5.3.12	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO tahun 2018 dan 2017	120
Tabel 5.3.13	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO dan LRA tahun 2018	120
Tabel 5.3.14	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO tahun 2018 dan 2017	120
Tabel 5.3.15	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO dan LRA tahun 2018	121
Tabel 5.3.16	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO tahun 2018 dan 2017	121
Tabel 5.3.17	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO dan LRA tahun 2018	121
Tabel 5.3.18	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO tahun 2018 dan 2017	122
Tabel 5.3.19	Perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dan LRA tahun 2018	122

Tabel 5.3.20	Perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO per SKPD Tahun 2018 dan 2017	123
Tabel 5.3.21	Perbedaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan LRA per SKPD Tahun 2018	123
Tabel 5.3.22	Pendapatan Transfer – LO Tahun 2018 dan 2017	124
Tabel 5.3.23	Pendapatan Transfer – LO dan LRA Tahun 2018	124
Tabel 5.3.24	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2018 dan 2017	125
Tabel 5.3.25	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dan LRA	126
Tabel 5.3.26	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2018 dan 2017	127
Tabel 5.3.27	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan LRA Tahun 2018	127
Tabel 5.3.28	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2018 dan 2017	127
Tabel 5.3.29	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO dan LRA Tahun 2018	128
Tabel 5.3.30	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2018 dan 2017	129
Tabel 5.3.31	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2018	129
Tabel 5.3.32	Perbedaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO dan LRA Tahun 2018 dan 2017	130
Tabel 5.3.33	Beban per SKPD Tahun 2018 dan 2017	131
Tabel 5.3.34	Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017	131
Tabel 5.3.35	Beban Belanja Pegawai - LO Tahun 2018	132
Tabel 5.3.36	Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2018 dan 2017	133
Tabel 5.3.37	Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2018	134
Tabel 5.3.38	Beban Persediaan per Rekening Tahun 2018 dan 2017	135
Tabel 5.3.39	Beban Persediaan per SKPD Tahun 2018 dan 2017	136
Tabel 5.3.40	Beban dan Belanja Persediaan s.d 31 Desember 2018	137
Tabel 5.3.41	Beban dan Belanja Persediaan per SKPD s.d 31 Desember 2018	138
Tabel 5.3.42	Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017	139
Tabel 5.3.43	Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2018	140
Tabel 5.3.44	Beban Jasa dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2018 dan 2017	142
Tabel 5.3.45	Beban Jasa dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2018	143
Tabel 5.3.46	Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017	144
Tabel 5.3.47	Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2018	144
Tabel 5.3.48	Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2018 dan 2017	145
Tabel 5.3.49	Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan per SKPD Tahun 2018	146
Tabel 5.3.50	Beban Perjalanan Dinas Dinas Tahun 2018 dan 2017	147
Tabel 5.3.51	Beban Perjalanan Dinas Dinas per SKPD Tahun 2018 dan 2017	147
Tabel 5.3.52	Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018	148

Tabel 5.3.53	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017.....	148
Tabel 5.3.54	Beban Hibah Barang per SKPD Tahun 2018 dan 2017	149
Tabel 5.3.55	Beban dan Belanja Hibah Tahun 2018.....	149
Tabel 5.3.56	Beban dan Belanja Hibah per SKPD Tahun 2018.....	151
Tabel 5.3.57	Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017.....	151
Tabel 5.3.58	Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2018 dan 2017	151
Tabel 5.3.59	Beban dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018.....	152
Tabel 5.3.60	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017	152
Tabel 5.3.61	Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD Tahun 2018 dan 2017	153
Tabel 5.3.62	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017	154
Tabel 5.3.63	Beban Penyisihan Piutang Per SKPD Tahun 2018 dan 2017.....	154
Tabel 5.3.64	Beban Lain-lain Tahun 2018 dan 2017	155
Tabel 5.3.65	Beban dan Belanja Lain-lain Tahun 2018	155
Tabel 5.3.66	Beban dan Belanja Transfer Keuangan ke Desa Tahun 2018	156
Tabel 5.3.67	Beban dan Belanja Transfer Keuangan Lainnya Tahun 2018	156
Tabel 5.4.1	Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017	158
Tabel 5.4.2	Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar	158
Tabel 5.5.1	Rincian Arus Kas dari Aktifitas Operasi Tahun 2018 dan 2017	162
Tabel 5.5.2	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017	163
Tabel 5.5.3	Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017	163
Tabel 5.5.4	Rincian Kas di Kas Daerah 31 Desember 2018 dan 2017	163
Tabel 5.5.5	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017	164
Tabel 5.5.6	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017	164
Tabel 5.5.7	Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2018 dan 2017	165
Tabel 5.5.8	Rincian DOC (Deposit on Call)	165
Tabel 5.5.9	Rincian Kas di Bendahara Sekolah	166
Tabel 5.5.10	Rincian Piutang per 31 Desember 2018	166
Tabel 5.5.11	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018	166
Tabel 5.5.12	Umur Piutang Pajak Daerah	167
Tabel 5.5.13	Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2018	167
Tabel 5.5.14	Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2018	167
Tabel 5.5.15	Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2018	168
Tabel 5.5.16	Rincian Umur Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2018	168
Tabel 5.5.17	Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2018	169
Tabel 5.5.18	Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018	169
Tabel 5.5.19	Rincian Piutang PPJ per 31 Desember 2018	169
Tabel 5.5.20	Rincian Piutang Pajak Air Bawah per 31 Desember 2018	170
Tabel 5.5.21	Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2018	170
Tabel 5.5.22	Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2018	170
Tabel 5.5.23	Rincian Piutang Dana Transfer pusat per 31 Desember 2018	171
Tabel 5.5.24	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2018	171

Tabel 5.5.25	Rincian Piutang Jamsokes Provinsi per 31 Desember 2018	172
Tabel 5.5.26	Rincian Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018	172
Tabel 5.5.27	Rincian Piutang Lain-lain	172
Tabel 5.5.28	Rincian Piutang TGR	173
Tabel 5.5.29	Rekapitulasi piutang Anggota DPRD per 31 Desember 2018	173
Tabel 5.5.30	Rincian Piutang Lainnya	174
Tabel 5.5.31	Rincian Piutang pada Badan Layanan Umum.....	174
Tabel 5.5.32	Rincian Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2018	175
Tabel 5.5.33	Rincian Perhitungan Piutang Deposito per 31 Desember 2018	175
Tabel 5.5.34	Rincian Piutang Deviden per 31 Desember 2018	175
Tabel 5.5.35	Rincian Umur Piutang Retribusi dan Piutang lain-lain per 31 Desember 2018	176
Tabel 5.5.36	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018	176
Tabel 5.5.37	Rincian Piutang PBB per 31 Desember 2018	176
Tabel 5.5.38	Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018	177
Tabel 5.5.39	Rincian Persediaan per Jenis Persediaan per 31 Desember 2018	177
Tabel 5.5.40	Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018	178
Tabel 5.5.41	Rincian Penyertaan yang menjadi saham per 31 Desember 2018 ...	178
Tabel 5.5.42	Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada PDAM Tirta Bertuah	179
Tabel 5.5.43	Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin.....	179
Tabel 5.5.44	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah	180
Tabel 5.5.45	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	181
Tabel 5.5.46	Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan	183
Tabel 5.5.47	Rincian Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	185
Tabel 5.5.48	Rincian Mutasi Aset tetap Lainnya	187
Tabel 5.5.49	Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan	188
Tabel 5.5.50	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	189
Tabel 5.5.51	Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2018	189
Tabel 5.5.52	Rincian Aset Lainnya	190
Tabel 5.5.53	Rincian Aset Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2018	190
Tabel 5.5.54	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	191
Tabel 5.5.55	Aset Tidak/Belum Digunakan Untuk Tugas dan Fungsi SKPD.....	191
Tabel 5.5.56	Rincian Aset Tidak Berwujud	192
Tabel 5.5.57	Rincian Amortisasi Aset tidak Berwujud	192
Tabel 5.5.58	Rincian Aset Lain-lain.....	193
Tabel 5.5.59	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	194
Tabel 5.5.60	Rincian Utang Fihak Ketiga (FPK) perjenis	194
Tabel 5.5.61	Rincian Utang Fihak Ketiga (FPK) per SKPD	195
Tabel 5.5.62	Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat	196
Tabel 5.5.63	Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per SKPD per 31 Desember 2018	196
Tabel 5.5.64	Rincian Utang Beban per Jenis per 31 Desember 2018	197
Tabel 5.6.1	Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2018 dan 2017	198
Tabel 5.6.2	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 dan 2017	198

Tabel 5.6.3	Komparasi Pendapatan LRA dengan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi LAK.....	199
Tabel 5.6.4	Rincian Penjelasan selisih Pendapatan LRA dan LAK.....	199
Tabel 5.6.5	Komparasi belanja LRA Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi LAK	200
Tabel 5.6.6	Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2018 dan 2017	201
Tabel 5.6.7	Komparasi belanja LRA Arus Kas keluar dari aktifitas investasi LAK	202
Tabel 5.6.8	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2018 dan 2017	202
Tabel 5.6.9	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2018 dan 2017	203
Tabel 5.6.10	Rincian PFK per SKPD 31 Desember 2018 dan 2017	203
Tabel 5.6.11	Rincian Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2018 dan 2017 ...	204
Tabel 5.6.12	Rincian Perbandingan Saldo Akhir Kas dengan silpa 31 Desember 2018 dan 2017	205

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 5.1.1	Realisasi Pendapatan Tahun 2018..... 83
Gambar 5.1.2	Komposisi Realisasi PAD Tahun 2018..... 84
Gambar 5.1.3	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2018..... 101
Gambar 5.1.4	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2018..... 101
Gambar 5.1.5	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 105
Gambar 5.3.1	Komposisi Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2018..... 115
Gambar 5.3.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah –LO dan LRA Tahun 2018 117
Gambar 5.5	Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2018..... 162
Gambar 5.6	Perbandingan Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2018 179
Gambar 5.7	Perbandingan Arus Masuk Kas LRA dan LAK per 31 Desember 2018 200
Gambar 5.8	Perbandingan Belanja Operasional dan Arus Kas Keluar Kas per 31 Desember 2018 201
Gambar 6.1	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin..... 207

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018
Lampiran 2	Rincian Belanja Hibah Uang PPKD Tahun 2018
Lampiran 3	Rincian Belanja Hibah Barang Dan Jasa Diserahkan Tahun 2018
Lampiran 4	Daftar Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tahun 2018
Lampiran 5	Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Lampiran 6	Dafta Piutang TP/TGR Tahun 2018
Lampiran 7	Daftar TP/TGR (Kasus Kerugian Daerah Yang Sedang Dalam Proses Penetapan Pembebanan) Tahun 2018
Lampiran 8	Daftar Rekapitulasi Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Kelebihan Belanja Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2018
Lampiran 9	Daftar Saldo Persediaan SKPD Tahun 2018
Lampiran 10	Rekapitulasi Persediaan Tahun 2018
Lampiran 11	Rekapitulasi Mutasi Persediaan SKPD Tahun 2018
Lampiran 12	Daftar Mutasi Aset Tanah SKPD Tahun 2018
Lampiran 13	Daftar Mutasi Aset Peralatan dan Mesin SKPD Tahun 2018
Lampiran 14	Daftar Mutasi Aset Gedung Bangunan SKPD Tahun 2018
Lampiran 15	Daftar Mutasi Aset Jalan, Jaringan Irigasi SKPD Tahun 2018
Lampiran 16	Daftar Mutasi Aset Aset Tetap Lainnya SKPD Tahun 2018
Lampiran 17	Daftar Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Tahun 2018
Lampiran 18	Daftar Mutasi Aset Lainnya SKPD Tahun 2018
Lampiran 19	Rekapitulasi Mutasi DED Tahun 2018
Lampiran 20	Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka Tahun 2018
Lampiran 21	Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya SKPD Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	72.521.285.353,00	82.349.366.395,92	113,55	72.514.691.201,38
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	6.555.099.000,00	7.751.152.778,00	118,25	8.069.798.706,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.432.071.561,12	4.432.071.561,12	100,00	4.116.082.327,28
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	37.763.187.345,00	46.069.481.754,71	122,00	41.283.796.653,26
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)		121.271.643.259,12	140.602.072.489,75	115,94	125.984.368.887,92
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	75.218.243.935,00	71.489.631.880,00	95,04	98.676.283.859,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	75.172.690.700,00	125.121.699.707,00	166,45	123.579.735.564,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	933.631.693.000,00	933.631.693.000,00	100,00	923.771.804.000,00
13	Dana Alokasi Khusus FISIK	5.1.1.2.1.4	146.378.482.000,00	129.859.099.396,00	88,71	118.727.497.293,00
14	Dana Alokasi Khusus Non FISIK		193.296.261.000,00	189.389.632.262,00	97,98	173.432.567.703,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 14)		1.423.697.370.635,00	1.449.491.756.245,00	101,81	1.438.187.888.419,00
16	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
17	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	
18	Dana Penyesuaian		389.769.965.956,00	388.096.246.999,00	99,57	336.478.881.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17+18)		389.769.965.956,00	388.096.246.999,00	99,57	336.478.881.000,00
20	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	70.274.740.723,91	67.958.097.759,00	96,70	95.300.886.270,45
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		23.216.512.000,00	24.976.852.781,30		
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (21+22)		93.491.252.723,91	92.934.950.540,30	99,40	95.300.886.270,45
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.4				
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.2.4.1	12.288.505.600,00	9.496.768.140,00	77,28	10.470.227.867,21
26	Jumlah Bantuan Keuangan (25)		12.288.505.600,00	9.496.768.140,00	77,28	10.470.227.867,21
27	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15+19+23+26)		1.919.247.094.914,91	1.940.019.721.924,30	101,08	1.880.437.883.556,66
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	784.863.000,00	27.215.581,00	3,47	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
32	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (29 s.d. 31)		784.863.000,00	27.215.581,00	3,47	0,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7+27+32)		2.041.303.601.174,03	2.080.649.009.995,05	101,93	2.006.422.252.444,58
34						
35	BELANJA	5.1.2				
36	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
37	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	724.372.676.666,70	709.570.714.755,00	97,96	713.707.862.584,96
38	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	564.569.378.546,64	534.549.235.600,73	94,68	561.175.826.779,01
39	Belanja Subsidi	---	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00
40	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	130.651.179.911,54	116.762.688.588,88	89,37	50.054.508.546,24
41	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	84.600.000,00	82.705.000,00	97,76	269.325.000,00
42	JUMLAH BELANJA OPERASI (37 s.d 41)		1.419.677.835.124,88	1.380.965.343.944,61	95,86	1.325.254.772.910,21
43	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
44	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	2.148.143.278,62
45	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	83.967.350.864,64	79.475.359.783,98	94,65	71.423.307.080,04
46	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	42.275.758.466,09	40.216.071.857,47	95,13	64.013.266.719,94
47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	157.090.562.720,81	144.726.464.609,49	92,13	162.445.667.970,09
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.155.936.998,00	2.011.283.358,00	93,29	3.074.301.183,00
49	JUMLAH BELANJA MODAL (44 s.d 48)		285.489.609.049,54	266.429.179.608,94	93,32	303.104.686.231,69

50	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
51	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	42.087.864.494,00	2.321.687.000,00	5,52	0,00
52	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (51)		42.087.864.494,00	2.321.687.000,00	5,52	0,00
53	JUMLAH BELANJA (42+49+52)		1.747.255.308.668,42	1.629.716.210.553,55	93,27	1.628.359.459.141,90
54						
55	TRANSFER	5.1.3				
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.1	361.823.207.000,00	361.056.921.213,00	99,79	336.118.279.720,00
57	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2	1.268.000.000,00	1.267.637.809,00	99,97	1.267.637.809,00
58	JUMLAH TRANSFER (56 s.d 57)		363.091.207.000,00	362.324.559.022,00	99,79	337.385.917.529,00
59						
60	SURPLUS / (DEFISIT) (33-53-56)		(69.042.914.494,39)	88.608.240.419,50	(128,34)	40.676.875.773,88
61						
62	PEMBIAYAAN	5.1.4				
63	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1				
64	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.1.1	74.042.914.494,39	73.079.556.830,68	98,70	38.366.038.720,71
65	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (64 s.d 65)		74.042.914.494,39	73.079.556.830,68	98,70	38.366.038.720,71
67	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2				
68	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
69	Pembayaran Pokok Utang	5.1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (68 s.d 69)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
71	PEMBIAYAAN NETTO (66-70)		69.042.914.494,39	68.079.556.830,68	98,60	33.366.038.720,71
72						
73	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (60+71)		(0,00)	156.687.797.250,18	0,00	74.042.914.494,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok

Pangkalan Balai, Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, SH., MH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2018	2017
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	74.042.914.494,39	81.912.340.338,80
2	Koreksi Kesalahan SAL Awal	5.2.2	(963.357.663,71)	(43.546.301.618,09)
	- Koreksi Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pusat		-	(48.023.409.357,00)
	- Koreksi atas Penerimaan Bunga Deposito Tahun Lalu		-	3.698.586.673,00
	- Koreksi atas Saldo Awal Bos Tahun Lalu		-	778.521.065,91
	- Koreksi atas Pengakuan Pendapatan LRA atas dana PSG Tahun 2017		71.644.209,09	
	- Koreksi atas Pengakuan Jasa Giro JKN Tahun 2016		3.660.311,00	
	- Koreksi atas pengakuan pelunasan hutang provinsi atas dana Jamsoskes yang dipotong langsung dari DBH Provinsi		(1.051.172.025,80)	
	- Koreksi atas kurang catat pendapatan PBB Tahun 2016		908.842,00	
	- Koreksi audit atas sisa pengembalian dana BOS Tahun 2016 dan 2017 yang disetor ke Kas Daerah		11.601.000,00	
3	Saldo Setelah Koreksi (1+2)	5.2.3	73.079.556.830,68	38.366.038.720,71
4	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	5.2.4	73.079.556.830,68	38.366.038.720,71
5	Sub Total (3-4)		-	-
6	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.5	156.687.797.250,18	74.042.914.494,39
7	Sub Total (5+6)		156.687.797.250,18	74.042.914.494,39
8	Lain-Lain	5.2.6	-	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (7+8)		156.687.797.250,18	74.042.914.494,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, SH., MH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

KEGIATAN OPERASIONAL	Ref	31 DESEMBER 2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
PENDAPATAN - LO	4.1	1.856.056.073.931,33	1.760.686.375.696,92	95.369.698.234,41	5,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	4.1.1	153.710.759.740,35	136.225.799.397,10	17.484.960.343,25	12,84
Pendapatan Pajak Daerah - LO	4.1.1.1	96.914.732.064,73	83.419.396.116,03	13.495.335.948,70	16,18
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.1.1.2	7.751.152.778,00	8.055.432.737,00	(304.279.959,00)	(3,78)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dioisahkan - LO	4.1.1.3	5.411.498.182,71	4.432.071.561,12	979.426.621,59	22,10
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	4.1.1.4	43.633.376.714,91	40.318.898.982,95	3.314.477.731,96	8,22
PENDAPATAN TRANSFER - LO	4.1.2	1.681.635.703.049,97	1.582.040.461.666,13	99.595.241.383,84	6,30
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.442.127.668.435,00	1.382.895.659.479,00	59.232.008.956,00	4,28
Dana Bagi Hasil Pajak		71.489.631.880,00	78.551.145.365,00	(7.061.513.485,00)	(8,99)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		117.757.611.897,00	88.412.645.118,00	29.344.966.779,00	33,19
Dana Alokasi Umum		933.631.693.000,00	923.771.804.000,00	9.859.889.000,00	1,07
Dana Alokasi Khusus		319.248.731.658,00	292.160.064.996,00	27.088.666.662,00	9,27
Transfer Pemerintah Pusat lainnya		134.676.040.000,00	106.472.960.000,00	28.203.080.000,00	26,49
Dana Penyesuaian - LO	4.1.2.2	134.676.040.000,00	106.472.960.000,00	28.203.080.000,00	26,49
Transfer Pemerintah Provinsi lainnya		104.831.994.614,97	92.671.842.187,13	12.160.152.427,84	13,12
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	4.1.2.3	90.639.278.609,41	81.763.603.087,13	8.875.675.522,28	10,86
Bantuan Keuangan Provinsi - LO	4.1.2.4	14.192.716.005,56	10.908.239.100,00	3.284.476.905,56	30,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	4.1.3	20.709.611.141,01	42.420.114.633,69	(21.710.503.492,68)	(51,18)
Pendapatan Hibah - LO	4.1.3.1	20.709.611.141,01	42.420.114.633,69	(21.710.503.492,68)	(51,18)
Dana Darurat - LO		-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LO		-	-	-	-
BEBAN	4.2	1.725.645.815.569,78	1.655.314.284.598,74	70.331.530.971,04	4,25
Beban Pegawai	4.2.1	708.602.678.677,00	696.786.811.648,96	11.815.867.028,04	1,70
Beban Persediaan	4.2.2	135.393.261.844,28	109.260.312.676,59	26.132.949.167,69	23,92
Beban Jasa	4.2.3	204.620.524.490,50	224.668.154.101,13	(20.047.629.610,63)	(8,92)
Beban Pemeliharaan	4.2.4	39.438.758.718,80	46.238.559.702,22	(6.799.800.983,42)	(14,71)
Beban Perjalanan Dinas	4.2.5	138.515.599.869,00	149.298.193.783,00	(10.782.593.914,00)	(7,22)
Beban Subsidi	4.2.6	-	47.250.000,00	(47.250.000,00)	(100,00)
Beban Hibah	4.2.7	131.691.443.056,34	42.497.001.102,78	89.194.441.953,56	209,88
Beban Bantuan Sosial	4.2.8	11.726.362,00	269.325.000,00	(257.598.638,00)	(95,65)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.2.9	224.860.360.886,69	240.132.945.793,34	(15.272.584.906,65)	(6,36)
Beban Penyisihan Piutang	4.2.10	7.440.595.193,32	6.736.224.708,77	704.370.484,55	10,46
Beban Lain-lain	4.2.11	25.400.228.662,85	31.999.509.551,95	(6.599.280.889,10)	(20,62)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.2.12	108.403.000.000,00	106.112.358.721,00	2.290.641.279,00	2,16
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.2.13	1.267.637.809,00	1.267.637.809,00	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		130.410.258.361,55	105.372.091.098,18	25.038.167.263,37	23,76
KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.3				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	4.3.1	-	536.441.228,76	(536.441.228,76)	(100,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	4.3.2	(251.220.170,19)	(44.213.983,00)	(207.006.187,19)	468,19
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(251.220.170,19)	492.227.245,76	(743.447.415,95)	(151,04)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		130.159.038.191,36	105.864.318.343,94	24.294.719.847,42	22,95

KEGIATAN OPERASIONAL	Ref	31 DESEMBER 2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
POS LUAR BIASA	4.4				
Pendapatan Luar Biasa - LO	4.4.1	-	-	-	
Beban Luar Biasa	4.4.2	2.321.687.000,00	-	2.321.687.000,00	
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(2.321.687.000,00)	-	(2.321.687.000,00)	
SURPLUS/DEFISIT-LO		127.837.351.191,36	105.864.318.343,94	21.973.032.847,42	20,76

Pangkalan Balai, Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI, SH., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2018	2017
Saldo Awal	5.4.1	3.802.689.972.329,28	3.711.791.633.437,85
Surplus Defisit	5.4.2	127.837.351.191,36	105.864.318.343,94
Dampak perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar	5.4.3		
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	5.4.3.1	18.437.595.803,00	28.400.937.795,00
Penilaian Aset Tetap	5.4.3.2	7.480.064.700,00	73.005.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	5.4.3.3	(2.331.088.734,12)	(12.007.403.935,93)
Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya		-	(2.853.314.400,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Lalu		-	(1.937.000,00)
Koreksi Hutang Lain-lain	5.4.3.4	11.601.000,00	-
Koreksi Pendapatan Dimuka Tahun Lalu		-	3.960.126.382,99
Koreksi Pendapatan tahun lalu	5.4.3.5	535.226.182,00	-
Koreksi Piutang tahun lalu	5.4.3.6	(394.571.140,00)	-
Koreksi Saldo Awal Hutang Beban	5.4.3.7	(6.841.900,00)	1.626.695.339,27
Koreksi Saldo Awal Hutang Aset		-	(3.000,00)
Koreksi Saldo Awal Piutang Lain-Lain		-	(150.644.401,00)
Koreksi lebih salur	5.4.3.8	(5.401.163.529,00)	(24.908.721.601,00)
Koreksi kurang salur	5.4.3.9	49.054.942.122,67	-
Koreksi Penyisihan Piutang	5.4.3.10	(55.460,00)	-
Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang (Penyertaan Modal)	5.4.3.11	20.522.254.435,90	(9.104.719.631,84)
Ekuitas Akhir	5.4.4	4.018.435.287.001,09	3.802.689.972.329,28

Pangkalan Balai, Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, S.H., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2018	2017
1	ASET	5.5.1		
2	ASET LANCAR	5.5.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	54.592.195.303,00	12.408.006.566,02
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	69.683.615,00	319.619.739,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	5.778.300,00	-
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.1.1.4	3.290.222.527,70	4.064.684.499,46
7	Kas di Bendahara FKTP	5.5.1.1.5	1.885.524.019,40	663.413.941,00
8	Deposito on Call	5.5.1.1.6	96.479.688.413,08	55.571.735.659,00
9	Kas Lainnya	5.5.1.1.7	927.883.061,00	873.603.165,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.5.1.2.1	83.313.150.036,07	68.720.767.807,26
11	Piutang Retribusi Daerah	5.5.1.2.2	12.293.734,00	12.293.734,00
12	Piutang Transfer	5.5.1.2.3	93.773.576.077,05	64.948.397.080,70
13	Bagian Lancar Penjualan Anggsuran	5.5.1.2.4	-	247.196.385,00
14	Piutang Lain-lain	5.5.1.2.5	13.816.284.839,57	13.439.390.862,64
15	Penyisihan Piutang	5.5.1.2.6	(47.363.931.137,55)	(39.923.280.484,23)
16	Beban dibayar dimuka	5.5.1.2.7	791.053.569,15	813.674.343,55
17	Persediaan	5.5.1.2.8	16.988.875.136,06	14.661.387.975,63
18	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 17)		318.582.277.493,53	196.820.891.274,03
19				
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.2		
21	Investasi Permanen	5.5.1.2		
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2.1	102.345.966.205,36	77.074.931.939,65
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang (22)		102.345.966.205,36	77.074.931.939,65
24				
25	ASET TETAP	5.5.1.3		
26	Tanah	5.5.1.3.1	366.535.741.520,96	359.129.458.167,96
27	Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	621.493.577.995,69	570.480.781.507,89
28	Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	1.124.310.604.064,64	1.071.651.247.696,27
29	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.1.3.4	2.698.925.591.508,54	2.540.324.081.259,97
30	Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	101.211.338.447,49	100.837.446.747,49
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	141.777.100.150,58	146.369.827.037,58
32	Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	(1.738.924.893.237,00)	(1.518.958.132.201,93)
33	Jumlah Aset Tetap (26 s.d 32)		3.315.329.060.450,90	3.269.834.710.215,23
34				
35	ASET LAINNYA	5.5.1.4		
36	Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.4.1	-	-
37	Aset Kondisi Rusak Berat	5.5.1.4.2	17.049.769.903,98	13.676.902.603,98
38	Penyusutan	5.5.1.4.3	(11.174.391.702,63)	(6.833.722.862,63)
39	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	5.5.1.4.4	293.899.215.605,78	293.311.879.455,78
40	Aset Tidak Berwujud	5.5.1.4.5	11.623.913.798,00	8.987.912.904,00
41	Amortisasi	5.5.1.4.6	(8.856.195.138,23)	(6.999.975.392,49)
42	Aset Lain - lain	5.5.1.4.7	10.449.134.003,03	7.563.619.963,58
43	Jumlah Aset Lainnya (36 s.d 42)		312.991.446.469,93	309.706.616.672,22
44	JUMLAH ASET (18+22+33+43)		4.049.248.750.619,72	3.853.437.150.101,13

No	Uraian	Ref	2018	2017
45				
46	KEWAJIBAN	5.5.2		
47	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.1		
48	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.1	561.425.655,00	660.032.064,00
49	Utang Kepada Pemerintah Pusat	5.5.2.1.3	15.534.417.493,00	25.399.205.215,00
50	Utang Pengadaan Aset tetap	5.5.2.1.4	3.997.655.577,01	8.857.929.727,86
51	Utang Beban	5.5.2.1.5	7.182.756.791,62	15.811.578.695,99
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.7	3.537.208.102,00	18.432.069,00
53	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (48 s.d 52)		30.813.463.618,63	50.747.177.771,85
54				
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
56	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
57	JUMLAH KEWAJIBAN (53+56)		30.813.463.618,63	50.747.177.771,85
58				
59	EKUITAS			
60	Ekuitas	5.5.3	4.018.435.287.001,09	3.802.689.972.329,28
61	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (57+60)		4.049.248.750.619,72	3.853.437.150.101,13

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, SH., MH



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Ref	2018	2017
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	82.349.366.395,92	72.514.998.381,38
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	7.751.152.778,00	8.069.798.706,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	4.432.071.561,12	4.116.082.327,28
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.6.1.1.4	45.796.413.880,71	41.282.147.473,26
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.5	71.489.631.880,00	98.676.283.859,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.6	125.121.699.707,00	123.579.735.564,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.7	933.631.693.000,00	923.771.804.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.8	319.248.731.658,00	118.727.497.293,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.6.1.1.9	-	173.432.567.703,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.10	388.096.246.999,00	336.478.881.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.1.1.11	91.883.778.514,50	95.300.886.270,45
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.1.1.12	9.496.768.140,00	10.470.227.867,21
15	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.13	27.215.581,00	-
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)		2.079.324.770.095,25	2.006.420.910.444,58
17	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	709.570.714.755,00	713.707.862.584,96
19	Pembayaran Barang	5.6.1.2.2	534.549.235.600,73	561.175.826.779,01
20	Pembayaran Hibah	5.6.1.2.4	116.762.688.588,88	50.054.508.546,24
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.5	82.705.000,00	269.325.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.6	362.324.559.022,00	337.385.917.529,00
23	Pembayaran Bantuan Subsidi	5.6.1.2.7	-	47.250.000,00
24	Pembayaran Belanja tak terduga	5.6.1.2.7	2.321.687.000,00	-
25	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d 24)		1.725.611.589.966,61	1.662.640.690.439,21
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-25)		353.713.180.128,64	343.780.220.005,37
27				
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
29	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
30	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.1	-	1.342.000,00
31	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.6.2.1.2	273.067.874,00	-
32	Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Lainnya	5.6.2.1.3	-	-
33	Jumlah Arus Masuk Kas (30 s.d 32)		273.067.874,00	1.342.000,00
34	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
35	Perolehan Tanah	5.6.2.2.1	-	2.148.143.278,62
36	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.2	79.475.359.783,98	71.423.307.080,04
37	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.3	40.216.071.857,47	64.013.266.719,94
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.3	144.726.464.609,49	162.445.667.970,09
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.4	2.011.283.358,00	3.074.301.183,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.2.5	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas (35 s.d 40)		271.429.179.608,94	308.104.686.231,69
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33-41)		(271.156.111.734,94)	(308.103.344.231,69)
43				
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
45	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
46	Penerimaan Piutang Daerah	5.6.3.1.1	-	-
47	Jumlah Arus Masuk Kas (46)		-	-
48	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
49	Pembayaran Pokok Utang	5.6.3.2.1	-	-
50	Jumlah Arus Keluar Kas (49)		-	-
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (47-50)		-	-
52				
53	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
54	Arus Masuk Kas	5.6.4.1		
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.6.4.1.1	105.454.549.597,00	101.795.328.693,00
56	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD	5.6.4.1.2	8.273.784.266,73	-
57	Koreksi SILPA Bunga Depoito tahun lalu	5.6.4.1.3	-	3.698.586.673,00
58	Kesalahan transfer rekening Kas Daerah	5.6.4.1.4	-	734.885,00
58	Kesalahan Pengembalian BOS Ke Provinsi	5.6.4.1.5	-	1.987.000,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s.d 59)		113.728.333.863,73	105.496.637.251,00

No	Uraian	Ref	2018	2017
1	2	3	4	5
60	Arus Keluar Kas	5.6.4.2		
61	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.6.4.2.1	105.217.609.597,00	101.793.976.207,00
62	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD	5.6.4.2.2	7.713.711.097,73	7.539.350,00
63	Kelebihan transfer pajak	5.6.4.2.3	-	236.940.000,00
64	Kas PSG dan BOS SMA yang diserahkan provinsi	5.6.4.2.4	-	476.296.545,00
65	Kas Awal PSG SD dan SMP yang belum Masuk LRA	5.6.4.2.5	-	119.705.276,91
66	Koreksi SILPA tahun lalu	5.6.4.2.6	-	51.721.996.030,00
67	Pengeluaran Rekening Penampungan PBB	5.6.4.2.7	4.169.893,00	-
68	Jumlah Arus Keluar Kas (61 s.d 67)		112.935.490.587,73	154.356.453.408,91
69	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (59-68)		792.843.276,00	(48.859.816.157,91)
70				
71	Kenaikan/Penurunan Kas (26+42+51+69)		83.349.911.669,70	(13.182.940.384,23)
72	Saldo Awal Kas		73.901.063.569,48	87.012.359.744,71
73	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas Dibendahara Pengeluaran		157.250.975.239,18	73.829.419.360,48
74	Kas Sekolah yang tidak masuk LRA 2017 (PSG)		-	71.644.209,00
75	Saldo Akhir KAS		157.250.975.239,18	73.901.063.569,48
76	Kas Di Kas Daerah	5.6.5	54.592.195.303,00	12.408.006.566,02
77	Kas Dibendahara Penerimaan	5.6.6	5.778.300,00	
78	Kas Dibendahara Pengeluaran	5.6.7	69.683.615,00	319.619.739,00
79	Kas di Bendahara FKTP	5.6.8	1.885.524.019,40	663.413.941,00
80	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.6.9	3.290.222.527,70	4.064.684.499,46
81	Kas di Sekolah - BOS	5.6.10	927.883.061,00	801.958.956,00
82	Kas di Sekolah - PSG	5.6.11	-	71.644.209,00
83	Saldo Deposito	5.6.12	96.479.688.413,08	55.571.735.659,00
84	Saldo Akhir Kas		157.250.975.239,18	73.901.063.569,48

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Pangkalan Balai, Mei 2019
 BUPATI BANYUASIN,

 H. ASKOLANI, SH., MH

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan;
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan LO;
10. Beban; dan
11. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 406 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 136 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
29. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 144 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Kebijakan Keuangan/Fiskal dan Ekonomi Makro

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Ekonomi Makro

III. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Anggaran
- 3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 3.3 Dana Diluar APBD

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Koreksi Kesalahan Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.3 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.5 Lain-lain
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1 Pendapatan-LO
 - 5.3.2 Beban Daerah
 - 5.3.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.3.4 Pos Luar Biasa
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.5.1 Aset
 - 5.5.2 Kewajiban
 - 5.5.3 Ekuitas

5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)

5.6.1 Arus Kas Dari Operasi

5.6.2 Arus Kas dari Invenstasi Aset Non Keuangan

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

6.1 Struktur Organisasi

VII. Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL DAN EKONOMI MAKRO

2.1 Kebijakan Keuangan

2.1.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan faktor sangat penting berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum bagi masyarakat, melaksanakan pembangunan disamping menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri di daerah.

berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2018, kebijakan pendapatan dilakukan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 dan evaluasi kinerja bidang Pendapatan sampai dengan bulan Juli 2018.

berdasarkan hal tersebut, kebijakan pendapatan APBD Kabupaten Banyuasin diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
 - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun Anggaran 2018.
2. Penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Migas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Penyesuaian Alokasi Dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
 - c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
 - d. Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan suatu kebijakan perencanaan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat dan tidak memberatkan dunia usaha terutama masyarakat kurang mampu. Kaitannya dengan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, onjek penerimaan serta rincian objek penerimaan. Disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, income perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan fiskal terutama dengan pengurangan Dana Bagi Hasil Migas yang dikucurkan pemerintah Pusat dan selama ini menjadi andalan penerimaan daerah termasuk Kabupaten Banyuasin.

Pada Tahun Anggaran 2018, tiga kebijakan penting sebagaimana yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya akan terus dilaksanakan dimasa depan yaitu:

1. Menumbuh-kembangkan pemikiran kewirausahaan pada masing-masing OPD untuk tidak hanya berorientasi kepada belanja, tetapi sebaliknya juga berorientasi kepada sikap/perilaku menghasilkan, termasuk pelayanan prima yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah.
2. Menggalang potensi-potensi daerah yang dapat memperbesar skala ekonomi masyarakat Banyuasin sehingga dapat bertambah objek-objek pajak dan atau retribusi baru.
3. Melaksanakan secara kontinyu upaya intensifikasi pendapatan daerah, tanpa menyebabkan pemberatan ekonomi dalam masyarakat di daerah.

2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Banyuasin mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai dua bidang fokus utama pembangunan daerah yakni pada bidang infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. belanja daerah pada tahun 2018 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konskuensi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penganggulangan kemiskinan.
2. Belanja daerah berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Penyesuaian alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus mempunyai tolak ukur yang jelas serta *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART)* yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang – undangan;
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
6. Kebijakan Belanja Pegawai mempedomani :
- a. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
 - c. Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
7. Kebijakan Belanja Hibah didasarkan :
- a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
 - b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Hibah diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tetapi dibutuhkan oleh kelompok masyarakat/perorangan.
8. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial
- Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
9. Kebijakan Belanja bantuan Keuangan penggunaannya didasarkan:
- a. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah

desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa penerima bantuan.

- b. Bantuan keuangan bersifat umum diperuntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Penerima Bantuan.
- c. Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyuasin urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD Kabupaten, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

11. Belanja dalam Rangka Memenuhi Kewajiban pada Pihak Ketiga

Belanja pada kategori ini diperuntukan untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga berupa Hutang terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi tidak tersedia dana untuk pembayarannya termasuk jaminan pekerjaan. Ketidakmampuan membayar tersebut dikarenakan perubahan kebijakan ditingkat Pusat maupun Provinsi, sehingga pendapatan yang telah direncanakan untuk membiaya kegiatan tersebut tidak terpenuhi sebagai akibat penundaan dana transfer maupun pengurangan dana transfer ke daerah.

2.2 Ekonomi Makro

Visi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2022 yaitu **“Banyuasin Sebagai Kawasan Mandiri dan Berdaya Saing”**. Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan dimasa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Banyuasin untuk periode 2018-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Banyuasin dibentuk karena dengan pertimbangan pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya Kabupaten Musi Banyuasin serta diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Banyuasin dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 yang diresmikan tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ibu kota Pangkalan Balai.

Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km², terletak di 1,3°-4° Lintang Selatan dan 104 ° 40' - 105 ° 15' Bujur Timur dan terbagi menjadi 21 Kecamatan, 17 Kelurahan serta 288 Desa. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,40Km² sekitar 30,70% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km² atau sekitar 1,48% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi berupa lahan kering. Secara administratif Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Lais dan Kecamatan Talang Kabupaten Musi Banyuasin.

2.2.1. Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama perekonomian disuatu wilayah. PDRB atas dasar harga belaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Dengan mengacu pada data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Banyuasin (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp24,563 triliun, sedangkan tanpa migas sebesar Rp21,816 triliun.

Struktur ekonomi Kabupaten Banyuasin masih didominasi oleh sektor primer (pertanian), sebesar 34,38% PDRB Banyuasin disumbang oleh sektor ini. Sumbangan sektor lainnya yaitu industri pengolahan, bangunan dan perdagangan sebesar 25,02%, 12,67% dan 12,20%.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan riil sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi mencapai 5,08% dengan migas dan bila tanpa migas sebesar 5,74%. pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mengalami perlambatan dibanding dengan tahun 2016 yang mencapai 5,88%, sedangkan bila dibanding dengan tanpa migas juga terjadi perlambatan yaitu sebesar 6,79%. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah mengalami laju pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 10,53%. disusul kemudian oleh sektor Bangunan sebesar 9,96% dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,52%.

2.2.3. Laju Inflasi PDRB

Selain untuk mengukur kinerja perekonomian, PDRB juga dapat digunakan untuk mengestimasi laju inflasi. Inflasi merupakan suatu indeks yang menggambarkan perubahan harga. Laju inflasi PDRB Banyuwangi tahun 2017 sebesar 2,38% dalam struktur migas dan 2,43 persen dalam struktur tanpa migas.

2.2.4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata. Angka ini terbentuk dari jumlah pendapatan yang timbul (income originated) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi dalam struktur ekonomi atas dasar harga berlaku dengan migas tahun 2017 tercatat Rp29.467.435,- sedangkan tanpa migas sebesar Rp26.170.850,-. Untuk pendapatan perkapita berdasarkan atas dasar harga konstan sebesar Rp21.668.640,- dan tanpa migas sebesar Rp18.739.173,-.

Tabel berikut menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi menurut sektor (%) Tahun 2017:

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi
Menurut Sektor (%) 2017

No	Lapangan Usaha	2017 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,13
2	Pertambangan dan Penggalian	1,78
3	Industri Pengolahan	7,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	10,53
6	Bangunan	9,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	9,52
8	Transportasi dan Pergudangan	7,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,66
10	Informasi dan Komunikasi	9,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,95
12	Real Estate	7,73
13	Jasa Perusahaan	5,31
14	Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan	4,52
15	Jasa Pendidikan	7,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,51
17	Jasa Lainnya	2,33
	PDRB dengan Migas	5,08
	PDRB tanpa Migas	5,74

Sedangkan pendapatan perkapita Kabupaten Banyuasin tahun 2017 tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Pendapatan Perkapita Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017

(dalam rupiah)

Keterangan		2017
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB dengan Migas	29.467.435,00
	PDRB tanpa Migas	26.170.850,00
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	PDRB dengan Migas	21.668.640,00
	PDRB tanpa Migas	18.739.173,00

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Anggaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Bagian Ketiga Pasal 160. (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

Terdapat tiga kali pergeseran anggaran dan satu kali perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018, rincian pergeseran dan perubahan APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 10, Nomor Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/BA/2017.
2. Peraturan Bupati Banyuasin No. 140 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 140.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 63 Tahun Anggaran 2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin No. 140 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 63
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 5. Nomor Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4-116/2018.
5. Peraturan Bupati Banyuasin No. 122 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018. Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 No. 122.

Berikut rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018:

Tabel 3.1.1
Rincian Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	2.041.303.601.174,03	2.080.649.009.995,05	101,93
Belanja	1.747.255.308.668,42	1.629.716.210.553,55	93,27
Transfer	363.091.207.000,00	362.324.559.022,00	99,79
Surplus (Defisit)	(69.042.914.494,39)	88.608.240.419,50	(128,34)
Pembiayaan Netto	69.042.914.494,39	68.079.556.830,68	98,60
SILPA	(0,00)	156.687.797.250,18	

3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

3.2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2018 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 atau 101,93% dari anggaran sebesar Rp2.041.303.601.174,03 dalam rangka membiayai operasional SKPD mencapai sebesar Rp2.080.649.009.995,05, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.271.643.259,12	140.602.072.489,75	19.330.429.230,63	115,94
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.919.247.094.914,91	1.940.019.721.924,30	20.772.627.009,39	101,08
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAI	784.863.000,00	27.215.581,00	(757.647.419,00)	0,00
	Jumlah	2.041.303.601.174,03	2.080.649.009.995,05	39.345.408.821,02	101,93

Dari tabel tersebut diatas, realisasi pendapatan tahun 2018 lebih tinggi dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp39.345.408.821,02 atau sebesar 1,93%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar Rp74.226.757.550,47.

Tabel berikut menggambarkan anggaran dan realisasi pendapatan seluruh SKPD Tahun Anggaran 2018:

Tabel 3.1.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2018

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	25.965.707.893,00	23.690.094.967,00	91,24
2	RSUD	6.050.000.000,00	5.794.996.389,00	95,79
3	SAT POL PP, Damkar Dan Penyelamatan	25.000.000,00	40.953.820,00	163,82
4	Dinas Lingkungan Hidup	750.000.000,00	1.078.053.100,00	143,74
5	Dinas Perhubungan	684.301.000,00	1.069.973.096,00	156,36
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	771.648.362,00	154,33
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.922.298.000,00	1.961.950.000,00	102,06
8	Dinas Perikanan	430.000.000,00	495.143.360,00	115,15
9	Sekretariat Daerah	131.500.000,00	115.690.000,00	87,98
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.500.000.000,00	2.655.863.500,00	106,23
11	Kecamatan Rambutan	-	1.050.000,00	100,00
12	Kecamatan Talang Kelapa	-	3.325.000,00	100,00
13	BPKAD	82.312.836.366,12	99.410.465.090,11	120,77
14	PPKD	1.920.031.957.914,91	1.943.559.803.310,94	101,23
	Jumlah	2.041.303.601.174,03	2.080.649.009.995,05	101,93

Secara rinci penjelasan hambatan yang ditemui dalam mencapai target pendapatan dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

3.2.2 Belanja dan Transfer

Total realisasi Belanja dan Transfer sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.992.040.769.575,55 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp2.110.346.515.668,42. Belanja terealisasi sebesar Rp1.629.716.210.553,55 atau 93,27% sedangkan transfer terealisasi sebesar Rp362.324.559.022,00 atau 99,79%. Berikut rincian realiasi belanja dan transfer:

Tabel 3.1.4
Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	Belanja Operasi	1.419.677.835.124,88	1.360.965.343.944,61	58.712.491.180,27	95,86
2	Belanja Modal	285.489.609.049,54	266.429.179.608,94	19.060.429.440,60	93,32
3	Belanja Tidak Terduga	42.087.864.494,00	2.321.687.000,00	39.766.177.494,00	5,52
		1.747.255.308.668,42	1.629.716.210.553,55	117.539.098.114,87	93,27
4	Transfer	363.091.207.000,00	362.324.559.022,00	766.647.978,00	99,79
	Total	2.110.346.515.668,42	1.992.040.769.575,55	118.305.746.092,87	94,39

Secara terinci penyerapan belanja dan transfer per masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.5
Realisasi Belanja dan Transfer Per SKPD Tahun Anggaran 2018

No.	Kelompok Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	610.931.939.275,10	604.863.898.232,45	6.068.041.042,65	99,01
2	Dinas Kesehatan	228.433.853.179,60	213.869.572.440,11	14.564.280.739,49	93,62
3	Rumah Sakit Umum Daerah	39.492.388.867,46	33.291.420.386,69	6.200.968.480,77	84,30
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	102.116.763.859,23	95.098.281.966,31	7.018.481.892,92	93,13
5	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	125.253.388.096,52	114.474.423.415,87	10.778.964.680,65	91,39
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan	20.434.475.190,90	17.915.445.965,00	2.519.029.225,90	87,67
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	14.721.953.563,13	14.650.913.639,00	71.039.924,13	99,52
8	Dinas Sosial	7.301.127.020,73	7.249.030.389,00	52.096.631,73	99,29
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.011.830.772,78	4.763.102.064,00	248.728.708,78	95,04
10	Dinas Ketahanan Pangan	5.233.297.633,98	5.113.874.227,00	119.423.406,98	97,72
11	Dinas Lingkungan Hidup	13.527.601.944,46	12.380.925.460,00	1.146.676.484,46	91,52
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.200.349.370,43	7.940.533.855,00	259.815.515,43	96,83
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.337.925.550,28	6.281.467.822,00	56.457.728,28	99,11
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan	14.207.278.914,58	13.871.279.688,00	335.999.226,58	97,64
15	Dinas Perhubungan	17.068.750.648,48	16.613.104.609,34	455.646.039,14	97,33
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.693.498.760,80	13.311.118.397,00	382.380.363,80	97,21
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.079.077.263,06	16.006.576.697,28	1.072.500.565,78	93,72
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4.793.608.255,20	4.659.062.160,00	134.546.095,20	97,19
19	Dinas Perikanan	7.798.057.547,80	7.397.918.576,00	400.138.971,80	94,87
20	Dinas Pertanian	33.367.623.580,91	22.642.580.004,00	10.725.043.576,91	67,86
21	DPRD	27.615.711.458,00	26.687.442.265,00	928.269.193,00	96,64
22	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.504.610.160,00	647.773.215,00	856.836.945,00	43,05
23	Sekretariat Daerah	68.621.864.868,15	66.700.341.802,00	1.921.523.066,15	97,20
24	Sekretariat DPRD	100.216.130.262,18	96.970.188.993,00	3.245.941.269,18	96,76
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	6.048.772.156,15	5.760.435.378,00	288.336.778,15	95,23
26	Kecamatan Banyuasin I	3.548.837.859,40	3.496.844.324,00	51.993.535,40	98,53
27	Kecamatan Banyuasin III	5.119.027.057,85	5.059.347.014,00	59.680.043,85	98,83
28	Kecamatan Betung	2.820.198.214,15	2.768.415.476,00	51.782.738,15	98,16
29	Kecamatan rantau Bayur	1.867.397.653,05	1.792.432.786,00	74.964.867,05	95,99
30	Kecamatan Pulau Rimau	2.604.286.912,75	2.568.534.945,00	35.751.967,75	98,63
31	Kecamatan Talang Kelapa	9.389.120.337,25	9.191.201.690,00	197.918.647,25	97,89
32	Kecamatan Rambutan	3.077.852.878,15	2.979.335.932,00	98.516.946,15	96,80
33	Kecamatan Tungkal Ilir	1.590.308.344,65	1.480.496.017,00	109.812.327,65	93,09
34	Kecamatan Tanjung Lago	1.743.844.955,75	1.697.198.110,00	46.646.845,75	97,33
35	Kecamatan Sembawa	1.742.592.888,65	1.706.439.234,50	36.153.654,15	97,93
36	Kecamatan Suak Tapeh	1.378.884.645,05	1.308.084.024,00	70.800.621,05	94,87
37	Kecamatan Banyuasin II	1.603.964.928,00	1.532.330.543,00	71.634.385,00	95,53
38	Kecamatan Makarti Jaya	2.102.138.362,95	2.006.705.368,00	95.432.994,95	95,46
39	Kecamatan Muara Padang	1.734.434.268,20	1.726.095.088,00	8.339.180,20	99,52
40	Kecamatan Muara Sugihan	1.983.297.066,20	1.890.514.562,00	92.782.504,20	95,32
41	Kecamatan Muara Telang	1.715.833.919,20	1.569.765.819,00	146.068.100,20	91,49
42	Kecamatan Air Salek	1.459.722.949,00	1.397.277.511,00	62.445.438,00	95,72
43	Kecamatan Sumber Marga Telang	1.439.224.174,60	1.379.461.340,00	59.762.834,60	95,85
44	Kecamatan Air Kumbang	1.486.523.565,35	1.429.669.900,00	56.853.665,35	96,18
45	Kecamatan Selat Penuangan	160.000.000,00	159.382.000,00	618.000,00	99,61
46	Kecamatan Karang Agung Ilir	160.000.000,00	159.320.000,00	680.000,00	99,58
47	Inspektorat Daerah	11.803.907.809,35	10.877.190.546,00	926.717.263,35	92,15
48	BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan	14.272.407.920,70	13.928.695.834,00	343.712.086,70	97,59
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.997.682.200,13	31.939.283.209,00	3.058.398.991,13	91,26
50	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	492.535.971.664,00	450.062.679.705,00	42.473.291.959,00	91,38
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.997.176.894,13	8.773.356.951,00	223.819.943,13	97,51
	Jumlah	2.110.346.515.668,42	1.992.040.769.575,55	118.305.746.092,87	94,39

Pencairan belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 94,39%, secara rinci penjelasan atas efisiensi dan hambatan yang ditemui dalam mencapai realisasi belanja dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Rincian Belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6
Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Pelayanan Umum	470.874.342.767,77	415.443.700.183,50	55.430.642.584,27
Ketertiban dan Keamanan	35.156.428.754,03	32.566.359.604,00	2.590.069.150,03
Ekonomi	96.216.121.313,31	83.018.551.973,62	13.197.569.339,69
Lingkungan Hidup	15.429.901.594,46	14.062.844.384,00	1.367.057.210,46
Perumahan dan Fasilitas Umum	216.156.871.355,75	198.818.859.257,18	17.338.012.098,57
Kesehatan	281.420.520.961,64	260.335.886.596,80	21.084.634.364,84
Pariwisata dan Budaya	3.543.002.000,00	3.279.771.300,00	263.230.700,00
Pendidikan	612.243.643.530,30	606.304.287.092,45	5.939.356.437,85
Perlindungan Sosial	16.214.476.391,16	15.885.950.162,00	328.526.229,16
	1.747.255.308.668,42	1.629.716.210.553,55	117.539.098.114,87

3.3 Dana Diluar APBD

Selain Dana yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terdapat Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat. berikut rincian dana diluar APBD:

3.3.1 Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp8.146.580.100,00 atau 97,72% dari anggaran sebesar Rp8.336.378.000,00. Rincian belanja Dana Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.7
Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 *(dalam Rupiah)*

Tahun	Sumber Dana	SKPD	Anggaran	Realisasi				
				Non Aset	Gedung/ Bangunan	Jalan/ Jaringan	Jumlah Aset	Total
2018	TUGAS PEMBANTUAN (TP)	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.336.378.000,00	4.392.671.200,00	744.271.000,00	3.009.637.900,00	3.753.908.900,00	8.146.580.100,00
		PKT	5.176.890.000,00	3.149.646.600,00	288.661.000,00	1.582.525.900,00	1.871.186.900,00	5.020.833.500,00
		PKP2TRANS	3.159.488.000,00	1.243.024.600,00	455.610.000,00	1.427.112.000,00	1.882.722.000,00	3.125.746.600,00
		Jumlah	8.336.378.000,00	4.392.671.200,00	744.271.000,00	3.009.637.900,00	3.753.908.900,00	8.146.580.100,00

3.3.2 Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat

Dana Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.167.267.800,00 atau 82,96% dari anggaran sebesar Rp3.818.055.000,00. Rincian Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.8
Realisasi Belanja Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat
Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

TAHUN	SUMBER DANA	SATKER/DINAS	Anggaran	Non Aset	Aset	TOTAL REALISASI
2018	URUSAN BERSAMA	1. Badan PMD BLM KEGIATAN BLM SATKER/ADM	640.055.000,00	624.867.800,00	0 0	624.867.800,00
2018	KANTOR PUSAT	2. DISPERKIMTAN	3.178.000.000,00	2.542.400.000,00	0	2.542.400.000,00
		Jumlah	3.818.055.000,00	3.167.267.800,00	0,00	3.167.267.800,00

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan SKPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam neraca.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin mencakup kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat :

- a. kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Pengeluaran

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Pengakuan kas yang dikeluarkan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat :

- a. kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C (*Letter of Credit*), pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu :
 - 1) Kas diterima di kas umum daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi :

- a. pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang;
- b. pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang;
- c. pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal pemerintah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset;
- d. pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau

- b. pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu;
- 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah kabupaten banyuasin. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran non anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas lainnya dengan akun lawan ekuitas.

Pada tahun berikutnya saat jasa giro di terima di rekening kas daerah dicatat sebagai kas dengan akun lawan kas lainnya dan ekuitas dengan akun lawan pendapatan jasa giro.

Pengukuran dan Penilaian

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. piutang yang timbul dari peristiwa perjanjian/perikatan lainnya, terdiri atas: Pemberian Pinjaman, Penjualan, Kemitraan dan Pemberian fasilitas.
- c. piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Kekurangan Transfer.
- d. piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah dan penjualan secara angsuran atas aset daerah, terdiri atas: Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Piutang yang timbul akibat penjualan angsuran.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomilainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau

2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi.
Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 1. Harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 2. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat tagihan baik berupa ketetapan dan/atau dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
4. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat diakui apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya atau kurang salur, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
5. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
6. Piutang TP/TGR Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran dan Penilaian

1. Pengukuran

- a. pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b. pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang sampai akhir periode pelaporan belum ditransfer.
- d. pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan kualitas piutang pajak dengan ketentuan:

No.	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
3	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

No	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel*.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

2. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan lain-lain.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memilikimanfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk beban dimuka diantaranya:

- a. Asuransi yang belum jatuh tempo.
- b. Sewa yang belum jatuh tempo.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran namun pemerintah daerah belum menerima manfaat atas pembayaran tersebut, yang selanjutnya pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas manfaat yang telah diperoleh. Beban dibayar dimuka harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban serta periode masa manfaat yang jelas.

Pengukuran dan Penilaian

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal pembayaran dikurangi dengan perhitungan nilai manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah. Perhitungan nilai manfaat dilakukan secara bulanan yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. Nilai manfaat yang telah diterima dicatat sebagai beban pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimukadisajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan dapat meliputi:

- a. barang konsumsi;
- b. amunisi;
- c. bahan untuk pemeliharaan;
- d. suku cadang;
- e. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. pita cukai dan leges;
- g. bahan baku ;
- h. barang dalam proses/setengah jadi;
- i. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

1. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengakuan nilai persediaan tersebut sebagai pengurang atas beban persediaan tahun berjalan. Untuk persediaan hewan dan tanaman yang jumlahnya sulit diukur, maka inventarisasi fisik dilakukan dengan perhitungan sampling terhadap persediaan tersebut. Sebagai contoh, untuk mendapatkan nilai persediaan bibit ikan yang akan dijual pada akhir periode pelaporan, dinas perikanan melakukan perhitungan persediaan bibit ikan dengan metode sampling, metode ini diawali dengan pemisahan

ukuran ikan (sortir), selanjutnya hasil klasifikasi dihitung per 500 ekor secara manual, kemudian ditimbang dalam satuan kilogram. Hasil penimbangan 500 ekor pertama merupakan satuan yang digunakan untuk mendapatkan 500 ekor berikutnya. Setelah mendapatkan total berat bibit ikan, dikonversikan kembali menjadi satuan per ekor, untuk mendapatkan nilai satuan per ekor, dikalikan dengan harga wajar. Hasil inventarisasi persediaan bibit ikan tersebut dituangkan dalam berita acara inventarisasi fisik persediaan.

Pengukuran dan Penilaian

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi serta rampasan.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

- 2) ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- 3) investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 1) investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 2) investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- 3) investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 3) saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
- 4) reksa dana.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

1. Perolehan Investasi

Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan biaya lainnya dari pasar modal. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

2. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada Neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di Neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas investasi tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.

Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada Neraca, hal ini diungkapkan dalam CaLK.

3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

1. Pengukuran investasi jangka pendek

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka

investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. investasi jangka panjang nonpermanen:
 - 1) investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
- d. investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter.
- e. harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f. diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- g. diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam Laporan Operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
- h. jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan: (i) dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, (ii) dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

- d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
- c. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan pada Neraca dengan membandingkan nilai investasi tahun sebelumnya. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- g. investasi yang disajikan dengan nilai nihil/negatif;
- h. perubahan klasifikasi pos investasi;
- i. perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau untuk kepentingan umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. tanah;
- b. peralatan dan Mesin;
- c. gedung dan Bangunan;
- d. jalan, Irigasi , dan Jaringan;
- e. aset Tetap Lainnya;
- f. konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pangakuan

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah yang dibuktikan secara hukum.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya serta jalan, irigasi dan jaringan kecuali barang bercorak kebudayaan adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).

Pengukuran dan Penilaian

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya lainnya sampai dengan aset tetap dapat dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun jika biaya perolehan tidak ada.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- g. biaya konstruksi;
- h. biaya pematangan;
- i. biaya dokumen kepemilikan aset.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional, maksudnya adalah sebagai berikut:

1. penggunaan atribusi secara proporsional diterapkan jika dalam pengadaan tidak terdapat nilai perolehan barang yang lebih dari 80 % dari harga total.
2. penggunaan nilai terbesar diterapkan jika dalam pengadaan barang terdapat nilai perolehan barang yang nilainya lebih dari 80% dari harga total.

Namun untuk aset tetap tanah berapapun nilai perolehan seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai (termasuk biaya yang dikeluarkan dalam tahap perencanaan dan tahap persiapan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum). Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Apabila ada tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah melainkan hanya diungkap secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

d. Jalan, irigasi dan jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Nilai aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman dicatat sebesar nilai wajar, dan tidak dilakukan penyusutan terhadap aset tetap lainnya tersebut, melainkan dilakukan penghapusan pada saat hewan dan tanaman dinyatakan kadaluarsa atau mati.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

2. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh perolehan aset secara gabungan diantaranya pembangunan gedung bertingkat yang terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning)*, dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat. Alokasi biaya masing-masing komponen adalah nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Banyuasin selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

5. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/ fasum diperoleh.

6. **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari posse macam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun - nilai -bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut :

- a. aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- b. aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.
- c. jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

7. **Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun.

Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

8. **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi kriteria (a) dan minimal salah satu kriteria (b) atau (c) atau (d) sebagai berikut:

- jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas, manfaat atau mutu produksi;
- pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau **memberi manfaat ekonomi** dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau Peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahanyang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

A. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	----
2.	Peralatan dan Mesin	Lebih dari 75%
3.	Gedung dan Bangunan	Lebih dari 25%
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Lebih dari 30%
5.	Aset Tetap Lainnya	Lebih dari 75%

B. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan baik berupa *overhaul* atau renovasi. Berikut uraian penambahan masa manfaat sesuai persentase renovasi dan *overhaul*:

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/Masa Manfaat	
			% dari nilai buku tanpa penyusutan	Tahun
1	Alat-Alat Besar Darat	10	>75%	5
2	Alat-Alat Besar Apung	8	>75%	4
3	Alat-alat Bantu	7	>75%	4

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/Masa Manfaat	
			% dari nilai buku tanpa penyusutan	Tahun
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	>75%	4
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	>75%	1
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	>75%	6
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	>75%	2
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	>75%	12
9	Alat Bengkel Bermesin	10	>75%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	>75%	1
11	Alat Ukur	5	>75%	3
12	Alat Pengolahan Pertanian	4	>75%	5
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	>75%	5
14	Alat Kantor	5	>75%	3
15	Alat Rumah Tangga	5	>75%	3
16	Alat Studio	5	>75%	3
17	Alat Komunikasi	5	>75%	3
18	Peralatan Pemancar	10	>75%	5
19	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	>75%	9
20	Alat Kedokteran	5	>75%	3
21	Alat Kesehatan Umum	5	>75%	3
22	Unit Alat Laboratorium	8	>75%	4
23	Alat Laboratorium Fisika	15	>75%	8
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	>75%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10	>75%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	>75%	4
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	>75%	4
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	>75%	5
29	Senjata Api	10	>75%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	3	>75%	1

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/Masa Manfaat	
			% dari nilai buku tanpa penyusutan	Tahun
31	Senjata Sinar	5	>75%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	4	>75%	2
33	Komputer Unit	4	>75%	2
34	Peralatan Komputer	4	>75%	2
35	Alat Eksplorasi Topografi	5	>75%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	10	>75%	5
37	Alat Pengeboran Mesin	10	>75%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	10	>75%	2
39	Peralatan Sumur	10	>75%	2
40	Peralatan Produksi	10	>75%	2
41	Pengolahan dan Pemurnian	15	>75%	8
42	Alat Bantu Eksplorasi	10	>75%	7
43	Alat Bantu Produksi	10	>75%	7
44	Alat Deteksi	5	>75%	3
45	Alat Pelindung	5	>75%	2
46	Alat SAR	2	>75%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	10	>75%	6
48	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	>75%	5
49	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	>75%	4
50	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	>75%	4
51	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	>75%	4
52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	>75%	9
53	Peralatan Olahraga	3	>75%	2
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	>75%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	>45%	15
56	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	>45%	15
57	Bangunan Menara Perambuan	40	>45%	15
58	Tugu/Tanda Batas	50	>45%	15

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/Masa Manfaat	
			% dari nilai buku tanpa penyusutan	Tahun
59	Jalan	10	>60%	10
60	Jembatan	50	>45%	15
61	Banguna Air Irigasi	50	>10%	10
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	>10%	10
63	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	>10%	5
64	Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai & Penanggulangan Ber	10	>10%	3
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	>10%	3
66	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	>45%	15
67	Bangunan Air Kotor	40	>45%	15
68	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30	>45%	10
69	Instalasi Air Kotor	30	>45%	10
70	Instalasi Pengolahan Sampah	10	>45%	5
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	>45%	5
72	Instalasi Pembangkit Listrik	40	>45%	15
73	Instalasi Gardu Listrik	40	>45%	15
74	Instalasi Pertahanan	30	>45%	5
75	Instalasi Gas	30	>45%	15
76	Instalasi Pengaman	20	>45%	3
77	Instalasi Lain	5	>45%	3
78	Jaringan Air Minum	30	>45%	10
79	Jaringan Listrik	40	>45%	15
80	Jaringan Telepon	20	>45%	10
81	Jaringan Gas	30	>45%	10
82	Alat Musik Modern/Band		>75%	2

Untuk penambahan masa manfaat sebagai akibat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang melebihi dari batas masa manfaat standar/yang telah ditetapkan, maka masa manfaat aset tersebut ditetapkan sebesar batas maksimal masa manfaat aset semula.

9. Menambah kapasitas dan mutu produksi

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas produksi atau mengembalikan ke kapasitas produksi normal karena adanya perbaikan/pemeliharaan terhadap aset tetap yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya mesin foto copy mempunyai kapasitas produksi sebesar 5.000 lembar dan sudah terpakai sebesar 4.000 lembar sehingga masih terdapat sisa kapasitas produksi 1.000 lembar. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan yang mengembalikan kapasitas produksi mesin foto copy menjadi 5.000 lembar lagi.

Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung kantor dengan luas 200 m² ditambah ruangan dengan luas 10 m² sehingga luas gedung kantor menjadi 210 m².

Belanja pemeliharaan yang tidak memenuhi unsur tersebut diatas tidak menambah nilai aset tetap.

10. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

11. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsi potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, bukan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10

No.	Kelompok Aset	Umur
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	40
37	Bangunan Bersejarah	50

No.	Kelompok Aset	Umur
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
47	Jalan	10
48	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Penghitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen :

- a. untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan dan manfaatnya bahkan bertambah nilainya antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

12. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

13. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Harga perolehan suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang. Apabila aset tetap dihapuskan atau dilepaskan dan terdapat nilai yang berbeda antara nilai buku dengan nilai jual, maka dicatat di LO.

Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat ;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. nilai penyusutan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam Neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a. dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b. dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- c. dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu, periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran dan Penilaian

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
- d. biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke dalam kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajore* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kebijakan Akuntansi untuk Konstruksi dalam Pengerjaan.
- b. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
- c. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- d. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- e. uang muka kerja yang diberikan; dan
- f. retensi.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang belum di proses SKTJM;
- c. kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. aset Tidak Berwujud;
- e. aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a. Bangun Guna Serah (BGS)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

b. bangun Serah Guna (BSG)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

c. kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

d. kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Definisi aset tidak berwujud mensyaratkan bahwa aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset tidak berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Berdasarkan jenis sumber daya, aset tidak berwujud pemerintah dapat berupa:

1. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak Paten dan Hak Cipta;
4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
5. Aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya;
6. Aset tidak berwujud dalam Pengerjaan.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Termasuk aset lainnya biaya perencanaan pembangunan berupa DED yang lebih dari 4 tahun periode pelaporan belum diikuti dengan pembangunan fisik. Jika telah diikuti dengan pembangunan fisik, biaya perolehan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

Pengakuan

Tagihan untuk penjualan angsuran diakui pada saat kontrak/berita acara penjualan aset dengan masa jatuh tempo pembayaran lebih dari 12 bulan. Jika angsuran atas tagihan penjualan angsuran tersebut sudah jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan maka diklasifikasikan sebagai piutang.

Aset yang timbul atau digunakan oleh pihak ketiga diakui sebagai aset lainnya pada saat :

1. Penyerahan aset tetap untuk digunakan sebagai aset yang akan diguna usahakan, diantaranya tanah atau bangunan yang dipakai oleh pihak ketiga.
2. Penyerahan aset tetap oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah atas perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah (BGS).

Aset tidak berwujud berupa software diakui jika terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua) belas bulan, yang digunakan untuk operasi normal entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tidak berwujud berupa software yang manfaatnya sampai dengan 12 bulan diklasifikasikan sebagai belanja habis pakai, contohnya antivirus yang hanya memiliki masa manfaat sampai dengan 1 tahun.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian sebagai berikut:

1. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
2. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai.

3. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
4. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Termasuk aset lainnya biaya perencanaan pembangunan berupa aset tetap yang lebih dari 4 (empat) tahun belum diikuti dengan pembangunan fisik. Jika telah diikuti dengan pembangunan fisik, biaya perencanaan pembangunan tersebut akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran dan jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Uang tunai kerugian Negara/daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut, kerugian Negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga. kerugian Negara/daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
3. Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

- a. untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b. untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
4. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar. Cara

perolehan aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

a. pembelian

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

b. pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c. kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

d. donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset lainnya berupa aset tetap yang rusak berat, aset tetap yang hilang, dan aset tetap yang dipinjam pakai disajikan sebesar nilai buku yang dipindahkan dari aset tetap dengan penjelasan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada

setiap periode akuntansi. Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

a. amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

b. amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi;
2. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG);
3. Rincian aset lainnya;
4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban :

a. kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya.

Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. pendapatan diterima dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Pemberian

izin usaha tertentu yang masa berlakunya lebih dari satu periode akuntansi dan telah diterima pembayarannya tidak termasuk dalam pendapatan dibayar dimuka, namun diakui sebagai pendapatan LO.

- e. utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. utang aset tetap diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui atau dana titipan dari pemerintah pusat untuk disalurkan kembali namun belum disalurkan oleh pemerintah daerah sebesar nilai yang belum disalurkan, misalnya Dana Desa.
- i. kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatangani kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan utang kepada Penyedia Barang/Jasa di Neraca dengan memenuhi persyaratan diantaranya :

1. Penyedia Barang/Jasa membuat Surat Pernyataan Penghapusan Piutang kepada Pemerintah Daerah, dan
2. Melampirkan Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan/*Final Hand Over (FHO)* atas kegiatan yang akan dihapus hutangnya, atau
3. Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerangkan bahwa rekanan telah menyelesaikan masa pemeliharaan pekerjaan tersebut.

Penghapusan utang yang dilakukan Pemerintah daerah dicatat dengan mengurangi nilai hutang dan menambah surplus dari kegiatan non operasional-penyelesaian kewajiban.

Pengukuran dan Penilaian

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung,

seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya .
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK, pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang kepada pihak ketiga, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
3. Utang transfer, dicatat sebesar nilai kelebihan transfer atau terdapat dana titipan dari pemerintah pusat untuk disalurkan kembali namun belum disalurkan oleh pemerintah daerah sebesar nilai yang belum disalurkan, misalnya Dana Desa
4. Utang bunga atas utang pemerintah, harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Bagian lancar hutang jangka panjang, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban, merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya, merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk

masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban dalam Laporan Keuangan disajikan di Neraca dengan klasifikasi pos kewajiban jangka pendek untuk utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, utang transfer, utang surat perbendaharaan negara dan utang jangka pendek lainnya (utang biaya dan pendapatan diterima dimuka). Sedangkan penyajian pada klasifikasi pos kewajiban jangka panjang untuk utang luar negeri, utang dalam negeri-sektor perbankan, utang dalam negeri-obligasi, utang pembelian cicilan, utang jangka panjang lainnya.

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan.

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Kewajiban;
2. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
3. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
4. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
5. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
6. Informasi atas penghapusan utang antara lain mengungkapkan nilai penghapusan utang, nama pihak penyedia barang jasa dan uraian pekerjaan.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Kabupaten Banyuasin tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
2. Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
3. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran dan Penilaian

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah bersih/nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan sesuai kelompok Bagan Akun Standar (BAS).

Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO. Pengungkapan Pendapatan-LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan-LO;
2. Klasifikasi Pendapatan-LO;
3. Informasi lain yang relevan.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pangakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan pendapatan transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi :

- a. apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama
- b. apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengukuran dan Penilaian

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

1. Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan-LRA
2. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
3. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari : beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan, beban transfer, pos luar biasa, dan beban lain lain.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas,

maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Penerimaan kembali dan koreksi beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) yaitu :

1. Beban Operasional, terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Persediaan, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional
Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
3. Beban Luar Biasa
Beban ini disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Beban;
2. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
3. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Terkait dengan perolehan aset tetap, entitas akuntansi menganggarkan dan mencatat pengadaan aset tetap ke dalam belanja modal dan belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap. Kriteria untuk memperoleh belanja modal sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
4. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan;
5. Nilai satuan barang yang dibeli lebih dari batasan minimal kapitalisasi;
6. Untuk pemeliharaan aset tetap yang melebihi nilai diatas kapitalisasi dan menambah masa manfaat aset.

Pengeluaran /belanja untuk pengadaan aset tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi dianggarkan dalam belanja operasional/barang jasa.

Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal yang perlu disajikan dalam CaLK terkait dengan belanja adalah :

1. Kebijakan Akuntansi tentang belanja.
2. Anggaran dan realisasi belanja sesuai dengan objek belanja berkenaan.
3. Penjelasan mengenai capaian belanja dan penjelasan dan penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
4. Penguraian belanja per objek belanja.
5. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
6. Kejadian luar biasa.
7. Informasi yang dianggap perlu.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dibagi menjadi:

- a. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi

- a. transfer dikategorikan berdasarkan sumber transfer dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar (BAS).
- b. klasifikasi transfer menurut sumber diklasifikasikan antara lain:
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
 - 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
 - 3) Transfer Pemerintah Provinsi.
 - 4) Transfer/Bagi hasil ke Desa.
 - 5) Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan

1. Pendapatan Operasional Transfer

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer disajikan dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer yaitu :

- a. pada saat kas diterima; dan
- b. pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

2. Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan pada saat diterima dokumen pendukung pembayaran sedangkan untuk dana desa tidak masuk ke beban transfer tetapi merupakan pelunasan hutang.

Pengukuran dan Penilaian

1. Pendapatan Operasional Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada

pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi tentang transfer.
2. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman kepada masyarakat berupa dana bergulir, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu :

1. Penerimaan pembiayaan
 - a. penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
 - b. penerimaan pembiayaan yang diterima pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
 - c. pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
 - b. pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran dan Penilaian

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Jika dalam penerimaan pinjaman dari dana bergulir terdapat penerimaan bunga maka harus dipisahkan pokok dan bunganya, untuk penerimaan pokok masuk ke dalam penerimaan pembiayaan sedang untuk pendapatan bunga masuk pada Pendapatan Asli Daerah.

Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan), Neraca serta diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening Kas Umum Daerah) oleh Entitas Akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah, seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto sedangkan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan antara lain:

- a. kebijakan Akuntansi tentang Pembiayaan;
- b. informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- c. informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
- d. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan /pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, Penyertaan pemerintah daerah;
- e. informasi lain yang dianggap perlu.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

- a. dana Cadangan Pembangunan Jembatan
- b. dana Cadangan Pembangunan Gedung
- c. dana Cadangan Pembangunan Waduk
- d. dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
- e. dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

Pengakuan

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, dan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan, sedangkan penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan, proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang pencairannya menggunakan mekanisme SP2D LS.

Pengukuran dan Penilaian

Terdapat tiga jenis pengukuran Dana Cadangan sesuai dengan waktu pengukurannya, yaitu :

1. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan di LRA dan Neraca, Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi tentang dana cadangan;
- b. dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- c. tujuan pembentukan dana cadangan;
- d. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- e. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- f. sumber dana cadangan; dan
- g. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggungjawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan-LRA;
- b. belanja;
- c. surplus/defisit-LRA;
- d. penerimaan pembiayaan;
- e. pengeluaran pembiayaan;
- f. pembiayaan neto; dan
- g. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. pendapatan hasil kerja sama;
- d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. pendapatan BLUD lainnya.

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal;
- b. penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. lain-lain; dan
- f. saldo anggaran lebih akhir.

Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang dari kegiatan BLUD;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. aset lainnya;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang; dan
- j. ekuitas.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. dana titipan pihak ketiga;
- b. uang jaminan; dan
- c. uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini

selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan-LO;
- b. beban;
- c. surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d. kegiatan non operasional;
- e. surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. pos luar biasa; dan
- g. surplus/defisit-LO.

BLUD menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a. pendapatan dari alokasi APBD;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. pendapatan hasil kerja sama;
- e. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f. pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan;
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLU diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

- a. aktivitas operasi
- b. aktivitas investasi
- c. aktivitas pendanaan
- d. aktivitas transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- a. ekuitas awal;
- b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. ekuitas akhir

7. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

8. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun Laporan Keuangan selayaknya entitas akuntansi

pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun Laporan Keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. **Kesalahan yang tidak berulang**, kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jenis koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berikutnya, diantaranya:

1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

2) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi

posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

2. **Kesalahan yang berulang dan sistemik**, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :

1. Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
2. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, dicatat dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
2. Fungsi tersebut tetap ada.
3. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran pendapatan - LRA Tahun 2018 sebesar Rp2.041.303.601.174,03 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Target pendapatan dapat terealisasi sebesar Rp2.080.649.009.995,05 atau 101,93%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LRA Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121.271.643.259,12	140.602.072.489,75	125.984.368.887,92	115,94
2	Pendapatan Transfer	1.919.247.094.914,91	1.940.019.721.924,30	1.880.437.883.556,66	101,08
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	784.863.000,00	27.215.581,00	-	3,47
	Jumlah	2.041.303.601.174,03	2.080.649.009.995,05	2.006.422.252.444,58	101,93

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 115,94%. Optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah diantaranya disebabkan karena tercapainya seluruh target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 113,55%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 118,25%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,00% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 122,00%. Sedangkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 101,08% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 3,47%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA terealisasi sebesar Rp1.449.491.756.245,00 atau 101,81% dari anggaran sebesar Rp1.423.697.370.635,00;
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA terealisasi sebesar Rp388.096.246.999,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp389.769.965.956,00;
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA terealisasi sebesar Rp92.934.950.540,30 atau 99,40% dari anggaran sebesar Rp93.491.252.723,91;
- 4) Bantuan Keuangan - LRA terealisasi sebesar Rp9.496.768.140,00 atau 77,28% dari anggaran sebesar Rp12.288.505.600,00.

Penyajian pendapatan secara grafik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2018



Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki ketergantungan yang besar dari Pendapatan Transfer sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1.940.019.721.924,30 atau 101,08% dari target sebesar Rp1.919.247.094.914,91, rincian pendapatan transfer diuraikan lebih lanjut pada Penjelasan Pos Pendapatan Transfer - LRA.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

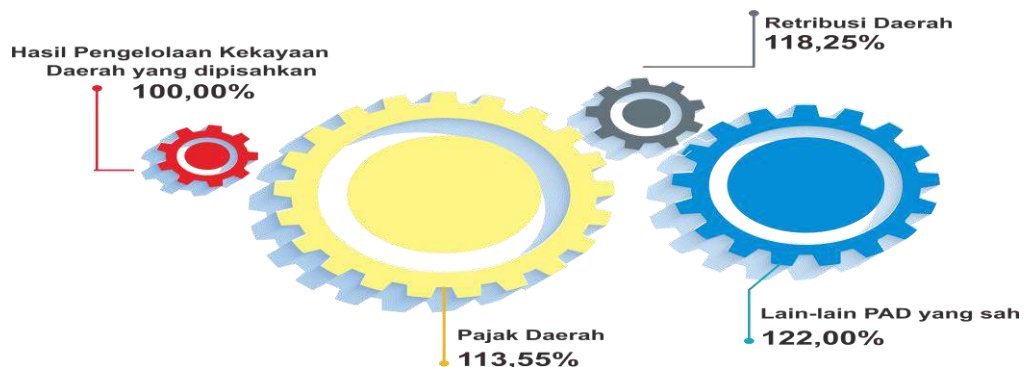
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA mencapai Rp140.602.072.489,75 atau 115,94% dari anggaran sebesar Rp121.271.643.259,12. Dapat tercapainya target PAD karena seluruh penerimaan daerah yang ditargetkan dapat mencapai bahkan melebihi 100,00%. Nilai realisasi PAD memberikan kontribusi terhadap keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar 6,76%. Berikut realisasi komponen PAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.

Tabel 5.1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	72.521.285.353,00	82.349.366.395,92	72.514.691.201,38	113,55
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.555.099.000,00	7.751.152.778,00	8.069.798.706,00	118,25
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.432.071.561,12	4.432.071.561,12	4.116.082.327,28	100,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	37.763.187.345,00	46.069.481.754,71	41.283.796.653,26	122,00
	Jumlah	121.271.643.259,12	140.602.072.489,75	125.984.368.887,92	115,94

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5.1.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)



5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi mencapai Rp82.349.366.395,92 atau 113,55% dari anggaran sebesar Rp72.521.285.353,00. Rincian Pajak Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Pajak Hotel - LRA	1.468.511.000,00	3.129.315.199,08	672.713.794,80	213,09
2	Pajak Restoran - LRA	5.970.323.000,00	7.929.106.589,40	4.370.523.882,91	132,81
3	Pajak Hiburan - LRA	2.183.050.000,00	2.929.860.010,30	1.914.199.535,79	134,21
4	Pajak Reklame - LRA	623.497.000,00	742.861.315,12	607.443.644,50	119,14
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	23.275.693.000,00	25.390.406.888,11	21.122.089.832,49	109,09
6	Pajak Air Tanah - LRA	93.090.000,00	112.503.104,95	89.363.039,45	120,85
7	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	14.550.000,00	25.970.000,00	22.770.000,00	178,49
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	74.596.000,00	463.067.206,96	115.324.064,44	620,77
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.665.019.353,00	12.342.424.745,00	12.038.387.903,00	97,45
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	26.152.956.000,00	29.283.851.337,00	31.561.875.504,00	111,97
	Jumlah	72.521.285.353,00	82.349.366.395,92	72.514.691.201,38	113,55

Tabel diatas menggambarkan bahwa dari sepuluh jenis Pendapatan Pajak Daerah, hanya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang tidak mencapai target, sembilan jenis pajak lainnya melebihi target yang dianggarkan. Rincian masing-masing pendapatan pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Hotel tercapai sebesar Rp3.129.315.199,08 atau 213,09 % dari target sebesar Rp1.468.511.000,00. Pencapaian target ini karena meningkatnya realisasi pembayaran pajak hotel di OPI Mall Kecamatan Rambutan, dan dari wisma/penginapan Patra Jasa di Kecamatan Banyuasin I yang merupakan tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan PT. Pertamina Wilayah Sumatera, serta adanya penambahan hotel baru yaitu Hotel Wyndham di OPI Mall di Kecamatan Rambutan.
2. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp7.929.106.589,40 atau 132,81% dari target sebesar Rp5.970.323.000,00. Pencapaian target ini karena adanya penambahan rumah makan/restoran dan katering, serta bertambahnya objek pajak seiring bertambahnya tenan di OPI Mall.

3. Pajak Hiburan dapat terealisasi sebesar Rp2.929.860.010,30 atau 134,21% dari target sebesar Rp2.183.050.000,00. Tercapainya realisasi pajak hiburan ini karena penambahan objek pajak hiburan khususnya di OPI Mall.
4. Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp742.861.315,12 atau 119,14% dari target sebesar Rp623.497.000,00. Pencapaian target ini karena meningkatnya jumlah wajib pajak reklame, jumlah reklame dan ukuran reklame yang dipasang sehingga realisasi pembayaran pajak reklame baik yang dibayar langsung oleh perusahaan atau perorangan maupun melalui advertising (biro iklan) juga meningkat.
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terealisasi sebesar Rp25.390.406.888,11 atau 109,09% dari target sebesar Rp23.275.693.000,00. Pencapaian target ini seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang sudah menikmati listrik sehingga realisasi PPJ juga meningkat dan adanya penyesuaian tarif PPJ Non PLN. Realisasi ini berasal dari PPJ PLN (Persero) Cabang Palembang, Ranting Pangkalan Balai dan Ranting Mariana serta PPJ Non PLN yang berasal dari PT. Pertamina dan PT. Medco Indonesia.
6. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp112.503.104,95 atau 120,85% dari target sebesar Rp93.090.000,00. Objek pajak air tanah terdapat di Kecamatan Talang Kelapa baik dari perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan maupun oleh orang pribadi yang menggunakan air tanah untuk komersil.
7. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp25.970.000,00 atau 178,49% dari target sebesar Rp14.550.000,00. Pencapaian target ini karena adanya upaya intensifikasi penerimaan pajak sarang burung walet yang dilakukan di Kecamatan-kecamatan yang potensial sarang burung walet.
8. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp463.067.206,96 atau 620,77% dari target sebesar Rp74.596.000,00. Pencapaian target ini karena meningkatnya volume Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target yang telah ditetapkan.
9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan sebesar Rp12.342.424.745,00 atau 97,45% dari target sebesar Rp12.665.019.353,00. Tidak tercapainya target ini karena adanya keterlambatan wajib pajak yang membayar setelah tanggal jatuh tempo.
10. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp29.283.851.337,00 atau 111,97% dari target sebesar Rp26.152.956.000,00. Tercapainya target ini karena BPHTB menganut sistem pemungutan *Self Assessment*, sehingga target secara tepat sulit diprediksi, namun target tahun 2018 dapat dicapai karena semakin meningkatnya transaksi atas tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Banyuasin.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tercapai sebesar Rp7.751.152.778,00 atau 118,25% dari anggaran sebesar Rp6.555.099.000,00. Rincian Penerimaan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Retribusi Jasa Umum - LRA	3.363.099.000,00	3.952.198.182,00	3.059.908.049,00	117,52
2	Retribusi Jasa Usaha - LRA	686.500.000,00	1.136.196.096,00	1.100.419.724,00	165,51
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	2.505.500.000,00	2.662.758.500,00	3.909.470.933,00	106,28
	Jumlah	6.555.099.000,00	7.751.152.778,00	8.069.798.706,00	118,25

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan pendapatan Retribusi Daerah - LRA mencapai target. Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp3.952.198.182,00 atau 117,52% dari anggaran sebesar Rp3.363.099.000,00. Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.136.196.096,00 atau 165,51% dari anggaran sebesar Rp686.500.000,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp2.662.758.500,00 atau 106,28% dari anggaran sebesar Rp2.505.500.000,00.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp3.952.198.182,00 atau 117,52% dari anggaran sebesar Rp3.363.099.000,00. Rincian Retribusi Jasa umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5
Rincian Retribusi Jasa Umum– LRA Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas - LRA	12.000.000,00	30.084.000,00	22.070.000,00	250,70
2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan - LRA	924.400.000,00	1.167.553.000,00	1.059.333.000,00	126,30
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum - LRA	126.650.000,00	127.247.000,00	127.805.000,00	100,47
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	774.000.000,00	797.973.000,00	772.623.000,00	103,10
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los -LRA	440.172.000,00	433.009.000,00	447.347.000,00	98,37
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	281.646.000,00	284.410.000,00	281.075.000,00	100,98
7	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	227.151.000,00	239.040.000,00	225.497.000,00	105,23
8	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	25.000.000,00	40.953.820,00	37.952.080,00	163,82
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	36.480.000,00	44.390.000,00	39.010.000,00	121,68
10	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	500.000.000,00	771.648.362,00	14.365.969,00	154,33
11	Retribusi Bea balik Nama - LRA	15.600.000,00	15.890.000,00	32.830.000,00	101,86
	Jumlah	3.363.099.000,00	3.952.198.182,00	3.059.908.049,00	117,52

Tabel di atas menggambarkan setiap jenis pendapatan Retribusi Jasa Umum melebihi target yang dianggarkan. Rincian Retribusi Jasa Umum dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas - LRA

Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas - LRA terealisasi sebesar Rp30.084.000,00 atau 250,70% dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas merupakan penerimaan dari pasien yang berobat ke Puskesmas namun bukan warga Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan, sehingga diperlakukan sebagai pasien umum.

Dapat dicapainya retribusi jenis ini karena dalam penetapan target tidak dapat memprediksi pasien berobat yang berasal dari luar Kabupaten Banyuasin.

2. **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA**
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA terealisasi sebesar Rp1.167.553.000,00 atau 126,30% dari anggaran sebesar Rp924.400.000,00. Jenis Retribusi ini terdiri dari Retribusi Kebersihan Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp386.278.000,00 dan Retribusi Pelayanan Persampahan terealisasi sebesar Rp781.275.000,00. Dapat dicapainya target karena adanya penambahan 2 unit Pasar yakni pasar Air Kumbang dan Pasar Manggar Raya serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.
3. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA**
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA terealisasi sebesar Rp127.247.000,00 atau 100,47% dari anggaran sebesar Rp126.650.000,00. Target retribusi ini dapat tercapai diantaranya karena telah dilakukannya penataan terhadap lahan parkir baru yang belum dikelola serta dilakukan penertiban, pembinaan dan sosialisasi terhadap juru parkir dan juga meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dalam memberikan kontribusi terhadap pelayanan parkir kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. **Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA**
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA terealisasi sebesar Rp797.973.000,00 atau 103,10% dari anggaran sebesar Rp774.000.000,00, dapat dicapainya target ini karena adanya penambahan 2 unit Pasar yakni pasar Air Kumbang dan Pasar Manggar Raya serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.
5. **Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA**
Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA terealisasi sebesar Rp433.009.000,00 atau 98,37% dari anggaran sebesar Rp440.172.000,00. tidak tercapainya target ini karena banyaknya los di unit Pasar Betung dan Pasar Telung Betung yang tutup.
6. **Retribusi Pelayanan Pasar-Kios - LRA**
Retribusi Pelayanan Pasar-Kios - LRA terealisasi sebesar Rp284.410.000,00 atau 100,98% dari anggaran sebesar Rp281.646.000,00. Dapat dicapainya target ini karena adanya penambahan sewa kios di Pasar Sukajadi, Unit Pasar Manggar Raya dan Pasar Air Kumbang.
7. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban - LRA**
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Truk - LRA terealisasi sebesar Rp239.040.000,00 atau 105,23% dari anggaran sebesar Rp227.151.000,00. Hal ini dapat dicapai seiring dengan tingginya pertumbuhan kendaraan yang wajib uji serta rutin dilakukan penertiban sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat akan kelaikan kendaraannya.
8. **Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA**
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA terealisasi sebesar Rp40.953.820,00 atau 163,82% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Tercapainya jenis retribusi ini karena adanya penambahan beberapa perusahaan dan ruko-ruko baru di wilayah Kabupaten Banyuasin.

9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA terealisasi sebesar Rp44.390.000,00 atau 121,68% dari anggaran sebesar Rp36.480.000,00. Hal ini dapat dicapai diantaranya karena adanya penambahan 4 WC pada unit pasar betung.
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA terdapat terealisasi sebesar Rp771.648.362,00 atau 154,33% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Dapat dicapainya target retribusi ini karena pada saat penerbitan SKRD, jumlah menara telekomunikasi yang ada lebih banyak dari jumlah target yang ditetapkan tahun 2018.
11. Retribusi Bea Balik Nama - LRA
Retribusi Bea Balik Nama - LRA terdapat terealisasi sebesar Rp15.890.000,00 atau 101,86% dari anggaran sebesar Rp15.600.000,00. Retribusi dapat dicapai karena penambahan objek retribusi baru.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.136.196.096,00 atau 165,51% dari anggaran sebesar Rp686.500.000,00. Rincian Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.6
Rincian Retribusi Jasa Usaha – LRA Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LRA	200.000.000,00	292.925.000,00	150.190.000,00	146,46
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang - LRA	16.500.000,00	21.700.000,00	25.200.000,00	131,52
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor - LRA	25.000.000,00	18.000.000,00	26.350.000,00	72,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	100.000.000,00	85.990.000,00	134.900.000,00	85,99
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	315.000.000,00	687.395.096,00	733.658.724,00	218,22
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	30.000.000,00	30.186.000,00	30.121.000,00	100,62
	Jumlah	686.500.000,00	1.136.196.096,00	1.100.419.724,00	165,51

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari empat jenis pendapatan Retribusi Jasa Usaha, dua jenis melebihi target yang dianggarkan dan dua jenis retribusi tidak mencapai target. Rincian Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LRA
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium terealisasi sebesar Rp292.925.000,00 atau 146,46% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hal ini dapat dicapai karena adanya peningkatan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Banyuwangi yang melakukan analisa Laboratorium Lingkungan di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

2. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan - LRA**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - LRA terealisasi sebesar Rp21.700.000,00 atau 131,52% dari anggaran sebesar Rp16.500.000,00. Hal ini dapat dicapai karena semakin banyaknya penyewa yang menggunakan gedung Graha Sedulang Setudung serta selalu dilakukannya sosialisasi terkait fasilitas penggunaan gedung Graha Sedulang Setudung kepada masyarakat umum.
3. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor - LRA**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor - LRA terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 atau 72,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Sewa Retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor terbagi dua SKPD, yakni Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan. Untuk sewa bus milik Pemkab Banyuasin tidak dapat dicapai karena berkurangnya masyarakat yang menggunakan jasa sewa kendaraan bermotor dan sebagian masyarakat yang menggunakan bus Dinas Perhubungan, sedangkan untuk penyewaan mobil derek dapat mencapai target karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan mobil derek khususnya pada saat volume kendaraan padat diantaranya pada musim lebaran, natal dan tahun baru.
4. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA**
Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA terealisasi sebesar Rp85.990.000,00 atau 85,99% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Tidak tercapainya retribusi ini karena kurangnya sosialisasi terhadap fasilitas penginapan yang dimiliki sehingga mengakibatkan jumlah tamu yang menginap di mess Pemkab Banyuasin berkurang.
5. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA terealisasi sebesar Rp687.395.096,00 atau 218,22% dari anggaran sebesar Rp315.000.000,00. Tingginya capaian retribusi ini diantaranya karena perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Gasing masih giat melakukan bongkar muat.
6. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA**
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp30.186.000,00 atau 100,62% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Target retribusi ini dapat dicapai seiring meningkatnya minat masyarakat untuk membeli ikan maupun benih ikan khususnya benih ikan patin melalui Balai Benih Ikan (BBI).

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

Retribusi Perizinan Tertentu - LRA terealisasi sebesar Rp2.662.758.500,00 atau 106,28% dari anggaran sebesar Rp2.505.500.000,00. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu - LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5.1.7
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu– LRA Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	2.500.000.000,00	2.660.063.500,00	2.881.600.398,00	106,40
2	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA	-	-	98.934.500,00	-
3	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA	-	-	923.381.035,00	-
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	5.500.000,00	2.695.000,00	5.555.000,00	49,00
	Jumlah	2.505.500.000,00	2.662.758.500,00	3.909.470.933,00	106,28

Tabel di atas menggambarkan bahwa satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu melebihi target pendapatan sedangkan satu jenis tidak mencapai target dan dua jenis retribusi tidak lagi memiliki target pada tahun 2018. Rincian masing-masing pendapatan retribusi dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - LRA
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - LRA terealisasi sebesar Rp2.660.063.500,00 atau 106,40% dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00. Hal ini dapat dicapai karena meningkatnya kesadaran masyarakat yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta tumbuhnya pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi dua objek pemungut, Retribusi yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terealisasi sebesar Rp2.655.688.500,00 serta Retribusi yang dipungut oleh SKPD Kecamatan Rambutan terealisasi sebesar Rp1.050.000,00 dan Kecamatan Talang Kelapa sebesar Rp3.325.000,00.
2. Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Keg. Orang Pribadi - LRA
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Keg. Orang Pribadi - LRA tidak lagi dianggarkan sehubungan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
3. Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Badan - LRA
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Keg. Badan - LRA tidak lagi dianggarkan sehubungan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 berlaku sejak tanggal 30 April 2017.
4. Retribusi Izin Trayek Orang Pribadi - LRA
Retribusi Izin Trayek Orang Pribadi - LRA terealisasi sebesar Rp2.695.000,00 atau 49,00% dari anggaran sebesar Rp5.500.000,00. Target retribusi ini tidak dapat dicapai karena minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membayar kewajibannya serta berkurangnya jumlah angkutan pedesaan karena pelaku usaha menjual armadanya.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (BPDSS Babel) Cabang Pangkalan Balai. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal sebesar Rp4.432.071.561,12 atau 100,00% dari target sebesar Rp4.432.071.561,12. Realisasi tersebut merupakan penerimaan deviden tunai tahun buku

2017 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 27 Februari 2018 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 44.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA terealisasi sebesar Rp46.069.481.754,71 atau 122,00% dari anggaran sebesar Rp37.763.187.345,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.8
Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	200.000.000,00	273.067.874,00	1.342.000,00	136,53
2	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.604.000.000,00	2.447.187.479,00	3.668.827.806,00	152,57
3	Pendapatan Bunga - LRA	3.205.479.452,00	4.437.068.172,08	5.151.076.991,00	138,42
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan - LRA	-	325.261.755,51	21.486.224,00	-
5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	-	243.344.464,40	230.891.694,75	-
6	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	-	7.449.100,00	2.011.000,00	-
7	Pendapatan dari Pengembalian	-	616.998.501,26	2.412.567.969,53	-
8	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	200.000.000,00	259.659.375,00	61.523.168,00	129,83
9	Pendapatan BLUD - LRA	6.050.000.000,00	5.794.996.389,00	6.674.733.987,00	95,79
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	550.000.000,00	8.004.437.677,46	836.045.339,98	1.455,35
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	25.953.707.893,00	23.660.010.967,00	22.223.290.473,00	91,16
Jumlah		37.763.187.345,00	46.069.481.754,71	41.283.796.653,26	122,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari sebelas rincian Lain-lain PAD yang Sah, sepuluh jenis melampaui target dan satu jenis lainnya masih dibawah target. Berikut penjelasan masing-masing Lain-lain PAD yang Sah :

1. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

Pendapatan atas Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA terealisasi sebesar Rp273.067.874,00 atau 136,53% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Pendapatan jenis ini merupakan pendapatan atas penjualan aset yang dihapuskan.

2. Penerimaan Jasa Giro - LRA

Penerimaan Jasa Giro - LRA terealisasi sebesar Rp2.447.187.479,00 atau 152,57% dari anggaran sebesar Rp1.604.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan jasa giro yang diterima di rekening kas umum daerah sebesar Rp2.444.787.089,00 ditambah Jasa Giro dari Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.729.929,00 dan Jasa Giro Non Kapitasi sebesar Rp.670.461,00.

3. Penerimaan Bunga - LRA

Penerimaan Bunga Deposito - LRA terealisasi sebesar Rp4.437.068.172,08 atau 138,42% dari anggaran sebesar Rp3.205.479.452,00. Berikut tabel rincian bunga deposito yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuasin:

Tabel 5.1.9
Daftar Nilai Bunga Deposito yang diterima RKUD Tahun 2018

No	Nama Bank	Nilai
1	Bank Sumselbabel Cab. Pangkalan Balai	853.626.799,51
2	Rekening Deposito Bank BJB	859.983.379,64
3	Rekening Deposito Bank BNI Musi	1.175.015.573,00
4	Rekening Deposito Bank BRI Pangkalan Balai	805.391.872,53
5	Rekening Deposito Bank Mandiri Cab. Sukajadi	724.589.030,44
6	Rekening Deposito Bank BRI Cabang Sako	18.461.516,96
TOTAL		4.437.068.172,08

4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA terealisasi sebesar Rp325.261.755,51 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaan.
5. Pendapatan Denda Pajak - LRA
Pendapatan Denda Pajak - LRA terealisasi sebesar Rp243.344.464,40 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan delapan jenis Pendapatan Pajak Daerah. Rincian per pendapatan denda pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.10
Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	-	203.870,28	89.776,00	100,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA	-	3.300.293,96	7.263.228,28	100,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	-	812.400,10	118.000,00	100,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	-	11.695.395,45	6.837.930,62	100,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	-	26.443.554,33	-	100,00
6	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C - LRA	-	2,72	-	100,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah - LRA	-	704.576,56	213.109,85	100,00
8	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA	-	483.400,00	75.000,00	100,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	-	199.700.971,00	216.294.650,00	100,00
Jumlah		-	243.344.464,40	230.891.694,75	100,00

6. Pendapatan Denda Retribusi - LRA
Pendapatan Denda Retribusi - LRA terealisasi sebesar Rp7.449.100,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.596.000,00 dan keterlambatan Denda Retribusi Jasa Analisa Laboratorium sebesar Rp3.853.100,00.
7. Pendapatan dari Pengembalian - LRA
Pendapatan dari Pengembalian - LRA terealisasi sebesar Rp616.998.501,26 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp00,00. Realisasi tersebut terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp184.970.755,26, pengembalian dari dana PSG Kabupaten sebesar Rp33.467.315,00 dan pengembalian dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp15.755.800,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp382.804.631,00.

8. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA terealisasi sebesar Rp259.659.375,00 atau 129,83% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan sebesar Rp197.196.375,00 dan angsuran/cicilan penjualan ganti rugi barang milik daerah sebesar Rp62.463.000,00.
9. Pendapatan BLUD - LRA
Pendapatan BLUD - LRA terealisasi sebesar Rp5.794.996.389,00 atau 95,79% dari anggaran sebesar Rp6.050.000.000,00. Rincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5.1.11
Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2018

No.	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai
1	Penerimaan Pasien Perusahaan (PT. Jasa Raharja)	9.729.000,00
1	Penerimaan Pasien Perusahaan (PT. Waskita)	170.000,00
2	Penerimaan Pasien Umum	1.415.896.038,00
3	Penerimaan Pasien Umum BPJS	4.227.929.300,00
4	Penerimaan Diklat	1.450.000,00
5	Penerimaan Ambulance	23.333.508,00
6	Penerimaan Jasa Giro	102.562.008,00
7	Penerimaan Parkir	4.400.000,00
8	lain-lain	9.526.535,00
Total		5.794.996.389,00

Tidak tercapainya pendapatan BLUD diantaranya karena penerimaan klaim BPJS baru terealisasi sampai dengan bulan Juni 2018.

10. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LRA terealisasi sebesar Rp8.004.437.677,46 atau 1.455,35% dari anggaran sebesar Rp550.000.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan lelang lebak lebung sebesar Rp464.957.360,00 atau 127,84% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00, tercapainya penerimaan ini karena penawaran peserta (pengemin) lelang terhadap beberapa objek lelang mengalami peningkatan. Realisasi per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12
Rincian Realisasi Pendapatan Lelang Lebak Lebung Tahun 2018

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Nilai
1	Kecamatan Pulau Rimau	32.870.000,00
2	Kecamatan Rambutan	21.356.000,00
3	Kecamatan Sumber Marga Telang	13.876.460,00
4	Kecamatan Rantau Bayur	258.571.000,00
5	Kecamatan Betung	35.079.700,00
6	Kecamatan Muara Telang	4.655.000,00
7	Kecamatan Banyuasin I	2.641.000,00
8	Kecamatan Banyuasin II	15.561.000,00
9	Kecamatan Makarti Jaya	13.725.600,00
10	Kecamatan Banyuasin III	15.796.600,00
11	Kecamatan Talang Kelapa	3.553.000,00
12	Kecamatan Muara Sugihan	14.630.000,00
13	Kecamatan Tanjung Lago	32.642.000,00
Jumlah		464.957.360,00

Selain Lelang Lebak Lebung, juga terdapat setoran PT. Taspen sebesar Rp314.185.395,00, Tindak Lanjut Hasil Audit sebesar Rp3.469.656.197,93, Penampungan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp3.535.455.768,00 dan Penerimaan Lainnya sebesar Rp220.146.953,53.

11. Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA

Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA terealisasi sebesar Rp23.660.010.967,00 atau 91,16% dari anggaran sebesar Rp25.953.707.893,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp22.335.484.517,00, Pendapatan Dana Jamsoskes sebesar Rp576.948.200,00 dan Dana Non Kapitasi melalui RKUD sebesar Rp747.578.250,00. Rincian dana kapitasi dan non kapitasi per puskesmas pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.13 Rincian Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dari BPJS
Per Puskesmas dan RKUD Tahun 2018**

NO	NAMA PUSKESMAS	KAPITASI	NON KAPITASI		JUMLAH
			Jamsoskes	Non Kapitasi melalui RKUD	
1	PKM SUMBER	539.248.762,00	11.855.000		551.103.762,00
2	PKM TANJUNG LAGO	1.461.239.200,00	6.435.000		1.467.674.200,00
3	PKM TIRTA HARJA	358.965.633,00	54.340.000		413.305.633,00
4	PKM KARANG MANUNGAL	369.830.039,00	28.000.000		397.830.039,00
5	PKM MARYANA	1.851.208.472,00	15.606.000		1.866.814.472,00
6	PKM CINTA MANIS BARU	1.030.636.600,00	3.670.000		1.034.306.600,00
7	PKM SRIKATON	1.002.623.528,00	11.517.000		1.014.140.528,00
8	PKM DAYA UTAMA	885.696.500,00	15.180.000		900.876.500,00
9	PKM SIMPANG RAMBUTAN	440.475.815,00	5.882.000		446.357.815,00
10	PKM MARGO MULYO	300.622.634,00	22.622.000		323.244.634,00
11	PKM SUNGAI DUA	680.476.000,00	22.159.000,00		702.635.000,00
12	PKM SUNGSANG	762.369.392,00	19.724.000		782.093.392,00
13	PKM MAKARTI JAYA	771.911.008,00	14.416.000		786.327.008,00
14	PKM TALANG JAYA TELANG	935.899.352,00	41.491.000		977.390.352,00
15	PKM MUARA TELANG	1.260.651.441,00	3.810.000		1.264.461.441,00
16	PKM PANGKALAN BALAI	1.079.571.525,00	11.226.000		1.090.797.525,00
17	PKM TALANG JAYA BETUNG	468.859.960,00	37.223.700		506.083.660,00
18	PKM PENGUMBUK	492.556.116,00	15.920.000		508.476.116,00
19	PKM DANA MULYA	351.092.750,00	32.100.000		383.192.750,00
20	PKM SUKARAJA	432.997.250,00	2.090.000,00		435.087.250,00
21	PKM BETUNG KOTA	1.025.645.200,00	52.213.000		1.077.858.200,00
22	PKM SEMBAWA	546.360.300,00	13.858.500		560.218.800,00
23	PKM MEKAR SARI	402.447.514,00	32.361.000,00		434.808.514,00
24	PKM PETALING	519.521.472,00	5.500.000		525.021.472,00
25	PKM SEMENTUL	728.250.400,00	28.860.000		757.110.400,00
26	PKM KARANG AGUNG ILIR	319.919.832,00	16.884.000,00		336.803.832,00
27	PKM SUKAJADI	1.604.747.500,00	15.903.000		1.620.650.500,00
28	PKM KENTEN LAUT	802.314.000,00	17.964.000		820.278.000,00
29	PKM GASING LAUT	418.061.664,00	3.017.000,00		421.078.664,00
30	PKM SIDO MULYO	255.364.191,00	11.921.000		267.285.191,00
31	PKM SUAK TAPEH	235.920.467,00	1.175.000,00		237.095.467,00
32	PKM JAKABARING	-	780.000,00		780.000,00
33	PKM TANJUNG API-API	-	1.245.000,00		1.245.000,00
	Penerimaan Non Kapitasi melalui RKUD			747.578.250,00	747.578.250,00
	TOTAL PENDAPATAN	22.335.484.517,00	576.948.200,00	747.578.250,00	23.660.010.967,00

Tidak tercapainya penerimaan dana kapitasi JKN sesuai target karena penurunan perhitungan jumlah kapitasi berdasarkan jumlah tenaga medis (Dokter Umum dan Dokter Gigi) pada Puskesmas dikarenakan mutasi dokter. Sedangkan tidak tercapainya penerimaan dana Non Kapitasi JKN dikarenakan terlambatnya FKTP menyampaikan klaim dana Non Kapitasi ke BPJS.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer - LRA mencapai sebesar Rp1.940.019.721.924,30 atau 101,08% dari anggaran sebesar Rp1.919.247.094.914,91. Berikut realisasi komponen Pendapatan Transfer - LRA Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018:

Tabel 5.1.14
Rincian Pendapatan Transfer - LRA Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	1.423.697.370.635,00	1.449.491.756.245,00	1.438.187.888.419,00	101,81
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	389.769.965.956,00	388.096.246.999,00	336.478.881.000,00	99,57
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	93.491.252.723,91	92.934.950.540,30	95.300.886.270,45	99,40
4	Bantuan Keuangan - LRA	12.288.505.600,00	9.496.768.140,00	10.470.227.867,21	77,28
	Jumlah	1.919.247.094.914,91	1.940.019.721.924,30	1.880.437.883.556,66	101,08

dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari empat jenis pendapatan transfer, hanya satu jenis yang mencapai target penerimaan dan sisanya tidak mencapai target.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA terealisasi sebesar Rp1.449.491.756.245,00 atau 101,81% dari anggaran sebesar Rp1.423.697.370.635,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.15
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA
Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	75.218.243.935,00	71.489.631.880,00	98.676.283.859,00	95,04
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	75.172.690.700,00	125.121.699.707,00	123.579.735.564,00	166,45
3	Dana Alokasi Umum - LRA	933.631.693.000,00	933.631.693.000,00	923.771.804.000,00	100,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	146.378.482.000,00	129.859.099.396,00	118.727.497.293,00	88,71
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	193.296.261.000,00	189.389.632.262,00	173.432.567.703,00	97,98
	Jumlah	1.423.697.370.635,00	1.449.491.756.245,00	1.438.187.888.419,00	101,81

dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari lima pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LRA terdapat dua jenis pendapatan yang mencapai target dan tiga pendapatan yang tidak mencapai target. Penjelasan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LRA sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018. Bagi Hasil Pajak - LRA terealisasi sebesar Rp71.489.631.880,00 atau 95,04% dari target sebesar Rp75.218.243.935,00. Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.62.635.375.000,00 terealisasi sebesar Rp59.874.260.858,00 atau 95,59% dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan sebesar Rp12.582.868.935,00 terealisasi sebesar Rp11.615.371.022,00 atau 92,31%.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Rp59.874.260.858,00 dan Anggaran Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan sebesar Rp11.615.371.022,00.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
Berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017, Anggaran Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA sebesar Rp75.172.690.700,00 dan terealisasi sebesar Rp125.121.699.707,00 atau 166,45%. Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.16
Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	1.146.197.000,00	991.397.969,00	1.941.894.043,00	86,49
2	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	-	-	339.977.366,00	100,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	2.866.948.000,00	4.271.655.371,00	4.317.940.180,00	149,00
4	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	14.996.209.806,00	36.048.236.920,00	31.031.089.976,00	240,38
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	651.535.106,00	701.234.591,00	749.540.727,00	107,63
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	12.673.494.663,00	15.221.406.293,00	12.635.540.053,00	120,10
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	42.657.095.125,00	67.786.861.498,00	72.458.826.457,00	158,91
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	19.148.000,00	19.875.565,00	23.739.152,00	103,80
9	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LRA	162.063.000,00	81.031.500,00	81.187.610,00	50,00
	Jumlah	75.172.690.700,00	125.121.699.707,00	123.579.735.564,00	166,45

dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sembilan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA terdapat delapan jenis pendapatan yang mencapai target dan satu pendapatan yang tidak mencapai target. Penjelasan atas Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp1.146.197.000,00 dan realisasi sebesar Rp991.397.969,00 atau 86,49%. Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) menjadi Rp991.397.969,00.
- b. Berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR) tidak ada alokasi atau nol.
- c. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp2.866.948.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.271.655.371,00 atau 149,00%. Realisasi ini terdiri dari

realisasi kurang bayar Dana bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) sampai dengan tahun 2017 (berdasarkan PMK 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018) sebesar Rp 11,00, dan Realisasi tahun 2018 sebesar Rp4.271.655.360,00

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dana Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) menjadi Rp4.271.655.371,00.

- d. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp14.996.209.806,00 dan realisasi sebesar Rp36.048.236.920,00 atau 240,38%. Realisasi ini terdiri dari realisasi kurang bayar bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sampai dengan tahun 2017 (berdasarkan PMK 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018) sebesar Rp1.697.233.174,00. Dan Realisasi tahun 2018 sebesar Rp34.351.003.746,00.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) menjadi Rp34.351.003.746,00.

- e. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp651.535.106,00 dan realisasi sebesar Rp701.234.591,00 atau 107,63%.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dana Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan menjadi Rp701.234.591,00.

- f. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp12.673.494.663,00 dan realisasi sebesar Rp15.221.406.293,00 atau 120,10%.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi menjadi Rp15.221.406.293,00.

- g. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp42.657.095.125,00 dan realisasi sebesar Rp67.786.861.498,00 atau 158,91%. Realisasi ini terdiri dari realisasi kurang bayar bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sampai dengan tahun 2017 (berdasarkan PMK 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018) sebesar Rp5.666.854.625,00. Dan Realisasi tahun 2018 sebesar Rp15.221.406.293,00.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) menjadi Rp15.221.406.293,00.

- h. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pertambangan Panas Bumi dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp19.148.000,00 dan realisasi sebesar Rp.19.875.565,00 atau 103,80%.

Jumlah realisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian DBH dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi menjadi Rp19.875.565,00.

- i. Penganggaran Dana bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 sebesar Rp162.063.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.031.500,00 atau 50,00%.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA terealisasi sebesar Rp933.631.693.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp933.631.693.000,00.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA terealisasi sebesar Rp129.859.099.396,00 atau 88,71% dari anggaran sebesar Rp146.378.482.000,00. Tidak terealisasinya penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA diantaranya karena daerah tidak dapat mencapai target fisik yang disyaratkan Pemerintah pusat sesuai dengan PMK Nomor 50 diantaranya akibat keterlambatan proses lelang dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta terdapat kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp9.850.000.000,00 tidak dapat dilaksanakan sesuai surat Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520/1472/Distan-Sekrt/2018 tanggal 20Juli 2018.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA terealisasi sebesar Rp189.389.632.262,00 atau 97,98% dari anggaran sebesar Rp193.296.261.000,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.17

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	138.630.923.000,00	140.157.479.000,00	136.014.242.434,00	101,10
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	3.279.000.000,00	2.978.750.000,00	3.486.000.000,00	90,84
3	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi - LRA	-	-	-	100,00
4	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini - LRA	8.517.600.000,00	8.506.800.000,00	6.030.000.000,00	99,87
5	Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	20.881.288.000,00	25.664.972.164,00	19.459.243.669,00	122,91
6	Akreditasi Rumah Sakit - LRA	540.000.000,00	-	-	-
7	Akreditasi Puskesmas - LRA	3.495.000.000,00	-	-	-
8	Jaminan Persalinan - LRA	4.328.362.000,00	-	-	-
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LRA	5.659.740.000,00	5.646.482.400,00	1.162.000.000,00	99,77
10	Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan - LRA	-	-	-	100,00
11	Dana Tunjangan Khusus Guru - LRA	6.106.225.000,00	4.579.669.000,00	5.580.969.600,00	75,00
12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.858.123.000,00	1.855.479.698,00	1.700.112.000,00	99,86
	Jumlah	193.296.261.000,00	189.389.632.262,00	173.432.567.703,00	97,98

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA terealisasi sebesar Rp388.096.246.999,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp389.769.965.956,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA sebagai berikut:

1. Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp35.750.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp35.750.000.000,00.
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD sebesar Rp77.113.440.000,00 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp78.132.468.502,00. Rincian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP terdapat pada lampiran 1.
3. Dana Bantuan Operasional (BOS) SMP sebesar Rp21.812.600.000,00 atau 97,08% dari anggaran sebesar Rp22.467.290.454,00. Rincian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP terdapat pada lampiran 1.
4. Dana Desa terealisasi sebesar Rp253.420.206.999,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp253.420.207.000,00.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah/Provinsi - Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA dari anggaran sebesar Rp93.491.252.723,91 terealisasi sebesar Rp92.934.950.540,30 atau 99,40% yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp67.958.097.759,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp24.976.852.781,30. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.18
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA
Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	18.518.132.150,65	17.071.942.284,65	16.797.063.765,07	92,19
2	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LRA	4.387.336,33	2.242.277,36	2.713.039,18	51,11
3	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	17.735.405.414,85	17.823.927.548,34	12.826.612.337,60	100,50
4	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LRA	2.407.895,47	440.132,91	1.153.858,83	18,28
5	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	33.537.079.077,53	32.795.665.196,99	33.998.565.002,82	97,79
6	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	477.328.849,08	263.880.318,75	232.484.399,38	55,28
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	23.216.512.000,00	24.976.852.781,30	31.442.293.867,57	107,58
	Jumlah	93.491.252.723,91	92.934.950.540,30	95.300.886.270,45	99,40

Pada tabel di atas menggambarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA merupakan Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang terealisasi sebesar 99,40%, Realisasi tersebut merupakan realisasi penerimaan dari pendapatan transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBBKB, PKAA, BBNKAA dan PPPABT, serta Realisasi Pajak Rokok sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 276/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 178/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Alokasi Definif dan Hutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kab/kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 111/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan - LRA

Bantuan Keuangan - LRA merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA yang terealisasi sebesar Rp9.496.768.140,00 atau 77,28% dari anggaran sebesar Rp12.288.505.600,00. Bantuan Keuangan - LRA merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan berupa Bantuan Berobat Gratis dari Provinsi Sumatera Selatan. Rincian transfer Bantuan Berobat Gratis dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 5.1.19
Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke RKUD Tahun Anggaran 2018

No	Bantuan Berobat Gratis	Penyaluran dari Provinsi ke RKUD	
		Tanggal	Nilai
1	Dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel	02/08/2018	3.975.127.160,00
2	Dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel	28/09/2018	1.034.294.400,00
3	Dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel	08/11/2018	2.352.435.584,00
4	Dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel	20/12/2018	1.338.550.696,00
5	Dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel	21/12/2018	796.360.300,00
	Jumlah		9.496.768.140,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp27.215.581,00 atau 3,47% dari anggaran sebesar Rp784.863.000,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dari pemerintah pusat. Pendapatan hibah ini merupakan kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* yang terdapat pada Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Bappeda. Realisasi sebesar Rp27.215.581,00 merupakan proses *Reimbursement* tahap I ke Kementerian PUPR per tanggal 28 November 2018 oleh Dinas PUTR. Sesuai dengan Surat Direktorat Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Nomor : HL.02.02-AJ/500 tanggal 21 November 2018 menyatakan bahwa terhadap permintaan penyaluran hibah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen atau melebihi pagu anggaran yang tersedia, maka akan dilakukan pengembalian, dan setelah dilengkapi dapat diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2019.

5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2018, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai Rp1.629.716.210.553,55 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp117.539.098.114,87 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp1.747.255.308.668,42 yang terdiri dari:

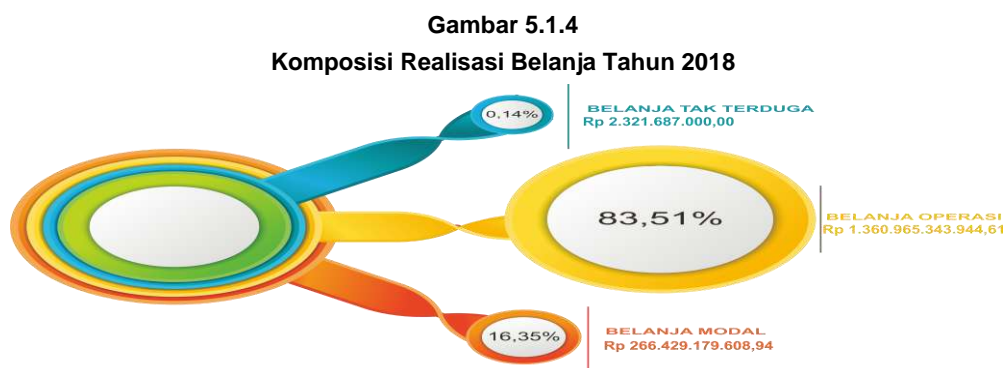
Tabel 5.1.20
Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Operasi	1.419.677.835.124,88	1.360.965.343.944,61	1.325.254.772.910,21	95,86
2	Belanja Modal	285.489.609.049,54	266.429.179.608,94	303.104.686.231,70	93,32
3	Belanja Tidak Terduga	42.087.864.494,00	2.321.687.000,00	-	5,52
	Jumlah	1.747.255.308.668,42	1.629.716.210.553,55	1.628.359.459.141,91	93,27

Berdasarkan tabel realisasi di atas, semua belanja terserap di bawah alokasi anggaran sehingga terdapat efisiensi 6,73% atas penghematan pemakaian dana dari berbagai kegiatan dan non kegiatan. Gambar berikut menunjukkan perbandingan realisasi anggaran dan belanja tahun 2018:



Berdasarkan grafik di atas, belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi, yang kedua untuk Belanja Modal dan yang terakhir Belanja Tidak Terduga. Berikut perbandingan rincian belanja Kabupaten Banyuwasin tahun 2018 terhadap total anggaran belanja kabupaten:



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Operasi memiliki persentase terbesar dari seluruh belanja Kabupaten Banyuasin yaitu sebesar 83,51%, sedangkan Belanja Modal sebesar 16,35%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,14%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp1.360.965.343.944,61 atau 95,86%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp58.712.491.180,27 dari anggaran sebesar Rp1.419.677.835.124,88. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp709.570.714.755,00.
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp534.549.235.600,73.
- 3) Belanja Subsidi sebesar Rp00,00.
- 4) Belanja Hibah sebesar Rp16.762.688.588,88.
- 5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp82.705.000,00.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp709.570.714.755,00 atau lebih rendah sebesar Rp14.801.961.911,70 dari anggaran sebesar Rp724.372.676.666,70. Realisasi belanja pegawai menyerap dana 97,96% dari anggaran yang tersedia dan terdiri dari:

Tabel 5.1.21
Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	488.746.360.503,75	481.262.233.515,00	483.514.842.506,00	98,47
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	165.548.839.287,70	163.156.344.594,00	181.318.871.996,00	98,55
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.442.550.900,00	17.177.500.000,00	4.776.000.000,00	98,48
4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	136.114.900,75	131.258.598,00	47.507.644,00	96,43
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.699.999.999,50	2.195.790.845,00	1.587.764.155,00	81,33
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	60.889.756,00	100,00
7	Belanja Uang Lembur	568.611.000,00	276.582.200,00	727.680.900,00	48,64
8	Belanja Honorarium PNS	41.742.648.075,00	38.021.263.235,00	40.586.455.627,96	91,08
9	Belanja Honorarium Non PNS	2.958.225.000,00	2.948.505.000,00	976.450.000,00	99,67
10	Belanja Uang Rapat	84.897.000,00	60.815.000,00	111.400.000,00	71,63
11	Belanja Pegawai BOS	4.444.430.000,00	4.340.421.768,00	-	97,66
	Jumlah	724.372.676.666,70	709.570.714.755,00	713.707.862.584,96	97,96

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa mencapai sebesar Rp534.549.235.600,73 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp564.569.378.546,64. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	28.523.720.414,66	27.180.369.159,76	42.719.063.216,78	95,29
2	Belanja Bahan/Material	12.239.571.062,13	11.211.516.785,46	15.569.374.679,02	91,60
3	Belanja Jasa Kantor	132.902.481.469,77	125.736.108.540,00	116.163.139.943,99	94,61
4	Belanja Premi Asuransi	58.297.015.677,02	52.980.613.647,10	36.169.178.271,00	90,88
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.953.130.121,00	15.626.666.996,00	15.292.638.943,00	87,04
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.646.797.107,33	14.091.619.169,00	13.762.347.308,00	96,21
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.371.005.100,00	3.167.788.360,00	5.641.077.880,00	93,97
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.589.554.000,00	1.316.510.000,00	6.283.623.000,00	82,82
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.072.618.850,00	2.912.367.361,00	3.594.776.875,00	94,78
10	Belanja Makanan dan Minuman	20.704.897.234,00	19.773.011.883,00	19.822.733.486,00	95,50
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.676.612.140,00	4.645.568.400,00	2.586.994.700,00	99,34
12	Belanja Pakaian Kerja	1.424.705.000,00	1.369.690.770,00	1.919.031.377,00	96,14
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.234.268.000,00	1.205.449.932,00	1.116.207.725,00	97,67
14	Belanja Perjalanan Dinas	143.420.753.580,07	138.515.599.869,00	141.552.812.479,00	96,58
15	Belanja Pemulangan Pegawai	14.250.000,00	-	-	-
16	Belanja Pemeliharaan	32.793.054.989,33	29.423.259.105,41	28.052.650.873,22	89,72
17	Belanja Jasa Konsultansi	3.880.611.034,00	3.364.149.563,00	6.073.398.700,00	86,69
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	100,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.909.521.891,33	5.202.132.170,00	4.163.462.664,00	88,03
20	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	73.600.000,00	73.600.000,00	96.000.000,00	100,00
21	Belanja Barang/Jasa yang akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	3.350.000,00	100,00
22	Beban Pengadaan Barang dan Jasa Non-Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	1.464.967.820,00	1.026.928.899,00	1.596.612.256,00	70,10
23	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	76.376.243.056,00	75.726.284.991,00	98.997.352.402,00	99,15
	Jumlah	564.569.378.546,64	534.549.235.600,73	561.175.826.779,01	94,68

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Untuk Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp116.762.688.588,88 atau 89,37% dari anggaran Rp130.651.179.911,54. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	73.667.789.170,00	73.128.733.683,00	14.000.000.000,00	99,27
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	10.123.611.000,00	8.722.200.000,00	10.418.320.000,00	86,16
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.565.500.000,00	3.565.500.000,00	3.760.000.000,00	100,00
4	Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.294.279.741,54	31.346.254.905,88	21.876.188.546,24	72,40
	Jumlah	130.651.179.911,54	116.762.688.588,88	50.054.508.546,24	89,37

Belanja hibah terbagi menjadi belanja hibah uang yang dikelola oleh SKPKD dan Belanja Hibah barang yang dikelola oleh SKPD.

5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Uang (SKPKD)

Belanja Hibah Uang (SKPKD) disalurkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 142 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 871 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Realisasi Belanja Hibah yang dikelola SKPKD sebesar Rp85.416.433.683,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp87.356.900.170,00. Berikut rincian Belanja Hibah yang dikelola SKPKD :

Tabel 5.1.24
Rincian Belanja Hibah Uang Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	73.667.789.170,00	73.128.733.683,00	14.000.000.000,00	99,27
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	10.123.611.000,00	8.722.200.000,00	10.418.320.000,00	86,16
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.565.500.000,00	3.565.500.000,00	3.760.000.000,00	100,00
	Jumlah	87.356.900.170,00	85.416.433.683,00	28.178.320.000,00	97,78

Pada tabel di atas, terdapat Belanja Hibah Kepada Pemerintah terealisasi sebesar Rp73.128.733.683,00 atau 99,27% dari anggaran sebesar Rp73.667.789.170,00. SP2D Hibah yang diterbitkan sebesar Rp90.567.789.170,00 namun terdapat setoran pengurangan belanja sebesar Rp17.439.055.487,00. Berikut rincian setoran pengurangan belanja hibah kepada pemerintah pusat Tahun Anggaran 2018:

Tabel 5.1.25
Rincian Setoran Pengurangan Belanja Atas Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi (SP2D)	Setoran Pengurangan Belanja	Realisasi
1	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	20.154.105.000,00	20.154.105.000,00	198.309.250,00	19.955.795.750,00
2	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	43.113.684.170,00	57.513.684.170,00	14.401.150.237,00	43.112.533.933,00
3	KODIM MUBA	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00
4	KODIM Banyuasin Karya Bhakti TNI	700.000.000,00	700.000.000,00	-	700.000.000,00
5	Polres Banyuasin	8.500.000.000,00	11.000.000.000,00	2.839.596.000,00	8.160.404.000,00
	Jumlah	73.667.789.170,00	90.567.789.170,00	17.439.055.487,00	73.128.733.683,00

Sedangkan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp8.722.200.000,00 atau 86,16% dari anggaran sebesar Rp10.123.611.000,00 dan Belanja Hibah Kepada Kelompok Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp3.565.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.565.500.000,00. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada beberapa lembaga Kemasyarakatan yang berada di Wilayah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rincian Belanja Hibah SKPKD sebagaimana terdapat pada Lampiran2.

5.1.2.1.3.2 Belanja Barang/Jasa Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (SKPD)

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp31.346.254.905,88 atau 72,40% dari anggaran sebesar Rp43.294.279.741,54. Rincian Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat pada lampiran 3.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial pada Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 871 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin.

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp82.705.000,00 atau 97,76% dari anggaran sebesar Rp84.600.000,00 yang merupakan Bantuan Sosial Barang/Jasa kepada

Anggota/Kelompok Masyarakat dengan Tujuan Penanggulangan Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin.

5.1.2.2 Belanja Modal

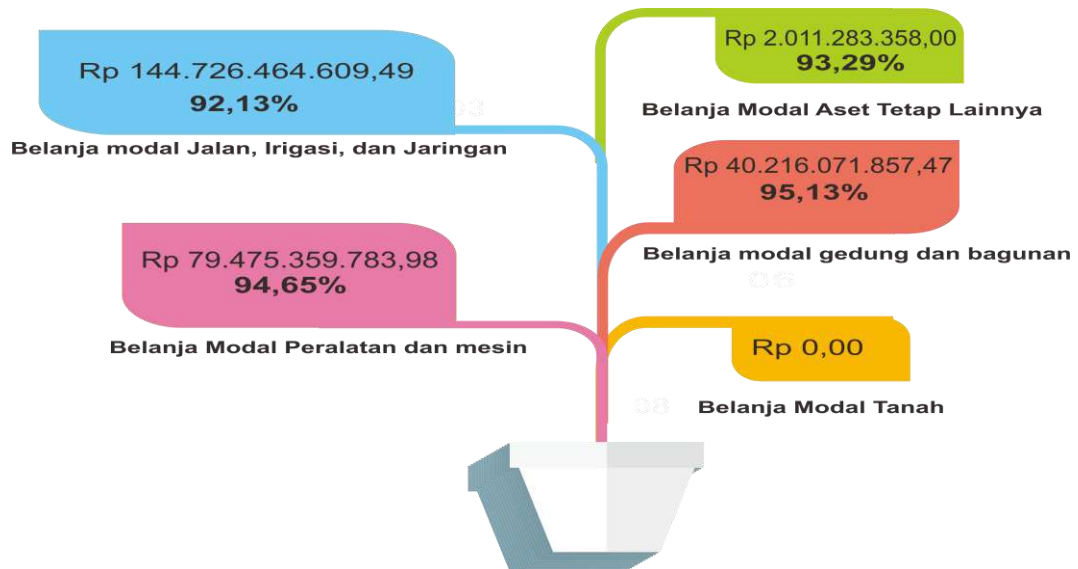
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp266.429.179.608,94 atau 93,32%. Terdapat efisiensi sebesar Rp19.060.429.440,60 dari anggaran sebesar Rp285.489.609.049,54. Rincian Belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.26
Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Modal Tanah	-	-	2.148.143.278,62	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.967.350.864,64	79.475.359.783,98	71.423.307.080,04	94,65
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.275.758.466,09	40.216.071.857,47	64.013.266.719,94	95,13
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.090.562.720,81	144.726.464.609,49	162.445.667.970,09	92,13
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.155.936.998,00	2.011.283.358,00	3.074.301.183,00	93,29
	Jumlah	285.489.609.049,54	266.429.179.608,94	303.104.686.231,70	93,32

Belanja Modal jika dibandingkan dengan total belanja kabupaten telah mencapai 16,35%. Berikut ini disajikan grafik mengenai persentase realisasi masing-masing pos belanja modal terhadap anggaran belanja modal untuk Tahun Anggaran 2018:

Gambar 5.1.5
Persentase Realisasi Belanja Modal Tahun 2018



5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Kabupaten Banyuasin tidak menganggarkan Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2018.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai sebesar Rp79.475.359.783,98 atau 94.65% dari anggaran sebesar Rp83.967.350.864,64. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 5.1.27
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	76.480.000,00	100,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.879.026.000,00	2.744.413.000,00	199.020.000,00	95,32
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	15.381.925.000,00	14.711.686.190,00	7.175.032.169,00	95,64
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	47.962.600,00	-	-	-
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	102.700.000,00	90.265.000,00	134.750.000,00	87,89
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	236.882.250,00	140.650.000,00	1.182.139.953,00	59,38
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	202.540.000,00	202.540.000,00	441.639.000,00	100,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.831.730.335,00	2.447.286.488,00	2.723.226.726,00	86,42
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.589.762.819,64	6.406.899.823,00	32.734.767.531,00	97,23
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.260.806.142,33	11.702.660.498,00	10.439.183.530,00	95,45
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	474.002.500,00	448.323.000,00	570.028.266,00	94,58
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	729.790.500,00	671.549.085,00	994.791.950,00	92,02
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	361.461.470,67	354.138.500,00	48.818.000,00	97,97
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	-	-	8.469.000,00	100,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	11.802.507.736,00	11.737.618.191,38	5.063.849.391,04	99,45
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.288.496.111,00	3.529.487.960,60	1.164.123.402,00	66,74
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	7.482.782.340,00	100,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	73.140.000,00	72.887.000,00	-	99,65
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	-	-	256.214.272,00	100,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	459.100.000,00	100,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	18.000.000,00	17.640.000,00	117.942.000,00	98,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	177.500.000,00	170.294.000,00	150.949.550,00	95,94
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	24.459.117.400,00	23.977.021.048,00	-	98,03
	Jumlah	83.967.350.864,64	79.475.359.783,98	71.423.307.080,04	94,65

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.216.071.857,47 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp42.275.758.466,09. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Tabel 5.1.28
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.145.513.416,09	39.106.934.203,47	63.087.994.969,94	95,05
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,00	149.663.000,00	-	99,78
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	-	-	54.198.750,00	100,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	9.973.200,00	-	24.300.000,00	-
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	652.471.850,00	644.340.000,00	37.178.000,00	98,75
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	317.800.000,00	315.134.654,00	809.595.000,00	99,16
	Jumlah	42.275.758.466,09	40.216.071.857,47	64.013.266.719,94	95,13

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp144.726.464.609,49 atau 92,13% dari anggaran sebesar Rp157.090.562.720,81. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

Tabel 5.1.29
Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	81.353.473.910,94	76.571.049.581,84	101.415.897.579,31	94,12
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	13.732.432.550,00	13.232.214.837,73	8.918.576.964,62	96,36
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	24.200.458.000,00	20.978.998.234,86	4.799.497.000,00	86,69
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	489.577.950,00	365.780.981,35	19.686.705.682,98	74,71
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	6.976.350.000,00	6.760.410.082,68	7.190.240.422,76	96,90
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	21.627.000,00	-	30.479.100,00	-
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.340.144.500,00	11.050.422.452,34	6.822.769.058,43	97,45
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	16.068.918.600,87	13.073.222.269,69	8.830.204.921,00	81,36
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.515.799.250,00	1.443.031.200,00	3.290.073.350,00	95,20
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	20.000.000,00	100,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	5.281.600,00	100,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	5.000.000,00	1.156.000,00	13.200.000,00	23,12
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.386.780.959,00	1.250.178.969,00	1.421.742.291,00	90,15
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	-	-	1.000.000,00	100,00
	Jumlah	157.090.562.720,81	144.726.464.609,49	162.445.667.970,09	92,13

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.011.283.358,00 atau 93,29% dari anggaran sebesar Rp2.155.936.998,00. Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.1.30
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	823.900.000	823.585.000,00	1.729.948.000,00	99,96
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	280.006.123	280.006.123,00	120.002.623,00	100,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	50.000.000	-	-	-
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	25.000.000	23.500.000,00	36.200.000,00	94,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	100.000.000	99.000.000,00	346.500.000,00	99,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	185.575.000	184.529.500,00	-	99,44
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	17.000.000	14.242.500,00	158.994.000,00	83,78
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	674.455.875	586.420.235,00	682.656.560,00	86,95
	Jumlah	2.155.936.998,00	2.011.283.358,00	3.074.301.183,00	93,29

Dari total realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp266.429.179.608,94 tidak seluruhnya diakui sebagai penambah aset tetap tahun 2018. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 136 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwasin, Belanja Modal harus dikecualikan dari aset tetap jika diperuntukkan sebagai hibah ke masyarakat dan atau secara nilai tidak dapat dikapitalisasi.

Rincian mutasi belanja modal yang dihibahkan/pakai habis dan yang tidak dapat dikapitalisir karena kebijakan akuntansi (*asset extracomptable*) dan reklasifikasi antar akun belanja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.31
Daftar Belanja Modal menjadi Aset Tetap Tahun Anggaran 2018

No	JENIS BELANJA MODAL	ANGGARAN BM	REALISASI BM	BELANJA MODAL YG TIDAK MENJADI ASET				TOTAL BM YG TIDAK MENJADI ASET	TOTAL BM MENJADI ASET
				PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	EXTRACOMPTABLE	HUTANG 2017		
1	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	83.967.350.864,64	79.475.359.783,98	-	-	2.549.923.075,56	341.087.110,60	2.891.010.186,16	76.584.349.597,82
3	Gedung dan Bangunan	42.275.758.466,09	40.216.071.857,47	-	348.583.000,00	76.114.778,00	1.974.699.802,11	2.399.397.580,11	37.816.674.277,36
4	Jalan, Jembatan dan Irigasi	157.090.562.720,81	144.726.464.609,49	-	-	-	2.481.301.216,25	2.481.301.216,25	142.245.163.393,24
5	Aset tetap Lainnya	2.155.936.998,00	2.011.283.358,00	92.454.500,00	408.278.535,00	387.768.000,00	280.006.123,00	1.168.507.158,00	842.776.200,00
	JUMLAH	285.489.609.049,54	266.429.179.608,94	92.454.500,00	756.861.535,00	3.013.805.853,56	5.077.094.251,96	8.940.216.140,52	257.488.963.468,42

1. Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten tidak menganggarkan belanja modal tanah.
2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp79.475.359.783,98 yang menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin hanya sebesar Rp76.584.349.597,82, sedangkan mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp2.549.923.075,56 merupakan

barang ekstra komptabel, mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp341.087.110,60 merupakan pembayaran hutang kegiatan tahun 2017 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari realisasi sebesar Rp40.216.071.857,47 yang menjadi aset sebesar Rp37.816.674.277,36. Sedangkan mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp348.583.000,00 merupakan belanja pemeliharaan, mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp76.114.778,00 merupakan barang ekstra komptabel, mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp1.974.699.802,11 merupakan pembayaran hutang kegiatan tahun 2017 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut.
4. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp144.726.464.609,49 yang menjadi aset sebesar Rp142.245.163.393,24, mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp2.481.301.216,25 merupakan pembayaran hutang kegiatan tahun 2017 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut.
5. Belanja aset tetap lainnya dari realisasi sebesar Rp2.011.283.358,00 yang menjadi aset hanya sebesar Rp842.776.200,00, mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp92.454.500,00 karena merupakan belanja persediaan, mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp408.278.535,00 merupakan belanja pemeliharaan, mutasi kurang sebesar Rp387.768.000,00 merupakan barang ekstra komptabel serta mutasi kurang atas belanja modal sebesar Rp280.006.123,00 merupakan pembayaran hutang kegiatan tahun 2017 yang telah diakui asetnya 100% pada tahun tersebut.

Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2018 yang tidak menjadi aset per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.32
Daftar Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap Per SKPD
Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	BELANJA MODAL YG TIDAK MENJADI ASET				TOTAL BM YG TIDAK MENJADI ASET 9=(5+6+7+8)	TOTAL BM MENJADI ASET 10=(4-9)
				PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	EXTRACONTABLE	HUTANG 2016		
1									
1	PENDIDIKAN	52.291.339.260,00	51.330.476.571,00	-	149.663.000,00	1.856.788.794,00	949.140.023,00	2.955.591.817,00	48.374.884.754,00
2	KESEHATAN	30.233.159.271,00	28.352.891.857,45	-	-	473.475.702,56	-	473.475.702,56	27.879.416.154,89
3	RSUD	12.279.915.211,87	8.895.851.879,47	-	-	67.598.879,00	1.650.320.431,41	1.717.919.310,41	8.177.932.569,06
4	PERKUMTAM	55.228.136.842,03	50.920.257.681,88	-	198.920.000,00	-	385.928.101,03	594.848.101,03	50.325.409.580,85
5	PU TATA RUANG	101.121.407.675,00	82.709.728.466,52	-	-	2.500.000,00	953.306.737,50	955.806.737,50	91.753.921.729,02
6	BNPBD KESSANG	104.550.000,00	10.005.684.040,00	-	-	34.485.000,00	-	34.485.000,00	9.971.209.040,00
7	SAT POL PP	192.498.109,00	192.498.109,00	-	-	50.864.778,00	-	50.864.778,00	141.633.331,00
8	DINSOS	61.500.000,00	61.500.000,00	-	-	-	-	-	61.500.000,00
9	DISNAKERTRAN	111.030.511,00	95.833.040,00	-	-	-	-	-	95.833.040,00
10	DISKETPAN	55.868.965,33	55.468.000,00	-	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	52.668.000,00
11	DLH	339.616.174,67	338.592.000,00	-	-	16.050.000,00	-	16.050.000,00	322.542.000,00
12	DUK CAPIL	606.624.950,00	603.908.000,00	-	-	1.962.500,00	-	1.962.500,00	601.945.500,00
13	DPMD	104.550.000,00	104.200.000,00	-	-	900.000,00	-	900.000,00	103.300.000,00
14	DPPKB PPKA	223.416.905,00	204.557.415,00	-	-	15.325.000,00	27.207.415,00	42.532.415,00	162.025.000,00
15	DISHUB	6.758.781.295,00	6.613.683.383,34	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	6.593.683.383,34
16	DISKOMINFO	788.450.000,00	758.016.335,00	-	-	49.923.535,00	-	49.923.535,00	708.092.800,00
17	KO LUM PERINDAG	3.905.326.423,31	3.887.682.648,28	-	-	-	1.101.191.544,02	1.101.191.544,02	2.786.491.104,26
18	DPKD	20.000.000,00	19.956.500,00	-	-	-	-	-	19.956.500,00
19	PERIKANAN	479.271.650,00	280.629.500,00	92.454.500,00	-	134.825.000,00	-	227.279.500,00	53.350.000,00
20	PERTANIAN	36.442.750,00	20.950.000,00	-	-	900.000,00	-	900.000,00	20.050.000,00
21	SETDAH	5.900.117.270,00	5.752.462.503,00	-	-	169.660.200,00	-	169.660.200,00	5.582.802.303,00
22	SET DPRD	1.434.593.586,33	1.305.252.000,00	-	335.460.000,00	-	-	428.705.000,00	876.547.000,00
23	DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	136.600.000,00	123.245.000,00	-	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	119.645.000,00
25	BANYUASIN II	115.750.000,00	112.645.000,00	-	-	3.175.000,00	-	3.175.000,00	109.470.000,00
26	BETUNG	64.900.000,00	64.683.818,00	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	59.283.818,00
27	RANTAU BAYUR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
28	PULAU RIMAU	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	750.000,00	-	750.000,00	17.000.000,00
29	TALANG KELAPA	110.100.000,00	110.028.000,00	-	-	9.240.000,00	-	9.240.000,00	100.788.000,00
30	RAMBUATAN	128.855.000,00	128.780.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.580.000,00
31	TUNGKAL ILIR	7.000.000,00	6.991.818,00	-	-	-	-	-	6.991.818,00
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	14.450.000,00	14.371.681,00	-	-	-	-	-	14.371.681,00
36	MAKARTI JAYA	92.750.000,00	92.750.000,00	-	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00	81.750.000,00
37	MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	51.364.000,00	49.134.000,00	-	17.495.000,00	10.490.000,00	-	27.985.000,00	21.149.000,00
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	14.775.000,00	14.775.000,00	-	-	-	-	-	14.775.000,00
43	SELAT PENGIJUAN	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	13.500.000,00
44	KARANG AGUNG ILIR	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	-	-	-	12.200.000,00
45	INSPEKTORAT	607.200.000,00	554.216.962,00	-	-	-	-	-	554.216.962,00
46	BAPPEDA	172.000.000,00	165.039.000,00	-	-	-	-	-	165.039.000,00
47	BPKAD	1.381.198.200,00	1.350.538.800,00	-	-	32.970.000,00	-	32.970.000,00	1.317.568.800,00
48	BKPSDM	87.650.000,00	83.440.000,00	-	-	-	-	-	83.440.000,00
	JUMLAH	285.489.609.049,54	266.429.179.608,94	92.454.500,00	756.861.535,00	3.013.805.853,56	5.077.094.251,96	8.940.216.140,52	257.488.963.468,42

Rincian lebih lanjut belanja modal Tahun Anggaran 2018 yang menjadi aset tetap per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp2.321.687.000,00 dari anggaran sebesar Rp42.087.864.494,00. Penggunaan Belanja Tidak Terduga merupakan penyetoran kembali sisa dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kesbangpol Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 270/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 04 April 2018 dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 28 Mei 2018.

5.1.3 Transfer

Realisasi belanja transfer tahun 2018 terealisasi sebesar Rp362.324.559.022,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp363.091.207.000,00. Belanja transfer terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Berikut rincian belanja transfer :

Tabel 5.1.33
Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2018	2017	
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	361.823.207.000	361.056.921.213,00	336.118.279.720,00	99,79
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.268.000.000	1.267.637.809,00	1.267.637.809,00	99,97
	Jumlah	363.091.207.000,00	362.324.559.022,00	337.385.917.529,00	99,79

5.1.3.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp361.056.921.213,00 terdiri dari Alokasi Dana Desa (APBD) terealisasi sebesar Rp108.403.000.000,00 dan Bantuan Keuangan kepada Desa/Dana Desa (APBN) terealisasi sebesar Rp252.653.921.213,00 atau 100,00%.

Untuk Alokasi Dana Desa (APBD) dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018, sedangkan Dana Desa (APBN) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian, Tahapan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018.

Transfer Dana Desa dari Pemerintah pusat melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan total Rp253.420.206.999,00 diterima dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp50.684.041.400,00 diterima pada tanggal 05 Mei 2018, tahap kedua sebesar Rp101.368.082.800,00 diterima pada tanggal 23 Juni 2018 dan tahap ketiga sebesar Rp101.368.082.800,00 diterima pada tanggal 23 November 2018, berikut rincian transfer dana desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah serta penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa:

Tabel 5.1.34
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Tahap	Anggaran	Transfer RKUN ke RKUD		Transfer RKUD ke Rekening Desa			
			Jumlah	Tanggal	Jumlah Desa	Realisasi Disalurkan	No SP2D	Tanggal SP2D
		253.420.207.000,00						
1	Tahap I		50.684.041.400,00	05/03/2018	1	231.862.929,00	0661/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	28/03/2018
					1	244.787.763,00	0785/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	05/04/2018
					14	2.294.870.310,00	0819/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	09/04/2018
					24	4.168.144.119,00	0892/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	16/04/2018
					16	2.593.984.594,00	0893/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	16/04/2018
					26	4.425.401.647,00	1069/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	30/04/2018
					19	3.276.552.473,00	1071/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	30/04/2018
					22	3.806.184.848,00	1083/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	02/05/2018
					10	1.774.859.626,00	1134/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	08/05/2018
					29	5.070.106.053,00	1136/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	08/05/2018
					13	2.380.705.952,00	1146/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	08/05/2018
					10	1.942.500.795,00	1177/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	11/05/2018
					17	2.808.864.400,00	1264/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	17/05/2018
					3	501.449.287,00	1265/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	17/05/2018
					36	6.577.561.320,00	1436/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	23/05/2018
					14	2.522.346.786,00	1541/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	30/05/2018
					9	1.758.080.937,00	1543/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	30/05/2018
					3	567.689.618,00	1640/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	30/05/2018
					2	375.548.668,00	1641/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	31/05/2018
					13	2.255.960.460,00	1706/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	05/06/2018
					3	491.762.015,00	1710/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	05/06/2018
					3	614.816.800,00	1780/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	08/06/2018
Jumlah Tahap I					288	50.684.041.400,00		
2	Tahap II		101.368.082.799,00	22/06/2018	285	100.138.449.201,00	1814/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	28/06/2018
					1	527.756.489,00	2606/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	23/08/2018
Jumlah Tahap II					286	100.666.205.690,00		
3	Tahap III		101.368.082.800,00	23/11/2018	278	97.695.991.235,00	4000/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	27/11/2018
					3	1.024.512.916,00	4321/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	10/12/2018
					1	371.318.736,00	4322/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	10/12/2018
					1	315.888.914,00	4324/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	10/12/2018
					1	408.110.717,00	4466/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	17/12/2018
					1	467.011.683,00	4481/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	19/12/2018
					1	318.962.812,00	4484/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	19/12/2018
					1	385.988.196,00	4590/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	21/12/2018
					1	315.888.914,00	4595/LS/4.04.01.02.00/5.1/DDS/2018	21/12/2018
Jumlah Tahap III					288	101.303.674.123,00		
TOTAL			253.420.206.999,00			252.653.921.213,00		

dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat sisa sebesar Rp766.285.786,00 antara dana desa yang disalurkan RKUN ke RKUD dengan dana desa yang disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa, sisa dana tersebut merupakan dana desa milik Desa Mekar Mukti Kecamatan Muara Telang dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Padang yang sampai dengan tahap penyaluran terakhir masih belum menyampaikan laporan tahap sebelumnya. Adapun rincian penggunaan dana desa oleh pemerintah desa sesuai dengan bidang penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35
Rincian Realisasi Dana Desa Per Kecamatan
Tahun Anggaran 2018

No	KECAMATAN	Anggaran 2018	Penyaluran	Realisasi					SISA DANA	
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tidak Terduga		Jumlah
				BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05		
1	KECAMATAN BANYUASIN I	11.173.803.334,00	11.173.803.334,00	-	9.164.762.469,00	-	1.663.667.388,00	-	10.828.429.857,00	345.373.477,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	15.752.994.529,00	15.752.994.529,00	-	11.812.938.272,00	-	3.756.230.929,00	-	15.569.169.201,00	183.825.328,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	15.474.743.590,00	15.474.743.590,00	-	12.084.776.867,00	-	3.177.928.495,00	-	15.262.705.362,00	212.038.228,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	23.374.228.621,00	23.374.228.621,00	-	18.633.911.843,00	-	4.532.811.026,00	-	23.166.722.869,00	207.505.752,00
5	KECAMATAN BETUNG	8.242.626.786,00	8.242.626.786,00	-	6.223.783.883,00	-	1.832.433.452,00	-	8.056.217.335,00	186.409.451,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	16.809.009.993,00	16.809.009.993,00	-	13.141.139.267,00	-	3.532.640.656,00	-	16.673.779.923,00	135.230.070,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	14.124.262.873,00	13.738.274.677,00	-	10.406.565.876,00	-	2.622.536.963,00	-	13.029.102.839,00	709.171.838,00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	15.544.047.254,00	15.163.749.663,00	-	11.374.709.408,00	-	3.190.763.320,00	-	14.565.472.728,00	598.276.935,00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	9.272.581.410,00	9.272.581.410,00	-	7.465.010.292,00	-	1.802.389.976,00	-	9.267.400.268,00	5.181.142,00
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	5.322.536.197,00	5.322.536.197,00	-	3.767.005.605,00	-	1.054.032.050,00	-	4.821.037.655,00	501.498.542,00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	19.691.815.533,00	19.691.815.533,00	-	15.378.591.069,00	-	3.951.109.392,00	-	19.329.700.461,00	362.115.072,00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	14.119.105.340,00	14.119.105.340,00	-	11.814.565.827,00	-	1.613.667.441,00	-	13.428.233.268,00	690.872.072,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	19.036.891.473,00	19.036.891.473,00	-	14.301.330.758,00	-	3.613.235.099,00	-	17.914.565.857,00	1.122.325.616,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	13.528.329.642,00	13.528.329.642,00	-	11.118.309.233,00	-	2.402.646.127,00	-	13.520.955.360,00	7.374.282,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	11.364.716.427,00	11.364.716.427,00	-	8.475.761.657,00	-	2.874.245.577,00	-	11.350.007.234,00	14.709.193,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	8.468.029.045,00	8.468.029.045,00	-	6.621.949.837,00	-	1.748.258.606,00	-	8.370.208.443,00	97.820.602,00
17	KECAMATAN SEMBAWA	8.465.230.974,00	8.465.230.974,00	-	6.174.874.476,00	-	2.198.443.038,00	-	8.373.317.514,00	91.913.460,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TLG	10.340.975.230,00	10.340.975.230,00	-	8.115.500.137,00	-	1.937.121.173,00	-	10.052.621.310,00	288.353.920,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	13.314.278.749,00	13.314.278.749,00	-	10.397.261.684,00	-	2.660.311.355,00	-	13.057.573.039,00	256.705.710,00
	Jumlah	253.420.207.000,00	252.653.921.213,00	-	196.472.748.460,00	-	50.164.472.063,00	-	246.637.220.523,00	6.016.700.690,00

pada tabel diatas dapat dilihat bahwa total realisasi belanja dana desa sebesar Rp246.637.220.523,00 dari anggaran sebesar Rp253.420.207.000,00. Saldo akhir Dana Desa sebesar Rp6.016.700.690,00 didapat dari penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sebesar Rp252.653.921.213,00 dikurangi realisasi sebesar Rp246.637.220.523,00. Laporan Penggunaan Dana Desa per Desa terdapat pada lampiran 5.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kepada Partai Politik Dalam Kabupaten Banyuasin, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.267.637.809,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp1.268.000.000,00. Tata cara pemberian bantuan transfer keuangan lainnya berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 24 Oktober 2014. berikut rincian bantuan kepada masing-masing partai politik tahun 2018:

Tabel 5.1.36
Rincian Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2018

No	Nama Parpol	Realisasi
1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	243.416.845,00
2	Partai Demokrasi Indonesia (PDIP)	169.906.752,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	142.902.672,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	115.050.153,00
5	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	105.832.882,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	99.544.094,00
7	Partai Demokrat	99.157.887,00
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	96.773.743,00
9	Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	86.042.054,00
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	66.950.656,00
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	42.060.071,00
Jumlah		1.267.637.809,00

Perolehan suara pemilu legislatif tahun 2014-2019 ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Parpol.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasisebesar Rp73.079.556.830,68 atau 98,70% dari anggaran Rp74.042.914.494,39. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp74.042.914.494,37 dikurangi dengan koreksi SiLPA sebesar Rp963.357.663,71.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin kepada Bank Sumsel Babel berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 408/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 31Mei 2018 Tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Pada APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp156.687.797.250,18 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp74.042.914.494,39.

5.2.2 Koreksi Kesalahan Saldo Anggaran Lebih Awal

Koreksi kurang saldo anggaran lebih awal sebesar Rp963.357.663,71 dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.1.37
Rincian Koreksi SAL Awal

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi atas Pengakuan Pendapatan LRA atas dana PSG Tahun 2017	71.644.209,09
2	Koreksi atas Pengakuan Jasa Giro JKN Tahun 2016	3.660.311,00
3	Koreksi atas pengakuan pelunasan hutang provinsi atas dana Jamsoskes yang dipotong langsung dari DBH Provinsi	(1.051.172.025,80)
4	Koreksi atas kurang catat pendapatan PBB Tahun 2016	908.842,00
5	Koreksi atas sisa pengembalian dana BOS Tahun 2016 dan 2017 yang disetor ke Kas Daerah	11.601.000,00
	Jumlah	(963.357.663,71)

5.2.3 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar Rp73.079.556.830,68 merupakan selisih dari Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp74.042.914.494,39 dikurangi dengan koreksi kesalahan SAL Awal sebesar Rp963.357.663,71.

5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp156.687.797.250,18 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Surplus/Defisit Anggaran	: Rp 88.608.240.419,50
- Pembiayaan Netto	: <u>Rp 68.079.556.830,68</u>
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	: Rp 156.687.797.250,18

5.2.5 Lain-lain

Tidak terdapat saldo koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018.

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Laporan Operasional.

5.3.1 Pendapatan - LO

Jumlah Pendapatan - LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.856.056.073.931,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.1
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan – LO 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan Asli Daerah	153.710.759.740,35	136.225.799.397,10	17.484.960.343,25
Pendapatan Transfer	1.681.635.703.049,97	1.582.040.461.666,13	99.595.241.383,84
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	20.709.611.141,01	42.420.114.633,69	(21.710.503.492,68)
Jumlah	1.856.056.073.931,33	1.760.686.375.696,92	95.369.698.234,41

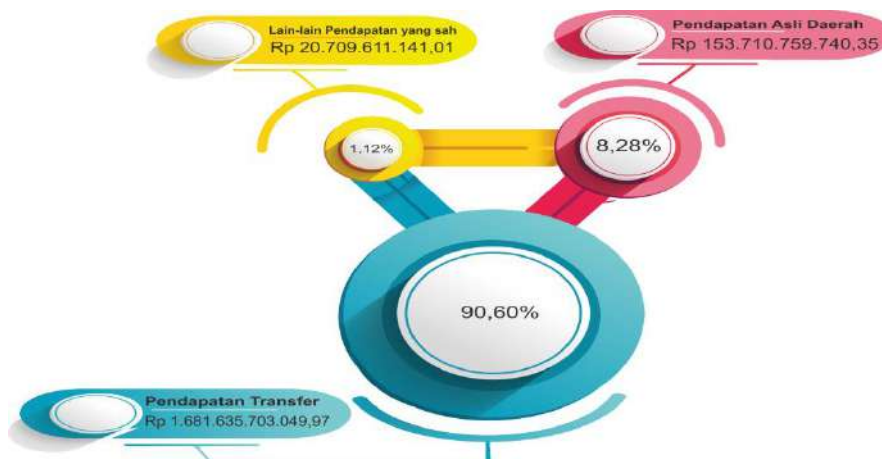
Jumlah Pendapatan – LO Kabupaten Banyuasin untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.856.056.073.931,33 jika dibandingkan dengan Pendapatan – LRA tahun 2018 sebesar Rp 2.080.649.009.995,05 terdapat perbedaan sebesar Rp 224.592.936.063,72. Rincian Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA per Kelompok Pendapatan Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel. 5.3.2
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan – LO dan LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pendapatan Asli Daerah	153.710.759.740,35	140.602.072.489,75	13.108.687.250,60
Pendapatan Transfer	1.681.635.703.049,97	1.940.019.721.924,30	(258.384.018.874,33)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	20.709.611.141,01	27.215.581,00	20.682.395.560,01
Jumlah	1.856.056.073.931,33	2.080.649.009.995,05	(224.592.936.063,72)

Gambar 5.3.1
Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2018



Sedangkan realisasi Pendapatan – LO per masing-masing SKPD untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.3.3
Realisasi Pendapatan – LO per SKPD 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	5.787.554.375,00	-	5.787.554.375,00
Dinas Kesehatan	29.795.648.388,56	23.690.094.967,00	6.105.553.421,56
Rumah Sakit Umum Daerah	8.080.817.043,79	5.794.996.389,00	2.285.820.654,79
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.953.139.629,00	-	1.953.139.629,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan	40.953.820,00	40.953.820,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	1.078.053.100,00	1.078.053.100,00	-
Dinas Perhubungan	1.077.629.096,00	1.069.973.096,00	7.656.000,00
Dinas Komunikasi dan Informasi	771.648.362,00	771.648.362,00	-
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.602.218.000,01	1.961.950.000,00	9.640.268.000,01
Dinas Perikanan	495.143.360,00	495.143.360,00	-
Sekretariat Daerah	115.690.000,00	115.690.000,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	2.655.688.500,00	2.655.688.500,00	-
Kecamatan Talang Kelapa	3.325.000,00	3.325.000,00	-
Kecamatan Rambutan	1.050.000,00	1.050.000,00	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	113.746.372.491,56	99.388.050.127,75	14.358.322.363,81
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.678.851.142.765,41	1.943.582.393.273,30	(264.731.250.507,89)
Jumlah	1.856.056.073.931,33	2.080.649.009.995,05	(224.592.936.063,72)

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp153.710.759.740,35 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.3.4
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Pajak Daerah	96.914.732.064,73	83.419.396.116,03	13.495.335.948,70
Retribusi Daerah	7.751.152.778,00	8.055.432.737,00	(304.279.959,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	5.411.498.182,71	4.432.071.561,12	979.426.621,59
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43.633.376.714,91	40.318.898.982,95	3.314.477.731,96
Jumlah	153.710.759.740,35	136.225.799.397,10	17.484.960.343,25

Jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah – LRA 2018 sebesar Rp140.602.072.489,75 terdapat perbedaan sebesar Rp13.108.687.250,60. Perbedaan antara Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Asli Daerah – LRA tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO dan LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pajak Daerah	96.914.732.064,73	82.349.366.395,92	14.565.365.668,81
Retribusi Daerah	7.751.152.778,00	7.751.152.778,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	5.411.498.182,71	4.432.071.561,12	979.426.621,59
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43.633.376.714,91	46.069.481.754,71	(2.436.105.039,80)
Jumlah	153.710.759.740,35	140.602.072.489,75	13.108.687.250,60

Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Banyuwasin tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.3.2 menunjukkan bahwa Pajak Daerah mendominasi komposisi jenis Pendapatan Asli Daerah dengan persentase sebesar 63,05% dari total Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2018.

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh BPKAD Kabupaten Banyuasin. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp96.914.732.064,73 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.6
Pajak Daerah – LO Tahun 2018 dan 2017

Uraian	(dalam rupiah)		
	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Pajak Hotel	3.129.715.179,08	673.233.814,80	2.456.481.364,28
Pajak Restoran	7.926.205.539,40	4.375.999.952,91	3.550.205.586,49
Pajak Hiburan	2.931.860.010,40	1.914.199.536,08	1.017.660.474,32
Pajak Reklame	724.769.115,12	605.313.707,00	119.455.408,12
Pajak Penerangan Jalan	28.611.124.975,78	21.204.118.020,38	7.407.006.955,40
Pajak Parkir	50.785.333,00	-	50.785.333,00
Pajak Air Tanah	111.387.672,45	88.904.567,95	22.483.104,50
Pajak Sarang Burung Walet	25.970.000,00	22.770.000,00	3.200.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	463.067.187,50	114.995.608,91	348.071.578,59
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	23.655.995.715,00	22.857.985.404,00	798.010.311,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.283.851.337,00	31.561.875.504,00	(2.278.024.167,00)
Jumlah	96.914.732.064,73	83.419.396.116,03	13.495.335.948,70

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun 2018 sebesar Rp82.349.366.395,92 terdapat perbedaan sebesar Rp14.565.365.668,81. Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Pajak Daerah – LO dan Pajak Daerah – LRA Tahun 2018

No.	Uraian	(dalam rupiah)		
		LO	LRA	Perbedaan
1	Pajak Hotel	3.129.715.179,08	3.129.315.199,08	399.980,00
2	Pajak Restoran	7.926.205.539,40	7.929.106.589,40	(2.901.050,00)
3	Pajak Hiburan	2.931.860.010,40	2.929.860.010,30	2.000.000,10
4	Pajak Reklame	724.769.115,12	742.861.315,12	(18.092.200,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	28.611.124.975,78	25.390.406.888,11	3.220.718.087,67
6	Pajak Parkir	50.785.333,00	-	50.785.333,00
7	Pajak Air Tanah	111.387.672,45	112.503.104,95	(1.115.432,50)
8	Pajak Sarang Burung Walet	25.970.000,00	25.970.000,00	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	463.067.187,50	463.067.206,96	(19,46)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	23.655.995.715,00	12.342.424.745,00	11.313.570.970,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.283.851.337,00	29.283.851.337,00	-
	Jumlah	96.914.732.064,73	82.349.366.395,92	14.565.365.668,81

Perbedaan sebesar Rp 14.565.365.668,81 sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan atas Pajak Hotel LO dan LRA sebesar Rp399.980,00 merupakan pembayaran Piutang Pajak Hotel bulan November dan Desember tahun 2017 dari Penginapan Tetesan Embun dan bulan Agustus dari Opi Indah.
2. Perbedaan atas Pajak Restoran LO dan LRA sebesar Rp2.901.050,00 merupakan penurunan nilai piutang tahun lalu dibandingkan piutang berjalan sebesar Rp5.601.570,00.
3. Perbedaan atas Pajak Hiburan sebesar Rp2.000.000,10 merupakan selisih pembayaran Pajak tahun lalu dan tahun berjalan.
4. Perbedaan atas Pajak Reklame sebesar Rp18.092.200,00 merupakan perhitungan selisih pendapatan piutang pajak reklame tahun lalu sebesar Rp27.292.500,00 dan piutang tahun berjalan sebesar Rp25.410.300,00 atau sebesar Rp1.882.200,00 dan koreksi atas pencatatan piutang reklame tahun lalu sebesar Rp16.210.000,00.
5. Perbedaan atas Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp3.220.718.087,67 merupakan perhitungan selisih pendapatan piutang pajak Penerangan Jalan tahun lalu sebesar Rp94.013.716,00 dan piutang tahun berjalan sebesar Rp3.314.731.803,67.
6. Perbedaan atas Pajak Parkir sebesar Rp50.785.333,00 merupakan tagihan 2018 yang belum dibayar.
7. Perbedaan atas Pajak Air Tanah LO dan LRA sebesar Rp1.115.432,50 merupakan perhitungan selisih pendapatan piutang tahun lalu sebesar Rp1.159.202,50 dan piutang tahun berjalan sebesar Rp43.770,00.
8. Perbedaan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO dan LRA sebesar Rp19,46 merupakan penurunan nilai piutang tahun lalu dibandingkan dengan tahun berjalan.
9. Perbedaan atas Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan LO dan LRA sebesar Rp11.313.570.970,00 merupakan perhitungan selisih Pendapatan Piutang tahun lalu sebesar Rp68.592.180.779,00 dan Piutang tahun berjalan sebesar Rp79.916.558.309,00 dan terdapat penyesuaian atas Piutang PBB tahun lalu sebesar Rp10.806.560,00 .

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO dikelola oleh 14 SKPD. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp7.751.152.778,00. Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.8
Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Jasa Umum - LO	3.180.549.820,00	3.045.542.080,00	135.007.740,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	1.907.844.458,00	1.100.419.724,00	807.424.734,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	2.662.758.500,00	3.909.470.933,00	(1.246.712.433,00)
Jumlah	7.751.152.778,00	8.055.432.737,00	(304.279.959,00)

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun 2018, tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.9
Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Jasa Umum - LO	3.180.549.820,00	3.180.549.820,00	-
Retribusi Jasa Usaha - LO	1.907.844.458,00	1.907.844.458,00	-
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	2.662.758.500,00	2.662.758.500,00	-
Jumlah	7.751.152.778,00	7.751.152.778,00	-

Pendapatan Retribusi Daerah - LO per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.10
Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Perbedaan
Dinas Kesehatan	30.084.000,00	22.070.000,00	8.014.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam	40.953.820,00	37.952.080,00	3.001.740,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.074.200.000,00	835.269.000,00	238.931.000,00
Dinas Perhubungan	1.066.377.096,00	1.104.115.724,00	(37.738.628,00)
Dinas Komunikasi dan Informasi	771.648.362,00	-	771.648.362,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil	1.961.950.000,00	1.947.139.000,00	14.811.000,00
Dinas Perikanan	30.186.000,00	30.121.000,00	65.000,00
Sekretariat Daerah	115.690.000,00	174.850.000,00	(59.160.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	2.655.688.500,00	3.902.340.933,00	(1.246.652.433,00)
Kecamatan Talang Kelapa	3.325.000,00	1.400.000,00	1.925.000,00
Kecamatan Rambutan	1.050.000,00	175.000,00	875.000,00
Jumlah	7.751.152.778,00	8.055.432.737,00	(304.279.959,00)

Sedangkan perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.11
Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA per SKPD Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dinas Kesehatan	30.084.000,00	30.084.000,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran	40.953.820,00	40.953.820,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	1.074.200.000,00	1.074.200.000,00	-
Dinas Perhubungan	1.066.377.096,00	1.066.377.096,00	-
Dinas Komunikasi dan Informasi	771.648.362,00	771.648.362,00	-
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	1.961.950.000,00	1.961.950.000,00	-
Dinas Perikanan	30.186.000,00	30.186.000,00	-
Sekretariat Daerah	115.690.000,00	115.690.000,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.655.688.500,00	2.655.688.500,00	-
Kecamatan Talang Kelapa	3.325.000,00	3.325.000,00	-
Kecamatan Rambutan	1.050.000,00	1.050.000,00	-
Jumlah	7.751.152.778,00	7.751.152.778,00	-

5.3.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum terdiri dari 10 jenis Retribusi dimana Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2018 sebesar Rp3.180.549.820,00. Jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum – tahun sebelumnya sebesar Rp3.045.542.080,00 terdapat kenaikan sebesar Rp135.007.740,00.

Tabel 5.3.12
Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	30.084.000,00	22.070.000,00	8.014.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.167.553.000,00	1.059.333.000,00	108.220.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	127.247.000,00	127.805.000,00	(558.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran - LO	797.973.000,00	772.623.000,00	25.350.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar Los - LO	433.009.000,00	447.347.000,00	(14.338.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar Kios - LO	284.410.000,00	281.075.000,00	3.335.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	239.040.000,00	225.497.000,00	13.543.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	40.953.820,00	37.952.080,00	3.001.740,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	44.390.000,00	39.010.000,00	5.380.000,00
Retribusi Bea Balik Nama - LO	15.890.000,00	32.830.000,00	(16.940.000,00)
Jumlah	3.180.549.820,00	3.045.542.080,00	135.007.740,00

Jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum – LRA sampai dengan 31 Desember 2018 tidak terdapat perbedaan, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.13
Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO dan LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	30.084.000,00	30.084.000,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.167.553.000,00	1.167.553.000,00	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	127.247.000,00	127.247.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran - LO	797.973.000,00	797.973.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pasar Los - LO	433.009.000,00	433.009.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pasar Kios - LO	284.410.000,00	284.410.000,00	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	239.040.000,00	239.040.000,00	-
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	40.953.820,00	40.953.820,00	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	44.390.000,00	44.390.000,00	-
Retribusi Bea Balik Nama - LO	15.890.000,00	15.890.000,00	-
Jumlah	3.180.549.820,00	3.180.549.820,00	-

5.3.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha – LO sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebesar Rp1.907.844.458,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun sebelumnya sebesar Rp1.100.419.724,00 terdapat kenaikan sebesar Rp807.424.734,00.

Tabel 5.3.14
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	771.648.362,00	-	771.648.362,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium - LO	292.925.000,00	150.190.000,00	142.735.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan - LO	21.700.000,00	25.200.000,00	(3.500.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan - LO	18.000.000,00	26.350.000,00	(8.350.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	85.990.000,00	134.900.000,00	(48.910.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	687.395.096,00	733.658.724,00	(46.263.628,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	30.186.000,00	30.121.000,00	65.000,00
Jumlah	1.907.844.458,00	1.100.419.724,00	807.424.734,00

Tidak terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.3.15
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO dan LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	LO	LRA	PERBEDAAN
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	771.648.362,00	771.648.362,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium - LO	292.925.000,00	292.925.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang - LO	21.700.000,00	21.700.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan - LO	18.000.000,00	18.000.000,00	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa - LO	85.990.000,00	85.990.000,00	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	687.395.096,00	687.395.096,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	30.186.000,00	30.186.000,00	-
Jumlah	1.907.844.458,00	1.907.844.458,00	-

5.3.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.662.758.500,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun sebelumnya sebesar Rp3.909.470.933,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.246.712.433,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.16
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Perbedaan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	2.660.063.500,00	2.881.600.398,00	(221.536.898,00)
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha Orang Pribadi - LO	-	98.934.500,00	(98.934.500,00)
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha Badan - LO	-	923.381.035,00	(923.381.035,00)
Retribusi Izin Trayek - LO	2.695.000,00	5.555.000,00	(2.860.000,00)
Jumlah	2.662.758.500,00	3.909.470.933,00	(1.246.712.433,00)

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LRA s.d tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat perbedaan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.17
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO dan LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	2.660.063.500,00	2.660.063.500,00	-
Retribusi Izin Trayek - LO	2.695.000,00	2.695.000,00	-
Jumlah	2.662.758.500,00	2.662.758.500,00	-

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Daerah – LO sebesar Rp5.411.498.182,71. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Daerah Tahun sebelumnya sebesar Rp4.432.071.561,12 terdapat kenaikan sebesar Rp979.426.621,59.

5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp43.633.376.714,91. Jika dibandingkan dengan tahun lalu terdapat kenaikan sebesar Rp3.314.477.731,96 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.18
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	273.067.874,00	1.342.000,00	271.725.874,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.447.187.479,00	3.673.568.908,00	(1.226.381.429,00)
Pendapatan Bunga - LO	4.462.344.746,43	5.225.380.243,39	(763.035.496,96)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	325.261.755,51	21.486.224,00	303.775.531,51
Pendapatan Denda Pajak - LO	243.344.464,40	230.891.694,75	12.452.769,65
Pendapatan Denda Retribusi - LO	7.449.100,00	2.011.000,00	5.438.100,00
Pendapatan dari Pengembalian -LO	616.998.501,26	640.432.625,22	(23.434.123,96)
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	48.447.393,00	258.480.060,00	(210.032.667,00)
Pendapatan BLUD - LO	8.080.817.043,79	7.177.362.187,00	903.454.856,79
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	3.468.447.390,52	864.653.567,59	2.603.793.822,93
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	23.660.010.967,00	22.223.290.473,00	1.436.720.494,00
Jumlah	43.633.376.714,91	40.318.898.982,95	3.314.477.731,96

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA tahun 2018 terdapat selisih sebesar Rp2.436.105.039,80 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.19
Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan LRA Tahun 2018
(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	273.067.874,00	273.067.874,00	-
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.447.187.479,00	2.447.187.479,00	-
Pendapatan Bunga Deposito - LO	4.462.344.746,43	4.437.068.172,08	25.276.574,35
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	325.261.755,51	325.261.755,51	-
Pendapatan Denda Pajak - LO	243.344.464,40	243.344.464,40	-
Pendapatan Denda Retribusi - LO	7.449.100,00	7.449.100,00	-
Pendapatan dari Pengembalian -LO	616.998.501,26	616.998.501,26	-
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	48.447.393,00	259.659.385,00	(211.211.992,00)
Pendapatan BLUD - LO	8.080.817.043,79	5.794.996.389,00	2.285.820.654,79
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	3.468.447.390,52	8.004.437.667,46	(4.535.990.276,94)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	23.660.010.967,00	23.660.010.967,00	-
Jumlah	43.633.376.714,91	46.069.481.754,71	(2.436.105.039,80)

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan LRA sebesar Rp2.436.105.039,80 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan sebesar Rp 25.276.574,35 pada Pendapatan Bunga Deposito adalah merupakan selisih kenaikan nilai piutang bunga deposito tahun 2017 dan tahun 2018.
2. Perbedaan atas Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO dan Penerimaan Angsuran Cicilan LRA sebesar Rp211.211.992,00 merupakan pelunasan piutang tagihan angsuran kendaraan sebesar Rp197.196.385,00 dan angsuran TGR sebesar Rp14.011.607,00 serta koreksi atas piutang dewan Rp4.000,00.
3. Perbedaan atas Pendapatan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp2.285.820.654,79 merupakan selisih pembayaran piutang tahun lalu dengan piutang tahun 2018 Rp61.852.300,00 dan penerimaan dana yang bersumber dari Jamsoskes sebesar Rp2.223.968.354,79.

4. Perbedaan atas Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA sebesar Rp4.535.990.276,94 merupakan penyesuaian atas penerimaan jaminan kesungguhan penambangan yang penanggungjawabnya telah berpindah ke Provinsi dan dicatat sebagai penambah nilai hutang sebesar Rp3.535.455.768,00 dan selisih penambahan dan pengurangan nilai piutang SKPP dan Taspen sebesar Rp67.118.212,00 dan penerimaan pembayaran atas kurang volum pekerjaan fisik sebesar Rp933.416.296,94.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO per SKPD sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.20
Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO per SKPD Tahun 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

SKPD	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	52.571.394,00	(52.571.394,00)
Dinas Kesehatan	23.660.010.967,00	22.223.290.473,00	1.436.720.494,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.080.817.043,79	7.177.362.187,00	903.454.856,79
Dinas Lingkungan Hidup	3.853.100,00	-	3.853.100,00
Dinas Perhubungan	3.596.000,00	2.011.000,00	1.585.000,00
Dinas Komunikasi dan Informasi	-	14.365.969,00	(14.365.969,00)
Dinas Perikanan	464.957.360,00	511.383.800,00	(46.426.440,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.420.142.244,12	10.337.914.159,95	1.082.228.084,17
Jumlah	43.633.376.714,91	40.318.898.982,95	3.314.477.731,96

Sedangkan perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan LRA per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.21
Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan LRA per SKPD Tahun 2018
(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dinas Kesehatan	23.660.010.967,00	23.660.010.967,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah	8.080.817.043,79	5.794.996.389,00	2.285.820.654,79
Dinas Lingkungan Hidup	3.853.100,00	3.853.100,00	-
Dinas Perhubungan	3.596.000,00	3.596.000,00	-
Dinas Perikanan	464.957.360,00	464.957.360,00	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.420.142.244,12	12.606.612.170,71	(1.186.469.926,59)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	-	3.535.455.768,00	(3.535.455.768,00)
Jumlah	43.633.376.714,91	46.069.481.754,71	(2.436.105.039,80)

5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Jumlah Pendapatan Transfer – LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.681.635.703.049,97 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LO tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp99.595.241.383,84 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.22
Pendapatan Transfer – LO tahun 2018 dan 2017

Uraian	2018	2017	(dalam rupiah)
			Kenaikan / Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.442.127.668.435,00	1.382.895.659.479,00	59.232.008.956,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	134.676.040.000,00	106.472.960.000,00	28.203.080.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	104.831.994.614,97	92.671.842.187,13	12.160.152.427,84
Jumlah	1.681.635.703.049,97	1.582.040.461.666,13	99.595.241.383,84

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp1.940.019.721.924,30 terdapat perbedaan sebesar Rp258.384.018.874,33. Berikut perbandingan Pendapatan Transfer – LO dan Pendapatan Transfer – LRA sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.23
Pendapatan Transfer – LO dan LRA tahun 2018

Uraian	LO	LRA	(dalam rupiah)
			Perbedaan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.442.127.668.435,00	1.449.491.756.245,00	(7.364.087.810,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	134.676.040.000,00	388.096.246.999,00	(253.420.206.999,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	104.831.994.614,97	102.431.718.680,30	2.400.275.934,67
Jumlah	1.681.635.703.049,97	1.940.019.721.924,30	(258.384.018.874,33)

5.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak – LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LO, Dana Alokasi Umum (DAU) – LO, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO. Jumlah Transfer Pemerintah Pusat untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.442.127.668.435,00. Perbandingan Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.24

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan
Dana Bagi Hasil Pajak	71.489.631.880,00	78.551.145.365,00	(7.061.513.485,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	59.874.260.858,00	67.898.240.150,00	(8.023.979.292,00)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	11.615.371.022,00	10.652.905.215,00	962.465.807,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	117.757.611.897,00	88.412.645.118,00	29.344.966.779,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	991.397.969,00	1.519.833.832,00	(528.435.863,00)
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO		339.977.366,00	(339.977.366,00)
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	4.271.655.360,00	4.187.081.500,00	84.573.860,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	34.351.003.746,00	30.914.914.929,00	3.436.088.817,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO			-
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	701.234.591,00	749.540.727,00	(48.306.136,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	15.221.406.293,00	12.306.599.200,00	2.914.807.093,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	62.120.006.873,00	38.294.258.800,00	23.825.748.073,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	19.875.565,00	19.353.264,00	522.301,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LO	81.031.500,00	81.085.500,00	(54.000,00)
Dana Alokasi Umum	933.631.693.000,00	923.771.804.000,00	9.859.889.000,00
Dana Alokasi Umum - LO	933.631.693.000,00	923.771.804.000,00	9.859.889.000,00
Dana Alokasi Khusus	319.248.731.658,00	292.160.064.996,00	27.088.666.662,00
Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	129.859.099.396,00	118.727.497.293,00	11.131.602.103,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	140.157.479.000,00	136.014.242.434,00	4.143.236.566,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	2.978.750.000,00	3.486.000.000,00	(507.250.000,00)
Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini - LO	8.506.800.000,00	6.030.000.000,00	2.476.800.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	25.664.972.164,00	19.459.243.669,00	6.205.728.495,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LO	5.646.482.400,00	1.162.000.000,00	4.484.482.400,00
Dana Tunjangan Khusus Guru - LO	4.579.669.000,00	5.580.969.600,00	(1.001.300.600,00)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.855.479.698,00	1.700.112.000,00	155.367.698,00
	1.442.127.668.435,00	1.382.895.659.479,00	59.232.008.956,00

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA 2018 sebesar Rp1.449.491.756.245,00 terdapat perbedaan sebesar Rp7.364.087.810,00. Berikut tabel yang menggambarkan perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dan LRA tahun 2018.

Tabel 5.3.25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dan LRA

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dana Bagi Hasil Pajak	71.489.631.880,00	71.489.631.880,00	-
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	59.874.260.858,00	59.874.260.858,00	-
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	11.615.371.022,00	11.615.371.022,00	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	117.757.611.897,00	125.121.699.707,00	(7.364.087.810,00)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	991.397.969,00	991.397.969,00	-
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO			-
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	4.271.655.360,00	4.271.655.371,00	(11,00)
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	34.351.003.746,00	36.048.236.920,00	(1.697.233.174,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO			-
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	701.234.591,00	701.234.591,00	-
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	15.221.406.293,00	15.221.406.293,00	-
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	62.120.006.873,00	67.786.861.498,00	(5.666.854.625,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	19.875.565,00	19.875.565,00	-
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LO	81.031.500,00	81.031.500,00	-
Dana Alokasi Umum	933.631.693.000,00	933.631.693.000,00	-
Dana Alokasi Umum - LO	933.631.693.000,00	933.631.693.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	319.248.731.658,00	319.248.731.658,00	-
Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	129.859.099.396,00	129.859.099.396,00	-
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	140.157.479.000,00	140.157.479.000,00	-
Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	2.978.750.000,00	2.978.750.000,00	-
Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini - LO	8.506.800.000,00	8.506.800.000,00	-
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	25.664.972.164,00	25.664.972.164,00	-
Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LO	5.646.482.400,00	5.646.482.400,00	-
Dana Tunjangan Khusus Guru - LO	4.579.669.000,00	4.579.669.000,00	-
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.855.479.698,00	1.855.479.698,00	-
	1.442.127.668.435,00	1.449.491.756.245,00	(7.364.087.810,00)

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – LRA tahun 2018 sebesar Rp7.364.087.810,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan atas Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*) – LO dan LRA sebesar Rp11,00 berupa penerimaan atas kurang salur Bagi Hasil dari Iuran Tetap Tahun 2017.
2. Perbedaan atas Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*) – LO dan LRA sebesar Rp1.697.233.174,00 berupa penerimaan atas kurang salur Pendapatan Bagi Hasil dari Iuran Tetap Tahun 2017.
3. Perbedaan atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO dan LRA sebesar Rp5.666.854.625,00 berupa penerimaan atas kurang salur Pendapatan Bagi Hasil Gas Bumi Tahun 2017.

5.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO adalah Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dan BOS sebesar Rp134.676.040.000,00 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Berikut perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO tahun 2018 dan 2017 yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.26
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	2018	2017	KENAIKAN / PENURUNAN
Dana Insentif Daerah	35.750.000.000,00	7.500.000.000,00	28.250.000.000,00
Bantuan Operasional Sekolah - SD	77.113.440.000,00	77.559.360.000,00	(445.920.000,00)
Bantuan Operasional Sekolah - SMP	21.812.600.000,00	21.413.600.000,00	399.000.000,00
Jumlah	134.676.040.000,00	106.472.960.000,00	28.203.080.000,00

Sedangkan perbandingan antara Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.3.27
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dana Insentif Daerah	35.750.000.000,00	35.750.000.000,00	-
Bantuan Operasional Sekolah - SD	77.113.440.000,00	77.113.440.000,00	-
Bantuan Operasional Sekolah - SMP	21.812.600.000,00	21.812.600.000,00	-
Dana Desa	-	253.420.206.999,00	(253.420.206.999,00)
Jumlah	134.676.040.000,00	388.096.246.999,00	(253.420.206.999,00)

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan LRA sebesar Rp253.420.206.999,00 merupakan titipan Dana Desa untuk 288 Desa di Kabupaten Banyuasin.

5.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp104.831.994.614,97 berikut perbandingannya dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO tahun 2017.

Tabel 5.3.28
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Dana Bagi Hasil	90.639.278.609,41	81.763.603.087,13	8.875.675.522,28
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	15.126.133.217,41	13.339.320.157,88	1.786.813.059,53
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LO	1.728.662,17	1.929.704,91	(201.042,74)
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	19.049.563.389,33	14.344.614.741,08	4.704.948.648,25
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LO	742.245,51	439.138,53	303.106,98
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	31.173.271.931,47	26.426.160.049,71	4.747.111.881,76
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO	-	-	-
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	310.986.382,22	303.201.467,73	7.784.914,49
Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	24.976.852.781,30	27.347.937.827,29	(2.371.085.045,99)
Bantuan Keuangan	14.192.716.005,56	10.908.239.100,00	3.284.476.905,56
Pendapatan Jamsoskes	14.192.716.005,56	10.908.239.100,00	3.284.476.905,56
Jumlah	104.831.994.614,97	92.671.842.187,13	12.160.152.427,84

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA tahun 2018 sebesar Rp102.431.718.680,30 terdapat perbedaan sebesar Rp2.400.275.934,67. Perbandingan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.29
Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dan LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dana Bagi Hasil	90.639.278.609,41	92.934.950.540,30	(2.295.671.930,89)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	15.126.133.217,41	17.071.942.284,65	(1.945.809.067,24)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LO	1.728.662,17	2.242.277,36	(513.615,19)
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	19.049.563.389,33	17.823.927.548,34	1.225.635.840,99
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LO	742.245,51	440.132,91	302.112,60
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	31.173.271.931,47	32.795.665.196,99	(1.622.393.265,52)
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO	-	-	-
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA	310.986.382,22	263.880.318,75	47.106.063,47
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	24.976.852.781,30	24.976.852.781,30	-
Bantuan Keuangan	14.192.716.005,56	9.496.768.140,00	4.695.947.865,56
Pendapatan Jamsoskes	14.192.716.005,56	9.496.768.140,00	4.695.947.865,56
Jumlah	104.831.994.614,97	102.431.718.680,30	2.400.275.934,67

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO dan LRA sebesar Rp2.400.275.934,67 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO dan LRA sebesar Rp1.945.809.067,24 merupakan selisih antara piutang bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor bulan September s.d Desember sebesar Rp4.642.889.236,50 dan pelunasan piutang DBH tahun 2016 sebesar Rp6.588.689.303,74.
2. Perbedaan atas Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO dan LRA sebesar Rp513.615,19 merupakan selisih antara piutang bagi hasil dari pajak Kendaraan Bermotor bulan September s.d Desember sebesar Rp459.871,60 dan pelunasan DBH tahun 2016 sebesar Rp973.486,79.
3. Perbedaan atas Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO dan LRA sebesar Rp1.225.635.840,99 merupakan selisih antara piutang bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor bulan September s.d Desember sebesar Rp5.700.232.873,76 dan pelunasan piutang DBH tahun 2016 sebesar Rp4.474.597.032,77.
4. Perbedaan atas Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO dan LRA sebesar Rp302.112,60 merupakan selisih antara piutang bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor bulan September s.d Desember sebesar Rp345.717,41 dan pelunasan piutang DBH tahun 2016 sebesar Rp43.604,81.
5. Perbedaan atas Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO dan LRA sebesar Rp1.622.393.265,52 merupakan selisih antara piutang bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor bulan September s.d Desember sebesar Rp9.637.030.654,10 dan pelunasan piutang DBH tahun 2016 sebesar Rp11.259.423.919,62.
6. Perbedaan atas Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO dan LRA sebesar Rp47.106.063,47 merupakan selisih antara piutang bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor bulan September s.d Desember sebesar Rp124.055.046,73 dan pelunasan piutang DBH tahun 2016 sebesar Rp76.948.983,26.

7. Perbedaan atas Pendapatan Jamsoskes sebesar Rp4.695.947.865,56 adalah merupakan piutang pendapatan yang timbul atas rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui Berita Acara Rekonsiliasi pada tanggal 15 Februari 2019.

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO terdiri dari pendapatan hibah. Untuk Lain-lain pendapatan daerah yang Sah - LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 20.709.611.141,01 yang terdiri dari Pendapatan Hibah – LO dalam bentuk uang sebesar Rp27.215.581,00, dalam bentuk aset tetap dan Obat-obatan sebesar Rp 20.682.395.560,01. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu terdapat penurunan sebesar Rp21.710.503.492,68.

Tabel 5.3.30
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2018 dan 2017

<i>(dalam rupiah)</i>			
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	20.709.611.141,01	42.420.114.633,69	(21.710.503.492,68)
Jumlah	20.709.611.141,01	42.420.114.633,69	(21.710.503.492,68)

Tabel 5.3.31
Rincian pendapatan Hibah - LO Tahun 2018

<i>(dalam rupiah)</i>		
Uraian	SK Hibah	Nilai
Hibah Uang dari Pemerintah Pusat		27.215.581,00
Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		27.215.581,00
Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi		1.409.605.556,00
Dinas Kesehatan		1.409.605.556,00
Obat-obatan		1.409.605.556,00
Hibah Barang dari Pemerintah Pusat		19.272.790.004,01
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		5.787.554.375,00
pembangunan dan rehab 14 SDN dan tiga SMPN		5.787.554.375,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		1.953.139.629,00
Jalan		1.353.139.629,00
Lampu Jalan		600.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.884.172.000,00
Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di 2 lokasi	358/LATTAS/II/2017	1.884.172.000,00
Dinas Perhubungan		7.656.000,00
Tanah untuk Dermaga di Desa Upang 2 lokasi		7.656.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		9.640.268.000,01
Peralatan Mesin berupa - Papan Pengumuman Digital Pasar Betung		49.500.000,00
Bangunan Gedung berupa gedung kantor, pasar, mushola, toilet umum		9.590.768.000,01
Jumlah		20.709.611.141,01

Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LRA tahun 2018 sebesar Rp27.215.581,00 terdapat perbedaan sebesar Rp20.682.395.560,01. Perbandingan antara Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LRA tahun 2018 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 5.3.32
Perbedaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO dan LRA Tahun 2018

			(dalam rupiah)
Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	20.709.611.141,01	27.215.581,00	20.682.395.560,01
Jumlah	20.709.611.141,01	27.215.581,00	20.682.395.560,01

Perbedaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO dan LRA sebesar Rp20.682.395.560,01 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hibah masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 28 November 2018 berupa tanah untuk dermaga hulu desa upang dengan nomor sertifikat 593/812/MJ/2017 senilai Rp3.828.000,00 dan Dermaga Hilir Desa Upang dengan nomor sertifikat 593/811/MJ/2017 senilai Rp3.828.000,00 (nilai NJOP).
2. Hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa papan pengumuman digital pasar betung senilai Rp49.500.000,00 dan bangunan pasar betung senilai Rp9.590.768.000,01
3. Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dinas Kesehatan berupa obat-obatan senilai Rp1.409.605.556,00.
4. Hibah dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa jalan lingkungan perumahan senilai Rp1.353.139.629,00.
5. Hibah dari DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa lampu Armature (HPS 70 W) untuk lampu jalan senilai Rp600.000.000,00.
6. Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga berupa pembangunan dan rehab 14 (empat belas) SDN dan tiga SMPN senilai 5.787.554.375,00.
7. Hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja berupa Balai Latihan Kerja (BLK) senilai Rp1.884.172.000,00

5.3.2 Beban Daerah

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.725.645.815.569,78 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.33
Beban per SKPD Tahun 2018 dan 2017

Uraian	(dalam rupiah)		
	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Beban Pegawai	708.602.678.677,00	696.786.811.648,96	11.815.867.028,04
Beban Persediaan	135.393.261.844,28	109.260.312.676,59	26.132.949.167,69
Beban Jasa	204.620.524.490,50	224.668.154.101,13	(20.047.629.610,63)
Beban Pemeliharaan	39.438.758.718,80	46.238.559.702,22	(6.799.800.983,42)
Beban Perjalanan Dinas	138.515.599.869,00	149.298.193.783,00	(10.782.593.914,00)
Beban Subsidi	-	47.250.000,00	(47.250.000,00)
Beban Hibah	131.691.443.056,34	42.497.001.102,78	89.194.441.953,56
Beban Bantuan Sosial	11.726.362,00	269.325.000,00	(257.598.638,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	224.860.360.886,69	240.132.945.793,34	(15.272.584.906,65)
Beban Penyisihan Piutang	7.440.595.193,32	6.736.224.708,77	704.370.484,54
Beban Lain-lain	25.400.228.662,85	31.999.509.551,95	(6.599.280.889,10)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	108.403.000.000,00	106.112.358.721,00	2.290.641.279,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.267.637.809,00	1.267.637.809,00	-
Jumlah	1.725.645.815.569,78	1.655.314.284.598,74	70.331.530.971,04

5.3.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp708.602.678.677,00 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.34
Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017

Uraian	(dalam rupiah)		
	2018	2017	Perbedaan
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	480.603.553.937,00	484.173.522.084,00	(3.569.968.147,00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	162.859.388.094,00	155.997.682.036,00	6.861.706.058,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	17.177.500.000,00	4.776.000.000,00	12.401.500.000,00
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	131.258.598,00	47.507.644,00	83.750.954,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.195.790.845,00	1.587.764.155,00	608.026.690,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	60.889.756,00	(60.889.756,00)
Beban Uang Lembur - LO	276.582.200,00	744.630.900,00	(468.048.700,00)
Belanja Honorarium PNS	38.008.863.235,00	44.959.187.986,96	(6.950.324.751,96)
Belanja Honorarium Non PNS	2.948.505.000,00	4.328.227.087,00	(1.379.722.087,00)
Beban Uang Rapat	60.815.000,00	111.400.000,00	(50.585.000,00)
Beban Pegawai - Dana BOS	4.340.421.768,00	-	4.340.421.768,00
Jumlah	708.602.678.677,00	696.786.811.648,96	11.815.867.028,04

Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp709.570.714.755,00 terdapat perbedaan sebesar Rp968.036.078,00. Rincian dan penjelasan perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai sebagai berikut.

Tabel 5.3.35
Beban dan Belanja Pegawai – LO Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	480.603.553.937,00	481.262.233.515,00	(658.679.578,00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	162.859.388.094,00	163.156.344.594,00	(296.956.500,00)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	17.177.500.000,00	17.177.500.000,00	-
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	131.258.598,00	131.258.598,00	-
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.195.790.845,00	2.195.790.845,00	-
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-
Beban Uang Lembur - LO	276.582.200,00	276.582.200,00	-
Belanja Honorarium PNS	38.008.863.235,00	38.021.263.235,00	(12.400.000,00)
Belanja Honorarium Non PNS	2.948.505.000,00	2.948.505.000,00	-
Beban Uang Rapat	60.815.000,00	60.815.000,00	-
Beban Pegawai - BOS	4.340.421.768,00	4.340.421.768,00	-
Jumlah	708.602.678.677,00	709.570.714.755,00	(968.036.078,00)

Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai sebesar Rp968.036.078,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan atas Beban dan Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp658.679.578,00 merupakan pembayaran utang iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian tahun lalu yang tersebar di SKPD.
2. Perbedaan atas Beban dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp296.956.500,00 merupakan pembayaran Rapel Tunjangan Non Sertifikasi periode Desember 2017 sebanyak 1.165 orang sebesar Rp291.250.000,00 dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD *Carry Over* / kurang bayar bulan Desember 2016 sebesar Rp5.706.500,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
3. Perbedaan atas Beban dan Belanja Honorarium PNS sebesar Rp12.400.000,00 merupakan kapitalisasi Beban Honorarium atas pengadaan aset tetap pada Dinas Perikanan sebesar Rp1.650.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.750.000,00.

Rincian Beban Pegawai per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.36
Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2018 dan 2017

	(dalam rupiah)		
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	446.278.901.177,00	443.998.163.692,00	2.280.737.485,00
Dinas Kesehatan	61.989.540.740,00	57.225.416.788,99	4.764.123.951,01
Rumah Sakit Umum Daerah	9.536.408.448,00	9.445.723.284,00	90.685.164,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.042.164.739,00	4.000.082.258,98	42.082.480,02
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	5.792.821.981,00	5.674.480.596,00	118.341.385,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.732.956.757,00	3.295.719.086,00	(562.762.329,00)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.129.057.185,00	3.852.650.964,00	1.276.406.221,00
Dinas Sosial	2.934.895.990,00	2.930.581.044,00	4.314.946,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.468.697.520,00	3.419.456.729,00	(950.759.209,00)
Dinas Ketahanan Pangan	2.556.686.532,00	2.972.824.303,00	(416.137.771,00)
Dinas Lingkungan Hidup	3.431.811.649,00	3.661.207.272,00	(229.395.623,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.083.680.559,00	2.692.301.668,00	(608.621.109,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.933.880.485,00	3.178.204.604,00	(244.324.119,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.619.905.110,00	9.151.985.850,00	(3.532.080.740,00)
Dinas Perhubungan	3.308.725.197,00	3.648.135.769,00	(339.410.572,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.094.260.924,00	2.942.554.210,00	151.706.714,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha	4.293.264.578,00	4.944.919.496,99	(651.654.918,99)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.335.997.456,00	2.856.415.681,00	(520.418.225,00)
Dinas Perikanan	3.039.205.717,00	3.758.517.013,00	(719.311.296,00)
Dinas Pertanian	15.624.300.839,00	16.054.823.732,00	(430.522.893,00)
DPRD	26.685.635.047,00	17.402.879.991,00	9.282.755.056,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	647.690.055,00	376.393.923,00	271.296.132,00
Sekretariat Daerah	13.526.079.883,00	13.273.610.318,00	252.469.565,00
Sekretariat DPRD	5.990.131.798,00	5.502.692.761,00	487.439.037,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	3.770.696.163,00	4.796.167.931,00	(1.025.471.768,00)
Kecamatan Banyuasin I	2.569.394.604,00	2.593.903.783,00	(24.509.179,00)
Kecamatan Banyuasin III	3.345.206.072,00	3.347.010.414,00	(1.804.342,00)
Kecamatan Betung	1.836.539.180,00	1.839.507.976,00	(2.968.796,00)
Kecamatan rantau Bayur	1.265.254.139,00	1.412.792.911,00	(147.538.772,00)
Kecamatan Pulau Rimau	2.002.500.442,00	1.873.505.731,00	128.994.711,00
Kecamatan Talang Kelapa	7.339.369.540,00	6.903.512.994,00	435.856.546,00
Kecamatan Rambutan	2.038.099.212,00	2.233.991.200,00	(195.891.988,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	1.040.968.274,00	1.088.118.506,00	(47.150.232,00)
Kecamatan Tanjung Lago	1.205.023.395,00	1.266.553.267,00	(61.529.872,00)
Kecamatan Sembawa	1.144.030.575,00	1.185.871.843,00	(41.841.268,00)
Kecamatan Suak Tapeh	901.925.372,00	1.083.010.450,00	(181.085.078,00)
Kecamatan Banyuasin II	983.143.046,00	1.116.663.029,00	(133.519.983,00)
Kecamatan Makarti Jaya	1.476.077.895,00	1.361.281.151,00	114.796.744,00
Kecamatan Muara Padang	1.311.932.822,00	1.332.822.433,00	(20.889.611,00)
Kecamatan Muara Sugihan	1.276.364.637,00	1.396.808.265,00	(120.443.628,00)
Kecamatan Muara Telang	1.133.180.615,00	1.224.211.337,00	(91.030.722,00)
Kecamatan Air Salek	926.103.137,00	762.866.888,00	163.236.249,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	992.787.038,00	977.900.156,00	14.886.882,00
Kecamatan Air Kumbang	953.519.292,00	1.013.435.223,00	(59.915.931,00)
Kecamatan Selat Penuguan	19.800.000,00	-	19.800.000,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	19.800.000,00	-	19.800.000,00
Inspektorat Daerah	5.912.079.644,00	5.716.412.694,00	195.666.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.576.886.958,00	5.209.114.742,00	1.367.772.216,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.652.415.215,00	17.515.655.053,00	1.136.760.162,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.832.881.044,00	3.275.952.637,00	556.928.407,00
Jumlah	708.602.678.677,00	696.786.811.648,96	11.815.867.028,04

Perbandingan Beban dan Belanja Pegawai per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.37
Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2018

			(dalam rupiah)
Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	446.278.901.177,00	446.986.929.035,00	(708.027.858,00)
Dinas Kesehatan	61.989.540.740,00	62.067.293.628,00	(77.752.888,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	9.536.408.448,00	9.544.949.990,00	(8.541.542,00)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.042.164.739,00	4.046.435.450,00	(4.270.711,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	5.792.821.981,00	5.799.093.643,00	(6.271.662,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.732.956.757,00	2.746.560.325,00	(13.603.568,00)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.129.057.185,00	5.132.859.053,00	(3.801.868,00)
Dinas Sosial	2.934.895.990,00	2.938.054.971,00	(3.158.981,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.468.697.520,00	2.472.134.584,00	(3.437.064,00)
Dinas Ketahanan Pangan	2.556.686.532,00	2.559.249.103,00	(2.562.571,00)
Dinas Lingkungan Hidup	3.431.811.649,00	3.435.464.278,00	(3.652.629,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.083.680.559,00	2.086.123.019,00	(2.442.460,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.933.880.485,00	2.936.524.927,00	(2.644.442,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.619.905.110,00	5.630.174.301,00	(10.269.191,00)
Dinas Perhubungan	3.308.725.197,00	3.312.411.814,00	(3.686.617,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.094.260.924,00	3.096.554.104,00	(2.293.180,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	4.293.264.578,00	4.298.363.639,00	(5.099.061,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.335.997.456,00	2.338.681.670,00	(2.684.214,00)
Dinas Perikanan	3.039.205.717,00	3.044.259.034,00	(5.053.317,00)
Dinas Pertanian	15.624.300.839,00	15.644.151.289,00	(19.850.450,00)
DPRD	26.685.635.047,00	26.687.442.265,00	(1.807.218,00)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	647.690.055,00	647.773.215,00	(83.160,00)
Sekretariat Daerah	13.526.079.883,00	13.535.494.840,00	(9.414.957,00)
Sekretariat DPRD	5.990.131.798,00	5.994.556.592,00	(4.424.794,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	3.770.696.163,00	3.773.877.905,00	(3.181.742,00)
Kecamatan Banyuasin I	2.569.394.604,00	2.572.631.070,00	(3.236.466,00)
Kecamatan Banyuasin III	3.345.206.072,00	3.349.667.846,00	(4.461.774,00)
Kecamatan Betung	1.836.539.180,00	1.838.846.993,00	(2.307.813,00)
Kecamatan rantau Bayur	1.265.254.139,00	1.266.990.041,00	(1.735.902,00)
Kecamatan Pulau Rimau	2.002.500.442,00	2.004.843.902,00	(2.343.460,00)
Kecamatan Talang Kelapa	7.339.369.540,00	7.349.002.628,00	(9.633.088,00)
Kecamatan Rambutan	2.038.099.212,00	2.040.867.440,00	(2.768.228,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	1.040.968.274,00	1.042.220.700,00	(1.252.426,00)
Kecamatan Tanjung Lago	1.205.023.395,00	1.206.506.899,00	(1.483.504,00)
Kecamatan Sembawa	1.144.030.575,00	1.145.431.319,00	(1.400.744,00)
Kecamatan Suak Tapeh	901.925.372,00	902.920.909,00	(995.537,00)
Kecamatan Banyuasin II	983.143.046,00	984.389.882,00	(1.246.836,00)
Kecamatan Makarti Jaya	1.476.077.895,00	1.477.725.296,00	(1.647.401,00)
Kecamatan Muara Padang	1.311.932.822,00	1.313.417.088,00	(1.484.266,00)
Kecamatan Muara Sugihan	1.276.364.637,00	1.278.013.793,00	(1.649.156,00)
Kecamatan Muara Telang	1.133.180.615,00	1.134.687.785,00	(1.507.170,00)
Kecamatan Air Salek	926.103.137,00	926.913.131,00	(809.994,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	992.787.038,00	993.834.878,00	(1.047.840,00)
Kecamatan Air Kumbang	953.519.292,00	954.623.472,00	(1.104.180,00)
Kecamatan Selat Penuguan	19.800.000,00	19.800.000,00	-
Kecamatan Karang Agung Ilir	19.800.000,00	19.800.000,00	-
Inspektorat Daerah	5.912.079.644,00	5.915.449.654,00	(3.370.010,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.576.886.958,00	6.580.193.182,00	(3.306.224,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.652.415.215,00	18.660.960.575,00	(8.545.360,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.832.881.044,00	3.835.563.598,00	(2.682.554,00)
Jumlah	708.602.678.677,00	709.570.714.755,00	(968.036.078,00)

5.3.2.2 Beban persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 135.393.261.844,28. Perbandingan Beban Persediaan 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.38
Beban Persediaan per Rekening Tahun 2018 dan 2017

	<i>(dalam rupiah)</i>		
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	9.750.784.554,00	24.815.688.711,00	(15.064.904.157,00)
Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-
Beban Persediaan Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerin)	2.447.192.362,00	1.548.703.755,00	898.488.607,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	260.416.000,00	511.659.599,00	(251.243.599,00)
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.764.393.450,00	3.337.108.872,00	(1.572.715.422,00)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.586.890.969,00	2.673.682.282,00	(1.086.791.313,00)
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.615.000,00	4.220.000,00	2.395.000,00
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	253.805.000,00	371.934.000,00	(118.129.000,00)
Beban Dekorasi , Dokumentasi dan Publikasi	4.392.850.359,00	8.485.610.057,00	(4.092.759.698,00)
Beban Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan lainnya	6.557.939.130,25	18.093.039.959,78	(11.535.100.829,53)
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	23.800.000,00	3.875.452.426,00	(3.851.652.426,00)
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	27.350.000,00	134.434.340,00	(107.084.340,00)
Beban Persediaan Bibit Ternak	86.488.000,00	244.041.300,00	(157.553.300,00)
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	8.835.380.430,31	11.773.555.584,79	(2.938.175.154,48)
Beban Persediaan Bahan Kimia	275.603.000,00	630.753.648,02	(355.150.648,02)
Beban Persediaan Makanan Pokok	767.535.579,72	1.136.371.955,00	(368.836.375,28)
Beban Hadiah	1.100.305.000,00	1.831.909.890,00	(731.604.890,00)
Beban Bahan Percontohan	378.833.000,00	1.322.046.871,00	(943.213.871,00)
Beban Cetak	9.546.006.859,00	10.915.872.475,00	(1.369.865.616,00)
Beban Penggandaan	4.305.479.058,00	11.519.902.004,00	(7.214.422.946,00)
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	695.860.000,00	293.250.000,00	402.610.000,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	408.459.000,00	362.525.000,00	45.934.000,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	398.779.840,00	35.637.000,00	363.142.840,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.218.296.000,00	1.375.076.700,00	(156.780.700,00)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	51.500.000,00	(36.500.000,00)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	251.886.000,00	173.766.000,00	78.120.000,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.657.287.560,00	235.300.000,00	1.421.987.560,00
Beban Pakaian kerja lapangan	1.358.190.770,00	1.829.131.377,00	(470.940.607,00)
Beban Tas Kerja	16.500.000,00	89.900.000,00	(73.400.000,00)
Beban Pakaian KORPRI	-	300.000,00	(300.000,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	17.850.000,00	17.928.000,00	(78.000,00)
Beban Pakaian Batik Tradisional	614.999.932,00	402.861.225,00	212.138.707,00
Beban Pakaian Olahraga	572.600.000,00	552.436.500,00	20.163.500,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	64.500.000,00	48.000.000,00	16.500.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	9.100.000,00	48.000.000,00	(38.900.000,00)
Hibah Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Pusat	-	515.363.145,00	(515.363.145,00)
Beban Barang/Jasa yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	-	3.350.000,00	(3.350.000,00)
Beban Barang dan Jasa Dana BOS - LO	75.726.284.991,00	-	75.726.284.991,00
Jumlah	135.393.261.844,28	109.260.312.676,59	26.132.949.167,69

Perbandingan Beban Persediaan per masing-masing SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 5.3.39
Beban Persediaan per SKPD Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	80.624.626.991,00	49.864.319.898,00	30.760.307.093,00
Dinas Kesehatan	11.306.421.220,59	13.062.801.331,76	(1.756.380.111,17)
Rumah Sakit Umum Daerah	6.228.093.424,79	9.801.133.441,83	(3.573.040.017,04)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.279.329.500,00	1.282.242.165,00	997.087.335,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	867.707.810,00	1.501.552.900,00	(633.845.090,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	606.157.213,00	428.937.337,00	177.219.876,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	394.337.100,00	568.244.916,00	(173.907.816,00)
Dinas Sosial	522.317.940,00	837.493.530,00	(315.175.590,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.648.250,00	1.213.406.050,00	(1.095.757.800,00)
Dinas Ketahanan Pangan	427.765.085,00	1.111.758.650,00	(683.993.565,00)
Dinas Lingkungan Hidup	554.641.450,00	495.167.505,00	59.473.945,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.558.292.808,00	1.392.259.300,00	1.166.033.508,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	459.912.900,00	674.292.800,00	(214.379.900,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	744.737.677,00	958.011.800,00	(213.274.123,00)
Dinas Perhubungan	489.977.100,00	494.191.900,00	(4.214.800,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.791.552.380,00	3.899.501.880,00	(2.107.949.500,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.357.901.763,00	1.421.174.000,00	(63.272.237,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	407.921.400,00	768.638.950,00	(360.717.550,00)
Dinas Perikanan	690.810.272,00	1.091.685.650,00	(400.875.378,00)
Dinas Pertanian	970.814.295,00	1.918.159.245,00	(947.344.950,00)
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	6.809.762.777,00	4.461.859.402,00	2.347.903.375,00
Sekretariat DPRD	6.223.134.178,00	5.249.473.152,00	973.661.026,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	491.626.400,00	754.977.360,00	(263.350.960,00)
Kecamatan Banyuasin I	178.132.560,00	43.943.400,00	134.189.160,00
Kecamatan Banyuasin III	470.758.320,00	130.356.300,00	340.402.020,00
Kecamatan Betung	217.378.882,00	114.627.000,00	102.751.882,00
Kecamatan rantau Bayur	219.223.206,00	152.902.716,00	66.320.490,00
Kecamatan Pulau Rimau	246.141.250,00	75.945.864,00	170.195.386,00
Kecamatan Talang Kelapa	296.592.000,00	118.684.500,00	177.907.500,00
Kecamatan Rambutan	203.046.640,00	121.926.400,00	81.120.240,00
Kecamatan Tungkal Ilir	164.309.600,00	191.442.350,00	(27.132.750,00)
Kecamatan Tanjung Lago	145.087.800,00	66.052.500,00	79.035.300,00
Kecamatan Sembawa	201.336.150,00	137.857.182,00	63.478.968,00
Kecamatan Suak Tapeh	120.606.040,00	46.828.908,00	73.777.132,00
Kecamatan Banyuasin II	156.346.920,00	33.650.000,00	122.696.920,00
Kecamatan Makarti Jaya	127.114.200,00	59.008.500,00	68.105.700,00
Kecamatan Muara Padang	194.294.193,00	110.824.000,00	83.470.193,00
Kecamatan Muara Sugihan	220.331.750,00	147.537.725,00	72.794.025,00
Kecamatan Muara Telang	168.021.600,00	45.820.500,00	122.201.100,00
Kecamatan Air Salek	150.517.380,00	56.415.508,00	94.101.872,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	112.980.100,00	60.130.500,00	52.849.600,00
Kecamatan Air Kumbang	144.612.315,00	74.707.000,00	69.905.315,00
Kecamatan Selat Penuguan	9.722.500,00	-	9.722.500,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	2.750.000,00	-	2.750.000,00
Inspektorat Daerah	571.620.183,00	483.581.303,00	88.038.880,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.178.207.289,00	1.438.536.604,00	(260.329.315,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.097.471.911,90	1.553.960.712,00	543.511.199,90
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	871.169.120,00	744.290.041,00	126.879.079,00
Jumlah	135.393.261.844,28	109.260.312.676,59	26.132.949.167,69

Tabel 5.3.40
Beban dan Belanja Persediaan s.d 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	9.750.784.554,00	9.558.323.499,00	192.461.055,00
Beban Persediaan Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.447.192.362,00	2.108.035.692,00	339.156.670,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	260.416.000,00	260.546.000,00	(130.000,00)
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.764.393.450,00	1.710.909.150,00	53.484.300,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.586.890.969,00	1.904.743.509,00	(317.852.540,00)
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.615.000,00	6.615.000,00	-
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	253.805.000,00	253.805.000,00	-
Beban Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.392.850.359,00	4.388.850.359,00	4.000.000,00
Beban Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan lainnya	6.557.939.130,25	6.988.540.950,76	(430.601.820,51)
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	23.800.000,00	23.800.000,00	-
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	27.350.000,00	27.350.000,00	-
Beban Persediaan Bibit Ternak	86.488.000,00	81.760.000,00	4.728.000,00
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	8.835.380.430,31	8.589.302.655,74	246.077.774,57
Beban Persediaan Bahan Kimia	275.603.000,00	278.253.000,00	(2.650.000,00)
Beban Persediaan Makanan Pokok	767.535.579,72	731.913.129,72	35.622.450,00
Beban Hadiah	1.100.305.000,00	1.100.305.000,00	-
Beban Bahan Percontohan	378.833.000,00	378.833.000,00	-
Beban Cetak	9.546.006.859,00	9.786.127.911,00	(240.121.052,00)
Beban Penggandaan	4.305.479.058,00	4.305.491.258,00	(12.200,00)
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	695.860.000,00	695.860.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	408.459.000,00	408.459.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	398.779.840,00	398.779.840,00	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.218.296.000,00	1.218.296.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	251.886.000,00	251.886.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.657.287.560,00	1.657.287.560,00	-
Beban Pakaian kerja lapangan	1.358.190.770,00	1.353.190.770,00	5.000.000,00
Beban Tas Kerja	16.500.000,00	16.500.000,00	-
Beban Pakaian Adat Daerah	17.850.000,00	17.850.000,00	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	614.999.932,00	614.999.932,00	-
Beban Pakaian Olahraga	572.600.000,00	572.600.000,00	-
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	64.500.000,00	64.500.000,00	-
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	9.100.000,00	9.100.000,00	-
Beban Barang dan Jasa Dana BOS - LO	75.726.284.991,00	75.726.284.991,00	-
Jumlah	135.393.261.844,28	135.504.099.207,22	(110.837.362,94)

Perbandingan beban dan belanja persediaan permasing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.3.41
Beban dan Belanja Persediaan per SKPD s.d 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	80.624.626.991,00	80.624.626.991,00	-
Dinas Kesehatan	11.306.421.220,59	11.163.736.267,00	142.684.953,59
Rumah Sakit Umum Daerah	6.228.093.424,79	6.606.099.116,22	(378.005.691,43)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.279.329.500,00	1.919.537.500,00	359.792.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	867.707.810,00	1.246.342.750,00	(378.634.940,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	606.157.213,00	603.883.350,00	2.273.863,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	394.337.100,00	394.337.100,00	-
Dinas Sosial	522.317.940,00	578.863.960,00	(56.546.020,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.648.250,00	117.648.250,00	-
Dinas Ketahanan Pangan	427.765.085,00	427.765.085,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	554.641.450,00	742.554.200,00	(187.912.750,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.558.292.808,00	2.223.174.420,00	335.118.388,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	459.912.900,00	454.912.900,00	5.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	744.737.677,00	746.536.877,00	(1.799.200,00)
Dinas Perhubungan	489.977.100,00	522.577.600,00	(32.600.500,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.791.552.380,00	1.785.016.980,00	6.535.400,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.357.901.763,00	1.399.031.563,00	(41.129.800,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	407.921.400,00	429.254.500,00	(21.333.100,00)
Dinas Perikanan	690.810.272,00	569.855.772,00	120.954.500,00
Dinas Pertanian	970.814.295,00	774.423.795,00	196.390.500,00
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	6.809.762.777,00	6.870.025.852,00	(60.263.075,00)
Sekretariat DPRD	6.223.134.178,00	6.258.389.565,00	(35.255.387,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	491.626.400,00	495.260.250,00	(3.633.850,00)
Kecamatan Banyuasin I	178.132.560,00	178.454.560,00	(322.000,00)
Kecamatan Banyuasin III	470.758.320,00	472.258.320,00	(1.500.000,00)
Kecamatan Betung	217.378.882,00	217.759.132,00	(380.250,00)
Kecamatan rantau Bayur	219.223.206,00	219.223.206,00	-
Kecamatan Pulau Rimau	246.141.250,00	246.531.000,00	(389.750,00)
Kecamatan Talang Kelapa	296.592.000,00	297.027.000,00	(435.000,00)
Kecamatan Rambutan	203.046.640,00	203.413.640,00	(367.000,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	164.309.600,00	164.309.600,00	-
Kecamatan Tanjung Lago	145.087.800,00	145.087.800,00	-
Kecamatan Sembawa	201.336.150,00	203.430.150,00	(2.094.000,00)
Kecamatan Suak Tapeh	120.606.040,00	119.938.165,00	667.875,00
Kecamatan Banyuasin II	156.346.920,00	156.346.920,00	-
Kecamatan Makarti Jaya	127.114.200,00	127.104.200,00	10.000,00
Kecamatan Muara Padang	194.294.193,00	194.294.193,00	-
Kecamatan Muara Sugihan	220.331.750,00	220.331.750,00	-
Kecamatan Muara Telang	168.021.600,00	168.021.600,00	-
Kecamatan Air Salek	150.517.380,00	150.517.380,00	-
Kecamatan Sumber Marga Telang	112.980.100,00	112.980.100,00	-
Kecamatan Air Kumbang	144.612.315,00	144.612.315,00	-
Kecamatan Selat Penuguan	9.722.500,00	9.722.500,00	-
Kecamatan Karang Agung Ilir	2.750.000,00	2.750.000,00	-
Inspektorat Daerah	571.620.183,00	570.471.183,00	1.149.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.178.207.289,00	1.178.262.950,00	(55.661,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.097.471.911,90	2.176.220.000,00	(78.748.088,10)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	871.169.120,00	871.176.900,00	(7.780,00)
Jumlah	135.393.261.844,28	135.504.099.207,22	(110.837.362,94)

5.3.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp204.620.524.490,50. Berikut Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017.

Tabel 5.3.42
Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017

	(dalam rupiah)		
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Beban Jasa telepon	814.026.852,00	563.963.013,00	250.063.839,00
Beban Jasa air	1.041.467.340,00	1.353.587.538,00	(312.120.198,00)
Beban Jasa listrik	15.556.240.130,00	8.566.166.169,99	6.990.073.960,01
Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	2.000.000,00	(1.350.500,00)	3.350.500,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.480.099.960,00	1.786.935.113,00	(306.835.153,00)
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	3.675.140.062,00	3.221.615.639,00	453.524.423,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	141.163.900,00	57.634.840,00	83.529.060,00
Beban Jasa Sertifikasi	75.245.300,00	28.173.840,00	47.071.460,00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	481.357.000,00	165.679.919,00	315.677.081,00
Beban Penyediaan Jasa Iuran FKDPM	24.000.000,00	(10.553.416,00)	34.553.416,00
Beban Jasa Administrasi Pendamping Kegiatan	628.500.000,00	602.560.000,00	25.940.000,00
Beban Jasa Umum Laboratorium Migas	3.150.000,00	(231.392.000,00)	234.542.000,00
Beban Jasa Izin Pemasangan	-	(3.067.609.119,00)	3.067.609.119,00
Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan	666.812.100,00	1.453.485.900,00	(786.673.800,00)
Beban Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	1.015.200.000,00	2.540.845.045,00	(1.525.645.045,00)
Beban Jasa Pengurusan Perizinan	140.275.152,00	14.394.421,00	125.880.731,00
Beban Jasa Kebersihan	6.442.064.400,00	3.771.183.980,00	2.670.880.420,00
Beban Jasa Keamanan	2.807.800.000,00	3.000.163.747,00	(192.363.747,00)
Beban Jasa Operator	7.131.383.750,00	8.238.038.128,00	(1.106.654.378,00)
Beban Jasa Pelayanan SKPD	73.766.842.174,00	84.471.992.585,00	(10.705.150.411,00)
Beban Jasa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa	1.660.400.000,00	1.602.850.000,00	57.550.000,00
Beban Jasa Listrik Pajak Penerangan Jalan	-	5.739.248.499,00	(5.739.248.499,00)
Beban Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	7.203.431.520,00	14.314.066.158,00	(7.110.634.638,00)
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	43.613.222.594,60	35.050.626.118,80	8.562.596.475,80
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	369.802.956,00	383.030.147,09	(13.227.191,09)
Beban Premi Asuransi Kematian	178.112.500,00	14.825.000,00	163.287.500,00
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	8.900.000,00	19.454.333,34	(10.554.333,34)
Beban Premi Asuransi Kendaraan	1.512.868.025,90	1.480.926.490,91	31.941.534,99
Beban Medical Check Up Kepala Daerah	-	976.000,00	(976.000,00)
Beban Medical Check Up DPRD	30.000.000,00	17.987.000,00	12.013.000,00
Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-	(611.000,00)	611.000,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.920.351.193,00	5.134.134.480,00	(2.213.783.287,00)
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	247.437.167,00	513.549.500,00	(266.112.333,00)
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	-	14.032.000,00	(14.032.000,00)
Beban Sewa Lain-lain	-	5.260.000,00	(5.260.000,00)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	546.410.000,00	2.143.574.339,00	(1.597.164.339,00)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	770.100.000,00	4.231.991.500,00	(3.461.891.500,00)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	-	1.599.000,00	(1.599.000,00)
Beban Sewa Meja Kursi	196.405.000,00	620.331.482,00	(423.926.482,00)
Beban Sewa Komputer dan Printer	-	30.831.500,00	(30.831.500,00)
Beban Sewa Proyektor	-	(5.503.700,00)	5.503.700,00
Beban Sewa Generator	97.250.000,00	67.788.358,00	29.461.642,00
Beban Sewa Tenda	500.437.000,00	673.946.800,00	(173.509.800,00)
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.250.000,00	50.159.484,00	(30.909.484,00)
Beban Sewa Audio Video	442.500.000,00	813.370.500,00	(370.870.500,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya	1.656.525.361,00	1.646.848.575,00	9.676.786,00
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.776.634.500,00	4.115.747.508,00	(2.339.113.008,00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.755.873.431,00	9.425.328.486,00	(2.669.455.055,00)
Beban Makanan dan Minuman Tamu	5.190.536.630,00	4.186.631.985,00	1.003.904.645,00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	1.692.776.000,00	2.061.363.400,00	(368.587.400,00)
Beban Snack Rapat	1.073.705.900,00	723.306.591,00	350.399.309,00
Beban Snack Kegiatan	2.231.230.000,00	3.959.974.791,00	(1.728.744.791,00)
Beban Snack Tamu	766.795.422,00	519.695.818,00	247.099.604,00
Beban Makanan dan Minuman Kompetisi/Pentas/Pameran	285.460.000,00	989.099.146,00	(703.639.146,00)
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	351.385.000,00	311.675.000,00	39.710.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	769.436.000,00	1.274.885.500,00	(505.449.500,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	194.758.000,00	74.635.000,00	120.123.000,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya	463.630.000,00	208.970.000,00	254.660.000,00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	2.281.206.551,00	2.778.622.464,00	(497.415.913,00)
Beban Sosialisasi	-	268.769.150,00	(268.769.150,00)
Beban Bimbingan Teknis	2.920.925.619,00	2.259.125.300,00	661.800.319,00
Beban Pengiriman Peserta PIM II	-	30.271.000,00	(30.271.000,00)
Beban Pengiriman Peserta PIM III	-	88.003.000,00	(88.003.000,00)
Beban Peserta Perlombaan/Kompetisi	-	347.142.554,00	(347.142.554,00)
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	-	(4.500.000,00)	4.500.000,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	-	(41.400.000,00)	41.400.000,00
Jumlah	204.620.524.490,50	224.668.154.101,13	(20.047.629.610,63)

Sedangkan perbandingan beban dan belanja jasa untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.43
Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2018

(dalam rupiah)			
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Beban Jasa telepon	814.026.852,00	814.026.852,00	-
Beban Jasa air	1.041.467.340,00	1.041.467.340,00	-
Beban Jasa listrik	15.556.240.130,00	15.556.240.130,00	-
Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.480.099.960,00	1.480.099.960,00	-
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	3.675.140.062,00	3.675.140.062,00	-
Beban Jasa Paket/Pengiriman	141.163.900,00	141.163.900,00	-
Beban Jasa Sertifikasi	75.245.300,00	75.245.300,00	-
Beban Jasa Transaksi Keuangan	481.357.000,00	481.357.000,00	-
Beban Penyediaan Jasa Iuran FKDPM	24.000.000,00	24.000.000,00	-
Beban Jasa Administrasi Pendamping Kegiatan	628.500.000,00	628.500.000,00	-
Beban Jasa Umum Laboratorium Migas	3.150.000,00	3.150.000,00	-
Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan	786.590.000,00	1.647.477.000,00	(860.887.000,00)
Beban Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	1.015.200.000,00	1.015.200.000,00	-
Beban Jasa Pengurusan Perizinan	140.275.152,00	140.275.152,00	-
Beban Jasa Kebersihan	6.442.064.400,00	6.442.064.400,00	-
Beban Jasa Keamanan	2.807.800.000,00	2.807.800.000,00	-
Beban Jasa Operator	7.131.383.750,00	7.131.383.750,00	-
Beban Jasa Pelayanan SKPD	73.766.842.174,00	73.765.686.174,00	1.156.000,00
Beban Jasa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa	1.660.400.000,00	1.660.400.000,00	-
Beban Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	7.203.431.520,00	7.203.431.520,00	-
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	43.613.222.594,60	50.903.550.939,60	(7.290.328.345,00)
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	369.802.956,00	423.875.952,00	(54.072.996,00)
Beban Premi Asuransi Kematian	178.112.500,00	175.000.000,00	3.112.500,00
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	8.900.000,00	26.700.000,00	(17.800.000,00)
Beban Premi Asuransi Kendaraan	1.512.868.025,90	1.421.486.755,50	91.381.270,40
Beban Medical Check Up DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.920.351.193,00	2.920.351.193,00	-
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	247.437.167,00	247.437.167,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	546.410.000,00	546.410.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	770.100.000,00	770.100.000,00	-
Beban Sewa Meja Kursi	196.405.000,00	196.405.000,00	-
Beban Sewa Generator	97.250.000,00	97.250.000,00	-
Beban Sewa Tenda	500.437.000,00	500.437.000,00	-
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.250.000,00	19.250.000,00	-
Beban Sewa Audio Video	442.500.000,00	442.500.000,00	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya	1.656.525.361,00	1.656.525.361,00	-
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.776.634.500,00	1.776.634.500,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.755.873.431,00	6.755.873.431,00	-
Beban Makanan dan Minuman Tamu	5.190.536.630,00	5.190.536.630,00	-
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	1.692.776.000,00	1.692.776.000,00	-
Beban Snack Rapat	1.073.705.900,00	1.073.705.900,00	-
Beban Snack Kegiatan	2.231.230.000,00	2.231.230.000,00	-
Beban Snack Tamu	766.795.422,00	766.795.422,00	-
Beban Makanan dan Minuman Kompetisi/Pentas/Pameran	285.460.000,00	285.460.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	351.385.000,00	843.684.500,00	(492.299.500,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	649.658.100,00	1.641.325.000,00	(991.666.900,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	194.758.000,00	194.758.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Lainnya	463.630.000,00	684.382.063,00	(220.752.063,00)
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	2.281.206.551,00	2.281.206.551,00	-
Beban Bimbingan Teknis	2.920.925.619,00	2.920.925.619,00	-
Jumlah	204.620.524.490,50	214.452.681.524,10	(9.832.157.033,60)

Perbedaan Beban dan Belanja Jasa sebesar Rp9.832.157.033,60 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan antara beban dan belanja perencanaan dan pengawasan sebesar Rp860.887.000,00 terdiri dari kapitalisasi atas reklasifikasi beban konsultan ke konstruksi dalam penyelesaian atas DED gedung perpustakaan umum pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp101.542.000,00 dan pembayaran hutang tahun lalu pada beberapa SKPD sebesar Rp371.336.500,00 diantaranya Rumah Sakit Rp83.792.500,00 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp71.973.000,00 dan Dinas Pendidikan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp122.514.000,00.
2. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Pelayanan SKPD sebesar Rp1.156.000,00 merupakan kapitalisasi Jasa Pelayanan SKPD ke Aset Tetap.
3. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp7.290.328.345,00 merupakan pembayaran hutang jamsoskes tahun lalu.
4. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp54.072.996,00 merupakan penyesuaian terhadap asuransi kesehatan yang telah jatuh tempo.
5. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp3.112.500,00 merupakan penyesuaian terhadap asuransi kesehatan yang telah jatuh tempo.
6. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Kecelakaan sebesar Rp17.800.000,00 merupakan penyesuaian terhadap asuransi kesehatan yang telah jatuh tempo.
7. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Kendaraan sebesar Rp91.381.270,40 merupakan penyesuaian terhadap asuransi kendaraan yang telah jatuh tempo.
8. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Konsultasi Penelitian sebesar Rp492.299.500,00 merupakan kapitalisasi terhadap pengadaan aset tetap.
9. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Konsultasi Perencanaan sebesar Rp991.666.900,00 merupakan kapitalisasi terhadap pengadaan aset tetap.
10. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Konsultasi Lainnya sebesar Rp220.752.063,00 merupakan kapitalisasi terhadap pengadaan aset tetap.

Perbandingan Beban Jasa per masing-masing SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 5.3.44
Beban Jasa dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2018 dan 2017

Uraian	2018	2017	(dalam rupiah)
			Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	15.794.178.649,00	58.856.475.406,50	(43.062.296.757,50)
Dinas Kesehatan	83.789.913.160,60	63.813.880.797,80	19.976.032.362,80
Rumah Sakit Umum Daerah	5.802.461.848,33	3.677.443.793,00	2.125.018.055,33
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.023.526.448,67	5.904.494.790,62	9.119.031.658,05
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	2.477.351.227,67	2.314.550.239,58	162.800.988,09
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	3.105.295.508,33	1.212.798.065,34	1.892.497.442,99
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.965.925.389,00	6.272.325.891,00	693.599.498,00
Dinas Sosial	1.498.312.677,67	1.680.898.585,25	(182.585.907,58)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.212.848.666,00	2.889.222.929,33	(1.676.374.263,33)
Dinas Ketahanan Pangan	486.363.648,00	854.829.453,00	(368.465.805,00)
Dinas Lingkungan Hidup	3.789.638.109,66	3.606.974.883,84	182.663.225,82
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.586.721.442,00	1.833.940.384,83	(247.218.942,83)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.314.471.999,33	2.507.814.322,67	(1.193.342.323,34)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.880.891.550,50	2.431.995.128,00	448.896.422,50
Dinas Perhubungan	1.611.643.512,25	1.770.447.500,00	(158.803.987,75)
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.380.072.329,66	4.141.852.424,96	1.238.219.904,70
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.543.782.139,75	3.419.713.098,58	(875.930.958,83)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	773.040.994,25	1.222.066.339,00	(449.025.344,75)
Dinas Perikanan	967.422.085,75	1.007.417.307,17	(39.995.221,42)
Dinas Pertanian	2.425.691.707,00	2.503.587.331,83	(77.895.624,83)
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	18.780.660.156,92	16.077.874.386,81	2.702.785.770,11
Sekretariat DPRD	11.471.563.176,59	9.741.803.557,66	1.729.759.618,93
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	497.280.785,67	766.803.963,50	(269.523.177,83)
Kecamatan Banyuasin I	394.838.794,00	563.934.040,00	(169.095.246,00)
Kecamatan Banyuasin III	867.050.761,00	761.177.390,00	105.873.371,00
Kecamatan Betung	532.002.238,00	617.185.065,00	(85.182.827,00)
Kecamatan rantau Bayur	239.173.011,66	498.703.199,67	(259.530.188,01)
Kecamatan Pulau Rimau	164.908.284,00	644.663.994,00	(479.755.710,00)
Kecamatan Talang Kelapa	1.185.363.145,33	1.189.968.428,67	(4.605.283,34)
Kecamatan Rambutan	434.267.202,00	315.694.761,00	118.572.441,00
Kecamatan Tungkallir	187.717.200,00	387.994.000,00	(200.276.800,00)
Kecamatan Tanjung Lago	164.385.604,67	426.178.983,33	(261.793.378,66)
Kecamatan Sembawa	208.277.628,00	258.950.635,00	(50.673.007,00)
Kecamatan Suak Tapeh	154.379.000,00	243.848.409,00	(89.469.409,00)
Kecamatan Banyuasin II	149.630.500,00	558.596.132,00	(408.965.632,00)
Kecamatan Makarti Jaya	167.985.050,17	491.622.469,00	(323.637.418,83)
Kecamatan Muara Padang	73.367.807,00	404.481.270,00	(331.113.463,00)
Kecamatan Muara Sugihan	158.780.000,00	451.327.000,00	(292.547.000,00)
Kecamatan Muara Telang	134.330.833,33	607.949.657,34	(473.618.824,01)
Kecamatan Air Salek	154.160.000,00	455.094.550,00	(300.934.550,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	97.244.166,67	488.295.625,00	(391.051.458,33)
Kecamatan Air Kumbang	201.928.988,00	348.513.961,00	(146.584.973,00)
Kecamatan Selat Penuguan	59.550.000,00	-	59.550.000,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	52.950.000,00	-	52.950.000,00
Inspektorat Daerah	685.974.009,50	768.968.430,00	(82.994.420,50)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.142.815.968,17	5.163.609.841,33	(2.020.793.873,16)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.346.702.560,07	8.562.953.694,35	(5.216.251.134,28)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.483.684.526,33	1.949.231.985,17	(465.547.458,84)
Jumlah	204.620.524.490,50	224.668.154.101,13	(20.047.629.610,63)

Tabel 5.3.45
Beban Jasa dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2018

			(dalam rupiah)
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	15.794.178.649,00	15.965.173.399,00	(170.994.750,00)
Dinas Kesehatan	83.789.913.160,60	91.317.168.350,60	(7.527.255.190,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	5.802.461.848,33	5.895.812.415,00	(93.350.566,67)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.023.526.448,67	15.532.233.482,00	(508.707.033,33)
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	2.477.351.227,67	2.400.471.716,00	76.879.511,67
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	3.105.295.508,33	3.075.469.675,00	29.825.833,33
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.965.925.389,00	6.961.675.389,00	4.250.000,00
Dinas Sosial	1.498.312.677,67	1.498.611.896,00	(299.218,33)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.212.848.666,00	1.213.232.861,00	(384.195,00)
Dinas Ketahanan Pangan	486.363.648,00	486.363.648,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	3.789.638.109,66	4.291.724.728,00	(502.086.618,34)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.586.721.442,00	1.587.029.612,00	(308.170,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.314.471.999,33	1.330.031.730,00	(15.559.730,67)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	2.880.891.550,50	2.884.673.343,00	(3.781.792,50)
Dinas Perhubungan	1.611.643.512,25	1.970.181.496,00	(358.537.983,75)
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.380.072.329,66	5.411.566.218,00	(31.493.888,34)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.543.782.139,75	3.002.663.401,00	(458.881.261,25)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	773.040.994,25	879.976.625,00	(106.935.630,75)
Dinas Perikanan	967.422.085,75	967.173.042,00	249.043,75
Dinas Pertanian	2.425.691.707,00	2.432.497.857,00	(6.806.150,00)
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	18.780.660.156,92	18.830.563.965,00	(49.903.808,08)
Sekretariat DPRD	11.471.563.176,59	11.364.211.642,00	107.351.534,59
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	497.280.785,67	511.368.764,00	(14.087.978,33)
Kecamatan Banyuasin I	394.838.794,00	394.838.794,00	-
Kecamatan Banyuasin III	867.050.761,00	867.050.761,00	-
Kecamatan Betung	532.002.238,00	532.002.238,00	-
Kecamatan rantau Bayur	239.173.011,66	238.818.845,00	354.166,66
Kecamatan Pulau Rimau	164.908.284,00	164.908.284,00	-
Kecamatan Talang Kelapa	1.185.363.145,33	1.185.391.812,00	(28.666,67)
Kecamatan Rambutan	434.267.202,00	434.267.202,00	-
Kecamatan Tungkal Ilir	187.717.200,00	184.660.000,00	3.057.200,00
Kecamatan Tanjung Lago	164.385.604,67	163.270.938,00	1.114.666,67
Kecamatan Sembawa	208.277.628,00	207.780.215,50	497.412,50
Kecamatan Suak Tapeh	154.379.000,00	154.379.000,00	-
Kecamatan Banyuasin II	149.630.500,00	149.669.500,00	(39.000,00)
Kecamatan Makarti Jaya	167.985.050,17	168.651.247,00	(666.196,83)
Kecamatan Muara Padang	73.367.807,00	73.367.807,00	-
Kecamatan Muara Sugihan	158.780.000,00	158.780.000,00	-
Kecamatan Muara Telang	134.330.833,33	136.187.500,00	(1.856.666,67)
Kecamatan Air Salek	154.160.000,00	154.160.000,00	-
Kecamatan Sumber Marga Telang	97.244.166,67	96.402.500,00	841.666,67
Kecamatan Air Kumbang	201.928.988,00	201.928.988,00	-
Kecamatan Selat Penuguan	59.550.000,00	59.550.000,00	-
Kecamatan Karang Agung Ilir	52.950.000,00	52.950.000,00	-
Inspektorat Daerah	685.974.009,50	690.382.760,00	(4.408.750,50)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.142.815.968,17	3.131.987.339,00	10.828.629,17
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.346.702.560,07	3.560.167.321,00	(213.464.760,93)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.483.684.526,33	1.481.253.218,00	2.431.308,33
Jumlah	204.620.524.490,50	214.452.681.524,10	(9.832.157.033,60)

5.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp39.438.758.718,80. Perbandingan Beban Pemeliharaan 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.46
Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)			
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Beban Jasa Service	3.346.456.253,00	3.407.586.717,00	(61.130.464,00)
Beban Penggantian Suku Cadang	3.857.322.454,00	3.902.497.951,00	(45.175.497,00)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.779.971.883,00	7.319.090.168,00	460.881.715,00
Beban Jasa KIR	900.000,00	2.900.000,00	(2.000.000,00)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	194.645.143,00	168.656.497,00	25.988.646,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	447.371.263,00	512.772.610,00	(65.401.347,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	199.300.000,00	107.130.000,00	92.170.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.993.677.796,00	4.262.915.137,00	(1.269.237.341,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.018.762.859,11	20.603.818.088,97	(10.585.055.229,86)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.949.294.826,14	3.345.972.739,25	3.603.322.086,89
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.064.900,00	299.470.900,00	(282.406.000,00)
Beban Pemeliharaan Fasilitas Umum	1.063.827.700,00	2.305.748.894,00	(1.241.921.194,00)
Beban Pemeliharaan Jembatan	1.820.636.685,21	-	1.820.636.685,21
Beban Pemeliharaan Jaringan	749.526.956,34	-	749.526.956,34
Jumlah	39.438.758.718,80	46.238.559.702,22	(6.799.800.983,42)

Perbandingan Beban dan Belanja pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.47
Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2018

(dalam rupiah)			
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Beban Jasa Service	3.346.456.253,00	3.346.456.253,00	-
Beban Penggantian Suku Cadang	3.857.322.454,00	3.857.322.454,00	-
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.779.971.883,00	7.779.971.883,00	-
Beban Jasa KIR	900.000,00	900.000,00	-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	194.645.143,00	194.645.143,00	-
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	447.371.263,00	447.371.263,00	-
Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	-	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah	199.300.000,00	199.300.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.993.677.796,00	2.678.317.796,00	315.360.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.018.762.859,11	16.647.574.856,06	(6.628.811.996,95)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.949.294.826,14	6.949.294.826,14	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.064.900,00	17.064.900,00	-
Beban Pemeliharaan Fasilitas Umum	1.063.827.700,00	1.063.827.700,00	-
Beban Pemeliharaan Jembatan	1.820.636.685,21	1.820.636.685,21	-
Beban Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	9.849.650,00	(9.849.650,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	749.526.956,34	37.392.692,00	712.134.264,34
Jumlah	39.438.758.718,80	45.049.926.101,41	(5.611.167.382,61)

Perbedaan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.611.167.382,61 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan atas beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp315.360.000,00 terdiri atas penambahan beban pemeliharaan dari hutang pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp305.910.000,00 dan reklasifikasi dari peralatan mesin pada Dinas Perikanan sebesar Rp9.450.000,00.
2. Perbedaan atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.628.811.996,95 terdiri atas penyesuaian atas pembayaran hutang tahun lalu sebesar (Rp55.221.400,00), penambahan Beban Pemeliharaan Gedung dari hutang tahun berjalan sebesar Rp15.122.150,00, reklasifikasi beban pemeliharaan dari pengadaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.103.730.535,00 dan kapitalisasi beban pemeliharaan gedung ke aset tetap sebesar (Rp7.692.443.281,95).

3. Perbedaan atas Beban Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan sebesar Rp9.849.650,00 terdiri atas penambahan Beban Pemeliharaan dari hutang pada Rumah Sakit Umum Daerah pekerjaan rehab gedung ponex CV. Salempo Jaya.
4. Perbedaan atas Beban Pemeliharaan Jaringan sebesar Rp712.134.264,34 terdiri atas mutasi dari aset tetap ke beban pemeliharaan atas pekerjaan normalisasi saluran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .

Perbandingan Beban Pemeliharaan per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan beban pemeliharaan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.48
Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2018 dan 2017

Uraian	2018	2017	(dalam rupiah)
			Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.088.232.140,00	5.919.978.884,00	(4.831.746.744,00)
Dinas Kesehatan	4.025.841.063,11	8.705.808.067,97	(4.679.967.004,86)
Rumah Sakit Umum Daerah	969.354.679,00	1.174.387.000,00	(205.032.321,00)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.420.629.133,00	1.291.120.178,00	129.508.955,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	11.117.965.212,69	4.434.239.434,25	6.683.725.778,44
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	309.983.975,00	333.863.125,00	(23.879.150,00)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	620.632.704,00	684.564.838,00	(63.932.134,00)
Dinas Sosial	561.541.662,00	684.232.932,00	(122.691.270,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	247.136.910,00	880.756.090,00	(633.619.180,00)
Dinas Ketahanan Pangan	226.949.650,00	383.569.775,00	(156.620.125,00)
Dinas Lingkungan Hidup	2.385.120.046,00	2.382.020.946,00	3.099.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	434.133.348,00	550.316.672,00	(116.183.324,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	451.307.925,00	328.834.833,00	122.473.092,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	381.483.025,00	98.850.743,00	282.632.282,00
Dinas Perhubungan	1.294.999.624,00	1.380.382.888,00	(85.383.264,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	432.942.201,00	789.579.344,00	(356.637.143,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	758.658.527,00	461.899.483,00	296.759.044,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	263.836.253,00	220.062.240,00	43.774.013,00
Dinas Perikanan	188.624.725,00	394.374.725,00	(205.750.000,00)
Dinas Pertanian	263.236.419,00	314.252.494,00	(51.016.075,00)
Sekretariat Daerah	7.730.417.177,00	7.179.086.532,00	551.330.645,00
Sekretariat DPRD	1.538.135.475,00	1.304.342.200,00	233.793.275,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	96.153.200,00	213.526.091,00	(117.372.891,00)
Kecamatan Banyuasin I	56.270.000,00	71.238.500,00	(14.968.500,00)
Kecamatan Banyuasin III	75.588.087,00	1.060.657.259,00	(985.069.172,00)
Kecamatan Betung	49.265.095,00	378.236.375,00	(328.971.280,00)
Kecamatan rantau Bayur	21.931.000,00	96.827.651,00	(74.896.651,00)
Kecamatan Pulau Rimau	39.060.000,00	74.190.000,00	(35.130.000,00)
Kecamatan Talang Kelapa	47.165.550,00	520.323.750,00	(473.158.200,00)
Kecamatan Rambutan	50.367.750,00	122.165.100,00	(71.797.350,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	22.873.899,00	43.960.000,00	(21.086.101,00)
Kecamatan Tanjung Lago	72.502.473,00	147.035.984,00	(74.533.511,00)
Kecamatan Sembawa	23.586.550,00	87.328.700,00	(63.742.150,00)
Kecamatan Suak Tapeh	58.609.050,00	130.099.700,00	(71.490.650,00)
Kecamatan Banyuasin II	27.011.560,00	37.775.989,00	(10.764.429,00)
Kecamatan Makarti Jaya	12.674.625,00	8.880.000,00	3.794.625,00
Kecamatan Muara Padang	43.166.000,00	74.250.000,00	(31.084.000,00)
Kecamatan Muara Sugihan	67.678.118,00	33.792.000,00	33.886.118,00
Kecamatan Muara Telang	29.374.900,00	82.258.085,00	(52.883.185,00)
Kecamatan Air Salek	53.196.000,00	73.146.005,00	(19.950.005,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	32.766.362,00	36.058.450,00	(3.292.088,00)
Kecamatan Air Kumbang	29.629.125,00	109.161.800,00	(79.532.675,00)
Inspektorat Daerah	608.309.594,00	455.101.443,00	153.208.151,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	374.768.885,00	1.611.140.460,00	(1.236.371.575,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	581.023.800,00	354.541.201,00	226.482.599,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	254.625.222,00	520.341.735,00	(265.716.513,00)
Jumlah	39.438.758.718,80	46.238.559.702,22	(6.799.800.983,42)

Perbandingan Beban dan Belanja Pemeliharaan per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.49
Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan per SKPD Tahun 2018

			<i>(dalam rupiah)</i>
Uraian	Beban	LRA	Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.088.232.140,00	938.569.140,00	149.663.000,00
Dinas Kesehatan	4.025.841.063,11	11.228.220.745,06	(7.202.379.681,95)
Rumah Sakit Umum Daerah	969.354.679,00	654.068.529,00	315.286.150,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.420.629.133,00	1.253.432.283,00	167.196.850,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	11.117.965.212,69	10.405.830.948,35	712.134.264,34
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	309.983.975,00	309.983.975,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	620.632.704,00	550.632.704,00	70.000.000,00
Dinas Sosial	561.541.662,00	561.541.662,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	247.136.910,00	247.136.910,00	-
Dinas Ketahanan Pangan	226.949.650,00	226.949.650,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	2.385.120.046,00	2.385.120.046,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	434.133.348,00	434.133.348,00	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	451.307.925,00	451.307.925,00	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	381.483.025,00	381.483.025,00	-
Dinas Perhubungan	1.294.999.624,00	1.274.999.624,00	20.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	432.942.201,00	383.018.666,00	49.923.535,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	758.658.527,00	758.658.527,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	263.836.253,00	345.605.003,00	(81.768.750,00)
Dinas Perikanan	188.624.725,00	185.652.875,00	2.971.850,00
Dinas Pertanian	263.236.419,00	263.236.419,00	-
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	7.730.417.177,00	8.069.561.777,00	(339.144.600,00)
Sekretariat DPRD	1.538.135.475,00	1.213.820.475,00	324.315.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	96.153.200,00	96.153.200,00	-
Kecamatan Banyuasin I	56.270.000,00	56.270.000,00	-
Kecamatan Banyuasin III	75.588.087,00	75.588.087,00	-
Kecamatan Betung	49.265.095,00	43.865.095,00	5.400.000,00
Kecamatan rantau Bayur	21.931.000,00	21.931.000,00	-
Kecamatan Pulau Rimau	39.060.000,00	39.060.000,00	-
Kecamatan Talang Kelapa	47.165.550,00	47.165.550,00	-
Kecamatan Rambutan	50.367.750,00	50.367.750,00	-
Kecamatan Tungkal Ilir	22.873.899,00	22.873.899,00	-
Kecamatan Tanjung Lago	72.502.473,00	72.502.473,00	-
Kecamatan Sembawa	23.586.550,00	23.586.550,00	-
Kecamatan Suak Tapeh	58.609.050,00	58.609.050,00	-
Kecamatan Banyuasin II	27.011.560,00	27.011.560,00	-
Kecamatan Makarti Jaya	12.674.625,00	12.674.625,00	-
Kecamatan Muara Padang	43.166.000,00	43.166.000,00	-
Kecamatan Muara Sugihan	67.678.118,00	67.678.118,00	-
Kecamatan Muara Telang	29.374.900,00	11.879.900,00	17.495.000,00
Kecamatan Air Salek	53.196.000,00	53.196.000,00	-
Kecamatan Sumber Marga Telang	32.766.362,00	32.766.362,00	-
Kecamatan Air Kumbang	29.629.125,00	29.629.125,00	-
Inspektorat Daerah	608.309.594,00	439.569.594,00	168.740.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	374.768.885,00	365.768.885,00	9.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	581.023.800,00	581.023.800,00	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	254.625.222,00	254.625.222,00	-
Jumlah	39.438.758.718,80	45.049.926.101,41	(5.611.167.382,61)

5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp138.515.599.869,00. Perbandingan Beban Persediaan 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.3.50
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017

			(dalam rupiah)
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.291.391.222,00	38.850.822.158,00	(7.559.430.936,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.745.679.647,00	109.406.196.675,00	(3.660.517.028,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	35.000.000,00	-	35.000.000,00
Beban Paket Kegiatan/Pertemuan di luar kantor	1.443.529.000,00	1.041.174.950,00	402.354.050,00
Jumlah	138.515.599.869,00	149.298.193.783,00	(10.782.593.914,00)

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan Beban Perjalanan Dinas tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.51
Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2018 dan 2017

			(dalam rupiah)
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.727.812.160,00	15.036.933.481,00	(12.309.121.321,00)
Dinas Kesehatan	8.716.662.493,00	7.413.929.800,00	1.302.732.693,00
Rumah Sakit Umum Daerah	694.638.457,00	465.143.077,00	229.495.380,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.902.305.450,00	1.323.524.403,00	578.781.047,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	1.912.955.892,00	1.268.248.715,00	644.707.177,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	1.091.149.600,00	2.218.024.097,00	(1.126.874.497,00)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.418.911.284,00	748.293.584,00	670.617.700,00
Dinas Sosial	1.479.767.900,00	1.640.966.264,00	(161.198.364,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	617.116.419,00	1.648.328.878,00	(1.031.212.459,00)
Dinas Ketahanan Pangan	1.332.460.741,00	2.228.491.642,00	(896.030.901,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.142.470.208,00	1.031.941.553,00	110.528.655,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.006.165.456,00	1.255.647.131,00	(249.481.675,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.990.340,00	1.707.288.932,00	(706.298.592,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.909.729.727,00	2.069.939.201,00	1.839.790.526,00
Dinas Perhubungan	936.770.942,00	981.100.832,00	(44.329.890,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.876.945.494,00	1.564.077.254,00	312.868.240,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	2.617.176.919,00	3.076.814.372,00	(459.637.453,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	645.587.862,00	997.917.026,00	(352.329.164,00)
Dinas Perikanan	1.018.361.253,00	1.582.511.426,00	(564.150.173,00)
Dinas Pertanian	2.458.026.644,00	3.352.815.893,00	(894.789.249,00)
DPRD	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Sekretariat Daerah	12.848.032.865,00	9.135.143.648,00	3.712.889.217,00
Sekretariat DPRD	70.833.958.719,00	69.604.843.906,00	1.229.114.813,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	883.775.259,00	1.358.592.770,00	(474.817.511,00)
Kecamatan Banyuasin I	171.404.900,00	137.202.500,00	34.202.400,00
Kecamatan Banyuasin III	182.137.000,00	102.195.000,00	79.942.000,00
Kecamatan Betung	71.258.200,00	59.130.000,00	12.128.200,00
Kecamatan rantau Bayur	40.469.694,00	71.563.600,00	(31.093.906,00)
Kecamatan Pulau Rimau	95.441.759,00	69.000.000,00	26.441.759,00
Kecamatan Talang Kelapa	202.586.700,00	170.104.707,00	32.481.993,00
Kecamatan Rambutan	121.639.900,00	57.559.500,00	64.080.400,00
Kecamatan Tungkal Ilir	59.440.000,00	92.368.500,00	(32.928.500,00)
Kecamatan Tanjung Lago	109.830.000,00	92.352.000,00	17.478.000,00
Kecamatan Sembawa	126.211.000,00	152.800.000,00	(26.589.000,00)
Kecamatan Suak Tapeh	72.236.900,00	91.051.600,00	(18.814.700,00)
Kecamatan Banyuasin II	200.541.000,00	225.076.000,00	(24.535.000,00)
Kecamatan Makarti Jaya	127.800.000,00	146.175.938,00	(18.375.938,00)
Kecamatan Muara Padang	101.850.000,00	135.900.000,00	(34.050.000,00)
Kecamatan Muara Sugihan	165.710.901,00	181.812.500,00	(16.101.599,00)
Kecamatan Muara Telang	69.855.034,00	133.844.000,00	(63.988.966,00)
Kecamatan Air Salek	112.491.000,00	161.607.500,00	(49.116.500,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	143.477.500,00	120.390.000,00	23.087.500,00
Kecamatan Air Kumbang	84.101.000,00	73.150.000,00	10.951.000,00
Kecamatan Selat Penguguan	56.809.500,00	-	56.809.500,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	71.620.000,00	-	71.620.000,00
Inspektorat Daerah	2.707.100.393,00	2.400.357.759,00	306.742.634,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.492.144.678,00	3.705.668.599,00	(1.213.523.921,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.610.372.713,00	6.372.429.267,00	(762.056.554,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.247.298.013,00	2.835.936.928,00	(588.638.915,00)
Jumlah	138.515.599.869,00	149.298.193.783,00	(10.782.593.914,00)

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.52
Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018

<i>(dalam rupiah)</i>			
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.291.391.222,00	31.291.391.222,00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.745.679.647,00	105.745.679.647,00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	35.000.000,00	35.000.000,00	-
Beban Paket Kegiatan/Pertemuan di luar kantor	1.443.529.000,00	1.443.529.000,00	-
Jumlah	138.515.599.869,00	138.515.599.869,00	-

5.3.2.6 Beban Subsidi

Tidak terdapat Beban Subsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

5.3.2.7 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban atas Hibah pemerintah daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Beban Hibah sebesar Rp131.691.443.056,34. Jumlah Beban Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp85.416.433.683,00 dan berbentuk barang senilai Rp46.275.009.373,34. Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara Beban Hibah 2018 dan 2017.

Tabel 5.3.53
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 *(dalam rupiah)*

Uraian	2018	2017	Kenaikan /
Beban Hibah dalam bentuk uang	85.416.433.683,00	28.178.320.000,00	57.238.113.683,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	73.128.733.683,00	14.000.000.000,00	59.128.733.683,00
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang	8.437.200.000,00	10.228.320.000,00	(1.791.120.000,00)
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	285.000.000,00	190.000.000,00	95.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.565.500.000,00	3.760.000.000,00	(194.500.000,00)
Beban Hibah dalam bentuk barang	46.275.009.373,34	14.318.681.102,78	31.956.328.270,56
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kpd Pemerintah Pusat	7.538.617.875,10	5.858.067.491,05	1.680.550.384,05
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	43.000.000,00	294.100.000,00	(251.100.000,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang	16.488.532.100,00	2.377.448.307,00	14.111.083.793,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang	4.753.244.938,00	1.343.781.216,00	3.409.463.722,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang	7.655.805.417,79	1.394.567.426,73	6.261.237.991,06
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang	-	50.850.000,00	(50.850.000,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang	1.171.805.000,00	-	1.171.805.000,00
Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang	1.101.739.977,45	1.010.464.000,00	91.275.977,45
Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kpd Pemerintah Desa	6.947.905.900,00	1.331.135.375,00	5.616.770.525,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	574.358.165,00	658.267.287,00	(83.909.122,00)
Total	131.691.443.056,34	42.497.001.102,78	89.194.441.953,56

Rincian Beban Hibah dalam bentuk barang yang dianggarkan di SKPD jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.54
Beban Hibah Barang per SKPD Tahun 2018 dan 2017

			(dalam rupiah)
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Hibah dalam bentuk uang			
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	85.416.433.683,00	28.178.320.000,00	57.238.113.683,00
Hibah dalam bentuk barang			
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6.998.990.874,45	5.745.818.607,00	1.253.172.267,45
Dinas Kesehatan	172.540.000,00	203.430.000,00	(30.890.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.393.448.483,89	2.434.081.710,78	16.959.366.773,11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	75.000.000,00	(75.000.000,00)
Dinas Sosial	131.035.000,00	262.275.000,00	(131.240.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	14.123.486.000,00	245.100.000,00	13.878.386.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263.933.165,00	74.312.287,00	189.620.878,00
Dinas Perhubungan	1.982.479.750,00	1.331.135.375,00	651.344.375,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43.000.000,00	49.000.000,00	(6.000.000,00)
Dinas Perikanan	1.315.752.100,00	1.722.975.132,00	(407.223.032,00)
Dinas Pertanian	1.049.294.000,00	654.473.175,00	394.820.825,00
Sekretariat Daerah	794.200.000,00	1.477.829.816,00	(683.629.816,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.350.000,00	43.250.000,00	(39.900.000,00)
Jumlah	46.275.009.373,34	14.318.681.102,78	31.956.328.270,56
Jumlah	131.691.443.056,34	42.497.001.102,78	89.194.441.953,56

Sedangkan bila dibandingkan dengan belanja hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.55
Beban dan Belanja Hibah Tahun 2018

			(dalam rupiah)
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Hibah dalam Bentuk Uang			
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	85.416.433.683,00	85.416.433.683,00	-
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	8.437.200.000,00	8.437.200.000,00	-
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	285.000.000,00	285.000.000,00	-
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.565.500.000,00	3.565.500.000,00	-
Hibah dalam Bentuk Barang			
Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat	7.538.617.875,10	7.659.884.669,30	(121.266.794,20)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	43.000.000,00	68.618.000,00	(25.618.000,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	16.488.532.100,00	2.373.786.100,00	14.114.746.000,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	4.753.244.938,00	3.838.992.750,00	914.252.188,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	7.655.805.417,79	7.722.435.409,13	(66.629.991,34)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian	-	-	-
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	1.171.805.000,00	1.174.274.100,00	(2.469.100,00)
Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	1.101.739.977,45	1.172.777.977,45	(71.038.000,00)
Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Desa	6.947.905.900,00	6.947.905.900,00	-
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	574.358.165,00	387.580.000,00	186.778.165,00
Jumlah	131.691.443.056,34	116.762.688.588,88	14.928.754.467,46

Perbedaan Beban Hibah dan Belanja Hibah sebesar Rp14.928.754.467,46 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan antara Beban dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp121.266.794,20 terdapat di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atas pembayaran hutang pemeliharaan gedung AKN tahun lalu sebesar Rp54.773.900,00 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atas pembayaran hutang pemeliharaan rehab kantor Polres Banyuasin I sebesar Rp66.492.894,20.
2. Perbedaan Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp25.618.000,00 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan atas pembayaran hutang pemeliharaan tahun lalu.
3. Perbedaan Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian sebesar Rp14.114.746.000,00 merupakan selisih antara hibah lumbung pangan desa senilai Rp14.123.486.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan pembayaran hutang pemeliharaan pembangunan gedung pakan di Rantau Bayur tahun lalu sebesar Rp8.740.000,00 pada Dinas Perikanan.
4. Perbedaan Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan sebesar Rp914.252.188,00 terdiri dari hibah personal komputer ke sekolah swasta senilai Rp373.026.838,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan penambahan hutang pemeliharaan pembangunan pagar pesantren Nurul Iman sebesar Rp4.960.350,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
5. Perbedaan Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan sebesar Rp66.629.991,34 merupakan pembayaran hutang pemeliharaan tahun lalu atas pembangunan masjid pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
6. Perbedaan Beban dan Belanja Hibah/Jasa Yang diserahkan kepada kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional sebesar Rp2.469.100,00 merupakan pembayaran hutang pemeliharaan tahun lalu atas pembuatan lapangan bola voli Desa Muara Damai Kecamatan Sembawa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
7. Perbedaan Beban dan Belanja Hibah Barang Modal Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan sebesar Rp71.038.000,00 merupakan pembayaran hutang pemeliharaan hutang pemeliharaan tahun lalu atas Rehab ruangan sekolah pada sekolah PAUD dan swasta.
8. Perbedaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp186.778.165,00 merupakan penyesuaian atas persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat berupa alat kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rincian Beban dan Belanja Hibah dalam bentuk barang yang dianggarkan di SKPD jika dibandingkan dengan Belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.56
Beban dan Belanja Hibah per SKPD Tahun 2018

			<i>(dalam rupiah)</i>
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Hibah dalam bentuk uang	85.416.433.683,00	85.416.433.683,00	-
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	85.416.433.683,00	85.416.433.683,00	-
Hibah dalam bentuk barang	46.275.009.373,34	31.346.254.905,88	14.928.754.467,46
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6.998.990.874,45	6.215.510.936,45	783.479.938,00
Dinas Kesehatan	172.540.000,00	172.540.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.393.448.483,89	19.524.080.119,43	(130.631.635,54)
Dinas Sosial	131.035.000,00	130.690.000,00	345.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	14.123.486.000,00	25.618.000,00	14.097.868.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263.933.165,00	77.500.000,00	186.433.165,00
Dinas Perhubungan	1.982.479.750,00	1.982.479.750,00	-
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43.000.000,00	43.000.000,00	-
Dinas Perikanan	1.315.752.100,00	1.324.492.100,00	(8.740.000,00)
Dinas Pertanian	1.049.294.000,00	1.049.294.000,00	-
Sekretariat Daerah	794.200.000,00	794.200.000,00	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.350.000,00	3.350.000,00	-
Jumlah	131.691.443.056,34	116.762.688.588,88	14.928.754.467,46

5.3.2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban atas Bantuan Sosial pemerintah daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp11.726.362,00. Berikut tersaji Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017.

Tabel 5.3.57
Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017

			<i>(dalam rupiah)</i>
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	-	7.300.000,00	(7.300.000,00)
Beban Bansos Kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat dengan tujuan Penanggulangan Kemiskinan	-	142.025.000,00	(142.025.000,00)
Beban Bansos Kepada Kelompok Masyarakat/ Masyarakat dengan tujuan Penanggulangan Bencana	11.726.362,00	47.000.000,00	(35.273.638,00)
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Dengan Tujuan Jaminan Sosial	-	73.000.000,00	(73.000.000,00)
Jumlah	11.726.362,00	269.325.000,00	(257.598.638,00)

Uraian lebih lanjut terkait dengan Bantuan Sosial per masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.58
Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2018 dan 2017

			<i>(dalam rupiah)</i>
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	11.726.362,00	47.000.000,00	(35.273.638,00)
Sekretariat Daerah	-	142.025.000,00	(142.025.000,00)
Kecamatan Rambutan	-	7.300.000,00	(7.300.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	73.000.000,00	(73.000.000,00)
Jumlah	11.726.362,00	269.325.000,00	(257.598.638,00)

Tabel 5.3.59
Beban dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018

			(dalam rupiah)
	Uraian	Beban	LRA
	Beban Bansos Kepada Kelompok Masyarakat/ Masyarakat dengan tujuan Penanggulangan Bencana	11.726.362,00	82.705.000,00
	Jumlah	11.726.362,00	82.705.000,00
			(70.978.638,00)

Perbedaan antara Beban dan Belanja Bantuan Sosial tahun 2018 sebesar Rp70.978.638,00 merupakan penyesuaian atas nilai persediaan bantuan sosial per 31 Desember 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.

5.3.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp224.860.360.886,69 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp240.132.945.793,34 terdapat penurunan sebesar Rp15.272.584.906,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.60
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017

				(dalam rupiah)
	Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Peralatan dan Mesin		63.160.813.120,95	61.136.232.531,42	2.024.580.589,53
	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	1.632.979.587,00	1.788.131.549,00	(155.151.962,00)
	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	4.625.000,00	1.490.625,00	3.134.375,00
	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	244.258.369,00	311.520.317,00	(67.261.948,00)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.695.491.605,00	14.380.470.415,00	(684.978.810,00)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	57.578.331,00	11.106.667,00	46.471.664,00
	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	530.655.529,00	541.229.155,00	(10.573.626,00)
	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	190.000,00	-	190.000,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	208.571.889,00	231.466.064,00	(22.894.175,00)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	43.537.590,00	45.551.996,00	(2.014.406,00)
	Beban Penyusutan Alat Ukur	612.443.419,95	670.733.276,00	(58.289.856,05)
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.315.665.092,00	1.582.786.507,00	(267.121.415,00)
	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	105.620.506,00	193.881.040,00	(88.260.534,00)
	Beban Penyusutan Alat Kantor	5.178.704.110,00	5.253.601.220,60	(74.897.110,60)
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	10.894.878.416,00	8.032.225.096,87	2.862.653.319,13
	Beban Penyusutan Komputer	7.381.165.070,00	7.591.392.801,00	(210.227.731,00)
	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.147.965.497,00	1.321.434.000,95	(173.468.503,95)
	Beban Penyusutan Alat Studio	1.773.912.246,00	1.841.936.402,00	(68.024.156,00)
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	450.696.475,00	464.274.956,00	(13.578.481,00)
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	25.110.749,00	24.803.333,00	307.416,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	8.773.603.483,00	8.000.856.289,00	772.747.194,00
	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	440.099.800,00	466.420.723,00	(26.320.923,00)
	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	2.503.893.505,00	2.333.960.591,00	169.932.914,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.318.948.917,00	5.221.155.926,00	97.792.991,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	13.717.005,00	13.717.002,00	3,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	13.378.363,00	14.547.029,00	(1.168.666,00)
	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	93.890.400,00	82.221.663,00	11.668.737,00
	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	32.807.445,00	26.215.986,00	6.591.459,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	388.982.345,00	392.944.534,00	(3.962.189,00)
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	26.474.440,00	26.051.053,00	423.387,00
	Beban Penyusutan Senjata Api	3.296.500,00	5.290.670,00	(1.994.170,00)
	Beban Penyusutan Peralengkapan Non Senjata Api	104.382.165,00	154.236.679,00	(49.854.514,00)
	Beban Penyusutan Senjata Sinar	450.000,00	-	450.000,00
	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	142.839.272,00	110.578.965,00	32.260.307,00
Gedung dan Bangunan		21.667.601.038,00	20.589.457.963,00	1.078.143.075,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.645.737.619,00	19.691.048.321,00	954.689.298,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	732.147.903,00	662.514.607,00	69.633.296,00
	Beban Penyusutan Bangunan Menara	7.710.543,00	7.710.543,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	1.983.500,00	1.983.500,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	114.560.354,00	62.951.561,00	51.608.793,00
	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	21.479.040,00	21.479.040,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Tiik Kontrol/Pasti	10.178.800,00	10.178.800,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	133.803.279,00	131.591.591,00	2.211.688,00
Jalan Irigasi dan Jaringan		138.175.726.982,00	156.386.714.401,00	(18.210.987.419,00)
	Beban Penyusutan Jalan	110.125.197.308,00	128.761.117.538,00	(18.635.920.230,00)
	Beban Penyusutan Jembatan	7.270.498.904,00	7.120.576.888,00	149.922.016,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	5.305.050.985,00	5.136.471.545,00	168.579.440,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Pasang Surut	1.725.311.130,00	1.724.884.540,00	426.590,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	463.242.536,00	463.242.536,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.114.464.078,00	4.633.278.498,00	481.185.580,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	16.313.868,00	16.313.868,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	3.189.982.489,00	3.177.194.681,00	12.787.808,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	505.475.552,00	368.634.103,00	136.841.449,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air	188.603.057,00	188.603.057,00	-
	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	138.664.148,00	80.967.299,00	57.696.849,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	85.437.628,00	62.828.606,00	22.609.022,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	501.611.471,00	499.831.772,00	1.779.699,00
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	76.771.507,00	73.082.924,00	3.688.583,00
	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	6.260.387,00	6.260.387,00	-
	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pengaman	2.150.000,00	2.150.000,00	-
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	2.351.064.925,00	2.814.310.256,00	(463.245.331,00)
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.013.434.744,00	1.169.139.005,00	(155.704.261,00)
	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	93.192.265,00	87.826.898,00	5.365.367,00
Aset Tidak Berwujud		1.856.219.745,74	2.020.540.897,92	(164.321.152,18)
	Beban Amortisasi Goodwill	1.856.219.745,74	1.000.389.597,92	855.830.147,82
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	1.020.151.300,00	(1.020.151.300,00)
	Jumlah	224.860.360.886,69	240.132.945.793,34	(15.272.584.906,65)

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per masing-masing SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.61
Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD Tahun 2018 dan 2017

Uraian	<i>(dalam rupiah)</i>		
	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	29.486.518.705,78	24.980.805.909,75	4.505.712.796,03
Dinas Kesehatan	14.128.410.369,00	12.027.381.662,50	2.101.028.706,50
Rumah Sakit Umum Daerah	5.148.160.325,00	4.654.798.516,00	493.361.809,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18.955.631.967,00	18.064.485.248,00	891.146.719,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	114.060.591.996,00	133.355.147.919,00	(19.294.555.923,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	1.067.018.428,00	862.456.745,00	204.561.683,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	920.234.683,00	969.804.632,00	(49.569.949,00)
Dinas Sosial	228.103.034,00	326.983.066,00	(98.880.032,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.345.358.574,00	6.599.426.603,00	(1.254.068.029,00)
Dinas Ketahanan Pangan	606.608.620,00	659.890.913,00	(53.282.293,00)
Dinas Lingkungan Hidup	2.073.363.028,00	2.425.707.805,00	(352.344.777,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	830.838.345,00	951.981.750,40	(121.143.405,40)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	555.761.291,00	1.453.013.099,00	(897.251.808,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	1.094.260.863,00	1.302.265.410,00	(208.004.547,00)
Dinas Perhubungan	3.336.049.982,00	4.140.699.223,00	(804.649.241,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.782.107.224,25	2.094.842.902,69	687.264.321,56
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.658.164.293,00	2.077.001.092,00	581.163.201,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	698.981.902,00	783.282.156,00	(84.300.254,00)
Dinas Perikanan	1.596.627.617,00	1.733.816.253,00	(137.188.636,00)
Dinas Pertanian	2.988.624.049,00	3.493.041.418,00	(504.417.369,00)
DPRD	-	3.666.953.834,00	(3.666.953.834,00)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	7.795.432.865,00	(7.795.432.865,00)
Sekretariat Daerah	7.516.179.402,33	53.240.250,00	7.462.939.152,33
Sekretariat DPRD	2.996.641.564,00	-	2.996.641.564,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	421.078.852,00	497.800.777,00	(76.721.925,00)
Kecamatan Banyuasin I	113.514.456,00	104.064.069,00	9.450.387,00
Kecamatan Banyuasin III	155.355.437,00	158.591.309,00	(3.235.872,00)
Kecamatan Betung	96.965.901,00	90.919.391,00	6.046.510,00
Kecamatan rantau Bayur	135.675.128,00	119.470.671,00	16.204.457,00
Kecamatan Pulau Rimau	201.882.868,00	209.092.625,00	(7.209.757,00)
Kecamatan Talang Kelapa	134.630.627,00	124.473.946,00	10.156.681,00
Kecamatan Rambutan	109.194.455,00	89.455.331,00	19.739.124,00
Kecamatan Tungkal Ilir	127.893.466,00	125.120.638,00	2.772.828,00
Kecamatan Tanjung Lago	87.184.901,00	88.635.734,00	(1.450.833,00)
Kecamatan Sembawa	133.360.638,00	130.255.869,00	3.104.769,00
Kecamatan Suak Tapeh	132.572.387,00	116.529.919,00	16.042.468,00
Kecamatan Banyuasin II	121.895.380,00	125.766.780,00	(3.871.400,00)
Kecamatan Makarti Jaya	135.626.890,00	119.318.331,00	16.308.559,00
Kecamatan Muara Padang	191.522.010,00	192.756.319,00	(1.234.309,00)
Kecamatan Muara Sugihan	114.544.765,00	114.451.123,00	93.642,00
Kecamatan Muara Telang	132.601.590,00	138.021.612,00	(5.420.022,00)
Kecamatan Air Salek	112.983.399,00	112.834.821,00	148.578,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	128.368.427,00	135.651.220,00	(7.282.793,00)
Kecamatan Air Kumbang	135.579.409,00	128.676.802,00	6.902.607,00
Kecamatan Selat Penuguan	281.250,00	-	281.250,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	508.333,00	-	508.333,00
Inspektorat Daerah	524.879.709,00	502.501.715,00	22.377.994,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	425.454.756,00	531.183.633,33	(105.728.877,33)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.230.641.235,33	1.075.290.061,00	155.351.174,33
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	681.928.355,00	629.623.824,67	52.304.530,33
Jumlah	224.860.360.886,69	240.132.945.793,34	(15.272.584.906,65)

5.3.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.440.595.193,32. Sedangkan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017 sebesar Rp6.736.224.708,77 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.62
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017

	(dalam rupiah)		
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Beban Penyisihan Piutang Pajak	38.106.132,36	4.341.864.173,53	(4.303.758.041,17)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	514.835.958,94	2.147.164.150,24	(1.632.328.191,30)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	247.196.385,00	(247.196.385,00)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	6.887.653.102,02	-	6.887.653.102,02
Jumlah	7.440.595.193,32	6.736.224.708,77	704.370.484,55

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang per masing-masing SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.63
Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2018 dan 2017

	(dalam rupiah)		
Uraian	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Rumah Sakit Umum Daerah	417.829.161,00	73.708.563,50	344.120.597,50
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.022.766.032,32	6.662.516.145,27	360.249.887,05
Jumlah	7.440.595.193,32	6.736.224.708,77	704.370.484,55

5.3.2.11 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain merupakan beban atas aset *extra comptable* untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp25.400.228.662,85 sedangkan Beban Lain-lain Tahun 2017 sebesar Rp31.999.509.551,95 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.64
Beban Lain-lain Tahun 2018 dan 2017

Uraian	(dalam rupiah)		
	2018	2017	Kenaikan / Penurunan
Belanja Alat - alat Angkutan Non-Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	-	2.632.000,00	(2.632.000,00)
Belanja Alat - alat Pengolahan Pertanian dan Pertenakan Non-Kapitalisasi/Kategori Aset tetap atau Belanja	-	28.835.000,00	(28.835.000,00)
Belanja Peralatan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	3.919.515.237,30	395.206.345,95	3.524.308.891,35
Belanja Perlengkapan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	152.536.200,00	897.035.709,00	(744.499.509,00)
Belanja Kelengkapan Komputer Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	24.540.500,00	73.206.000,00	(48.665.500,00)
Belanja Meubelair Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	109.218.726,00	7.989.478.590,00	(7.880.259.864,00)
Belanja Peralatan Dapur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	376.527.021,63	133.456.312,00	243.070.709,63
Belanja Penghias Ruang RT Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	440.469.473,00	120.122.856,00	320.346.617,00
Belanja Alat - Alat Studio Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	-	957.000,00	(957.000,00)
Belanja Alat - alat Ukur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	2.500.000,00	1.479.250,00	1.020.750,00
Belanja Alat - alat Kedokteran Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	734.618.786,92	784.025.335,00	(49.406.548,08)
Belanja Alat - alat Laboratorium Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	16.050.000,00	2.617.347.400,00	(2.601.297.400,00)
Belanja Aset Lainnya Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	19.600.753.218,00	18.685.076.626,00	915.676.592,00
Jumlah	25.400.228.662,85	31.999.509.551,95	(6.599.280.889,10)

Perbandingan Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.65
Beban dan Belanja Lain-lain Tahun 2018

Uraian	(dalam rupiah)		
	Beban	LRA	Perbedaan
Beban Peralatan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	3.919.515.237,30	173.448.666,00	3.746.066.571,30
Beban Perlengkapan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	152.536.200,00	72.269.000,00	80.267.200,00
Beban Kelengkapan Komputer Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	24.540.500,00	15.888.000,00	8.652.500,00
Beban Meubelair Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	109.218.726,00	57.623.726,00	51.595.000,00
Beban Peralatan Dapur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	376.527.021,63	3.316.000,00	373.211.021,63
Beban Penghias Ruang RT Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	440.469.473,00	429.979.473,00	10.490.000,00
Beban Alat - alat Ukur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Beban Alat - alat Kedokteran Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	734.618.786,92	193.954.734,00	540.664.052,92
Beban Alat - alat Laboratorium Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	16.050.000,00	-	16.050.000,00
Beban Alat - alat Persampahan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	23.499.500,00	68.499.500,00	(45.000.000,00)
Beban Aset Lainnya Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	19.600.753.218,00	11.949.800,00	19.588.803.418,00
Jumlah	25.400.228.662,85	1.026.928.899,00	24.373.299.763,85

5.3.2.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer adalah Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa merupakan Beban atas Bantuan Keuangan Desa untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp108.403.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp106.112.358.721,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.290.641.279,00. Perbandingan Beban dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Desa untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.66
Beban dan Belanja Transfer Keuangan ke Desa Tahun 2018

			(dalam rupiah)
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	108.403.000.000,00	361.056.921.213,00	(252.653.921.213,00)
Jumlah	108.403.000.000,00	361.056.921.213,00	(252.653.921.213,00)

5.3.2.13 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Beban atas Bantuan Keuangan Lainnya untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.267.637.809,00 berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lain sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar Rp1.267.637.809,00 maka tidak terdapat perbedaan. Perbandingan Beban dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.67
Beban dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2018

			(dalam rupiah)
Uraian	Beban	LRA	Perbedaan
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.267.637.809,00	1.267.637.809,00	-
Jumlah	1.267.637.809,00	1.267.637.809,00	-

5.3.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional menyajikan pendapatan dan beban Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang sifatnya tidak rutin.

5.3.3.1 Surplus Non Operasional Lainnya

Dalam periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tidak terdapat Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya.

5.3.3.2 Defisit Non Operasional Lainnya

Dalam periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp251.220.170,19. Defisit tersebut merupakan penurunan nilai investasi di PDAM sebagai akibat penurunan nilai ekuitas PDAM atas kerugian yang di akui Tahun 2015.

5.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan pos laporan operasional yang memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik berupa kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

5.3.4.1 Pendapatan Luar Biasa

Sampai dengan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tidak terdapat pendapatan luar biasa.

5.3.4.2 Beban Luar Biasa

Sampai dengan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat beban luar biasa sebesar Rp2.321.687.000,00 yang berasal dari pengembalian pendapatan transfer tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas Aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berikut penjelasan mengenai komponen Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal sebesar Rp3.802.689.972.329,28 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2017.

5.4.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional

Penambahan ekuitas dari surplus/defisit Laporan Operasional sebesar Rp127.837.351.191,36 merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 5.4.1
Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017

Uraian	(dalam rupiah)	
	2018	2017
Pendapatan Operasional	1.856.056.073.931,33	1.760.686.375.696,92
Beban	1.725.645.815.569,78	1.655.314.284.598,74
Surplus defisit dari kegiatan operasional	130.410.258.361,55	105.372.091.098,18
Surplus Defisit dari Non Operasional	(251.220.170,19)	492.227.245,76
Surplus defisit sebelum pos luar biasa	130.159.038.191,36	105.864.318.343,94
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	2.321.687.000,00	-
Surplus defisit setelah pos luar biasa	127.837.351.191,36	105.864.318.343,94

5.4.3. Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.4.2
Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar

Uraian	(dalam rupiah)
	31 Desember 2018
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	18.437.595.803,00
Penilaian Aset Tetap	7.480.064.700,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	(2.331.088.734,12)
Koreksi Hutang Lain-lain	11.601.000,00
Koreksi Pendapatan tahun lalu	535.226.182,00
Koreksi piutang tahun lalu	(394.571.140,00)
Koreksi Saldo Awal Hutang Beban	(6.841.900,00)
Koreksi Lebih salur DBH	(5.401.163.529,00)
Koreksi Kurang Salur DBH	49.054.942.122,67
Koreksi Penyisihan Piutang	(55.460,00)
Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang (Penyertaan Modal)	20.522.254.435,90
Jumlah	87.907.963.480,45

5.4.3.1 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap

Koreksi saldo awal aset tetap untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp 18.437.595.803,00 merupakan koreksi atas pencatatan nilai tanah yang semula belum dicatat di Neraca, diantaranya :

1. Tanah untuk Puskesmas Kelurahan Tanah Mas dengan sertifikat tahun 1999 dengan luas 1.016 m², Surat Hibah Tanah tanggal 18 September 2015 luas 1.337,2 m² sebesar Rp1,00.
2. Tanah Ruang Rapat kantor Lurah Kelurahan Sukomoro (satu hamparan dengan kantor lurah) berdasarkan Surat Pengoperan Hak sebesar Rp1,00.
3. Tanah Taman Kota Kecamatan Betung sebesar Rp1,00.
4. Koreksi atas kurang catat enam bidang tanah yang telah dimiliki sertifikat pada Kawasan Terpadu Mandiri Telang sebesar Rp96.600.800,00.
5. Koreksi atas papan nama instansi yang dihibahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Pemkab Banyuasin tahun 2011 namun belum tercatat pada KIB sebesar Rp74.292.000,00.
6. Koreksi atas pencatatan tiga bangunan gedung dan tiga tugu batas yang dihibahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Pemkab Banyuasin (Disnakertrans) sesuai BAST Hibah 4460/DPDPTT/DPKTrans/11/2017 sebesar Rp2.181.161.000,00.
7. Koreksi atas tiga bangunan jalan, dua jembatan penyebrangan orang dan satu saluran irigasi yang dihibahkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Pemkab Banyuasin sesuai BAST Hibah Nomor 4450/DPDPTT/DPKTrans/11/2017 sebesar Rp16.085.542.000,00.

5.4.3.2 Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset tetap akibat dampak perubahan kebijakan sebesar Rp7.480.064.700,00 adalah penilaian aset tetap berupa tanah di 57 lokasi yang tersebar di beberapa sekolah negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

5.4.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu

Koreksi akumulasi penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.331.088.734,12 adalah merupakan koreksi saldo awal penyusutan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Perkimtan, Kesbangpol, dan Dinas Kehutanan perkebunan.

5.4.3.4 Koreksi Hutang Lain-lain

Koreksi hutang lain-lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.601.000,00 adalah koreksi atas pencatatan sisa pengembalian dana BOS tahun 2016 dan 2017 yang disetor ke kas daerah sebesar Rp11.601.000,00.

5.4.3.5 Koreksi Pendapatan Tahun lalu

Koreksi hutang beban untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 berjumlah Rp535.226.182,00 terdiri dari koreksi atas pendapatan tahun lalu atas kelebihan penerimaan PBB tahun 2016 dari Bank Sumsel yang dicatat sebagai hutang lain-lain sebesar Rp908.842,00 dan koreksi atas kurang pencatatan persediaan hibah obat-obatan

per 31 Desember 2018 dari Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Tahun 2017 sebesar Rp534.317.340,00.

5.4.3.6 Koreksi Piutang Tahun Lalu

Koreksi saldo awal piutang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp394.571.140,00 terdiri dari :

- Koreksi saldo piutang BLUD tahun 2017 setelah validasi BPJS	(369.787.700,00)
- Koreksi pencatatan pajak reklame tahun 2017	16.210.000,00
- Koreksi piutang TGR tahun lalu yang belum jelas nama pembayarannya	3.000.000,00
- Koreksi piutang atas cicilan pembayaran penjualan kendaraan perseorangan tahun 2017	(50.000.000,00)
- Koreksi tahun 2018 atas belum diakui setoran kerugian daerah	(5.000.000,00)
- Koreksi TGR Dewan tahun 2018	4.000,00
- Koreksi TGR Dewan tahun 2018	196.000,00
- koreksi penyesuaian atas Piutang PBB tahun lalu	10.806.560,00
Jumlah	(394.571.140,00)

5.4.3.7 Koreksi Saldo Awal Hutang Beban

Koreksi saldo awal hutang beban untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp 6.841.900,00 merupakan koreksi hutang antara lain :

1. Koreksi atas pengakuan hutang dana tambahan penghasilan non sertifikasi tahun 2017 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp1.000.000,00.
2. Koreksi atas hutang jamsoskes tahun 2015 sebesar (Rp7.841.900,00) terdiri dari : Sisa hutang bulan Januari Rp174.700,00 dan Tagihan susulan bulan Mei (Rp7.667.200,00).

5.4.3.8 Koreksi Lebih Salur Dana Bagi Hasil

Koreksi hutang beban untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp5.401.163.529,00 merupakan koreksi atas kurang salur pendapatan DBH tahun lalu sesuai dengan PMK Nomor 103/PMK.07/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Bagi Hasil SDA Minerba - iuran tetap tahun 2017	3.059.589.711,00
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi tahun 2016,2017	2.325.063.213,00
Bagi Hasil SDA Gas Bumi tahun 2016	16.510.605,00
Jumlah	5.401.163.529,00

5.4.3.9 Koreksi Kurang Salur Dana Bagi Hasil

Koreksi Kurang Salur Dana Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 berjumlah Rp49.054.942.122,67 merupakan koreksi atas kurang salur pendapatan DBH tahun lalu sesuai dengan PMK Nomor 103/PMD.07/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2018, dan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 758/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Utang DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bulan November 2018 dan Kurang Salur Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Bagi Hasil PBB tahun 2017	16.591.585.388,00
- Bagi Hasil PPH pasal 25/29 tahun 2017	2.354.744.122,00
- Bagi Hasil SDA Kehutanan tahun 2012 - 2017	1.354.877.215,00
- Bagi Hasil SDA Minerba - landrent tahun 2015,2017	202.886.988,00
- Bagi Hasil SDA Minerba - royalti tahun 2015,2017	6.742.703.982,00
- Bagi Hasil SDA Panas Bumi tahun 2017	5.626.485,00
- Bagi Hasil SDA Gas Bumi Bumi tahun 2017	21.698.170.494,00
- Bagi Hasil SDA Perikanan tahun 2017	99.184.671,00
- Bagi Hasil Cukai Tembakau tahun 2017	77.519,00
- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017	668.269,52
- Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan tahun 2017	4.416.989,15
Jumlah	<u>49.054.942.122,67</u>

5.4.3.10 Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp55.460,00 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 merupakan koreksi atas perbaikan tanggal terbit SPPT pada database SISMIOP.

5.4.3.11 Koreksi Saldo Awal Investasi Jangka Panjang

Koreksi saldo awal investasi jangka panjang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp20.522.254.435,90 merupakan koreksi atas nilai investasi pada PDAM atas akumulasi kerugian yang menjadi pengurang terhadap nilai investasi Kabupaten Banyuasin. Penurunan nilai investasi semula dihitung dengan membebaskan seluruh kegiatan PDAM pada nilai investasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, menjadi diperhitungkan berdasarkan proporsional sesuai dengan jumlah modal PDAM yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir sebesar Rp4.018.435.287.001,09 merupakan hasil perhitungan saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2018.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1 Aset

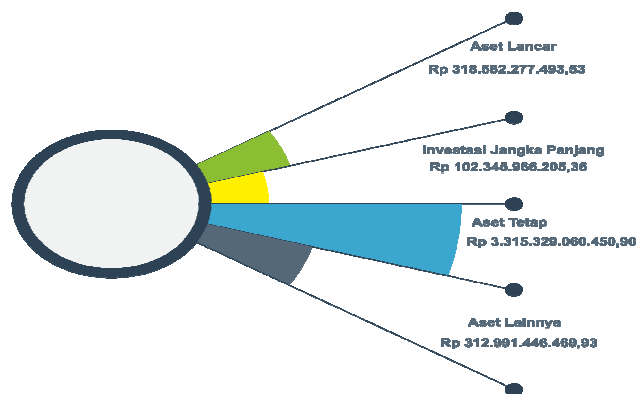
Saldo Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.049.248.750.619,72 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	%
Aset lancar	318.582.277.493,53	196.820.891.274,03	121.761.386.219,50	61,86
Investasi Jangka Panjang	102.345.966.205,36	77.074.931.939,65	25.271.034.265,71	32,79
Aset Tetap	3.315.329.060.450,90	3.269.834.710.215,23	45.494.350.235,67	1,39
Aset Lainnya	312.991.446.469,93	309.706.616.672,22	3.284.829.797,71	1,06
Jumlah	4.049.248.750.619,72	3.853.437.150.101,13	195.811.600.518,59	5,08

Berdasarkan rincian pada tabel 5.5.1 di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp195.811.600.518,59 atau (5,08%) penyebab terjadinya kenaikan aset dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Kabupaten Banyuasin.

Gambar 5.5
Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2018



5.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp318.582.277.493,53 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017	Kenaikan
Kas dan setara kas	157.250.975.239,18	73.901.063.569,48	83.349.911.669,70
Piutang	190.915.304.686,69	147.368.045.869,60	43.547.258.817,09
Penyisihan Piutang	(47.363.931.137,55)	(39.923.280.484,23)	(7.440.650.653,32)
Beban Dibayar Dimuka	791.053.569,15	813.674.343,55	(22.620.774,40)
Persediaan	16.988.875.136,06	14.661.387.975,63	2.327.487.160,43
Jumlah	318.582.277.493,53	196.820.891.274,03	121.761.386.219,50

5.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp157.250.975.239,18 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.3
Rincian jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017
Kas di Kas Daerah (BUD)	54.592.195.303,00	12.408.006.566,02
Kas di Bendahara Pengeluaran	69.683.615,00	319.619.739,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.778.300,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	3.290.222.527,70	4.064.684.499,46
Kas di Bendahara FKTP	1.885.524.019,40	663.413.941,00
Deposito on Call	96.479.688.413,08	55.571.735.659,00
Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	927.883.061,00	873.603.165,00
Jumlah	157.250.975.239,18	73.901.063.569,48

Saldo kas dan setara kas di atas sudah termasuk dana titipan atas nama Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp3.535.455.768,00 yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan Kuasa Pertambangan sebesar Rp2.751.780.000,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp32.000.000,00, dan jasa giro per 31 Desember 2017 tahun lalu sebesar Rp751.675.768,00.

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp54.592.195.303,00 merupakan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.5.4
Rincian Kas di Kas Daerah 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017
Kas di Kas Daerah (BUD)		
• Rek. 1673000002 Rekening Dana Rutin	54.556.381.550,00	12.374.633.120,02
• Rek. 1673000004 Rekening Gaji	34.061.419,00	27.451.219,00
• Rek. Penampungan PBB	1.752.334,00	5.922.227,00
Jumlah	54.592.195.303,00	12.408.006.566,02

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp69.683.615,00 merupakan saldo yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.5
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA SKPD	2018	2017
1	Kecamatan Air Salek	69.683.615,00	
2	Kecamatan Muara Padang	-	10.532.886,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	309.086.853,00
	Jumlah	69.683.615,00	319.619.739,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari sisa UYHD sebesar Rp69.683.615,00 pada Kecamatan Air Salek terdiri dari Pajak yang belum disetor sebesar Rp6.469.115,00 dan Sisa UYHD sebesar Rp63.214.500,00 yang per 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Daerah. Penyetoran telah dilakukan pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp62.974.500,00 dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp240.000,00 sedangkan untuk setoran pajak telah dilakukan penyetoran pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp5.624.723,00 sisanya pada tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp844.392,00.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.778.300,00 yang merupakan kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum RSUD Banyuasin.

5.5.1.1.1.4 Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah

Saldo kas pada Badan Layanan Umum Daerah yang terdapat di SKPD RSUD Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.290.222.527,70 merupakan saldo kas di bendahara Pengeluaran sementara kas dibendahara penerimaan telah disajikan di akun kas bendahara penerimaan diatas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Saldo Bank	3.278.328.002,45	4.053.932.265,79
2	Saldo Kas Tunai	11.894.525,25	10.752.233,67
	Jumlah	3.290.222.527,70	4.064.684.499,46

5.5.1.1.1.5 Kas Pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama)

Saldo kas Pada FKTP merupakan sisa penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.885.524.019,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.7
Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No	Nama Puskesmas	SALDO FKTP 2018				Jumlah Saldo 2017
		Saldo Kapitasi	Saldo Jamsoskes	Hutang Pajak	Jumlah	
1	PKM SUMBER	23.738.036,00	11.855.000,00	-	35.593.036,00	-
2	PKM TANJUNG LAGO	104.365.904,00	6.435.000,00	-	110.800.904,00	67.957.485,00
3	PKM TIRTA HARJA	57.473.194,00	54.340.000,00	272.764,00	112.085.958,00	25.138.365,00
4	PKM KARANG MANUNGGAL	31.380.516,00	28.000.000,00	-	59.380.516,00	25.875.414,00
5	PKM MARYANA	21.536.636,00	15.606.000,00	-	37.142.636,00	34.801,00
6	PKM CINTA MANIS BARU	23.708.876,00	3.670.000,00	-	27.378.876,00	3.901.227,00
7	PKM SRIKATON	3.581.815,00	11.517.000,00	-	15.098.815,00	10.016.800,00
8	PKM DAYA UTAMA	57.483.730,00	15.180.000,00	-	72.663.730,00	11.506.541,00
9	PKM SIMPANG RAMBUTAN	3.402.235,00	5.882.000,00	-	9.284.235,00	4.657.969,00
10	PKM MARGO MULYO	59.817.270,00	22.622.000,00	466.690,00	82.905.960,00	3.404.013,00
11	PKM SUNGAI DUA	1.592.888,00	22.159.000,00	-	23.751.888,00	7.802.449,00
12	PKM SUNGSANG	11.786.178,00	19.724.000,00	-	31.510.178,00	10.212.339,00
13	PKM MAKARTI JAYA	88.256.073,40	14.416.000,00	-	102.672.073,40	2.070.758,00
14	PKM TALANG JAYA TELANG	153.566.567,00	41.491.000,00	-	195.057.567,00	13.812.997,00
15	PKM MUARA TELANG	52.542,00	3.810.000,00	-	3.862.542,00	10.595.242,00
16	PKM PANGKALAN BALAI	101.237.706,00	11.226.000,00	-	112.463.706,00	6.844.354,00
17	PKM TALANG JAYA BETUNG	32.582.854,00	37.223.700,00	-	69.806.554,00	156.930,00
18	PKM PENGUMBUK	53.798.990,00	15.920.000,00	-	69.718.990,00	99.787.689,00
19	PKM DANA MULYA	5.745.561,00	32.100.000,00	2.906.274,00	40.751.835,00	94.005.756,00
20	PKM SUKARAJA	103.975.705,00	2.090.000,00	-	106.065.705,00	247.680,00
21	PKM BETUNG KOTA	75.758.033,00	52.213.000,00	-	127.971.033,00	3.806.067,00
22	PKM SEMBAWA	51.951.447,00	13.858.500,00	-	65.809.947,00	9.633.663,00
23	PKM MEKAR SARI	27.728.211,00	32.361.000,00	-	60.089.211,00	64.274.340,00
24	PKM PETALING	40.170.226,00	5.500.000,00	586.500,00	46.256.726,00	9.499.816,00
25	PKM SEMENTUL	6.925.209,00	28.860.000,00	-	35.785.209,00	9.726.735,00
26	PKM KARANG AGUNG ILIR	17.646.314,00	16.884.000,00	-	34.530.314,00	29.234.200,00
27	PKM SUKAJADI	61.417.313,00	15.903.000,00	-	77.320.313,00	2.431.510,00
28	PKM KENTEN LAUT	32.976.772,00	17.964.000,00	355.287,00	51.296.059,00	71.857.457,00
29	PKM GASING LAUT	17.172.997,00	3.017.000,00	-	20.189.997,00	2.121.326,00
30	PKM SIDO MULYO	13.622.499,00	11.921.000,00	-	25.543.499,00	32.307.717,00
31	PKM SUAK TAPEH	16.228.853,00	1.175.000,00	3.307.154,00	20.711.007,00	30.492.301,00
32	PKM JAKABARING	-	780.000,00	-	780.000,00	-
33	PKM TANJUNG API-API	-	1.245.000,00	-	1.245.000,00	-
	Jumlah	1.300.681.150,40	576.948.200,00	7.894.669,00	1.885.524.019,40	663.413.941,00

5.5.1.1.1.6 Setara Kas

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp96.479.688.413,08 merupakan dana yang didepositokan berupa DOC (*Deposit on Call*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.8
Rincian DOC (*Deposit on Call*)

(Dalam Rupiah)

No	Rekening	URAIAN	Tgl Jatuh Tempo	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
					Tambah	Kurang	
1	220601000099407	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Sako Palembang	2 Desember 2018	3.872.674.535,00	245.579.067,00	-	4.118.253.602,00
2	1674000288	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	29 Desember 2018	4.200.000.000,00	-	-	4.200.000.000,00
3	380711260	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	13 Desember 2018	12.005.614.024,00	722.073.647,00	-	12.727.687.671,00
4	1130204562171	Penempatan DOC Ke Bank Mandiri Cabang Sukajadi	8 Desember 2018	11.915.695.663,00	724.589.030,08	-	12.640.284.693,08
5	433555881	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	7 Desember 2018	11.268.993.208,00	-	11.268.993.208,00	-
6	1302201709	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	13 Desember 2018	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-
7	110001000268405	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	8 Desember 2018	3.144.447.099,00	208.966.661,00	-	3.353.413.760,00
8	A446503	Penempatan DOC BJB Cabang Palembang	21 Desember 2018	4.164.311.130,00	275.737.557,00	-	4.440.048.687,00
9	1674005518	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	28 Desember 2018	-	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00
10	A446881	Penempatan DOC BJB Cabang Palembang	30 Desember 2018	-	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00
11	220601000309404	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Sako Palembang	30 Desember 2018	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00
12	1674002358	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	7 Desember 2018	-	7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00
13	110001000327403	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	15 Desember 2018	-	7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00
		JUMLAH		55.571.735.659,00	57.176.945.962,08	16.268.993.208,00	96.479.688.413,08

5.5.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya merupakan saldo Kas di Bendahara Sekolah per 31 Desember 2018 sebesar Rp927.883.061,00 merupakan dana BOS yang berada di rekening sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.9
Rincian Kas Dibendahara Sekolah

(Dalam Rupiah)

No	Jenis	Uraian	2018	2017
1	Dana PSG	Sekolah Dasar (SD)	-	58.869.672,00
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	12.774.537,00
		Sub jumlah	-	71.644.209,00
2	Dana BOS	Sekolah Dasar (SD)	729.113.971,00	371.668.502,00
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	198.769.090,00	430.290.454,00
		Sub jumlah	927.883.061,00	801.958.956,00
Total			927.883.061,00	873.603.165,00

Rincian lebih lanjut pada Lampiran 1

5.5.1.1.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp190.915.304.686,69 terdiri dari:

Tabel 5.5.10
Rincian Piutang Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak Daerah	68.720.767.807,26	96.942.868.624,73	82.350.486.395,92	83.313.150.036,07
2	Piutang Retribusi Daerah	12.293.734,00	-	-	12.293.734,00
3	Piutang Dana Transfer Pusat	-	238.216.069.141,00	211.796.251.338,00	26.419.817.803,00
4	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	64.948.397.080,70	90.644.363.868,07	92.934.950.540,28	62.657.810.408,49
5	Piutang Jamsoskes	-	4.695.947.865,56	-	4.695.947.865,56
6	Bagian Lancar Penjualan Anggsuran	247.196.385,00	-	247.196.385,00	-
7	Piutang Lain-Lain	13.439.390.862,64	6.909.296.617,57	6.532.402.640,64	13.816.284.839,57
	Jumlah	147.368.045.869,60	437.408.546.116,93	393.861.287.299,84	190.915.304.686,69

5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp83.313.150.036,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.11
Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Hotel	520.020,00	3.129.715.179,08	3.129.315.199,08	920.000,00
2	Pajak Restoran	5.601.570,00	7.927.325.539,40	7.930.226.589,40	2.700.520,00
3	PBB	68.592.180.779,00	23.666.802.275,00	12.342.424.745,00	79.916.558.309,00
4	Pajak Hiburan	0,30	2.931.860.010,40	2.929.860.010,30	2.000.000,40
5	Pajak Reklame	27.292.500,00	740.979.115,12	742.861.315,12	25.410.300,00
6	Pajak Penerangan Jalan	94.013.716,00	28.611.124.975,78	25.390.406.888,11	3.314.731.803,67
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan	19,46	463.067.187,50	463.067.206,96	-
8	Pajak Air Bawah Tanah	1.159.202,50	111.387.672,45	112.503.104,95	43.770,00
9	Pajak Walet	-	25.970.000,00	25.970.000,00	-
10	Pajak Parkir	-	50.785.333,00	-	50.785.333,00
11	BPHTB	-	29.283.851.337,00	29.283.851.337,00	-
	Total	68.720.767.807,26	96.942.868.624,73	82.350.486.395,92	83.313.150.036,07

Sedangkan rincian umur Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.12
Umur Piutang Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA	UMUR PIUTANG				JUMLAH
		< 1 TAHUN	1-3 TAHUN	3 - 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
1	Pajak Hotel	920.000,00	-	-	-	920.000,00
2	Pajak Restoran	2.700.520,00	-	-	-	2.700.520,00
3	PBB	11.914.299.213,00	23.243.549.664,00	14.930.257.950,00	29.828.451.482,00	79.916.558.309,00
4	Pajak Hiburan	1.750.000,40	250.000,00	-	-	2.000.000,40
5	Pajak Reklame	25.010.300,00	400.000,00	-	-	25.410.300,00
6	Pajak Penerangan Jalan	3.314.731.803,67	-	-	-	3.314.731.803,67
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya	-	-	-	-	-
8	Pajak Air Bawah Tanah	43.770,00	-	-	-	43.770,00
9	Pajak Walet	-	-	-	-	-
10	Pajak Parkir	50.785.333,00	-	-	-	50.785.333,00
Jumlah		15.310.240.940,07	23.244.199.664,00	14.930.257.950,00	29.828.451.482,00	83.313.150.036,07

Penjelasan saldo piutang pajak daerah tersebut sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2018 sebesar Rp920.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13
Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Nama	No. Ketetapan	Tgl. Ketetapan	Nilai
1	PENGINAPAN SETIA KAWAN	1/SPTPD.2728/1.5/5/18	01 Juni 2018	110.000,00
2	HOTEL LESTARI	13/SPTPD.472/1.11/5/18	01 Desember 2018	150.000,00
3	PENGINAPAN SETIA KAWAN	2/SPTPD.2728/1.6/5/18	02 Juli 2018	110.000,00
4	PENGINAPAN SETIA KAWAN	3/SPTPD.2728/1.7/5/18	01 Agustus 2018	110.000,00
5	PENGINAPAN SETIA KAWAN	4/SPTPD.2728/1.8/5/18	03 September 2018	110.000,00
6	PENGINAPAN SETIA KAWAN	5/SPTPD.2728/1.9/5/18	01 Oktober 2018	110.000,00
7	PENGINAPAN SETIA KAWAN	6/SPTPD.2728/1.10/5/18	01 November 2018	110.000,00
8	PENGINAPAN SETIA KAWAN	7/SPTPD.2728/1.11/5/18	03 Desember 2018	110.000,00
Jumlah				920.000,00

2. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.700.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.14
Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA	NO KETETAPAN	TGL. KETETAPAN	NILAI
1	RM. PONDOK LINTAS	1/SPTPD.2065/1.1/2.5/18	15 Februari 2018	25.000,00
2	RM. PALAPA PERIMA	21/SPTPD.78/2.12/2/10/18	18 Desember 2018	264.000,00
3	RM. SIMPANG TIGO	39/SPTPD.1475/2.12/2/6/18	18 Desember 2018	500,00
5	RESTO AYAM JFC	4/SPTPD.1713/2.6/2/3/18	07 Juni 2018	500,00
6	RM. AMPERA INDAH	4/SPTPD.2446/2.8/2/10/18	08 Agustus 2018	500,00
7	RM. YULIA AMPERA	5/SPTPD.1240/2.11/2/3/18	28 November 2018	360.000,00
8	WARUNG MAKAN FIKRAM JAYA	7/SPTPD.2041/1.8/2/12/18	24 September 2018	50.000,00
9	RUMAH MAKAN TAHU SUMEDANG RENYAH	8/SPTPD.935/1.7/2/3/18	01 Agustus 2018	20,00
10	RESTORAN SOLO BALAPAN	7/SPTPD.1655/1.10/2/6/18	15 November 2018	1.000.000,00
11	RESTORAN SOLO BALAPAN	8/SPTPD.1655/1.11/2/6/18	10 Desember 2018	1.000.000,00
Jumlah				2.700.520,00

3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp79.916.558.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15
Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Nama Kecamatan	Saldo Awal	SPPT Terbit	Pembayaran	Saldo Akhir
1	Banyuasin III	3.848.560.556,00	1.074.380.135,00	252.720.150,00	4.670.220.541,00
2	Sembawa	1.872.787.197,00	604.279.236,00	141.276.812,00	2.335.789.621,00
3	Betung	4.659.094.767,00	1.461.122.986,00	453.996.996,00	5.666.220.757,00
4	Suak Tapeh	775.120.821,00	316.902.585,00	148.638.455,00	943.384.951,00
5	Pulau Rimau	3.288.447.899,00	703.191.993,00	196.863.888,00	3.794.776.004,00
6	Tungkal Ilir	1.208.036.164,00	236.567.489,00	101.178.695,00	1.343.424.958,00
7	Banyuasin I	4.553.806.750,00	5.369.990.946,00	4.536.501.092,00	5.387.296.604,00
8	Air Kumbang	1.331.500.006,00	320.681.327,00	158.676.777,00	1.493.504.556,00
9	Rambutan	4.561.396.643,00	2.400.116.154,00	1.329.523.092,00	5.631.989.705,00
10	Banyuasin II	1.047.169.827,00	186.220.529,00	60.498.644,00	1.172.891.712,00
11	Muara Padang	1.198.935.865,00	223.921.217,00	78.679.240,00	1.344.177.842,00
12	Muara Sugihan	1.363.903.307,00	251.999.971,00	107.650.279,00	1.508.252.999,00
13	Air Saleh	925.291.965,00	177.035.688,00	76.302.508,00	1.026.025.145,00
14	Muara Telang	2.165.659.493,00	307.367.330,00	208.393.150,00	2.264.633.673,00
15	Sumber Marga Telang	557.684.720,00	213.347.532,00	128.888.992,00	642.143.260,00
16	Makarti Jaya	774.840.038,00	109.556.033,00	34.002.543,00	850.393.528,00
17	Talang Kelapa	31.653.717.168,00	8.924.220.575,00	4.007.441.932,00	36.570.495.811,00
18	Rantau Bayur	1.102.052.388,00	306.435.686,00	144.410.895,00	1.264.077.179,00
19	Tanjung Lago	1.704.175.205,00	479.464.863,00	176.780.605,00	2.006.859.463,00
TOTAL		68.592.180.779,00	23.666.802.275,00	12.342.424.745,00	79.916.558.309,00

Rincian lebih lanjut atas umur Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per kecamatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.16
Rincian Umur Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Nama Kecamatan	Kategori Piutang				Jumlah
		1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Banyuasin III	841.409.836,00	1.580.247.760,00	1.074.232.460,00	1.174.330.485,00	4.670.220.541,00
2	Sembawa	471.867.267,00	873.418.897,00	460.811.222,00	529.692.235,00	2.335.789.621,00
3	Betung	1.029.977.556,00	1.939.716.275,00	1.537.801.719,00	1.158.725.207,00	5.666.220.757,00
4	Suak Tapeh	170.213.532,00	322.126.229,00	222.325.885,00	228.719.305,00	943.384.951,00
5	Pulau Rimau	525.409.106,00	897.854.427,00	748.895.968,00	1.622.616.503,00	3.794.776.004,00
6	Tungkal Ilir	137.949.520,00	255.265.104,00	239.379.717,00	710.830.617,00	1.343.424.958,00
7	Banyuasin I	896.955.987,00	1.877.216.491,00	883.966.453,00	1.729.157.673,00	5.387.296.604,00
8	Air Kumbang	176.639.241,00	328.954.994,00	307.155.859,00	680.754.462,00	1.493.504.556,00
9	Rambutan	1.122.651.874,00	2.371.359.407,00	783.434.670,00	1.354.543.754,00	5.631.989.705,00
10	Banyuasin II	130.440.859,00	206.061.913,00	231.295.844,00	605.093.096,00	1.172.891.712,00
11	Muara Padang	166.959.301,00	247.762.160,00	213.625.995,00	715.830.386,00	1.344.177.842,00
12	Muara Sugihan	158.040.179,00	237.134.003,00	173.571.567,00	939.507.250,00	1.508.252.999,00
13	Air Saleh	101.185.651,00	154.297.567,00	124.472.896,00	646.069.031,00	1.026.025.145,00
14	Muara Telang	99.492.225,00	198.330.441,00	478.909.125,00	1.487.901.882,00	2.264.633.673,00
15	Sumber Marga Telang	90.324.149,00	146.673.716,00	118.632.864,00	286.512.531,00	642.143.260,00
16	Makarti Jaya	75.806.109,00	131.802.714,00	101.948.287,00	540.836.418,00	850.393.528,00
17	Talang Kelapa	5.231.888.761,00	10.652.972.361,00	6.628.939.905,00	14.056.694.784,00	36.570.495.811,00
18	Rantau Bayur	174.021.335,00	298.534.566,00	258.420.171,00	533.101.107,00	1.264.077.179,00
19	Tanjung Lago	313.066.725,00	523.820.639,00	342.437.343,00	827.534.756,00	2.006.859.463,00
TOTAL		11.914.299.213,00	23.243.549.664,00	14.930.257.950,00	29.828.451.482,00	79.916.558.309,00

4. Piutang Pajak Hiburan

Saldo piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.17
Rincian Piutang Pajak Hiburan Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA	NO KETETAPAN	TGL. KETETAPAN	NILAI
1	KIDZOOONA OPI MALL	1/SPTPD.2436/3/6/18	01 November 2018	0,40
2	PT.GASING WATER BAY	10/SPTPD.1735/3/18	02 April 2018	250.000,00
3	PT.GASING WATER BAY	11/SPTPD.1735/3/18	01 Mei 2018	250.000,00
4	PT.GASING WATER BAY	12/SPTPD.1735/3/18	04 Juni 2018	250.000,00
5	PT.GASING WATER BAY	13/SPTPD.1735/3/18	02 Juli 2018	250.000,00
6	PT.GASING WATER BAY	6/SPTPD.1735/3/18	04 Desember 2017	250.000,00
7	PT.GASING WATER BAY	7/SPTPD.1735/3/18	02 Januari 2018	250.000,00
8	PT.GASING WATER BAY	8/SPTPD.1735/3/18	01 Februari 2018	250.000,00
9	PT.GASING WATER BAY	9/SPTPD.1735/3/18	05 Maret 2018	250.000,00
Jumlah				2.000.000,40

5. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.410.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.18
Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA	NO KETETAPAN	TGL. KETETAPAN	NILAI
1	NICO CHANDRA SAIMAN	1/SKPD.1624/9/6/2018	01 Maret 2018	980.100,00
2	PT.SINAR ARTHA CEMERLANG	1/SKPD.1837/9/10/2018	13 Desember 2018	16.200.000,00
3	SYAFRIZAL (WAVIN)	1/SKPD.1898/9/10/2018	18 Desember 2018	1.500.000,00
4	CV.MERAH PUTIH	1/SKPD.2722/9/10/2018	21 Februari 2018	400.000,00
5	SYAFRIZAL (WAVIN)	2/SKPD.1898/9/3/2018	18 Desember 2018	300.000,00
6	CV.MERAH PUTIH	2/SKPD.2722/9/10/2018	21 Februari 2018	400.000,00
7	SYAFRIZAL (WAVIN)	3/SKPD.1898/9/17/2018	18 Desember 2018	300.000,00
8	CV.MERAH PUTIH	3/SKPD.2722/9/10/2018	21 Februari 2018	400.000,00
9	PT.PURNAMA ASRI LESTARI	4/SKPD.1620/9/6/2018	01 Maret 2018	790.200,00
10	PT.PURNAMA ASRI LESTARI	4/SKPD.1620/9/6/2018	01 Maret 2018	540.000,00
11	CV.MERAH PUTIH	4/SKPD.2722/9/10/2018	21 Februari 2018	400.000,00
12	CV.MERAH PUTIH	5/SKPD.2722/9/17/2018	21 Februari 2018	400.000,00
13	CV.MERAH PUTIH	6/SKPD.2722/9/10/2018	21 Februari 2018	400.000,00
14	EDISON AZIS	7/SKPD.622/9/10/2018	21 November 2018	1.600.000,00
15	CV.CITRA SRIWIJAYA ADV	8/SKPD.1907/9/3/2017	10 Juli 2017	400.000,00
16	CV.CITRA SRIWIJAYA ADV	9/SKPD.1907/9/3/2018	10 Juli 2018	400.000,00
Jumlah				25.410.300,00

6. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.314.731.803,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.19
Rincian Piutang PPJ per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA	NO KETETAPAN	TGL. KETETAPAN	NILAI
1	PT. KARYA SAWIT LESTARI	11/SPTPD.1812/4/5/18	03 Desember 2018	3.360,05
2	PT. PERTAMINA (PERSERO)	12/SPTPD.121/4/1/17	02 Januari 2018	5.000,00
3	PT. PERTAMINA (PERSERO)	2/SPTPD.121/4/1/17	01 Maret 2018	5.000,00
4	PT. KARYA SAWIT LESTARI	3/SPTPD.1812/4/5/18	02 April 2018	0,62
5	PT. PERTAMINA (PERSERO)			3.214.437.617,00
6	PT. PERTAMINA (PERSERO)			100.280.826,00
Jumlah				3.314.731.803,67

7. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya
Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.
8. Piutang Pajak Air Bawah Tanah
Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp43.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20
Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA	NO KETETAPAN	TGL. KETETAPAN	NILAI
1	CV. GLOBAL SARANA	2/SKPD.2030/10/6/18	03 Juli 2018	21.600,00
2	PT.SEGARA MAKMUR SEJAH	3/SKPD.1341/10/10/18	02 Oktober 2018	70,00
3	CV. GLOBAL SARANA	3/SKPD.2030/10/6/18	02 Oktober 2018	21.600,00
4	INDRA	3/SKPD.2714/10/10/18	02 Oktober 2018	500,00
Jumlah				43.770,00

9. Piutang Pajak Walet
Saldo Piutang Pajak Walet per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.
10. Piutang Pajak Parkir
Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2018 sebesar Rp50.785.333,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21
Rincian Piutang Pajak Parkir Per 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA	NO KETETAPAN	TGL. KETETAPAN	NILAI
1	PT.ADHI PRATAMA PERKASA	1/SPTPD.2705/6.11/6/18	01 November 2018	50.785.333,00
Jumlah				50.785.333,00

11. Piutang BPHTB
Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp12.293.734,00 merupakan saldo piutang retribusi menara pada SKPD Dishubkominfo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.22
Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Retribusi Daerah	12.293.734,00	-	-	12.293.734,00
Jumlah					12.293.734,00

5.5.1.1.2.3 Piutang Dana Transfer

Saldo Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2018 sebesar Rp93.773.576.077,05 terdiri dari Piutang Dana Transfer Pusat dan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, Piutang Jamsoskes Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Dana Transfer Pusat
Saldo Piutang Dana Transfer Pusat per 31 Desember 2018 sebesar Rp26.419.817.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.23
Rincian Piutang Dana Transfer Pusat per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Bagi Hasil Pajak				
a PPh 21, 25, 29	-	13.970.115.144,00	11.620.023.087,00	2.350.092.057,00
b PBB	-	76.465.846.246,00	62.549.596.358,00	13.916.249.888,00
Jumlah 1	-	90.435.961.390,00	74.169.619.445,00	16.266.341.945,00
Bagi Hasil Bukan				
a PSDH	-	2.346.275.184,00	991.397.969,00	1.354.877.215,00
b CHT	-	77.519,00	77.519,00	-
c Perikanan	-	800.419.262,00	800.419.262,00	-
d Lanrent	-	4.474.542.348,00	4.474.542.348,00	-
e Royalty	-	41.093.707.728,00	36.240.622.773,00	4.853.084.955,00
f Minyak Bumi	-	15.221.406.293,00	15.221.406.293,00	-
g Gas Bumi	-	83.818.177.367,00	79.878.290.164,00	3.939.887.203,00
h Panas Bumi	-	25.502.050,00	19.875.565,00	5.626.485,00
Jumlah 2	-	147.780.107.751,00	137.626.631.893,00	10.153.475.858,00
Jumlah	-	238.216.069.141,00	211.796.251.338,00	26.419.817.803,00

Piutang Dana Transfer Pusat per 31 Desember 2018 sebesar Rp26.419.817.803,00 terdiri dari piutang bagi hasil pajak sebesar Rp16.266.314.945,00 dan dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp10.153.475.858,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2018.

2. Piutang Bagi Hasil Provinsi
Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2018 sebesar Rp62.657.810.408,49 terdiri dari piutang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 274/KPTS/BPKAD/2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kurang Salur bulan Desember 2017 dan Triwulan 1 (Januari s.d. Maret 2018) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24
Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
PKB	16.962.009.154,39	15.126.801.486,92	17.071.942.284,63	15.016.868.356,68
BBN-KB	16.082.884.447,62	19.049.563.389,33	17.823.927.548,34	17.308.520.288,61
PBB-KB	31.583.118.222,95	31.173.271.931,47	32.795.665.196,99	29.960.724.957,43
PKAA	2.447.423,12	1.728.662,17	2.242.277,36	1.933.807,93
BBN-KAA	467.900,28	742.245,51	440.132,91	770.012,88
P3AP	317.469.932,34	315.403.371,37	263.880.318,75	368.992.984,96
PAJAK ROKOK	-	24.976.852.781,30	24.976.852.781,30	-
Jumlah	64.948.397.080,70	90.644.363.868,07	92.934.950.540,28	62.657.810.408,49

3. Piutang Jamsoskes

Piutang Jamsoskes adalah Piutang Jaminan Kesehatan yang merupakan program Gubernur Sumatera Selatan dengan sistem *cost sharing* dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.695.947.865,56 dimana Pemerintah Provinsi telah melakukan rekonsiliasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin berdasarkan berita acara rekonsiliasi pada tanggal 15 Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25
Rincian Piutang Jamsoskes Provinsi per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Piutang Jamsoskes ke Provinsi	-	4.695.947.865,56	-	4.695.947.865,56
Jumlah	-	4.695.947.865,56	-	4.695.947.865,56

5.5.1.1.2.4 Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 yang merupakan piutang atas penjualan barang milik daerah kepada mantan bupati dan wakil bupati tahun 2013 yang telah dilunasi pada tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp50.722.445,00 atas nama Drs. A. Rahman Hasan dan pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp146.473.490,00 dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 dibayar pada tanggal 8 desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26
Rincian Bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Ir.H.Amiruddin Inoed	196.473.940,00	-	196.473.940,00	-
Drs.A.Rachman Hasan	50.722.445,00	-	50.722.445,00	-
Jumlah	247.196.385,00	-	247.196.385,00	-

5.5.1.1.2.5 Piutang Lain-Lain

Saldo Putang Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.816.284.839,57 dengan rincian piutang lain-lain sebagai berikut :

Tabel 5.5.27
Rincian Piutang Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Bagian lancar TP/TGR	289.673.585,00	51.447.393,00	62.459.000,00	278.661.978,00
Puitang Dewan	6.881.813.035,00	-	4.804.000,00	6.877.009.035,00
Piutang lainnya	115.300.000,00	245.417.186,00	312.535.398,00	48.181.788,00
Piutang PPh Ps 21	236.940.000,00	-	236.940.000,00	-
Piutang BLUD	1.302.300.500,00	994.365.100,00	1.302.300.500,00	994.365.100,00
Piutang Bunga Deposito	181.292.181,52	206.568.755,86	181.292.181,52	206.568.755,86
Piutang Deviden	4.432.071.561,12	5.411.498.182,71	4.432.071.561,12	5.411.498.182,71
Jumlah	13.439.390.862,64	6.909.296.617,57	6.532.402.640,64	13.816.284.839,57

1) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 sebesar Rp278.661.978,00 terdiri dari piutang TP kepada Bendahara dan TGR kepada PNS bukan Bendahara yang segera jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Rincian TP/TGR sebagai berikut:

Tabel 5.5.28
Rincian Piutang TGR

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Bagian Tuntutan Perbendaharaan	18.814.525,00	-	-	18.814.525,00
Bagian Lancar TGR	270.859.060,00	51.447.393,00	62.459.000,00	259.847.453,00
Jumlah	289.673.585,00	51.447.393,00	62.459.000,00	278.661.978,00

Selain nilai tersebut terdapat Tuntutan Ganti Rugi yang masih dalam proses SKTJM

Rincian lebih lanjut pada Lampiran 6, dan lampiran 7

2) Piutang Dewan

Saldo Piutang Dewan merupakan terhadap anggota dewan per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.877.009.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.29
Rekapitulasi piutang Anggota DPRD per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017
Saldo Awal	6.881.813.035,00	6.881.813.035,00
Pengurangan atas pelunasan a.n.Irian Setiawan.SH 2010	(5.000.000,00)	-
Pengurangan atas pelunasan a.n.Arkoni MD.SH 2010	(4.000,00)	-
koreksi tahun 2018 atas kesalahan pencatatan 4.000n a.n.Hj Fitriana.SE	4.000,00	-
koreksi tahun 2018 atas kesalahan pencatatan an slamet somo sentono	196.000,00	-
Saldo akhir piutang kepada dewan	6.877.009.035,00	6.881.813.035,00

Rincian lebih lanjut disajikan dalam lampiran 8.

3) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp48.181.788,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji pegawai yaitu sisa atas kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai yang telah pensiun dan akan dipotong langsung melalui pembayaran uang pensiunnya oleh PT. Taspen. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pensiun oleh Badan Kepegawaian Nasional. Mutasi piutang lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.30
Rincian Piutang Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember
			Tambah	Kurang	
1	Awaluddin	7.000.000,00	-	6.000.000,00	1.000.000,00
2	Rohmani Abdullah	11.800.000,00	-	11.800.000,00	-
3	Muhammad Iskandar	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
4	Sujisna	18.000.000,00	-	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Nasution	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
6	Khodijah Cek Ani	6.500.000,00	-	6.000.000,00	500.000,00
7	Maryati	13.000.000,00	-	12.000.000,00	1.000.000,00
8	Farida	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
9	Nazimatul Khoiriah	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
10	Nurbaiti	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
11	Mawardi NC	15.000.000,00	-	12.000.000,00	3.000.000,00
12	Sulastris	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
13	Ely	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
14	Sobri	-	5.237.720,00	5.237.720,00	-
15	Oto Lihman	-	3.512.176,00	3.512.176,00	-
16	Mahdalena	-	3.373.056,00	3.373.056,00	-
17	Fahrurrozi	-	10.161.990,00	4.500.000,00	5.661.990,00
18	Warsiyah	-	19.566.966,00	5.566.966,00	14.000.000,00
19	Rukiati	-	171.457.720,00	160.437.922,00	11.019.798,00
20	Harsono	-	3.616.838,00	3.616.838,00	-
21	Bakrie	-	24.873.000,00	24.873.000,00	-
22	Zainuddin	-	3.617.720,00	3.617.720,00	-
	JUMLAH	115.300.000,00	245.417.186,00	312.535.398,00	48.181.788,00

4) Piutang Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Piutang pada Badan Layanan Umum merupakan piutang klaim kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp994.365.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.31
Rincian Piutang pada Badan Layanan Umum

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
BPJS	1.302.300.500,00	994.365.100,00	1.302.300.500,00	994.365.100,00
Jumlah	1.302.300.500,00	994.365.100,00	1.302.300.500,00	994.365.100,00

Mutasi tambah sebesar Rp994.365.100,00 terdiri dari klaim BPJS bulan Juli sebesar Rp531.860.500,00 dan bulan Agustus sebesar Rp462.504.600,00. Sedangkan mutasi kurang piutang sebesar Rp1.302.300.500,00 terdiri dari pembayaran sebesar Rp932.512.800,00 yang terdiri dari pembayaran bulan Oktober Tahun 2018 sebesar Rp200.251.900,00, bulan November sebesar Rp567.543.300,00 dan Desember sebesar Rp164.171.600,00 serta koreksi piutang sebesar Rp369.787.700,00 merupakan pengurangan nilai klaim sesuai dengan hasil verifikasi BPJS.

5) Piutang Bunga Deposito

Saldo piutang bunga deposito per 31 Desember 2018 sebesar Rp206.568.755,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.32
Rincian Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Rekening	Uraian	Tgl Jatuh Tempo	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
					Tambah	Kurang	
1	220601000099407	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Sako Palembang	2 Desember 2018	18.461.516,96	22.904.259,76	18.461.516,96	22.904.259,76
2	1674000288	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	29 Desember 2018	1.610.958,90	1.380.821,92	1.610.958,90	1.380.821,92
3	380711260	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	13 Desember 2018	37.496.986,27	37.660.007,36	37.496.986,27	37.660.007,36
4	1130204562171	Penempatan DOC Ke Bank Mandiri Cabang Sukajadi	8 Desember 2018	45.051.123,33	47.790.665,41	45.051.123,33	47.790.665,41
5	433555881	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	7 Desember 2018	44.458.493,75	-	44.458.493,75	-
6	1302201709	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	13 Desember 2018	14.794.520,55	-	14.794.520,55	-
7	110001000268405	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	8 Desember 2018	11.888.594,51	15.637.014,30	11.888.594,51	15.637.014,30
8	A446503	Penempatan DOC BJB Cabang Palembang	21 Desember 2018	7.529.987,25	8.819.274,79	7.529.987,25	8.819.274,79
9	1674005518	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	28 Desember 2018	-	7.397.260,27	-	7.397.260,27
10	A446881	Penempatan DOC BJB Cabang Palembang	30 Desember 2018	-	2.979.452,05	-	2.979.452,05
11	220601000309404	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Sako Palembang	30 Desember 2018	-	1.917.808,22	-	1.917.808,22
12	1674002358	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	7 Desember 2018	-	35.753.424,66	-	35.753.424,66
13	110001000327403	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	15 Desember 2018	-	24.328.767,12	-	24.328.767,12
Jumlah				181.292.181,52	206.568.755,86	181.292.181,52	206.568.755,86

Penambahan Piutang Deposito sebesar Rp206.568.755,86 merupakan bunga yang harus diterima per 31 desember 2018 dari tanggal jatuh tempo bunga deposito periode sebelumnya, dengan rincian perhitungan piutang bunga deposito dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.33
Rincian perhitungan piutang deposito per 31 desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Rekening	Uraian	Tgl Jatuh Tempo	Saldo Deposito Per Jatuh tempo	Suku Bunga	Kekurangan Hari Per Jatuh Tempo	Saldo Akhir 31 Desember 2018
1	220601000099407	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Sako Palembang	2 Desember 2018	4.118.253.602,00	7,00%	29	22.904.259,76
2	1674000288	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	29 Desember 2018	4.200.000.000,00	6,00%	2	1.380.821,92
3	380711260	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	13 Desember 2018	12.727.687.671,00	6,00%	18	37.660.007,36
4	1130204562171	Penempatan DOC Ke Bank Mandiri Cabang Sukajadi	8 Desember 2018	12.640.284.693,08	6,00%	23	47.790.665,41
5	433555881	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	7 Desember 2018	-	0,00%	24	-
6	1302201709	Penempatan DOC BNI Cabang Utama Musi	13 Desember 2018	-	0,00%	18	-
7	110001000268405	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	8 Desember 2018	3.353.413.760,00	7,40%	23	15.637.014,30
8	A446503	Penempatan DOC BJB Cabang Palembang	21 Desember 2018	4.440.048.687,00	7,25%	10	8.819.274,79
9	1674005518	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	28 Desember 2018	15.000.000.000,00	6,00%	3	7.397.260,27
10	A446881	Penempatan DOC BJB Cabang Palembang	30 Desember 2018	15.000.000.000,00	7,25%	1	2.979.452,05
11	220601000309404	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Sako Palembang	30 Desember 2018	10.000.000.000,00	7,00%	1	1.917.808,22
12	1674002358	Penempatan DOC Bank Sumselbabel	7 Desember 2018	7.500.000.000,00	7,25%	24	35.753.424,66
13	110001000327403	Penempatan DOC Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	15 Desember 2018	7.500.000.000,00	7,40%	16	24.328.767,12
Jumlah				96.479.688.413,08	0,75	192,00	206.568.755,86

6) Piutang Deviden

Saldo Piutang Deviden per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.411.498.182,71 merupakan hasil dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada PT. Bank Sumselbabel sampai dengan tahun 2018. Nilai tersebut sesuai dengan hasil RUPS Bank Sumselbabel pada tanggal 25 Maret 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan telah dipinda bukukan ke rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Maret 2019.

Tabel 5.5.34
Rincian Piutang Deviden Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Piutang Deviden	4.432.071.561,12	5.411.498.182,71	4.432.071.561,12	5.411.498.182,71
Jumlah	4.432.071.561,12	5.411.498.182,71	4.432.071.561,12	5.411.498.182,71

Rincian umur Piutang Retribusi dan Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.35
Rincian umur Piutang Retribusi dan Piutang lain-lain Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA	UMUR PIUTANG				JUMLAH
		< 1 BULAN	1 -3 BULAN	3 - 12 BULAN	> 12 BULAN	
1	Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	12.293.734,00	12.293.734,00
2	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-
	Bagian lancar TP/TGR	-	-	26.842.393,00	251.819.585,00	278.661.978,00
	Puitang Dewan	-	-	-	6.877.009.035,00	6.877.009.035,00
	Piutang lainnya	30.681.788,00	-	-	17.500.000,00	48.181.788,00
	Piutang BLUD	-	-	994.365.100,00	-	994.365.100,00
	Piutang Bungan Deposito	-	-	-	-	-
	Piutang Deviden	-	-	-	-	-
	Jumlah Seluruhnya	30.681.788,00	-	1.021.207.493,00	7.158.622.354,00	8.210.511.635,00

5.5.1.1.2.6 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2018, Penyisihan Piutang sebesar Rp47.363.931.137,55 rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 5.5.36
Penyisihan piutang per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	Piutang Bruto	Kategori Piutang				Jumlah	Piutang Netto
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
			0,5%	10%	50%	100%		
A	Piutang Pajak Daerah							
1	Pajak Hotel	920.000,00	4.600,00	-	-	4.600,00	915.400,00	
2	Pajak Restoran	2.700.520,00	13.502,60	-	-	13.502,60	2.687.017,40	
3	PBB	79.916.558.309,00	59.571.496,07	2.324.354.966,40	7.465.128.975,00	29.828.451.482,00	39.677.506.919,47	
4	Pajak Hiburan	2.000.000,40	8.750,00	25.000,00	-	33.750,00	1.966.250,40	
5	Pajak Reklame	25.410.300,00	125.051,50	40.000,00	-	165.051,50	25.245.248,50	
6	Pajak Penerangan Jalan	3.314.731.803,67	16.573.659,02	-	-	16.573.659,02	3.298.158.144,65	
7	Pajak Air Bawah Tanah	43.770,00	218,85	-	-	218,85	43.551,15	
8	Pajak Parkir	50.785.333,00	253.926,67	-	-	253.926,67	50.531.406,33	
B	Piutang Retribusi Daerah							
1	Retribusi Menara	12.293.734,00	-	-	-	12.293.734,00	-	
C	Piutang Lain-lain							
1	Bagian lancar TP/TGR	278.661.978,00	-	-	13.421.196,50	251.819.585,00	265.240.781,50	
2	Puitang Dewan	6.877.009.035,00	-	-	-	6.877.009.035,00	-	
3	Piutang lainnya	48.181.788,00	153.408,94	-	-	17.500.000,00	30.528.379,06	
4	Piutang BLUD	994.365.100,00	-	-	497.182.550,00	-	497.182.550,00	
5	Piutang Bungan Deposito	206.568.755,86	-	-	-	-	206.568.755,86	
6	Piutang Deviden	5.411.498.182,71	-	-	-	-	5.411.498.182,71	
	Total	97.141.728.609,64	76.704.613,65	2.324.419.966,40	7.975.732.721,60	36.987.073.836,00	47.363.931.137,55	

Penjelasan lebih lanjut tentang Penyisihan Piutang PBB per Kecamatan sebesar Rp39.677.506.919,47 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.37
Penyisihan piutang PBB per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Nama Kecamatan	Penyisihan				Saldo Akhir
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Banyuasin III	4.207.049	158.024.776	537.116.230	1.174.330.485	1.873.678.540,18
2	Sembawa	2.359.336,34	87.341.890	230.405.611	529.692.235	849.799.072,04
3	Betung	5.149.887,78	193.971.628	768.900.860	1.158.725.207	2.126.747.581,78
4	Suak Tapeh	851.067,66	32.212.623	111.162.943	228.719.305	372.945.938,06
5	Pulau Rantau	2.627.045,53	89.785.443	374.447.984	1.622.616.503	2.089.476.975,23
6	Tungkal Ilir	689.747,60	25.526.510	119.689.859	710.830.617	856.736.733,50
7	Banyuasin I	4.484.779,94	187.721.649	441.983.227	1.729.157.673	2.363.347.328,54
8	Air Kumbang	883.196,21	32.895.499	153.577.930	680.754.462	868.111.087,11
9	Rambutan	5.613.259,37	237.135.941	391.717.335	1.354.543.754	1.989.010.289,07
10	Banyuasin II	652.204,30	20.606.191	115.647.922	605.093.096	741.999.413,60
11	Muara Padang	834.796,51	24.776.216	106.812.998	715.830.386	848.254.396,01
12	Muara Sugih	790.200,90	23.713.400	86.785.784	939.507.250	1.050.796.634,70
13	Air Saleh	505.928,26	15.429.757	62.236.448	646.069.031	724.241.163,96
14	Muara Telang	497.461,13	19.833.044	239.454.563	1.487.901.882	1.747.686.949,73
15	Sumber Marga Telang	451.620,75	14.667.372	59.316.432	286.512.531	360.947.955,35
16	Makarti Jaya	379.030,55	13.180.271	50.974.144	540.836.418	605.369.863,45
17	Talang Kelapa	26.159.443,81	1.065.297.236	3.314.469.953	14.056.694.784	18.462.621.416,41
18	Rantau Bayur	870.106,68	29.853.457	129.210.086	533.101.107	693.034.755,78
19	Tanjung Lago	1.565.334	52.382.064	171.218.672	827.534.756	1.052.700.825,03
	TOTAL	59.571.496,07	2.324.354.966,40	7.465.128.975,00	29.828.451.482,00	39.677.506.919,47

5.5.1.1.2.7 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban tahun 2018 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2018 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp791.053.569,15 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.38
Rincian Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018

NO	NAMA SKPD	Saldo awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	90.385.500,00	185.155.000,00	136.674.250,00	138.866.250,00
2	Dinas Kesehatan	36.240.163,33	118.341.100,00	83.828.655,00	70.752.608,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	26.281.200,00	39.862.150,00	39.568.583,33	26.574.766,67
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawas Permukiman dan Pertanahan	50.506.666,67	53.237.125,00	58.051.091,67	45.692.700,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	78.602.945,00	20.681.200,00	97.560.711,67	1.723.433,33
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	29.825.833,33	-	29.825.833,33	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.250.000,00	-	4.250.000,00	-
8	Dinas Sosial	1.778.371,25	24.931.075,00	24.631.856,67	2.077.589,58
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.243.846,67	34.884.125,00	34.499.930,00	11.628.041,67
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.995.136,67	80.593.530,00	70.806.411,67	26.782.255,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.827.519,17	45.176.410,00	44.868.240,00	26.135.689,17
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.376.989,00	57.645.900,00	42.086.169,33	45.936.719,67
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.047.720,00	45.993.450,00	42.211.657,50	26.829.512,50
14	Dinas Perhubungan	27.910.605,33	33.967.562,00	33.797.578,25	28.080.589,08
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.172.778,33	49.000.000,00	17.506.111,67	32.666.666,67
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.086.345,83	23.833.285,00	24.933.523,75	1.986.107,08
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.978.652,42	15.720.000,00	10.326.369,25	9.372.283,17
18	Dinas Perikanan	15.740.933,33	21.399.105,00	21.648.148,75	15.491.889,58
19	Dinas Pertanian	32.994.400,00	59.700.825,00	52.894.675,00	39.800.550,00
20	Sekretariat Daerah	-	598.845.697,00	548.941.888,92	49.903.808,08
21	Sekretariat DPRD	157.951.451,25	121.439.800,00	228.791.334,58	50.599.916,67
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	3.346.000,00	29.886.820,00	15.798.841,67	17.433.978,33
23	Kecamatan Rantau Bayur	770.833,33	5.000.000,00	5.354.166,67	416.666,67
24	Kecamatan Talang Kelapa	1.137.833,33	6.999.000,00	6.970.333,33	1.166.500,00
25	Kecamatan Tungkal Ilir	3.057.200,00	-	3.057.200,00	-
26	Kecamatan Tanjung Lago	6.358.916,65	5.721.000,00	6.835.666,67	5.244.249,98
27	Kecamatan Sembawa	2.770.000,00	6.817.762,50	7.315.175,00	2.272.587,50
28	Kecamatan Banyuasin II	1.306.500,00	5.382.000,00	5.343.000,00	1.345.500,00
29	Kecamatan Makarti Jaya	-	7.994.362,00	7.328.165,17	666.196,83
30	Kecamatan Muara Telang	2.308.333,33	6.247.500,00	4.390.833,33	4.165.000,00
31	Kecamatan Sumber Marga Telang	5.140.000,00	6.447.500,00	7.289.166,67	4.298.333,33
32	Inspektorat Daerah	39.468.465,00	45.745.503,00	41.336.752,50	43.877.215,50
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	29.895.266,67	39.411.200,00	50.239.829,17	19.066.637,50
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.486.629,32	61.584.721,00	68.872.023,07	40.199.327,25
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.431.308,33	-	2.431.308,33	-
	Jumlah	813.674.343,55	1.857.644.707,50	1.880.265.481,90	791.053.569,15

Penjelasan lebih rinci disajikan pada lampiran 20

5.5.1.1.2.8 Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.988.875.136,06 merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meliputi persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, obat-obatan, barang habis pakai (BHP) alat kesehatan, bahan kimia/bibit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.39
Rincian Persediaan per Jenis Persediaan per 31 Desember 2018

Jenis Persediaan	(Dalam Rupiah)	
	2018	2017
Persediaan Bahan Habis Pakai	-	-
Persediaan ATK	637.390.758,00	826.758.813,00
Persediaan Alat Listrik	257.428.330,00	25.185.000,00
Persediaan Benda Pos	1.309.000,00	1.179.000,00
Persediaan Bahan Pembersih	154.768.650,00	212.845.950,00
Persediaan Minyak / Gas	317.852.540,00	-
Persediaan Cetak	963.154.940,00	630.498.188,00
Persediaan Habis Pakai Lainnya	2.045.804.676,00	1.696.308.727,00
Sub Jumlah	4.377.708.894,00	3.392.775.678,00

(Dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	2018	2017
Persediaan Barang Material		
Persediaan Obat-obatan	12.004.269.576,06	10.306.424.454,63
Persediaan Makanan Pokok	115.594.500,00	58.762.450,00
Persediaan Bibit Ternak	1.282.000,00	6.010.000,00
Persediaan Material/Bahan Lainnya	-	294.245.700,00
Persediaan Material/Bahan Kimia	2.650.000,00	-
Sub Jumlah	12.123.796.076,06	10.665.442.604,63
Persediaan Lainnya		
Persediaan Barang Hibah	349.146.528,00	535.579.693,00
Persediaan Barang Bansos	138.223.638,00	67.590.000,00
Sub Jumlah	487.370.166,00	603.169.693,00
Jumlah	16.988.875.136,06	14.661.387.975,63

informasi lanjut saldo persediaan per 31 Desember 2018 pada masing-masing SKPD pada Lampiran 9,10 dan lampiran 11

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, sebesar Rp102.345.966.205,36 yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank Sumselbabel dan PDAM Tirta Betuah. Masing-masing sebesar Rp46.000.752.000,00 dan Rp56.345.214.205,36 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.40

Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Nama BUMD	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Penyertaan Bank SumselBabel	41.000.752.000,00	5.000.000.000,00		46.000.752.000,00
Penyertaan PDAM Tirta Betuah	36.074.179.939,65	20.472.753.616,24	201.719.350,53	56.345.214.205,36
Jumlah	77.074.931.939,65	25.472.753.616,24	201.719.350,53	102.345.966.205,36

1) Penyertaan Modal ke Bank Sumselbabel

Saldo Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel terjadi penambahan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 3.439 lembar saham. pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 408/KPTS/BPKAD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Tahun 2018. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebanyak 31.637 lembar saham (nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham) dengan nilai pasar per lembar saham sebesar Rp1.454.000,00. Dengan demikian terdapat nilai setoran investasi yang belum dijadikan saham sebesar Rp554.000,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.5.41

Rincian Penyertaan yg menjadi saham per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	Modal Saham	28.198.000.000,00	3.439.000.000,00	-	31.637.000.000,00
2	Agio Saham	12.801.892.000,00	1.561.306.000,00	-	14.363.198.000,00
3	Sisa penyertaan yang belum	860.000,00	(306.000,00)	-	554.000,00
4	Total	41.000.752.000,00	5.000.000.000,00	-	46.000.752.000,00
	Total Lembar Saham	28.198,00	3.439,00	-	31.637,00

2) Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Betuah

Saldo Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Tirta Betuah per 31 Desember 2018 sebesar Rp56.345.214.205,36 Pemerintah Kabupaten Banyuasin menghitung nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas. Melihat nilai ekuitas akhir Pada Neraca PDAM Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp95.402.924.742,22 serta melihat laporan laba rugi tahun berjalan sebesar Rp425.362.327,43 maka perhitungan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.42
Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada PDAM Tirta Betuah

(Dalam Rupiah)

Uraian	Penyertaan	Akumulasi Kerugian	Kerugian Berjalan	Nilai Investasi
Pemkab Banyuasin	86.202.156.125,39	(29.605.721.749,83)	(251.220.170,19)	56.345.214.205,36
Penyertaan yang belum ditetapkan statusnya				
- Pemerintah Provinsi	10.705.012.130,00	(3.676.585.652,78)	(31.197.769,18)	-
- Pemerintah Pusat	49.049.065.000,00	(16.845.668.783,12)	(142.944.388,06)	-
	145.956.233.255,39	(50.127.976.185,74)	(425.362.327,43)	-

5.5.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.315.329.060.540,90 merupakan aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin terdiri dari:

Tabel 5.5.43
Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin *(Dalam Rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Tanah	359.129.458.167,96	10.584.321.503,00	(3.178.038.150,00)	366.535.741.520,96
Peralatan dan Mesin	570.480.781.507,89	87.456.165.800,99	(36.443.369.313,19)	621.493.577.995,69
Gedung dan Bangunan	1.071.651.247.696,27	74.894.110.727,57	(22.234.754.359,20)	1.124.310.604.064,64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.540.324.081.259,97	166.692.194.574,30	(8.090.684.325,73)	2.698.925.591.508,54
Aset Tetap Lainnya	100.837.446.747,49	20.007.027.340,00	(19.633.135.640,00)	101.211.338.447,49
Konstruksi Dalam Pengerjaan	146.369.827.037,58	6.576.541.910,07	(11.169.268.797,07)	141.777.100.150,58
Akumulasi Penyusutan	(1.518.958.132.201,93)	(225.510.385.996,95)	(5.543.624.961,88)	(1.738.924.893.237,00)
Total	3.269.834.710.215,23	140.699.975.858,98	(106.292.875.547,07)	3.315.329.060.450,90

Berdasarkan rincian pada tabel 5.5.43 di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2018. Penyebab terjadinya kenaikan aset tetap dikarenakan adanya aktivitas belanja yang menambah aset yang dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Tetap Kabupaten Banyuasin.



1) Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp366.535.741.520,96 terjadi peningkatan sebesar Rp7.406.283.353,00 dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.44
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanah	
	2018	2017
Saldo Awal	359.129.458.167,96	359.038.747.714,96
Mutasi Tambah	10.584.321.503,00	16.434.569.849,62
Belanja Modal Menjadi Aset 2017	-	2.121.219.428,62
Mutasi Antar OPD	3.000.000.000,00	13.328.503.352,00
Penilaian	7.576.665.503,00	-
Hibah/Bansos/Bos	7.656.000,00	984.847.000,00
Pencatatan Aset Baru	-	69,00
Mutasi Kurang	(3.178.038.150,00)	(16.343.859.396,62)
Mutasi Antar OPD	(3.000.000.000,00)	(13.328.503.352,00)
Penghapusan	-	(1.182.388.816,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(178.038.150,00)	(180.000.000,00)
Reklasifikasi Ke Aset Tetap Lainnya	-	(39.747.743,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	-	(1.613.219.485,62)
Saldo Akhir	366.535.741.520,96	359.129.458.167,96

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp10.584.321.503,00, terdiri dari:

- a. Mutasi antar SKPD, yaitu dari Dinas Perhubungan yang merupakan tanah eks terminal kargo ke Dinas Kesehatan yang digunakan untuk tanah bangunan Rumah Sakit Pratama Sukajadi senilai Rp3.000.000.000,00;
- b. Hasil penilaian terhadap aset tanah yang masih bernilai Rp1,00 dan aset tanah yang belum tercatat dalam daftar inventaris barang berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp7.480.064.703,00 serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk enam persil tanah yang berada pada kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang Kecamatan Tanjung Lago sebesar Rp96.600.800,00 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- c. Hibah masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Perhubungan untuk pembangunan dermaga senilai Rp7.656.000,00 dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.178.038.150,00 terdiri dari:

- a. Mutasi Antar SKPD, yaitu dari Dinas Perhubungan yang merupakan tanah eks terminal kargo ke Dinas Kesehatan yang digunakan untuk tanah bangunan Rumah Sakit Pratama Sukajadi senilai Rp3.000.000.000,00;
- b. Reklasifikasi ke Aset lainnya sebesar Rp178.038.150,00 merupakan aset tanah bangunan pendidikan SMA/MK pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 12

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp621.493.577.995,69 terjadi peningkatan sebesar Rp51.012.796.487,80 dari tahun sebelumnya. Perubahan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.5.45
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Peralatan dan Mesin	
	2018	2017
Saldo Awal	570.480.781.507,89	513.830.983.733,93
Mutasi Tambah	87.456.165.800,99	120.526.503.151,71
Belanja Modal	76.584.349.597,82	49.366.810.456,09
Kapitalisasi/Atribusi	12.400.000,00	-
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	636.107.730,38	271.824.000,00
Koreksi LK	-	1.400.000,00
Hutang	975.000,00	341.087.110,60
Mutasi Antar OPD	6.364.727.922,00	61.903.815.944,02
Penilaian	-	73.005.000,00
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	2.148.075.354,79	8.465.396.920,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	1.680.280.222,00	16.875.000,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.749.974,00	57.288.721,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	23.500.000,00	29.000.000,00
Mutasi Kurang	(36.443.369.313,19)	(63.876.705.377,75)
Penghapusan	(1.027.800.000,00)	(17.552.350,00)
Mutasi Antar OPD	(6.364.727.922,00)	(61.903.815.944,02)
Hibah/Bansos/Bos	(373.026.838,00)	-
Ekstrakompatabel dari Dana Bos dan BLUD	(971.760.818,30)	(211.734.900,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(6.102.578.486,00)	(659.010.500,00)
Penyesuaian ke Barang dan Jasa	(1.566.534.108,89)	
Koreksi LK	-	(109.871.500,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(683.775.900,00)	(487.931.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(188.914.100,00)	(356.383.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(19.164.251.140,00)	
Reklasifikasi ke Barang Jasa/Salah Penganggaran	-	(130.406.183,73)
Saldo Akhir	621.493.577.995,69	570.480.781.507,89

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp87.456.165.800,99 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar Rp76.584.349.597,82;
- b. Atribusi dari belanja honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp12.400.000,00; pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perikanan;
- c. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada beberapa SKPD yang merupakan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp636.107.730,38;
- d. Hutang belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp975.000,00 di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- e. Mutasi kendaraan operasional dinas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp6.364.727.922,00;

- f. Hibah/Bansos/BOS/BLUD/JKN sebesar Rp2.148.075.354,79, terdiri dari hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ke Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin berupa papan pengumuman digital pasar Betung senilai Rp49.500.000,00, hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp74.292.000,00 dan belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyuasin senilai Rp2.024.283.354,79;
- g. Reklasifikasi dari belanja Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.680.280.222,00 pada Sekretariat DPRD, Kantor Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin;
- h. Reklasifikasi dari belanja Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.749.974,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin;
- i. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.500.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.443.369.313,19 terdiri dari:

- a. Penghapusan kendaraan operasional dinas sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dengan cara penjualan/lelang berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 589/KPTS/BPKAD/2018, senilai Rp1.027.800.000,00;
- b. Mutasi kendaraan operasional dinas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp6.364.727.922,00;
- c. Hibah kepada dua sekolah swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupa peralatan telekomunikasi, informatika dan komunikasi (TIK) untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), senilai Rp373.026.838,00;
- d. Aset berupa Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya tidak memenuhi kapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan dicatat sebagai aset ekstrakompabel yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp971.760.818,30;
- e. Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud senilai Rp6.102.578.486,00, terdiri dari belanja software/perangkat lunak senilai Rp2.636.000.894,00 dan aset berupa kendaraan roda empat dan roda dua yang dobel pencatatannya senilai Rp213.637.592,00 dan kondisi rusak berat sebanyak 26 unit senilai Rp3.252.940.000,00;
- f. Penyesuaian ke belanja barang dan jasa terhadap belanja modal Peralatan dan Mesin yang tidak sesuai dengan kriteria aset tetap, senilai Rp1.566.534.108,89;
- g. Reklasifikasi belanja Peralatan dan Mesin ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp683.775.900,00;

- h. Reklasifikasi belanja Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp188.914.100,00;
- i. Reklasifikasi belanja Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp19.164.251.140,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi berupa belanja buku dan alat peraga/olahraga lainnya.

rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 13.

Terdapat aset hibah berupa peralatan sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diterima oleh sekolah, namun belum dicatat pada BMD peralatan dan mesin dinas karena belum dilengkapi dengan dokumen serah terima hibah aset dari Kementerian Pendidikan, dengan rincian;

- (1) Peralatan Laboratorium IPA kepada delapan sekolah atau senilai Rp234.040.929,00;
- (2) Peralatan Lab TIK kepada tujuh sekolah atau senilai Rp1.664.216.177,00;
- (3) Peralatan matematika ketujuh sekolah atau senilai Rp22.050.000,00.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2018 sebesar Rp1.124.310.604.064,64 terjadi peningkatan sebesar Rp52.659.356.368,37 dari tahun sebelumnya, perubahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.46
Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Gedung dan Bangunan	
	2018	2017
Saldo Awal	1.071.651.247.696,27	1.004.951.572.255,55
Mutasi Tambah	74.894.110.727,57	143.936.473.699,21
Belanja Modal	37.816.674.277,36	48.224.914.328,95
Kapitalisasi/Atribusi	95.455.790,00	4.500.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	220.144.600,00	-
Kapitalisasi dari Belanja Rehabilitasi	7.281.508.681,95	-
Hutang Belanja Modal	17.384.850,00	941.924.523,50
Mutasi Antar OPD	430.634.064,89	68.376.959.230,84
Hibah/Bansos/Bos/JKN/BLUD	19.643.340.375,01	13.579.986.130,30
Koreksi LK	-	1.050.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tanah	-	1.613.219.485,62
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	683.775.900,00	165.431.000,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00	26.123.000,00
Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.685.192.188,36	10.729.000.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	-	273.366.000,00
Mutasi Kurang	(22.234.754.359,20)	(77.236.798.258,49)
Mutasi Antar OPD	(430.634.064,89)	(68.376.959.230,84)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(14.532.784.000,00)	(461.350.000,00)
Penyesuaian ke Barang dan Jasa	(149.129.000,00)	-
Kekurangan Volume	(714.844.967,07)	-
Ekstrakompatabel dari Dana Bos dan BLUD	(82.040.000,00)	-
Koreksi LK	-	(119.154.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(1.680.280.222,00)	(16.875.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.645.042.105,24)	(57.172.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Aset Tetap Lainnya	-	(329.134.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	(7.740.028.927,65)
Reklasifikasi ke Barang Jasa/Salah Penganggaran	-	(136.125.100,00)
Saldo Akhir	1.124.310.604.064,64	1.071.651.247.696,27

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.894.110.727,57 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp37.816.674.277,36;
- b. Atribusi Belanja Barang dan Jasa berupa jasa perencanaan dan pengawasan terhadap perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp95.455.790,00;
- c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp220.144.600,00 pada Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin;
- d. Kapitalisasi belanja rehabilitasi terhadap Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria sebagai penambah nilai masa manfaat dan fungsi suatu aset bangunan dan gedung sebesar Rp7.281.508.681,95;
- e. Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp17.384.850,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin;
- f. Mutasi antar SKPD sebesar Rp430.634.064,89;
- g. Hibah/Bansos/BOS/JKN/BLUD sebesar Rp19.643.340.375,01, terdiri dari hibah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp9.590.768.000,00 berupa bangunan pasar rakyat Betung, hibah dari Kementerian Ketanagakerjaan Republik Indonesia senilai Rp1.884.172.000,00 berupa bangunan Balai Latihan Kerja dan bangunan lainnya di lokasi Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Telang Kecamatan Tanjung Lago senilai Rp2.181.161.000,00 kepada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia senilai Rp5.787.554.375,00 berupa bangunan ruang kelas baru, bangunan perpustakaan dan rehabilitasi bangunan pendidikan pada SD/SMP Negeri, serta belanja bangunan dan gedung yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin senilai Rp199.685.000,00;
- h. Reklasifikasi belanja Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp683.775.900,00;
- i. Reklasifikasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00;
- j. Reklasifikasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.685.192.188,26.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.234.754.359,20 terdiri dari:

- a. Mutasi Antar SKPD sebesar Rp430.634.064,89;
- b. Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud sebesar Rp14.532.784.000,00 yang merupakan aset yang digunakan oleh pihak lainnya (pemerintah desa) di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- c. Penyesuaian ke belanja barang dan jasa terhadap belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak sesuai dengan kriteria aset tetap sebesar Rp149.129.000,00;

- d. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp714.844.967,07 pada beberapa kegiatan belanja modal Gedung dan Bangunan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin;
- e. Aset berupa Gedung dan Bangunan yang nilai perolehannya tidak memenuhi kapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan dicatat sebagai aset ekstrakompetebel pada dinas pendidikan pemuda olah raga dan pariwisata yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp82.040.000,00;
- f. Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.680.280.222,00;
- g. Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp4.645.042.105,24;

rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 14

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2018 sebesar Rp2.698.925.591.508,54 terjadi peningkatan sebesar Rp158.601.510.248,57 dari tahun sebelumnya, perubahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.47
Rincian Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	2018	2017
Saldo Awal	2.540.324.081.259,97	2.442.624.235.052,42
Mutasi Tambah	166.692.194.574,30	571.837.725.471,99
Belanja Modal	142.245.163.393,24	77.524.222.666,11
Kapitalisasi/Atribusi	3.448.484,00	-
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa/DED	194.020.500,00	-
Hutang Belanja Modal	709.587.754,01	531.330.623,44
Mutasi Antar OPD	-	443.601.579.657,44
Koreksi LK	-	19.928.592.886,00
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	17.517.705.729,00	29.515.944.639,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	109.890.000,00	678.883.000,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	4.645.042.105,24	57.172.000,00
Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.267.336.608,81	-
Mutasi Kurang	(8.090.684.325,73)	(474.137.879.264,44)
Mutasi Antar OPD	-	(443.601.579.657,44)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	-	(19.948.592.886,00)
Penyesuaian ke Barang dan Jasa	(713.290.264,34)	-
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(5.749.974,00)	(57.288.721,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(20.000.000,00)	(26.123.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	-	(10.504.295.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(5.558.009.010,07)	-
Kekurangan Volume	(1.793.635.077,32)	-
Saldo Akhir	2.698.925.591.508,54	2.540.324.081.259,97

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp166.692.194.574,30 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp142.245.163.393,24;
- b. Atribusi Belanja Barang Dan Jasa berupa jasa perencanaan terhadap perolehan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.448.484,00;
- c. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa berupa jasa perencanaan/DED (*detail engineering design*) yang dikapitalisasi ke aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp194.020.500,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk bangunan dermaga;
- d. Hutang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp709.587.754,01 yakni pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp640.366.854,01 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp 69.220.900,00;
- e. Hibah/Bansos/BOS/BLUD/JKN sebesar Rp17.517.705.729,00 terdiri dari hibah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia senilai Rp16.085.542.000,00 berupa kegiatan peningkatan jalan, pembangunan jembatan pipa besi di Kecamatan Tanjung Lago, hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa PSU jalan senilai Rp1.353.139.629,00 dan belanja aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin senilai Rp79.024.100,00;
- f. Reklasifikasi dari aset Peralatan dan Mesin ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp109.890.000,00;
- g. Reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.645.042.105,24;
- h. Reklasifikasi dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.267.336.608,81.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.090.684.325,73 terdiri dari :

- a. Penyesuaian ke belanja barang dan jasa terhadap belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak sesuai dengan kriteria aset tetap sebesar Rp1.156.000,00 dan koreksi belanja modal senilai Rp712.134.264,34 berupa pekerjaan normalisasi aliran sungai dan pengerukan sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Reklasifikasi dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.749.974,00;
- c. Reklasifikasi dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00;
- d. Reklasifikasi dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.558.009.010,07 berupa pekerjaan pemasangan jaringan sambungan pipa air minum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.793.635.077,32 terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp496.657.747,74, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp49.138.279,15 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.247.839.050,43.

rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 15.

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada daftar inventaris barang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin merupakan kegiatan normalisasi sungai dari tahun anggaran 2012 s.d. tahun anggaran 2016 senilai Rp17.341.586.419,00 yang belum diperoleh dokumen pendukung untuk memastikan/mengidentifikasi kegiatan pemeliharaan atau menambahkan nilai Aset Jalan Irigasi dan Jaringan.

rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 19.

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp101.211.338.447,49 terjadi peningkatan sebesar Rp373.891.700,00 dari tahun sebelumnya, perubahan Aset Tetap Lainnya ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.48
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	Aset Tetap Lainnya	
	2018	2017
Saldo Awal	100.837.446.747,49	88.560.485.687,49
Mutasi Tambah	20.007.027.340,00	34.654.134.295,00
Belanja Modal	842.776.200,00	516.644.757,00
Kapitalisasi	-	828.024.000,00
Mutasi Antar OPD	-	5.490.504.950,00
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	-	16.766.183.845,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	-	179.600.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tanah	-	368.881.743,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	19.164.251.140,00	
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	10.504.295.000,00
Mutasi Kurang	(19.633.135.640,00)	(22.377.173.235,00)
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN	(536.265.000,00)	-
Mutasi Antar OPD	-	(5.490.504.950,00)
Ekstrakompatabel dari Dana Bos dan BLUD	(19.059.128.140,00)	(16.830.068.285,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	-	(27.600.000,00)
Penyesuaian ke Barang dan Jasa	(14.242.500,00)	
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(23.500.000,00)	(29.000.000,00)
Saldo Akhir	101.211.338.447,49	100.837.446.747,49

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.007.027.340,00, terdiri dari:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp842.776.200,00;
- Reklasifikasi dari belanja Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp19.164.251.140,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin berupa belanja buku dan alat peraga/olah raga lainnya.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.633.135.640,00 terdiri dari:

- a. Hibah/Bansos/BOS/BLUD/JKN Rp536.265.000,00, yaitu hibah kepada TK/PAUD di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin;
- b. Aset Tetap Lainnya yang nilai perolehannya tidak memenuhi kapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan dicatat sebagai aset ekstrakompabel yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin sebesar Rp19.059.128.140,00;
- c. Penyesuaian ke Belanja Barang Dan Jasa terhadap belanja modal Aset Tetap Lainnya yang tidak sesuai dengan kriteria aset tetap sebesar Rp14.242.500,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin;
- d. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.500.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 16

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp141.777.100.150,58 terjadi penurunan sebesar Rp4.392.726.887,00 dari tahun sebelumnya, perubahan Aset Tetap Lainnya ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.49
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan
(Dalam Rupiah)

Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	2018	2017
Saldo Awal	146.369.827.037,58	145.561.631.040,51
Mutasi Tambah	6.576.541.910,07	11.978.533.997,07
Mutasi Antar OPD	-	377.575.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa/DED	1.018.532.900,00	1.456.898.200,00
Hutang Belanja Modal	-	2.404.031.869,42
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	-	7.740.028.927,65
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.558.009.010,07	
Mutasi Kurang	(11.169.268.797,07)	(11.170.338.000,00)
Mutasi Antar OPD	-	(377.575.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(8.685.192.188,26)	(10.729.000.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.267.336.608,81)	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(1.216.740.000,00)	(63.763.000,00)
Saldo Akhir	141.777.100.150,58	146.369.827.037,58

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.576.541.910,07 yang terdiri dari reklasifikasi dari barang ke jasaPerencanaan/DED (*detail engineering design*) yang belum di kapitalisasi ke aset tetap, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.018.532.900,00 dan reklasifikasi dari aset jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp5.558.009.010,07.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.169.268.797,07 terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.685.192.188,26, terdiri dari pembangunan gedung sentra industri Diskoprindag, gedung travo RSUD Kabupaten Banyuasin dan SMPN 3 Tungkal Ilir Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.267.336.608,81 merupakan jaringan saluran air bersih pada RSUD Kabupaten Banyuasin;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Rusak/Aset Tak berwujud sebesar Rp1.216.740.000,00 yang merupakan belanja jasa perencanaan/DED (*detail engineering design*) yang umur teknisnya melebihi batas pengakuan pada aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu empat tahun sejak perolehannya.

rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 17.

7) Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.738.924.893.237,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.50
Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

No	Nama Kelompok Aset	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	361.605.452.176,98	63.235.105.122,95	4.429.525.290,93	420.411.032.009,00
3	Gedung dan Bangunan	151.274.027.173,19	21.935.330.627,00	1.087.703.794,19	172.121.654.006,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.006.078.652.851,76	140.339.950.247,00	26.395.876,76	1.146.392.207.222,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam Penyelesaian	-	-	-	-
	Jumlah	1.518.958.132.201,93	225.510.385.996,95	5.543.624.961,88	1.738.924.893.237,00

Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.51
Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	128.913.253.026,00	28.812.205.257,95	43.930.672,00	157.681.527.611,95
Dinas Kesehatan	70.450.604.574,19	14.101.817.744,00	510.135.619,19	84.042.286.699,00
Rumah Sakit Umum Daerah	16.384.752.259,40	5.148.160.325,00	-	21.532.912.584,40
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	74.253.290.503,13	18.971.070.881,00	969.235.707,00	92.255.125.677,13
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	934.882.823.030,00	114.069.174.067,00	8.582.071,00	1.048.943.415.026,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	6.480.034.015,93	1.067.018.428,00	51.793.165,93	7.495.259.278,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.396.227.803,00	920.234.683,00	-	5.316.462.486,00
Dinas Sosial	2.355.661.026,00	228.103.034,00	5.565.000,00	2.578.199.060,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.805.201.748,00	7.769.275.705,00	-	21.574.477.453,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.682.305.112,10	606.608.620,00	-	4.288.913.732,10
Dinas Lingkungan Hidup	13.112.269.369,00	2.073.363.028,00	-	15.185.632.397,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.645.995.471,20	830.838.345,00	-	6.476.833.816,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.993.993.385,00	614.068.029,00	-	4.608.061.414,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	8.703.465.870,00	1.094.260.863,00	-	9.797.726.733,00
Dinas Perhubungan	19.387.505.413,00	3.327.799.982,00	-	22.715.305.395,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.081.248.029,02	1.942.455.468,00	-	10.023.703.497,02
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.246.159.664,00	2.658.164.295,00	2,00	13.904.323.957,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.037.481.779,00	698.981.902,00	-	7.736.463.681,00
Dinas Perikanan	9.951.613.875,00	1.511.402.617,00	-	11.463.016.492,00
Dinas Pertanian	23.475.999.012,00	2.988.624.049,00	-	26.464.623.061,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Ikuudasi)	17.569.391,76	-	17.569.391,76	-
Sekretariat Daerah	81.671.761.284,00	7.461.480.819,00	1.420.488.333,00	87.712.753.770,00
Sekretariat DPRD	33.722.715.410,00	2.996.641.564,00	2.362.000.000,00	34.357.356.974,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	4.236.665.735,00	409.536.352,00	-	4.646.202.087,00
Kecamatan Banyuasin I	376.875.636,00	113.514.456,00	-	490.390.092,00
Kecamatan Banyuasin III	1.481.962.801,00	155.355.437,00	-	1.637.308.238,00
Kecamatan Betung	460.974.612,00	96.965.901,00	-	557.940.513,00
Kecamatan rantau Bayur	347.967.750,00	135.675.128,00	-	483.642.878,00
Kecamatan Pulau Rimau	623.610.150,00	201.882.868,00	-	825.493.018,00
Kecamatan Talang Kelapa	802.955.182,00	134.630.627,00	-	937.585.809,00
Kecamatan Rambutan	348.580.315,00	109.194.455,00	-	457.774.770,00

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Kecamatan Tunggal Ilir	559.748.573,00	127.893.466,00	-	687.642.039,00
Kecamatan Tanjung Lago	314.729.124,00	87.184.901,00	-	401.914.025,00
Kecamatan Sembawa	444.897.208,00	133.360.638,00	-	578.257.846,00
Kecamatan Suak Tapeh	413.137.091,00	132.572.387,00	-	545.709.478,00
Kecamatan Banyuasin II	628.780.182,00	121.895.380,00	-	750.675.562,00
Kecamatan Makarti Jaya	547.065.667,00	135.626.890,00	-	682.692.557,00
Kecamatan Muara Padang	765.219.367,00	191.522.010,00	-	956.741.377,00
Kecamatan Muara Sugihan	347.858.614,00	114.544.765,00	-	462.403.379,00
Kecamatan Muara Telang	673.796.873,00	132.601.590,00	-	806.398.463,00
Kecamatan Air Salek	436.832.318,00	112.983.399,00	-	549.815.717,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	307.801.120,00	128.368.427,00	-	436.169.547,00
Kecamatan Air Kumbang	385.071.193,00	135.579.409,00	-	520.650.602,00
Kecamatan Selat Penuguan	-	281.250,00	-	281.250,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	508.333,00	-	508.333,00
Inspektorat Daerah	4.144.858.584,00	524.879.709,00	-	4.669.738.293,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.015.956.763,00	425.454.756,00	154.325.000,00	5.287.086.519,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.646.254.303,00	1.184.182.902,00	-	10.830.437.205,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.994.611.990,20	572.440.855,00	-	4.567.052.845,20
Jumlah	1.518.958.132.201,93	225.510.385.996,95	5.543.624.961,88	1.738.924.893.237,00

5.5.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp312.991.446.469,93 terdiri dari:

Tabel 5.5.2
Rincian Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Aset Kondisi Rusak Berat	13.676.902.603,98	3.372.867.300,00	-	17.049.769.903,98
Penyusutan	(6.833.722.862,63)	(4.340.668.840,00)	-	(11.174.391.702,63)
Aset Tidak/Belum Digunakan untuk Tusi SKPD	293.311.879.455,78	14.710.822.150,00	(14.123.486.000,00)	293.899.215.605,78
Aset Tidak Berwujud	8.987.912.904,00	2.636.000.894,00	-	11.623.913.798,00
Amortisasi	(6.999.975.392,49)	(1.856.219.745,74)	-	(8.856.195.138,23)
Aset Lain-Lain	7.563.619.963,58	3.938.857.636,39	(1.053.343.596,94)	10.449.134.003,03
Jumlah	309.706.616.672,22	18.461.659.394,65	(15.176.829.596,94)	312.991.446.469,93

1) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Aset Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.049.769.903,98, terjadi penambahan sebesar Rp3.372.867.300,00 yang berasal dari aset lain-lain aset yang tidak ditemukan dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 aset tersebut telah ditemukan namun dalam kondisi rusak berat senilai Rp119.927.300,00 dan kendaraan dinas operasional dengan kondisi rusak berat pada tiga SKPD yaitu Sekretariat DPRD senilai Rp1.103.005.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp1.596.000.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp553.935.000,00.

Tabel 5.5.3
Rincian Aset Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Nama OPD	Saldo Awal 2018	Mutasi		Saldo Akhir 2018
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Sekretariat DPRD	34.347.000,00	1.596.000.000,00	-	1.630.347.000,00
Sekretariat Daerah	2.998.067.500,00	1.103.005.000,00	-	4.101.072.500,00
Dinas Kesehatan	-	553.935.000,00	-	553.935.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.969.692.282,00	-	-	4.969.692.282,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	406.258.000,00	-	-	406.258.000,00
Dinas Perhubungan	2.369.901.272,00	-	-	2.369.901.272,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	62.802.376,00	-	-	62.802.376,00
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	689.622.598,00	119.927.300,00	-	809.549.898,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141.150.000,00	-	-	141.150.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	361.036.000,00	-	-	361.036.000,00
Dinas Pertanian	36.700.000,00	-	-	36.700.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	388.223.802,98	-	-	388.223.802,98
Dinas Perikanan	184.383.773,00	-	-	184.383.773,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95.169.000,00	-	-	95.169.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	575.184.000,00	-	-	575.184.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	11.500.000,00	-	-	11.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	208.065.000,00	-	-	208.065.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	22.850.000,00	-	-	22.850.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	115.950.000,00	-	-	115.950.000,00
Kecamatan Banyuasin I	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Jumlah	13.676.902.603,98	3.372.867.300,00	-	17.049.769.903,98

2) Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.174.391.702,63 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.54
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	480.607.014,67	-	-	480.607.014,67
Dinas Kesehatan	-	433.868.451,00	-	433.868.451,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	218.506.303,67	951.911.360,00	-	1.170.417.663,67
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	406.258.000,00	-	-	406.258.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	154.325.000,00	-	154.325.000,00
Dinas Sosial	-	5.565.000,00	-	5.565.000,00
Dinas Perhubungan	1.031.559.242,84	-	-	1.031.559.242,84
Dinas Lingkungan Hidup	(107.146.000,00)	-	-	(107.146.000,00)
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	265.500.833,33	-	-	265.500.833,33
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.127.575,52	-	-	140.127.575,52
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	16.865.476,19	-	-	16.865.476,19
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	40.310.696,00	-	40.310.696,00
Sekretariat Daerah	2.487.917.500,00	1.158.688.333,00	-	3.646.605.833,00
Sekretariat DPRD	34.347.000,00	1.596.000.000,00	-	1.630.347.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(0,50)	-	-	(0,50)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	528.637.750,00	-	-	528.637.750,00
Kecamatan Banyuwasin III	-	-	-	-
Kecamatan Talang Kelapa	10.600.000,00	-	-	10.600.000,00
Kecamatan Air Kumbang	5.875.000,00	-	-	5.875.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	388.223.802,98	-	-	388.223.802,98
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141.150.000,00	-	-	141.150.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	115.950.000,00	-	-	115.950.000,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	116.685.709,33	-	-	116.685.709,33
Dinas Pertambangan dan Energi	189.970.000,00	-	-	189.970.000,00
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	195.076.666,67	-	-	195.076.666,67
Dinas Perikanan	71.841.987,93	-	-	71.841.987,93
Dinas Pengelolaan Pasar	95.169.000,00	-	-	95.169.000,00
Jumlah	6.833.722.862,63	4.340.668.840,00	-	11.174.391.702,63

3) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Saldo Aset Dimanfaatkan Pihak Lain merupakan aset yang tidak/belum digunakan untuk tugas dan fungsi SKPD per 31 Desember 2018 sebesar Rp293.899.215.605,78. Terjadi penambahan sebesar Rp14.710.822.150,00, yang terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah senilai Rp178.038.150,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp14.532.784.000,00 serta pengurangan sebesar Rp14.123.486.000,00 yang merupakan penghapusan aset lainnya yang telah dihibahkan kepada pihak lainnya berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 479/KPTS/DPPKAD/2015 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwasin. Mutasi aset dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5.55
Aset Tidak/Belum Digunakan Untuk Tugas dan Fungsi SKPD

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2018	Mutasi		Saldo Akhir 2018
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Sekretariat Daerah	24.281.256.603,00	-	-	24.281.256.603,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	171.558.194.095,00	14.532.784.000,00	-	186.090.978.095,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	55.079.452.000,00	-	-	55.079.452.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	12.970.682.757,78	178.038.150,00	-	13.148.720.907,78
Dinas Ketahanan Pangan	29.422.294.000,00	-	(14.123.486.000,00)	15.298.808.000,00
Jumlah	293.311.879.455,78	14.710.822.150,00	(14.123.486.000,00)	293.899.215.605,78

4) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.623.913.798,00, terjadi peningkatan sebesar Rp2.636.000.894,00 berupa perangkat lunak/*Software*, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut::

Tabel 5.5.56
Rincian Aset Tidak Berwujud

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2018	Mutasi		Saldo Akhir 2018
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Sekretariat DPRD	42.350.000,00	-	-	42.350.000,00
Sekretariat Daerah	212.961.000,00	35.000.000,00	-	247.961.000,00
Dinas Perhubungan	-	198.000.000,00	-	198.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.375.192.700,00	19.500.000,00	-	4.394.692.700,00
Dinas Kesehatan	261.345.500,00	-	-	261.345.500,00
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.212.926.204,00	2.315.500.894,00	-	4.528.427.098,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.772.500,00	-	-	272.772.500,00
Dinas Perikanan	340.900.000,00	-	-	340.900.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	333.222.500,00	68.000.000,00	-	401.222.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	46.170.000,00	-	-	46.170.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	412.522.500,00	-	-	412.522.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	477.550.000,00	-	-	477.550.000,00
Jumlah	8.987.912.904,00	2.636.000.894,00	-	11.623.913.798,00

5) Amortisasi

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.856.195.138,23 yang merupakan perangkat lunak sistem operasi

Tabel 5.5.57
Rincian Amortisasi Aset tidak berwujud

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	2.012.898.157,06	674.313.447,83	-	2.687.211.604,89
2	Dinas Kesehatan	183.151.520,83	26.592.625,00	-	209.744.145,83
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	412.522.500,00	-	-	412.522.500,00
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	8.250.000,00	-	8.250.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.772.500,00	-	-	272.772.500,00
6	Sekretariat Daerah	87.770.187,50	54.698.583,33	-	142.468.770,83
7	Sekretariat DPRD	42.350.000,00	-	-	42.350.000,00
8	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	196.267.708,34	109.487.500,00	-	305.755.208,34
9	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	292.430.833,34	46.458.333,33	-	338.889.166,67
10	Dinas Perikanan dan Kelautan	177.552.083,33	85.225.000,00	-	262.777.083,33
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.319.374.277,09	839.651.756,25	-	4.159.026.033,34
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	2.885.625,00	11.542.500,00	-	14.428.125,00
	Jumlah	6.999.975.392,49	1.856.219.745,75	-	8.856.195.138,23

6) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.449.134.003,03, terjadi penambahan dengan rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.5.58
Rincian Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2018	Mutasi		Saldo Akhir 2018
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Detail Engineering Design (DED)	3.863.707.000,00	1.216.740.000,00	-	5.080.447.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	1.354.040.000,00	245.440.000,00	-	1.599.480.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	149.420.000,00	-	-	149.420.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	734.305.000,00	377.575.000,00	-	1.111.880.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	768.711.000,00	-	-	768.711.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	63.763.000,00	-	-	63.763.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	793.468.000,00	-	-	793.468.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	593.725.000,00	-	593.725.000,00
Kekurangan Volume Pekerjaan	1.303.689.118,58	2.508.480.044,39	(933.416.296,94)	2.878.752.866,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.303.689.118,58	1.247.839.050,43	(933.416.296,94)	1.618.111.872,07
Dinas Kesehatan	-	623.010.915,79	-	623.010.915,79
Dinas Perhubungan	-	496.657.747,74	-	496.657.747,74
Dinas Perumahan Rakyat, Kaw asan Permukiman dan Pertanahan	-	140.972.330,43	-	140.972.330,43
Aset tetap yang tidak ditemukan	119.927.300,00	-	(119.927.300,00)	-
Dinas Pendidikan	119.927.300,00	-	(119.927.300,00)	-
Investasi di BUMD dalam Proses Likuidasi	1.800.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.800.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00
Saldo Kas SMA/MK Yang Diserahkan ke Provinsi	476.296.545,00	-	-	476.296.545,00
Saldo Kas SMA/MK Yang Diserahkan ke Provinsi	476.296.545,00	-	-	476.296.545,00
Aset Ganda Pencatatan	-	213.637.592,00	-	213.637.592,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Poli	-	53.747.592,00	-	53.747.592,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengemba	-	154.325.000,00	-	154.325.000,00
Dinas Sosial	-	5.565.000,00	-	5.565.000,00
Jumlah	7.563.619.963,58	3.938.857.636,39	(1.053.343.596,94)	10.449.134.003,03

a. Detail Engineering Design (DED)

Saldo Aset Lain-lain berupa *Detail Engineering Design (DED)* per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.080.447.000,00 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.216.740.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang merupakan belanja jasa perencanaan/DED (*detail engineering design*) yang umur teknisnya melebihi batas pengakuan pada aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu empat tahun sejak perolehannya.

rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 20.

b. Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan

Saldo Aset Lain-lain berupa kekurangan volume pekerjaan terjadi penambahan sebesar Rp2.508.480.044,39 pada empat SKPD dan telah dilakukan penyeteroran ke kas daerah senilai Rp933.416.296,94 hingga saldo akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.878.752.866,03

c. Aset Tetap yang Tidak Ditemukan

Pada Aset Lain-lain per 31 Desember 2018, aset tetap yang tidak ditemukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp0,00 hal ini karena aset tersebut telah ditemukan dan dalam kondisi rusak berat.

d. Investasi di BUMD dalam Proses Likuidasi

Pada Aset Lain-lain terdapat koreksi reklasifikasi dari Investasi Permanen lainnya (Penyertaan Modal pada PT. *Basin Resources*) sebesar Rp1.800.000.000,00, yang

telah dibubarkan/dibekukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah *Basin Resources* tanggal 24 Oktober 2013. Likuidasi atas BUMD *Basin Resources* sampai 31 Desember 2018 belum jelas tindak lanjutnya.

e. Saldo Akhir Kas BOS dan PSG SMA/MK

Saldo kas BOS dan PSG SMK/MK masih tetap senilai Rp476.296.545,00 karena sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 belum dilakukan rekonsiliasi dan penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

f. Aset Dobel Pencatatan

Saldo Aset lain-lain terdapat penambahan sebesar Rp213.637.592,00 berupa aset kendaraan operasional dinas roda empat dan roda dua yang terdoble pencatatannya, yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin.

5.5.2 Kewajiban

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.813.463.618,63 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo tidak lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.59
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	660.032.064,00	113.167.278.183,73	113.265.884.592,73	561.425.655,00
Utang Kepada Pemerintah Pusat	25.399.205.215,00	5.181.765.947,00	15.046.553.669,00	15.534.417.493,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	8.857.929.727,86	236.848.624.598,66	241.708.898.749,51	3.997.655.577,01
Utang Beban	14.760.406.670,19	1.547.253.312.973,37	1.554.830.962.851,94	7.182.756.791,62
Utang Jamsoskes	1.051.172.025,80	-	1.051.172.025,80	-
Kelebihan setoran Pembayaran PBB	908.842,00	-	908.842,00	-
Pengembalian dana BOS	11.601.000,00	-	11.601.000,00	-
Penampungan PBB yang belum jelas NOP nya	5.922.227,00	-	4.169.893,00	1.752.334,00
Jaminan Kesungguhan yang ditempatkan pada Kas Daerah	-	3.535.455.768,00	-	3.535.455.768,00
Jumlah	50.747.177.771,85	1.905.986.437.470,76	1.925.920.151.623,98	30.813.463.618,63

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp561.425.655,00 merupakan hutang iuran jaminan kesehatan, hutang pajak dan utang perhitungan pihak ketiga lainnya per jenis hutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.60
Rincian Utang Pihak Ketiga (PFK) perjenis

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	10.478.537.932,00	10.478.537.932,00	-
Utang PPh Pasal 21	26.363,00	24.236.153.284,00	24.063.831.840,00	172.347.807,00
Utang PPh Pasal 22	239.179,00	1.580.696.991,91	1.579.851.803,91	1.084.367,00
Utang PPh Pasal 23	1.000.580,00	866.300.338,45	858.989.241,45	8.311.677,00
Utang PPh Pasal 4 (2)	-	4.824.128.947,00	4.824.128.947,00	-
Utang PPN Pusat	86.364,00	32.662.710.569,36	32.283.115.129,36	379.681.804,00

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Utang Taperum	-	679.086.000,00	679.086.000,00	-
Utang luran Wajib Pegawai	-	34.193.936.208,00	34.193.936.208,00	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	1.630.000,00	1.630.000,00	-
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	658.679.578,00	3.644.097.913,00	4.302.777.491,00	-
Jumlah	660.032.064,00	113.167.278.183,73	113.265.884.592,73	561.425.655,00

Perhitungan rincian PFK per SKPD dapat dilihat dalam rincian berikut :

Tabel 5.5.61
Rincian Utang Pihak Ketiga (PFK) per SKPD

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	1.188.105.685,00	641.043.814,00	547.061.871,00
Dinas Kesehatan	-	703.822.145,00	695.927.476,00	7.894.669,00
Rumah Sakit Umum Daerah	-	247.868.867,00	247.868.867,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	182.726.925,00	182.726.925,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	-	263.184.431,00	263.184.431,00	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	110.345.470,00	110.345.470,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	131.288.997,00	131.288.997,00	-
Dinas Sosial	-	108.447.145,00	108.447.145,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	44.979.963,00	44.979.963,00	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	109.518.674,00	109.518.674,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	236.316.578,00	236.316.578,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	126.643.676,00	126.643.676,00	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	134.121.086,00	134.121.086,00	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	229.701.395,00	229.701.395,00	-
Dinas Perhubungan	-	85.682.325,00	85.682.325,00	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	148.471.706,00	148.471.706,00	-
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	187.029.377,00	187.029.377,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	78.143.955,00	78.143.955,00	-
Dinas Perikanan	-	104.190.929,00	104.190.929,00	-
Dinas Pertanian	-	152.388.061,82	152.388.061,82	-
Sekretariat Daerah	-	1.522.872.718,00	1.522.872.718,00	-
Sekretariat DPRD	-	354.304.069,00	354.304.069,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	53.792.015,00	53.792.015,00	-
Kecamatan Banyuasin I	-	19.176.887,00	19.176.887,00	-
Kecamatan Banyuasin III	-	53.523.034,00	53.523.034,00	-
Kecamatan Betung	-	21.557.403,00	21.557.403,00	-
Kecamatan rantau Bayur	-	17.468.182,00	17.468.182,00	-
Kecamatan Pulau Rimau	-	13.905.747,00	13.905.747,00	-
Kecamatan Talang Kelapa	-	31.674.428,00	31.674.428,00	-
Kecamatan Rambutan	-	19.422.278,00	19.422.278,00	-
Kecamatan Tungkal Ilir	-	14.041.683,00	14.041.683,00	-
Kecamatan Tanjung Lago	-	15.850.633,00	15.850.633,00	-
Kecamatan Sembawa	-	16.597.089,00	16.597.089,00	-
Kecamatan Suak Tapeh	-	12.021.759,00	12.021.759,00	-
Kecamatan Banyuasin II	-	15.330.868,00	15.330.868,00	-
Kecamatan Makarti Jaya	-	18.075.503,00	18.075.503,00	-
Kecamatan Muara Padang	1.352.486,00	13.523.606,00	14.876.092,00	-
Kecamatan Muara Sugihan	-	8.405.281,00	8.405.281,00	-
Kecamatan Muara Telang	-	14.655.757,00	14.655.757,00	-
Kecamatan Air Salek	-	13.482.325,00	7.013.210,00	6.469.115,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	-	13.577.219,00	13.577.219,00	-
Kecamatan Air Kumbang	-	7.780.794,00	7.780.794,00	-
Kecamatan Selat Penuguan	-	5.167.951,91	5.167.951,91	-
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	3.929.546,00	3.929.546,00	-
Inspektorat Daerah	-	170.870.520,00	170.870.520,00	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	278.499.309,00	278.499.309,00	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	658.679.578,00	231.229.443,00	889.909.021,00	-
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	-	105.454.549.597,00	105.454.549.597,00	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	179.015.148,00	179.015.148,00	-
Total	660.032.064,00	113.167.278.183,73	113.265.884.592,73	561.425.655,00

2) Utang Kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.534.417.493,00 merupakan kelebihan transfer pemerintah pusat atas dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang disebabkan Pengurangan dan penambahan hutang transfer dihitung berdasarkan kurang salur dan lebih salur dana transfer sesuai dengan PMK nomor 103/PMK.07/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2018. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.5.62
Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	PPH	4.652.065,00	-	4.652.065,00	-
2	PBB	2.675.335.500,00	-	2.675.335.500,00	-
3	PSDH	-	-	-	-
4	DANA REBAOISASI (DR)	9.764.100,00	-	-	9.764.100,00
5	CUKAI HASIL TEMBAKAU	5.045.415,00	-	77.519,00	4.967.896,00
6	PERIKANAN	291.491.894,00	-	99.184.671,00	192.307.223,00
7	LANDRENT	364.187.533,00	2.856.702.734,00	-	3.220.890.267,00
8	ROYALTY	192.385.853,00	-	192.385.853,00	-
9	MINYAK BUMI	9.781.424.794,00	2.325.063.213,00	-	12.106.488.007,00
10	GAS BUMI	12.074.918.061,00	-	12.074.918.061,00	-
	TOTAL	25.399.205.215,00	5.181.765.947,00	15.046.553.669,00	15.534.417.493,00

3) Utang Pengadaan Aset Tetap

Saldo Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.997.655.577,01 dengan rincian per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.63
Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per SKPD per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	810.553.187,00	27.271.455.523,00	27.940.589.423,00	141.419.287,00
2	Dinas Kesehatan	142.364.811,00	26.978.957.147,45	27.111.367.747,45	9.954.211,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.739.928.947,41	7.924.344.761,47	9.664.273.708,88	-
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawas Permukiman dan Pertanahan	2.029.549.276,03	50.589.976.035,60	50.323.015.482,62	2.296.509.829,01
5	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	2.072.981.262,50	92.742.553.266,52	93.626.639.104,02	1.188.895.425,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	9.956.044.040,00	9.956.044.040,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	156.050.000,00	156.050.000,00	-
8	Dinas Sosial	-	61.500.000,00	61.500.000,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	95.833.040,00	95.833.040,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	9.623.000,00	55.468.000,00	65.091.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	502.988.050,00	259.560.000,00	751.859.500,00	10.688.550,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	555.033.000,00	555.033.000,00	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	64.000.000,00	64.000.000,00	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.223.915,00	204.557.415,00	231.764.830,00	30.016.500,00
15	Dinas Perhubungan	-	6.593.683.383,34	6.593.683.383,34	-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	670.519.935,00	670.519.935,00	-
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.163.541.753,92	3.884.182.648,28	5.047.724.402,20	-
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9.978.750,00	-	9.978.750,00	-
19	Dinas Perikanan	238.704.900,00	226.379.500,00	226.379.500,00	238.704.900,00
20	Dinas Pertanian	44.798.150,00	-	-	44.798.150,00
21	Sekretariat Daerah	-	5.408.393.003,00	5.408.393.003,00	-
22	Sekretariat DPRD	35.093.725,00	1.246.542.000,00	1.245.567.000,00	36.068.725,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	-	-	-
24	Kecamatan Talang Kelapa	-	60.300.000,00	60.300.000,00	-
25	Kecamatan Rambutan	-	47.025.000,00	47.025.000,00	-
26	Kecamatan Makarti Jaya	-	34.750.000,00	34.750.000,00	-
27	Inspektoral Daerah	-	344.333.100,00	344.333.100,00	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.350.538.800,00	1.350.538.800,00	-
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	600.000,00	-	-	600.000,00
	Jumlah	8.857.929.727,86	236.781.979.598,66	241.642.253.749,51	3.997.655.577,01

dengan rincian terlampir pada lampiran 21

4) Utang Beban

Saldo Utang beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.182.756.791,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.64
Rincian utang Beban per jenis per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Utang Beban Pegawai	297.956.500,00	667.469.575.304,00	667.767.531.804,00	-
Utang Beban Barang dan Jasa	15.388.476.853,65	135.625.797.441,79	144.597.803.290,82	6.416.471.005
Utang Beban Hibah	125.145.341,34	127.849.568.143,58	127.974.713.484,92	-
Utang Beban Transfer	1,00	613.986.685.084,00	613.220.399.298,00	766.285.787
Utang Beban Lain-lain	-	2.321.687.000,00	2.321.687.000,00	-
Jumlah	15.811.578.695,99	1.547.253.312.973,37	1.555.882.134.877,74	7.182.756.791,62

dengan rincian terlampir pada lampiran 21

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Penampungan PBB yang belum jelas NOP

Saldo Penampungan PBB yang belum jelas NOP nya per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.752.334,00 dan baru diakui sebagai pendapatan pajak daerah setelah NOPnya teridentifikasi.

b. Jaminan Kesungguhan yang ditempatkan pada Kas Daerah

Jaminan kesungguhan merupakan jaminan berupa dana yang dicadangkan oleh perusahaan sebagai bentuk jaminan kesungguhan atas kesanggupan melakukan penambangan dan akan dicairkan pada saat perusahaan tersebut melakukan eksplorasi sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan urusan kewenangan berpindah ke Provinsi sehingga dana tersebut menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dan Saldo Jaminan Kesungguhan yang ditempatkan pada Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.535.455.768,00 yang akan ditransfer ke Rekening Provinsi pada tahun 2019.

5.5.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.018.435.287.001,09 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban.

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas selama periode 31 Desember 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Rincian arus kas bersih dari masing-masing aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.6.1
Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	353.713.180.128,64	343.780.220.005,37
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(271.156.111.734,94)	(308.103.344.231,69)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	792.843.276,00	(48.859.816.157,91)

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo arus kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp353.713.180.128,64 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.6.2
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2018	2017
1	2	3		4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	82.349.366.395,92	72.514.998.381,38
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	7.751.152.778,00	8.069.798.706,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.6.1.1.3	4.432.071.561,12	4.116.082.327,28
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.6.1.1.4	45.796.413.880,71	41.282.147.473,26
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.5	71.489.631.880,00	98.676.283.859,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.6	125.121.699.707,00	123.579.735.564,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.7	933.631.693.000,00	923.771.804.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.8	319.248.731.658,00	118.727.497.293,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.6.1.1.9	-	173.432.567.703,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.10	388.096.246.999,00	336.478.881.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah	5.6.1.1.11	91.883.778.514,50	95.300.886.270,45
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	5.6.1.1.12	9.496.768.140,00	10.470.227.867,21
15	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.13	27.215.581,00	-
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)		2.079.324.770.095,25	2.006.420.910.444,58
17	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	709.570.714.755,00	713.707.862.584,96
19	Pembayaran Barang	5.6.1.2.2	534.549.235.600,73	561.175.826.779,01
20	Pembayaran Hibah	5.6.1.2.4	116.762.688.588,88	50.054.508.546,24
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.5	82.705.000,00	269.325.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.6	362.324.559.022,00	337.385.917.529,00
23	Pembayaran Bantuan Subsidi	5.6.1.2.7	-	47.250.000,00
24	Pembayaran Belanja tak terduga	5.6.1.2.7	2.321.687.000,00	-
25	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d 24)		1.725.611.589.966,61	1.662.640.690.439,21
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-25)		353.713.180.128,64	343.780.220.005,37

5.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.080.649.009.995,05 merupakan pendapatan daerah dari laporan realisasi anggaran yang diterima melalui kas daerah. Apabila dikomparasikan pendapatan yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan laporan arus kas masuk dari aktivitas operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.3
Komparasi Pendapatan LRA dengan Arus Kas Masuk dari aktivitas Operasi LAK

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pajak Daerah	82.349.366.395,92	82.349.366.395,92	-
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.751.152.778,00	7.751.152.778,00	-
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	4.432.071.561,12	4.432.071.561,12	-
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	46.069.481.754,71	45.796.413.880,71	273.067.874,00
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	71.489.631.880,00	71.489.631.880,00	-
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	125.121.699.707,00	125.121.699.707,00	-
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	933.631.693.000,00	933.631.693.000,00	-
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	319.248.731.658,00	319.248.731.658,00	-
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	388.096.246.999,00	388.096.246.999,00	-
11	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah	92.934.950.540,30	91.883.778.514,50	1.051.172.025,80
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	9.496.768.140,00	9.496.768.140,00	-
13	Penerimaan Hibah	27.215.581,00	27.215.581,00	-
14	Jumlah	2.080.649.009.995,05	2.079.324.770.095,25	1.324.239.899,80

Terdapat selisih antara Penerimaan lain-lain PAD yang sah, Penerimaan Dana Penyesuaian dan dana bagi hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada LRA dengan arus masuk kas pada aktivitas operasi LAK sebesar Rp1.324.239.899,80 yang akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

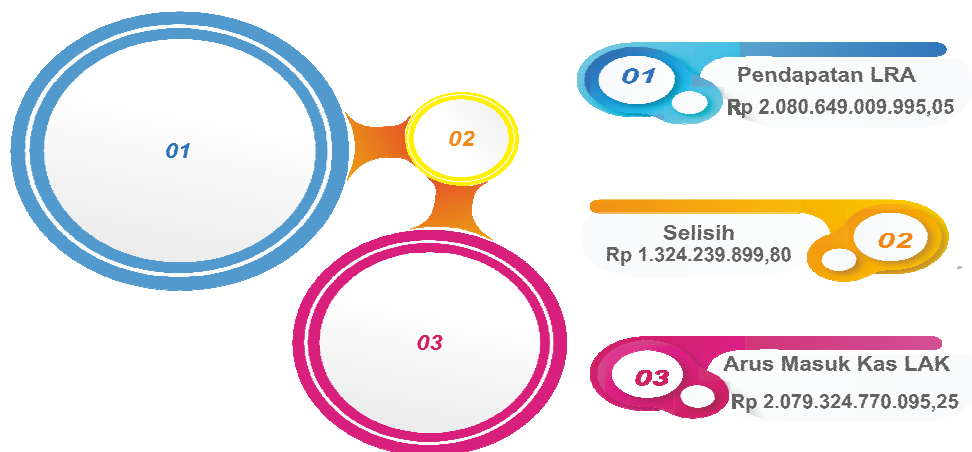
Tabel 5.6.4
Rincian Penjelasan selisih Pendapatan LRA dan LAK

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah LRA	46.069.481.754,71
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah LAK	45.796.413.880,71
selisih	273.067.874,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya LRA	92.934.950.540,30
Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya LAK	91.883.778.514,50
selisih	1.051.172.025,80
Total Selisih	1.324.239.899,80
Penjelasan Selisih	
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah	273.067.874,00
Dana Bagi Hasil Provinsi yang dipotong langsung	1.051.172.025,80
Total Penjelasan Selisih	1.324.239.899,80
Selisih	-

Berikut komposisi perbandingan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Masuk Kas Pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2018.

Gambar 5.7
Perbandingan Pendapatan LRA dan Arus Masuk Kas LAK per 31 Desember 2018



5.6.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.725.611.589.966,61 merupakan belanja operasi dari laporan realisasi anggaran yang diterima kas daerah. Apabila dikomparasikan belanja yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.5
Komparasi belanja LRA Arus Kas keluar dari aktivitas Operasi LAK

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5	6
1	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	709.570.714.755,00	709.570.714.755,00	-
2	Pembayaran Barang	5.6.1.2.2	534.549.235.600,73	534.549.235.600,73	-
3	Pembayaran Hibah	5.6.1.2.4	116.762.688.588,88	116.762.688.588,88	-
4	Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.5	82.705.000,00	82.705.000,00	-
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.6	362.324.559.022,00	362.324.559.022,00	-
6	Pembayaran Bantuan Subsidi	5.6.1.2.7	-	-	-
7	Pembayaran Belanja tak terduga	5.6.1.2.7	2.321.687.000,00	2.321.687.000,00	-
8	Jumlah		1.725.611.589.966,61	1.725.611.589.966,61	-

Berikut komposisi perbandingan Belanja Operasi Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Keluar Kas Pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2018.

Gambar 5.8
Perbandingan Belanja Operasi dan belanja bantuan keuangan LRA dan Arus
Keluar Kas LAK per 31 Desember 2018



5.6.2 Aktivitas Investasi

Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2018 defisit sebesar Rp271.156.111.734,94 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.6.6
Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
2	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
3	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.1	-	1.342.000,00
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.6.2.1.2	273.067.874,00	-
5	Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Lainnya	5.6.2.1.3	-	-
6	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 5)		273.067.874,00	1.342.000,00
7	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
8	Perolehan Tanah	5.6.2.1	-	2.148.143.278,62
9	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	79.475.359.783,98	71.423.307.080,04
10	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.3	40.216.071.857,47	64.013.266.719,94
11	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.4	144.726.464.609,49	162.445.667.970,09
12	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.5	2.011.283.358,00	3.074.301.183,00
13	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.6	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
14	Jumlah Arus Keluar Kas (8 s.d 13)		271.429.179.608,94	308.104.686.231,69
15	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (6-14)		(271.156.111.734,94)	(308.103.344.231,69)

5.6.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas aktivitas investasi sebesar Rp273.067.874,00 merupakan hasil penjualan kendaraan dinas roda empat sampai dengan 31 Desember 2018.

5.6.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas aktivitas investasi sebesar Rp271.429.179.608,94 merupakan belanja modal pada laporan realisasi anggaran dan penyertaan modal yang dikeluarkan melalui kas daerah. Apabila dikomparasikan belanja modal yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.7
Komparasi belanja LRA Arus Kas keluar dari aktivitas investasi LAK

(dalam rupiah)

NO		LRA	LAK	Selisih
1	Perolehan Tanah	-	-	-
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	79.475.359.783,98	79.475.359.783,98	-
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	40.216.071.857,47	40.216.071.857,47	-
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.726.464.609,49	144.726.464.609,49	-
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.011.283.358,00	2.011.283.358,00	-
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
7	Jumlah	271.429.179.608,94	271.429.179.608,94	-

5.6.3 Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2018 defisit sebesar Rp0,00 mencerminkan penerimaan pendanaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pendanaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.6.8
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
2	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
3	Penerimaan Piutang Daerah	5.6.3.1.1	-	-
4	Jumlah Arus Masuk Kas (3)		-	-
5	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
6	Pembayaran Pokok Utang	5.6.3.2.2	-	-
7	Jumlah Arus Keluar Kas (6)		-	-
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (3-6)		-	-

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 merupakan Penerimaan Piutang Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 merupakan Pengeluaran Pembayaran pokok utang pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.6.4 Aktivitas Transitoris

Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2018 sebesar Rp792.843.276,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak

mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.9
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
2	Arus Masuk Kas	5.6.4.1		
3	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.6.4.1.1	105.454.549.597,00	101.795.328.693,00
4	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD		8.273.784.266,73	-
5	Koreksi SILPA Bunga Depoito tahun lalu	5.6.4.1.1	-	3.698.586.673,00
6	Kesalahan transfer rekening Kas Daerah	5.6.4.1.2	-	734.885,00
7	Kesalahan Pengembalian BOS Ke Provinsi	5.6.4.1.3	-	1.987.000,00
8	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 7)		113.728.333.863,73	105.496.637.251,00
9	Arus Keluar Kas	5.6.4.2		
10	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.6.4.2.1	105.217.609.597,00	101.793.976.207,00
11	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD		7.713.711.097,73	7.539.350,00
12	Kelebihan transfer pajak	5.6.4.2.2		236.940.000,00
13	Kas PSG dan BOS SMA yang diserahkan provinsi	5.6.4.2.4		476.296.545,00
14	Kas Awal PSG SD dan SMP yang belum Masuk LRA	5.6.4.2.5		119.705.276,91
15	Koreksi SILPA tahun lalu	5.6.4.2.6	-	51.721.996.030,00
16	Pengeluaran Rekening Penampungan PBB	5.6.4.2.7	4.169.893,00	-
17	Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d 16)		112.935.490.587,73	154.356.453.408,91
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (8-17)		792.843.276,00	(48.859.816.157,91)

Selanjutnya penjelasan rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) bendahara SKPD per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.10
Rincian PFK per SKPD per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	1.188.105.685,00	641.043.814,00	547.061.871,00
Dinas Kesehatan	-	703.822.145,00	695.927.476,00	7.894.669,00
Rumah Sakit Umum Daerah	-	247.868.867,00	247.868.867,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	182.726.925,00	182.726.925,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	-	263.184.431,00	263.184.431,00	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	110.345.470,00	110.345.470,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	131.288.997,00	131.288.997,00	-
Dinas Sosial	-	108.447.145,00	108.447.145,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	44.979.963,00	44.979.963,00	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	109.518.674,00	109.518.674,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	236.316.578,00	236.316.578,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	126.643.676,00	126.643.676,00	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	134.121.086,00	134.121.086,00	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	229.701.395,00	229.701.395,00	-
Dinas Perhubungan	-	85.682.325,00	85.682.325,00	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	148.471.706,00	148.471.706,00	-
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	187.029.377,00	187.029.377,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	78.143.955,00	78.143.955,00	-
Dinas Perikanan	-	104.190.929,00	104.190.929,00	-
Dinas Pertanian	-	152.388.061,82	152.388.061,82	-
Sekretariat Daerah	-	1.522.872.718,00	1.522.872.718,00	-
Sekretariat DPRD	-	354.304.069,00	354.304.069,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	53.792.015,00	53.792.015,00	-
Kecamatan Banyuwasin I	-	19.176.887,00	19.176.887,00	-
Kecamatan Banyuwasin III	-	53.523.034,00	53.523.034,00	-
Kecamatan Betung	-	21.557.403,00	21.557.403,00	-

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2018
		Tambah	Kurang	
Kecamatan rantau Bayur	-	17.468.182,00	17.468.182,00	-
Kecamatan Pulau Rimau	-	13.905.747,00	13.905.747,00	-
Kecamatan Talang Kelapa	-	31.674.428,00	31.674.428,00	-
Kecamatan Rambutan	-	19.422.278,00	19.422.278,00	-
Kecamatan Tungkai Ilir	-	14.041.683,00	14.041.683,00	-
Kecamatan Tanjung Lago	-	15.850.633,00	15.850.633,00	-
Kecamatan Sembawa	-	16.597.089,00	16.597.089,00	-
Kecamatan Suak Tapeh	-	12.021.759,00	12.021.759,00	-
Kecamatan Banyuasin II	-	15.330.868,00	15.330.868,00	-
Kecamatan Makarti Jaya	-	18.075.503,00	18.075.503,00	-
Kecamatan Muara Padang	1.352.486,00	13.523.606,00	14.876.092,00	-
Kecamatan Muara Sughan	-	8.405.281,00	8.405.281,00	-
Kecamatan Muara Telang	-	14.655.757,00	14.655.757,00	-
Kecamatan Air Salek	-	13.482.325,00	7.013.210,00	6.469.115,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	-	13.577.219,00	13.577.219,00	-
Kecamatan Air Kumbang	-	7.780.794,00	7.780.794,00	-
Kecamatan Selat Penuguan	-	5.167.951,91	5.167.951,91	-
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	3.929.546,00	3.929.546,00	-
Inspektorat Daerah	-	170.870.520,00	170.870.520,00	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	278.499.309,00	278.499.309,00	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	658.679.578,00	231.229.443,00	889.909.021,00	-
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	-	105.454.549.597,00	105.454.549.597,00	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	179.015.148,00	179.015.148,00	-
Total	660.032.064,00	113.167.278.183,73	113.265.884.592,73	561.425.655,00

Selanjutnya penjelasan rincian saldo akhir arus kas per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.11
Rincian Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Ref	2018	2017
1	Kenaikan/Penurunan Kas (24+40+50+65)		83.349.911.669,70	(13.182.940.384,23)
2	Saldo Awal Kas		73.901.063.569,48	87.012.359.744,71
3	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas Dibendahara Pengeluaran		157.250.975.239,18	73.829.419.360,48
4	Kas Sekolah yang tidak masuk LRA 2017 (PSG)		-	71.644.209,00
5	Saldo Akhir KAS		157.250.975.239,18	73.901.063.569,48
6	Kas Di Kas Daerah		54.592.195.303,00	12.408.006.566,02
7	Kas Dibendahara Penerimaan (BLUD)		5.778.300,00	
8	Kas Dibendahara Pengeluaran		69.683.615,00	319.619.739,00
9	Kas di Bendahara FKTP		1.885.524.019,40	663.413.941,00
10	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		3.290.222.527,70	4.064.684.499,46
11	Kas di Sekolah - BOS		927.883.061,00	801.958.956,00
12	Kas di Sekolah - PSG		-	71.644.209,00
13	Saldo Deposito		96.479.688.413,08	55.571.735.659,00
14	Saldo Akhir Kas		157.250.975.239,18	73.901.063.569,48

Dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA sebesar Rp73.901.063.569,48. Dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas menjadi saldo akhir Kas di BUD sebesar Rp157.250.975.239,18.

Saldo akhir kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran jika dijumlahkan dengan Kas di Bendahara FKTP, Kas di BLUD, Bunga Deposito dan Saldo Kas sisa dana BOS maka saldo akhir kas sebesar Rp157.250.975.239,18 sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca namun apabila dibandingkan dengan SiLPA pada laporan realisasi anggaran terdapat perbedaan sebesar Rp563.177.989,00 Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5.6.12
Rincian Perbandingan saldo akhir kas dengan silpa tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
SILPA di LRA	156.687.797.250,18
Saldo Akhir Kas	157.250.975.239,18
Kas Di Kas Daerah	54.592.195.303,00
Kas Dibendahara Penerimaan (BLUD)	5.778.300,00
Kas Dibendahara Pengeluaran	69.683.615,00
Kas di Bendahara FKTP	1.885.524.019,40
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	3.290.222.527,70
Kas di Sekolah - BOS	927.883.061,00
Saldo Deposito	96.479.688.413,08
Selisih	(563.177.989,00)
Penjelasan Selisih	-
Selisih PFK SKPD	(561.425.655,00)
Selisih tahu lalu	-
- Penerimaan PBB yang masih suspend bank sumsel	(1.752.334,00)
Jumlah	(563.177.989,00)
Selisih Saldo Akhir Kas dengan Silpa di LRA	(0,00)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyesuaian terkait Organisasi Perangkat Daerah yang baru dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuasin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah.

SKPD berbentuk dinas daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A;
2. Dinas Kesehatan Tipe A;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe A;
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A;
6. Dinas Sosial Tipe A;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
12. Dinas Perhubungan Tipe A;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
15. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTNSP) Tipe A;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A;
17. Dinas Perikanan Tipe A;
18. Dinas Pertanian Tipe A;
19. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A.

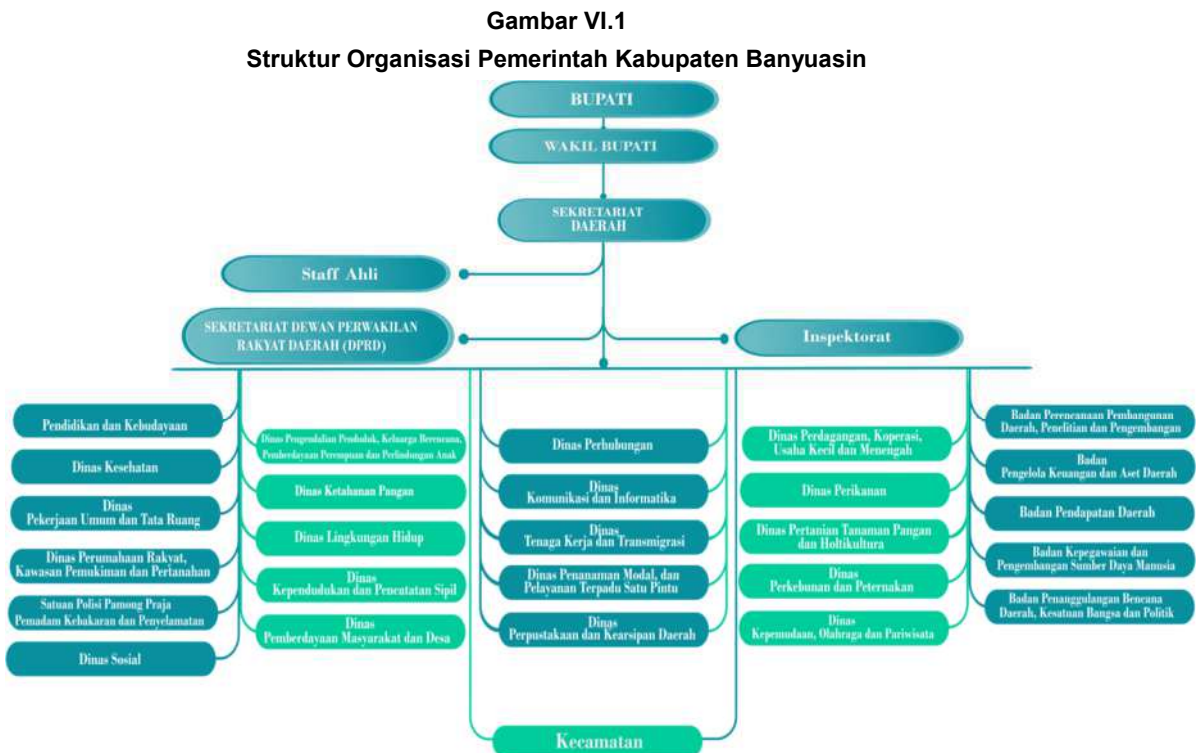
SKPD berbentuk badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.

SKPD berbentuk kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Banyuasin I;
2. Kecamatan Banyuasin II;
3. Kecamatan Banyuasin III;
4. Kecamatan Betung;
5. Kecamatan Rantau Bayur;
6. Kecamatan Pulau Rimau;
7. Kecamatan Talang Kelapa;
8. Kecamatan Rambutan;
9. Kecamatan Tungkal Ilir;
10. Kecamatan Tanjung Lago;
11. Kecamatan Sembawa;
12. Kecamatan Suak Tapeh;
13. Kecamatan Makarti Jaya;
14. Kecamatan Muara Padang;
15. Kecamatan Muara Sugihan;
16. Kecamatan Muara Telang;
17. Kecamatan Air Salek;
18. Kecamatan Sumber Marga Telang;
19. Kecamatan Air Kumbang;
20. Kecamatan Selat Penuguan;
21. Kecamatan Karang Agung Ilir.

Berikut Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin:



Selain Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuasin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga memiliki satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyuasin, sesuai surat Menteri Dalam Negeri No. 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Hal Pedoman persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, pada point 3 dinyatakan bahwa kelembagaan rumah sakit daerah dapat menggunakan struktur kelembagaan yang ada pada saat ini sampai ditetapkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Bupati Banyuasin menjalankan pemerintahannya selama periode 2018-2023, dengan ketetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-6079 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan dilantik pada tanggal 18 September 2018

Pengangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin sebagai berikut :

- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18000294/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengangkatan Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18002505/BKPSDM/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Lingkungan Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18003549/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18003558/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18004049/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18005973/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penyesuaian/Inpasing dalam Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821.2/18005970/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal November 2018 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18005971/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal November 2018 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/18005972/KPTS/BKPSDM/2018 Tanggal November 2018 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Sesuai Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 821/18003549/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin SKPD sebagai berikut:

1. Asisten Administrasi Umum;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
7. Kepala Dinas Perikanan;

VII. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 secara keseluruhan.

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD DAN SMP NEGERI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN : 1

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)																
1	10602515	SDN	SDN 1 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	452.214,00	160.960.000,00	10.800.000,00	117.652.131,00	32.960.000,00	161.412.131,00	83,00	1.080.000,00	-	1.080.000,00	1.080.083,00	
2	10602568	SDN	SDN 2 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	99.562,00	84.320.000,00	2.000.000,00	65.279.562,00	17.120.000,00	84.399.562,00	20.000,00	569.250,00	-	569.250,00	589.250,00	
3	10602657	SDN	SDN 3 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	1.056.622,00	216.640.000,00	750.000,00	173.183.422,00	43.763.200,00	217.696.622,00	-	2.775.500,00	-	2.775.500,00	2.775.500,00	
4	10644658	SDN	SDN 4 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	9.520,00	167.200.000,00	5.000.000,00	114.379.520,00	47.820.000,00	167.199.520,00	10.000,00	4.218.800,00	-	4.218.800,00	4.228.800,00	
5	10602700	SDN	SDN 5 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	140.173,00	102.080.000,00	3.600.000,00	85.080.600,00	13.399.400,00	102.080.000,00	140.173,00	1.191.000,00	-	1.191.000,00	1.331.173,00	
6	10602463	SDN	SDN 6 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	10.840,00	158.400.000,00	14.400.000,00	114.213.000,00	29.787.000,00	158.400.000,00	10.840,00	3.930.000,00	3.684.000,00	246.000,00	256.840,00	
7	10644650	SDN	SDN 7 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	1.716.972,00	213.600.000,00	18.000.000,00	144.221.771,00	53.071.600,00	215.293.371,00	23.601,00	4.154.500,00	-	4.154.500,00	4.178.101,00	
8	10644655	SDN	SDN 8 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	3.972,00	95.680.000,00	6.600.000,00	71.682.372,00	17.381.600,00	95.663.972,00	20.000,00	2.172.750,00	446.750,00	1.726.000,00	1.746.000,00	
9	10644659	SDN	SDN 9 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	10.827,00	81.120.000,00	2.400.000,00	62.410.827,00	16.280.000,00	81.090.827,00	40.000,00	120.000,00	-	120.000,00	160.000,00	
10	10600172	SDN	SDN 10 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	14.328.698,00	120.640.000,00	7.200.000,00	101.840.615,00	25.826.700,00	134.867.315,00	101.383,00	2.599.900,00	1.459.000,00	1.140.900,00	1.242.283,00	
11	10602585	SDN	SDN 11 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	281.485,00	204.160.000,00	11.705.000,00	146.214.000,00	46.241.000,00	204.160.000,00	281.485,00	174.900,00	-	174.900,00	456.385,00	
12	10644656	SDN	SDN 12 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	750.037,00	202.720.000,00	14.400.000,00	160.048.062,00	28.959.000,00	203.407.062,00	62.975,00	4.561.950,00	-	4.561.950,00	4.624.925,00	
13	10644657	SDN	SDN 13 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	6.939,00	141.280.000,00	13.500.000,00	94.978.839,00	32.808.100,00	141.286.939,00	-	1.585.000,00	-	1.585.000,00	1.585.000,00	
14	10602580	SDN	SDN 14 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	3.822,00	78.880.000,00	4.800.000,00	63.579.100,00	10.500.900,00	78.880.000,00	3.822,00	869.000,00	-	869.000,00	872.822,00	
15	10644664	SDN	SDN 15 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	12.118,00	106.880.000,00	900.000,00	84.712.000,00	21.280.000,00	106.892.000,00	118,00	716.000,00	716.000,00	-	118,00	
16	10644663	SDN	SDN 16 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	74.343,00	199.360.000,00	10.800.000,00	148.154.343,00	40.480.000,00	199.434.343,00	-	2.759.250,00	-	2.759.250,00	2.759.250,00	
17	10644665	SDN	SDN 17 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	199.609,00	171.520.000,00	13.200.000,00	125.210.325,00	33.068.500,00	171.478.825,00	240.784,00	4.803.727,00	1.852.000,00	2.951.727,00	3.192.511,00	
18	10644667	SDN	SDN 18 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	103.567,00	153.120.000,00	13.200.000,00	118.421.267,00	21.582.300,00	153.203.567,00	20.000,00	2.441.000,00	-	2.441.000,00	2.461.000,00	
19	10644668	SDN	SDN 19 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	395.243,00	109.760.000,00	13.200.000,00	74.272.200,00	22.633.000,00	110.105.200,00	50.043,00	2.371.000,00	1.960.000,00	411.000,00	461.043,00	
20	10644669	SDN	SDN 20 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	187.567,00	55.200.000,00	600.000,00	43.387.567,00	11.400.000,00	55.387.567,00	-	177.500,00	-	177.500,00	177.500,00	
21	10644670	SDN	SDN 21 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	182.302,00	61.120.000,00	3.300.000,00	45.788.902,00	12.093.400,00	61.182.302,00	120.000,00	292.500,00	-	292.500,00	412.500,00	
22	10600102	SDN	SDN 1 AIR SALEH	AIR SALEH	1.256.665,00	318.240.000,00	3.200.000,00	251.096.600,00	64.960.000,00	319.256.600,00	240.065,00	-	-	-	240.065,00	
23	10644803	SDN	SDN 2 AIR SALEH	AIR SALEH	57.969,00	67.520.000,00	1.800.000,00	53.281.669,00	12.496.300,00	67.577.969,00	-	854.370,00	15.000,00	839.370,00	839.370,00	
24	10600377	SDN	SDN 3 AIR SALEH	AIR SALEH	251.389,00	151.840.000,00	2.640.000,00	112.321.349,00	37.005.800,00	151.967.149,00	124.240,00	710.200,00	710.200,00	-	124.240,00	
25	10600386	SDN	SDN 4 AIR SALEH	AIR SALEH	185.103,00	141.600.000,00	3.600.000,00	105.485.303,00	32.699.800,00	141.785.103,00	-	810.000,00	-	810.000,00	810.000,00	
26	10645878	SDN	SDN 5 AIR SALEH	AIR SALEH	42.808,00	90.400.000,00	1.200.000,00	71.861.308,00	17.381.500,00	90.442.808,00	-	-	-	-	-	
27	10600378	SDN	SDN 6 AIR SALEH	AIR SALEH	39.070,00	85.760.000,00	2.000.000,00	67.233.570,00	16.547.000,00	85.780.570,00	18.500,00	495.000,00	495.000,00	-	18.500,00	
28	10644785	SDN	SDN 7 AIR SALEH	AIR SALEH	164.908,00	86.240.000,00	3.300.000,00	65.627.350,00	17.445.000,00	86.372.350,00	32.558,00	300.000,00	300.000,00	-	32.558,00	
29	10644787	SDN	SDN 8 AIR SALEH	AIR SALEH	145.820,00	128.320.000,00	2.950.000,00	95.750.520,00	29.695.300,00	128.395.820,00	70.000,00	507.500,00	-	507.500,00	577.500,00	
30	10600328	SDN	SDN 9 AIR SALEH	AIR SALEH	660.653,00	248.320.000,00	1.800.000,00	182.835.665,00	64.166.000,00	248.801.665,00	178.988,00	3.753.900,00	3.753.900,00	-	178.988,00	
31	10600113	SDN	SDN 10 AIR SALEH	AIR SALEH	218.692,00	205.440.000,00	3.600.000,00	134.587.384,00	67.471.308,00	205.658.692,00	-	2.162.000,00	2.162.000,00	-	-	
32	10600131	SDN	SDN 11 AIR SALEH	AIR SALEH	141.317,00	77.920.000,00	3.600.000,00	67.440.417,00	7.020.900,00	78.061.317,00	-	335.000,00	-	335.000,00	335.000,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
34	10644786	SDN	SDN 13 AIR SALEH	AIR SALEH	180.008,00	135.040.000,00	2.400.000,00	115.701.100,00	16.938.900,00	135.040.000,00	180.008,00	-	-	-	180.008,00	
35	10602413	SDN	SDN 14 AIR SALEH	AIR SALEH	170.169,00	121.760.000,00	4.200.000,00	103.152.000,00	14.577.400,00	121.929.400,00	769,00	487.500,00	465.000,00	22.500,00	23.269,00	
36	10602807	SDN	SDN 15 AIR SALEH	AIR SALEH	772.339,00	109.600.000,00	1.200.000,00	87.040.825,00	22.085.600,00	110.326.425,00	45.914,00	-	-	-	45.914,00	
37	10600342	SDN	SDN 16 AIR SALEH	AIR SALEH	40.426,00	114.240.000,00	1.200.000,00	88.083.137,00	24.996.600,00	114.279.737,00	689,00	90.000,00	-	90.000,00	90.689,00	
38	10600347	SDN	SDN 17 AIR SALEH	AIR SALEH	967.887,00	140.800.000,00	2.000.000,00	111.174.544,00	28.593.300,00	141.767.844,00	43,00	305.000,00	-	305.000,00	305.043,00	
39	10600116	SDN	SDN 18 AIR SALEH	AIR SALEH	465.734,00	170.880.000,00	5.700.000,00	130.576.434,00	35.068.800,00	171.345.234,00	500,00	2.782.908,00	-	2.782.908,00	2.783.408,00	
40	10602416	SDN	SDN 19 AIR SALEH	AIR SALEH	164.402,00	81.120.000,00	840.000,00	64.379.002,00	15.547.900,00	80.766.902,00	517.500,00	218.000,00	-	218.000,00	735.500,00	
41	10644788	SDN	SDN 20 AIR SALEH	AIR SALEH	2.049.630,00	123.520.000,00	800.000,00	100.403.630,00	24.335.100,00	125.538.730,00	30.900,00	440.000,00	-	440.000,00	470.900,00	
42	10644790	SDN	SDN 21 AIR SALEH	AIR SALEH	416.648,00	178.080.000,00	2.400.000,00	135.792.200,00	38.465.200,00	176.657.400,00	1.839.248,00	4.320.570,00	2.398.570,00	1.922.000,00	3.761.248,00	
43	10600156	SDN	SDN 22 AIR SALEH	AIR SALEH	15.046,00	71.680.000,00	2.700.000,00	58.234.146,00	10.752.400,00	71.686.546,00	8.500,00	651.250,00	631.250,00	20.000,00	28.500,00	
44	10602701	SDN	SDN 23 AIR SALEH	AIR SALEH	297.813,00	139.040.000,00	7.200.000,00	109.935.849,00	21.624.200,00	138.760.049,00	577.764,00	970.000,00	-	970.000,00	1.547.764,00	
45	69756059	SDN	SDN 24 AIR SALEH	AIR SALEH	289.225,00	103.520.000,00	2.400.000,00	84.974.094,00	16.042.300,00	103.416.394,00	392.831,00	133.200,00	-	133.200,00	526.031,00	
46	69947967	SDN	SDN 25 AIR SALEH	AIR SALEH	193.293,00	228.000.000,00	12.000.000,00	158.479.493,00	45.713.800,00	216.193.293,00	12.000.000,00	4.832.095,00	-	4.832.095,00	16.832.095,00	
47	10644892	SDN	SDN 1 BANYUASIN I	BANYUASIN I	245.557,00	274.560.000,00	6.600.000,00	210.384.940,00	57.820.000,00	274.804.940,00	617,00	2.174.100,00	-	2.174.100,00	2.174.717,00	
48	10602904	SDN	SDN 2 BANYUASIN I	BANYUASIN I	168.432,00	100.640.000,00	1.400.000,00	79.218.386,00	20.190.000,00	100.808.386,00	46,00	353.090,00	-	353.090,00	353.136,00	
49	10645916	SDN	SDN 3 BANYUASIN I	BANYUASIN I	10.626,00	81.120.000,00	3.000.000,00	60.891.100,00	17.186.600,00	81.077.700,00	52.926,00	360.000,00	360.000,00	-	52.926,00	
50	10602940	SDN	SDN 4 BANYUASIN I	BANYUASIN I	504.432,00	166.240.000,00	1.800.000,00	124.177.581,00	40.695.500,00	166.673.081,00	71.351,00	307.500,00	307.500,00	-	71.351,00	
51	10602370	SDN	SDN 5 BANYUASIN I	BANYUASIN I	70.746,00	101.280.000,00	2.800.000,00	76.110.546,00	22.440.200,00	101.350.746,00	-	1.781.818,00	1.680.000,00	101.818,00	101.818,00	
52	10645937	SDN	SDN 6 BANYUASIN I	BANYUASIN I	86.648,00	169.280.000,00	2.800.000,00	130.553.412,00	35.993.500,00	169.346.912,00	19.736,00	1.905.000,00	1.905.000,00	-	19.736,00	
53	10646113	SDN	SDN 7 BANYUASIN I	BANYUASIN I	1.162.842,00	321.280.000,00	10.800.000,00	240.910.586,00	70.691.200,00	322.401.786,00	41.056,00	2.849.500,00	-	2.849.500,00	2.890.556,00	
54	10602922	SDN	SDN 8 BANYUASIN I	BANYUASIN I	78.770,00	168.800.000,00	3.600.000,00	127.719.520,00	36.880.000,00	168.199.520,00	679.250,00	1.360.000,00	-	1.360.000,00	2.039.250,00	
55	10600324	SDN	SDN 9 BANYUASIN I	BANYUASIN I	98.986,00	116.800.000,00	-	93.658.986,00	23.200.000,00	116.858.986,00	40.000,00	1.401.128,00	1.401.128,00	-	40.000,00	
56	10644660	SDN	SDN 10 BANYUASIN I	BANYUASIN I	2.659.289,00	340.960.000,00	8.400.000,00	267.229.258,00	67.324.800,00	342.954.058,00	665.231,00	10.838.890,00	-	10.838.890,00	11.504.121,00	
57	10602899	SDN	SDN 11 BANYUASIN I	BANYUASIN I	9.485,00	173.920.000,00	17.600.000,00	112.307.038,00	44.019.300,00	173.926.338,00	3.147,00	1.413.626,00	-	1.413.626,00	1.416.773,00	
58	10602932	SDN	SDN 12 BANYUASIN I	BANYUASIN I	679.959,00	147.520.000,00	2.800.000,00	116.361.860,00	29.037.100,00	148.198.960,00	999,00	1.186.500,00	-	1.186.500,00	1.187.499,00	
59	10602802	SDN	SDN 13 BANYUASIN I	BANYUASIN I	38.197,00	173.760.000,00	6.300.000,00	130.828.197,00	36.670.000,00	173.798.197,00	-	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
60	10644640	SDN	SDN 14 BANYUASIN I	BANYUASIN I	127.754,00	118.240.000,00	2.200.000,00	90.207.754,00	25.960.000,00	118.367.754,00	-	288.000,00	288.000,00	-	-	
61	10644648	SDN	SDN 15 BANYUASIN I	BANYUASIN I	109.824,00	115.840.000,00	3.000.000,00	84.780.100,00	28.059.900,00	115.840.000,00	109.824,00	405.000,00	405.000,00	-	109.824,00	
62	10644891	SDN	SDN 16 BANYUASIN I	BANYUASIN I	7.850,00	119.360.000,00	-	96.709.250,00	22.658.600,00	119.367.850,00	-	-	-	-	-	
63	10602824	SDN	SDN 17 BANYUASIN I	BANYUASIN I	12.970,00	134.240.000,00	3.250.000,00	100.197.812,00	30.325.000,00	133.772.812,00	480.158,00	420.000,00	-	420.000,00	900.158,00	
64	10644661	SDN	SDN 18 BANYUASIN I	BANYUASIN I	172.189,00	194.880.000,00	2.400.000,00	152.076.966,00	40.472.500,00	194.949.466,00	102.723,00	897.135,00	897.135,00	-	102.723,00	
65	10602896	SDN	SDN 19 BANYUASIN I	BANYUASIN I	410.070,00	239.680.000,00	4.950.000,00	171.316.081,00	62.980.600,00	239.246.681,00	843.389,00	5.670.690,00	5.670.690,00	-	843.389,00	
66	10644662	SDN	SDN 20 BANYUASIN I	BANYUASIN I	478.018,00	239.200.000,00	8.400.000,00	151.560.674,00	79.386.900,00	239.347.574,00	330.444,00	8.860.210,00	-	8.860.210,00	9.190.654,00	
67	10600165	SDN	SDN 21 BANYUASIN I	BANYUASIN I	8.017,00	130.560.000,00	3.800.000,00	91.858.000,00	34.910.000,00	130.568.000,00	17,00	400.000,00	400.000,00	-	17,00	
68	10602919	SDN	SDN 22 BANYUASIN I	BANYUASIN I	8.759,00	69.280.000,00	1.000.000,00	54.947.659,00	13.341.100,00	69.288.759,00	-	150.000,00	150.000,00	-	-	
69	10602828	SDN	SDN 23 BANYUASIN I	BANYUASIN I	100.000,00	168.800.000,00	9.600.000,00	119.107.496,00	40.192.100,00	168.899.596,00	404,00	2.516.000,00	1.070.000,00	1.446.000,00	1.446.404,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
70	10602831	SDN	SDN 24 BANYUASIN I	BANYUASIN I	32.785,00	137.120.000,00	3.600.000,00	100.219.043,00	33.333.700,00	137.152.743,00	42,00	2.128.001,00	1.158.181,00	969.820,00	969.862,00	
71	10602696	SDN	SDN 25 BANYUASIN I	BANYUASIN I	16.357,00	139.200.000,00	1.800.000,00	103.773.915,00	33.624.900,00	139.198.815,00	17.542,00	435.000,00	-	435.000,00	452.542,00	
72	10602913	SDN	SDN 26 BANYUASIN I	BANYUASIN I	91.934,00	99.040.000,00	2.200.000,00	72.977.858,00	23.840.550,00	99.018.408,00	113.526,00	1.164.350,00	1.164.350,00	-	113.526,00	
73	10645831	SDN	SDN 27 BANYUASIN I	BANYUASIN I	187.110,00	124.640.000,00	9.600.000,00	84.201.382,00	30.835.800,00	124.637.182,00	189.928,00	1.630.000,00	-	1.630.000,00	1.819.928,00	
74	10602879	SDN	SDN 28 BANYUASIN I	BANYUASIN I	81.934,00	134.720.000,00	2.800.000,00	105.396.634,00	26.605.300,00	134.801.934,00	-	-	-	-	-	
75	10602394	SDN	SDN 29 BANYUASIN I	BANYUASIN I	6.884,00	153.760.000,00	3.000.000,00	109.837.984,00	40.928.900,00	153.766.884,00	-	935.600,00	617.000,00	318.600,00	318.600,00	
76	10646203	SDN	SDN 30 BANYUASIN I	BANYUASIN I	162.283,00	68.800.000,00	2.400.000,00	52.637.000,00	13.925.000,00	68.962.000,00	283,00	330.000,00	-	330.000,00	330.283,00	
77	10600148	SDN	SDN 1 BANYUASIN II	BANYUASIN II	1.346.813,00	585.920.000,00	10.800.000,00	460.534.948,00	102.634.800,00	573.969.748,00	13.297.065,00	480.000,00	-	480.000,00	13.777.065,00	
78	10600244	SDN	SDN 2 BANYUASIN II	BANYUASIN II	134.207,00	89.760.000,00	6.600.000,00	64.996.000,00	18.152.000,00	89.748.000,00	146.207,00	360.000,00	-	360.000,00	506.207,00	
79	10645908	SDN	SDN 3 BANYUASIN II	BANYUASIN II	2.196.406,00	491.200.000,00	10.800.000,00	373.827.406,00	84.699.800,00	469.327.206,00	24.069.200,00	9.080.140,00	9.080.140,00	-	24.069.200,00	
80	10600243	SDN	SDN 4 BANYUASIN II	BANYUASIN II	281.130,00	73.760.000,00	-	58.006.930,00	16.034.200,00	74.041.130,00	-	-	-	-	-	
81	10644671	SDN	SDN 5 BANYUASIN II	BANYUASIN II	92.319,00	96.960.000,00	8.400.000,00	67.703.150,00	20.780.000,00	96.883.150,00	169.169,00	1.110.000,00	-	1.110.000,00	1.279.169,00	
82	10645912	SDN	SDN 6 BANYUASIN II	BANYUASIN II	36.152,00	71.200.000,00	1.650.000,00	55.273.752,00	14.312.400,00	71.236.152,00	-	41.250,00	-	41.250,00	41.250,00	
83	10600169	SDN	SDN 7 BANYUASIN II	BANYUASIN II	1.459.892,00	409.920.000,00	10.800.000,00	321.112.700,00	78.007.300,00	409.920.000,00	1.459.892,00	5.350.800,00	-	5.350.800,00	6.810.692,00	
84	10600117	SDN	SDN 8 BANYUASIN II	BANYUASIN II	75.693,00	151.200.000,00	8.250.000,00	114.911.600,00	28.061.400,00	151.223.000,00	52.693,00	655.600,00	-	655.600,00	708.293,00	
85	10600214	SDN	SDN 9 BANYUASIN II	BANYUASIN II	123.879,00	109.120.000,00	4.800.000,00	80.919.879,00	23.524.000,00	109.243.879,00	-	902.000,00	902.000,00	-	-	
86	10600164	SDN	SDN 10 BANYUASIN II	BANYUASIN II	121.341,00	450.240.000,00	10.800.000,00	324.771.341,00	114.790.000,00	450.361.341,00	-	2.793.000,00	-	2.793.000,00	2.793.000,00	
87	10600137	SDN	SDN 11 BANYUASIN II	BANYUASIN II	374.074,00	169.120.000,00	7.800.000,00	104.254.074,00	57.440.000,00	169.494.074,00	-	4.466.590,00	4.466.590,00	-	-	
88	10600118	SDN	SDN 12 BANYUASIN II	BANYUASIN II	78.803,00	164.320.000,00	7.800.000,00	111.940.803,00	44.658.000,00	164.398.803,00	-	2.995.962,00	2.995.962,00	-	-	
89	10600139	SDN	SDN 13 BANYUASIN II	BANYUASIN II	164.309,00	162.880.000,00	1.600.000,00	108.903.009,00	52.541.300,00	163.044.309,00	-	1.762.000,00	-	1.762.000,00	1.762.000,00	
90	10600138	SDN	SDN 14 BANYUASIN II	BANYUASIN II	353.263,00	132.320.000,00	1.000.000,00	104.683.263,00	26.990.000,00	132.673.263,00	-	154.000,00	-	154.000,00	154.000,00	
91	10600215	SDN	SDN 15 BANYUASIN II	BANYUASIN II	229.523,00	48.000.000,00	2.000.000,00	35.333.000,00	10.539.900,00	47.872.900,00	356.623,00	100.000,00	-	100.000,00	456.623,00	
92	10600101	SDN	SDN 16 BANYUASIN II	BANYUASIN II	1.713.289,00	213.920.000,00	9.000.000,00	149.452.000,00	53.250.000,00	211.702.000,00	3.931.289,00	1.230.000,00	-	1.230.000,00	5.161.289,00	
93	10644672	SDN	SDN 17 BANYUASIN II	BANYUASIN II	271.252,00	133.440.000,00	7.200.000,00	87.582.200,00	38.657.800,00	133.440.000,00	271.252,00	1.219.400,00	-	1.219.400,00	1.490.652,00	
94	10646519	SDN	SDN 18 BANYUASIN II	BANYUASIN II	382.340,00	92.960.000,00	1.800.000,00	71.770.677,00	19.771.600,00	93.342.277,00	63,00	875.000,00	-	875.000,00	875.063,00	
95	10647436	SDN	SDN 19 BANYUASIN II	BANYUASIN II	188.236,00	48.000.000,00	10.800.000,00	34.630.336,00	2.757.900,00	48.188.236,00	-	-	-	-	-	
96	10648063	SDN	SDN 20 BANYUASIN II	BANYUASIN II	182.025,00	48.000.000,00	-	38.582.525,00	9.599.500,00	48.182.025,00	-	-	-	-	-	
97	10648070	SDN	SDN 21 BANYUASIN II	BANYUASIN II	168.369,00	94.560.000,00	4.200.000,00	70.925.000,00	19.435.000,00	94.560.000,00	168.369,00	-	-	-	168.369,00	
98	69851469	SDN	SDN 22 BANYUASIN II	BANYUASIN II	515.193,00	146.240.000,00	1.200.000,00	108.695.193,00	36.860.000,00	146.755.193,00	-	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1.010.000,00	
99	10602874	SDN	SDN 1 BANYUASIN III	BANYUASIN III	301.690,00	284.320.000,00	10.800.000,00	199.617.444,00	74.157.000,00	284.574.444,00	47.246,00	7.445.292,00	6.064.179,00	1.381.113,00	1.428.359,00	
100	10602658	SDN	SDN 2 BANYUASIN III	BANYUASIN III	455.180,00	92.640.000,00	7.800.000,00	65.898.356,00	19.396.800,00	93.095.156,00	24,00	1.891.273,00	1.615.000,00	276.273,00	276.297,00	
101	10602694	SDN	SDN 3 BANYUASIN III	BANYUASIN III	633.446,00	99.680.000,00	3.700.000,00	74.923.041,00	21.645.000,00	100.268.041,00	45.405,00	1.170.000,00	1.170.000,00	-	45.405,00	
102	10602406	SDN	SDN 4 BANYUASIN III	BANYUASIN III	246.043,00	217.440.000,00	8.400.000,00	146.099.000,00	62.941.000,00	217.440.000,00	246.043,00	6.375.143,00	-	6.375.143,00	6.621.186,00	
103	10600160	SDN	SDN 5 BANYUASIN III	BANYUASIN III	994.752,00	317.920.000,00	4.150.000,00	236.240.310,00	78.505.400,00	318.895.710,00	19.042,00	9.508.986,00	9.105.486,00	403.500,00	422.542,00	
104	10602843	SDN	SDN 6 BANYUASIN III	BANYUASIN III	649.908,00	278.080.000,00	16.200.000,00	183.382.954,00	79.146.900,00	278.729.854,00	54,00	8.006.750,00	8.006.750,00	-	54,00	
105	10602517	SDN	SDN 7 BANYUASIN III	BANYUASIN III	116.848,00	114.880.000,00	10.500.000,00	71.687.774,00	32.809.000,00	114.996.774,00	74,00	1.095.000,00	1.095.000,00	-	74,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
106	10602642	SDN	SDN 8 BANYUASIN III	BANYUASIN III	2.427.993,00	135.040.000,00	3.600.000,00	104.638.760,00	28.479.400,00	136.718.160,00	749.833,00	795.000,00	795.000,00	-	749.833,00	
107	10602712	SDN	SDN 9 BANYUASIN III	BANYUASIN III	2.030.834,00	120.160.000,00	900.000,00	89.122.634,00	32.168.200,00	122.190.834,00	-	557.750,00	557.750,00	-	-	
108	10602334	SDN	SDN 10 BANYUASIN III	BANYUASIN III	434.970,00	104.480.000,00	6.000.000,00	78.761.713,00	20.072.800,00	104.834.513,00	80.457,00	1.188.000,00	1.188.000,00	-	80.457,00	
109	10602587	SDN	SDN 11 BANYUASIN III	BANYUASIN III	150.002,00	154.560.000,00	6.000.000,00	91.978.743,00	56.581.100,00	154.559.843,00	150.159,00	4.352.839,00	4.352.839,00	-	150.159,00	
110	10602592	SDN	SDN 12 BANYUASIN III	BANYUASIN III	190.849,00	102.240.000,00	6.000.000,00	75.955.325,00	20.353.800,00	102.309.125,00	121.724,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-	121.724,00	
111	10602455	SDN	SDN 13 BANYUASIN III	BANYUASIN III	748.349,00	324.480.000,00	6.600.000,00	233.660.616,00	84.219.300,00	324.479.916,00	748.433,00	12.843.668,00	10.297.856,00	2.545.812,00	3.294.245,00	
112	10602474	SDN	SDN 14 BANYUASIN III	BANYUASIN III	571.754,00	205.280.000,00	10.800.000,00	138.996.632,00	56.050.000,00	205.846.632,00	5.122,00	3.394.700,00	2.608.700,00	786.000,00	791.122,00	
113	10602483	SDN	SDN 15 BANYUASIN III	BANYUASIN III	333.640,00	269.760.000,00	19.200.000,00	177.888.612,00	72.758.500,00	269.847.112,00	246.528,00	7.680.546,00	7.680.546,00	-	246.528,00	
114	10602627	SDN	SDN 16 BANYUASIN III	BANYUASIN III	195.895,00	142.240.000,00	1.500.000,00	95.865.500,00	44.874.500,00	142.240.000,00	195.895,00	2.828.090,00	1.275.000,00	1.553.090,00	1.748.985,00	
115	10602615	SDN	SDN 17 BANYUASIN III	BANYUASIN III	1.088.325,00	111.360.000,00	7.200.000,00	73.378.280,00	31.870.000,00	112.448.280,00	45,00	3.775.677,00	2.868.177,00	907.500,00	907.545,00	
116	10645911	SDN	SDN 18 BANYUASIN III	BANYUASIN III	690.852,00	52.960.000,00	2.200.000,00	43.051.652,00	8.399.200,00	53.650.852,00	-	110.000,00	110.000,00	-	-	
117	10602613	SDN	SDN 19 BANYUASIN III	BANYUASIN III	161.214,00	48.480.000,00	800.000,00	38.560.000,00	9.100.000,00	48.460.000,00	181.214,00	-	-	-	181.214,00	
118	10602618	SDN	SDN 20 BANYUASIN III	BANYUASIN III	166.538,00	80.000.000,00	1.200.000,00	54.491.900,00	24.398.100,00	80.090.000,00	76.538,00	700.000,00	700.000,00	-	76.538,00	
119	10602630	SDN	SDN 21 BANYUASIN III	BANYUASIN III	232.773,00	157.760.000,00	7.200.000,00	112.844.005,00	35.085.000,00	155.129.005,00	2.863.768,00	1.276.000,00	-	1.276.000,00	4.139.768,00	
120	10602686	SDN	SDN 22 BANYUASIN III	BANYUASIN III	103.222,00	123.360.000,00	4.100.000,00	98.198.856,00	21.052.009,00	123.350.865,00	112.357,00	255.000,00	-	255.000,00	367.357,00	
121	10602583	SDN	SDN 23 BANYUASIN III	BANYUASIN III	214.180,00	77.440.000,00	9.900.000,00	54.669.300,00	12.898.700,00	77.468.000,00	186.180,00	1.075.300,00	-	1.075.300,00	1.261.480,00	
122	10602933	SDN	SDN 24 BANYUASIN III	BANYUASIN III	117.476,00	158.560.000,00	6.600.000,00	109.441.523,00	42.586.900,00	158.628.423,00	49.053,00	1.328.400,00	-	1.328.400,00	1.377.453,00	
123	10602434	SDN	SDN 25 BANYUASIN III	BANYUASIN III	97.829,00	169.120.000,00	4.000.000,00	128.981.829,00	33.996.000,00	166.977.829,00	2.240.000,00	2.343.300,00	1.664.700,00	678.600,00	2.918.600,00	
124	10602468	SDN	SDN 26 BANYUASIN III	BANYUASIN III	137.226,00	86.400.000,00	4.000.000,00	62.371.324,00	20.009.000,00	86.380.324,00	156.902,00	810.000,00	-	810.000,00	966.902,00	
125	10602369	SDN	SDN 27 BANYUASIN III	BANYUASIN III	154.142,00	183.520.000,00	4.200.000,00	133.187.450,00	45.295.000,00	182.682.450,00	991.692,00	3.654.330,00	2.372.730,00	1.281.600,00	2.273.292,00	
126	10602822	SDN	SDN 28 BANYUASIN III	BANYUASIN III	184.120,00	145.280.000,00	4.000.000,00	116.281.853,00	25.020.900,00	145.302.753,00	161.367,00	3.793.600,00	2.517.500,00	1.276.100,00	1.437.467,00	
127	10602910	SDN	SDN 29 BANYUASIN III	BANYUASIN III	487.591,00	74.880.000,00	2.000.000,00	51.442.391,00	21.925.200,00	75.367.591,00	-	750.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	
128	10602323	SDN	SDN 30 BANYUASIN III	BANYUASIN III	621.625,00	187.200.000,00	4.200.000,00	132.603.549,00	50.925.400,00	187.728.949,00	92.676,00	2.880.839,00	1.812.839,00	1.068.000,00	1.160.676,00	
129	10602893	SDN	SDN 31 BANYUASIN III	BANYUASIN III	32.454,00	65.760.000,00	1.600.000,00	48.001.679,00	16.172.700,00	65.774.379,00	18.075,00	638.409,00	-	638.409,00	656.484,00	
130	10602900	SDN	SDN 32 BANYUASIN III	BANYUASIN III	136.923,00	180.960.000,00	12.000.000,00	125.736.399,00	36.000.000,00	173.736.399,00	7.360.524,00	5.118.177,00	4.408.177,00	710.000,00	8.070.524,00	
131	10602611	SDN	SDN 33 BANYUASIN III	BANYUASIN III	100.718,00	112.960.000,00	2.000.000,00	78.281.718,00	32.759.000,00	113.040.718,00	20.000,00	1.580.500,00	450.000,00	1.130.500,00	1.150.500,00	
132	10602358	SDN	SDN 34 BANYUASIN III	BANYUASIN III	182.025,00	139.360.000,00	5.400.000,00	96.653.195,00	37.477.000,00	139.530.195,00	11.830,00	-	-	-	11.830,00	
133	10602337	SDN	SDN 35 BANYUASIN III	BANYUASIN III	1.448.787,00	196.320.000,00	9.600.000,00	143.520.387,00	44.648.400,00	197.768.787,00	-	2.023.500,00	2.023.500,00	-	-	
134	10602331	SDN	SDN 36 BANYUASIN III	BANYUASIN III	192.590,00	57.120.000,00	6.000.000,00	38.801.058,00	12.280.000,00	57.081.058,00	231.532,00	360.000,00	360.000,00	-	231.532,00	
135	10602882	SDN	SDN 37 BANYUASIN III	BANYUASIN III	186.443,00	100.160.000,00	6.000.000,00	71.077.422,00	23.172.500,00	100.249.922,00	96.521,00	1.509.772,00	366.363,00	1.143.409,00	1.239.930,00	
136	10602519	SDN	SDN 38 BANYUASIN III	BANYUASIN III	363.458,00	79.360.000,00	9.600.000,00	54.580.000,00	15.169.000,00	79.349.000,00	374.458,00	615.000,00	-	615.000,00	989.458,00	
137	10602500	SDN	SDN 39 BANYUASIN III	BANYUASIN III	269.748,00	85.760.000,00	2.800.000,00	65.139.114,00	17.820.200,00	85.759.314,00	270.434,00	-	-	-	270.434,00	
138	10644673	SDN	SDN 40 PERCONTOHAN BANYUASIN III	BANYUASIN III	468.761,00	136.000.000,00	8.400.000,00	113.698.094,00	12.028.000,00	134.126.094,00	2.342.667,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-	2.342.667,00	
139	10646504	SDN	SDN 41 PLUS BANYUASIN III	BANYUASIN III	1.259.166,00	156.640.000,00	13.200.000,00	116.797.070,00	26.642.900,00	156.639.970,00	1.259.196,00	1.531.784,00	1.400.534,00	131.250,00	1.390.446,00	
140	10644701	SDN	SDN 1 BETUNG	BETUNG	116.076,00	237.760.000,00	12.400.000,00	169.550.791,00	55.869.000,00	237.819.791,00	56.285,00	3.770.773,00	1.240.000,00	2.530.773,00	2.587.058,00	
141	10602656	SDN	SDN 2 BETUNG	BETUNG	89.984,00	196.960.000,00	4.996.000,00	150.653.515,00	40.518.800,00	196.168.315,00	881.669,00	2.800.200,00	98.000,00	2.702.200,00	3.583.869,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
142	10602512	SDN	SDN 3 BETUNG	BETUNG	148.459,00	118.080.000,00	8.400.000,00	81.914.859,00	27.867.100,00	118.181.959,00	46.500,00	1.236.000,00	-	1.236.000,00	1.282.500,00	
143	10602684	SDN	SDN 4 BETUNG	BETUNG	68.099,00	156.480.000,00	4.800.000,00	116.283.398,00	35.462.300,00	156.545.698,00	2.401,00	1.847.000,00	200.000,00	1.647.000,00	1.649.401,00	
144	10602655	SDN	SDN 5 BETUNG	BETUNG	196.964,00	450.080.000,00	10.800.000,00	334.935.769,00	104.275.000,00	450.010.769,00	266.195,00	4.453.800,00	2.057.000,00	2.396.800,00	2.662.995,00	
145	10602643	SDN	SDN 6 BETUNG	BETUNG	4.151.554,00	245.600.000,00	8.800.000,00	180.361.131,00	60.590.000,00	249.751.131,00	423,00	3.801.290,00	2.289.090,00	1.512.200,00	1.512.623,00	
146	10602702	SDN	SDN 7 BETUNG	BETUNG	182.458,00	225.280.000,00	5.200.000,00	131.424.779,00	88.796.300,00	225.421.079,00	41.379,00	3.920.600,00	2.477.500,00	1.443.100,00	1.484.479,00	
147	10602388	SDN	SDN 8 BETUNG	BETUNG	320.470,00	101.120.000,00	3.600.000,00	81.316.832,00	16.523.000,00	101.439.832,00	638,00	1.609.000,00	150.000,00	1.459.000,00	1.459.638,00	
148	10602397	SDN	SDN 9 BETUNG	BETUNG	355.831,00	171.200.000,00	13.800.000,00	113.912.831,00	43.803.000,00	171.515.831,00	40.000,00	4.475.000,00	4.162.500,00	312.500,00	352.500,00	
149	10602398	SDN	SDN 10 BETUNG	BETUNG	261.261,00	231.520.000,00	8.400.000,00	165.750.000,00	57.566.000,00	231.716.000,00	65.261,00	2.551.636,00	-	2.551.636,00	2.616.897,00	
150	10602481	SDN	SDN 11 BETUNG	BETUNG	67.706,00	186.400.000,00	7.200.000,00	133.952.714,00	45.314.500,00	186.467.214,00	492,00	2.555.635,00	663.635,00	1.892.000,00	1.892.492,00	
151	10602929	SDN	SDN 12 BETUNG	BETUNG	77.748,00	538.240.000,00	6.000.000,00	384.456.618,00	147.858.500,00	538.315.118,00	2.630,00	7.525.496,00	2.444.546,00	5.080.950,00	5.083.580,00	
152	10602714	SDN	SDN 13 BETUNG	BETUNG	230.592,00	121.440.000,00	12.000.000,00	84.067.992,00	24.802.600,00	120.870.592,00	800.000,00	986.000,00	-	986.000,00	1.786.000,00	
153	10602897	SDN	SDN 14 BETUNG	BETUNG	243.842,00	279.360.000,00	6.000.000,00	213.176.756,00	60.424.000,00	279.600.756,00	3.086,00	5.225.350,00	-	5.225.350,00	5.228.436,00	
154	10602464	SDN	SDN 15 BETUNG	BETUNG	18.662,00	110.400.000,00	9.600.000,00	78.433.662,00	22.385.000,00	110.418.662,00	-	1.172.000,00	-	1.172.000,00	1.172.000,00	
155	10602713	SDN	SDN 16 BETUNG	BETUNG	151.279,00	245.120.000,00	8.400.000,00	178.815.698,00	57.996.100,00	245.211.798,00	59.481,00	2.492.682,00	595.000,00	1.897.682,00	1.957.163,00	
156	10602699	SDN	SDN 17 BETUNG	BETUNG	127.069,00	235.360.000,00	9.000.000,00	169.654.413,00	56.746.600,00	235.401.013,00	86.056,00	4.130.499,00	1.085.000,00	3.045.499,00	3.131.555,00	
157	10644703	SDN	SDN 18 BETUNG	BETUNG	61.309,00	51.040.000,00	4.800.000,00	35.594.309,00	10.707.000,00	51.101.309,00	-	660.000,00	-	660.000,00	660.000,00	
158	10602878	SDN	SDN 19 BETUNG	BETUNG	588.827,00	368.160.000,00	10.800.000,00	273.409.232,00	83.345.000,00	367.554.232,00	1.194.595,00	7.525.500,00	7.154.500,00	371.000,00	1.565.595,00	
159	10602415	SDN	SDN 20 BETUNG	BETUNG	120.712,00	113.600.000,00	3.900.000,00	80.468.500,00	29.205.850,00	113.574.350,00	146.362,00	1.010.850,00	578.850,00	432.000,00	578.362,00	
160	10602912	SDN	SDN 21 BETUNG	BETUNG	135.037,00	195.360.000,00	9.600.000,00	138.482.714,00	47.408.900,00	195.491.614,00	3.423,00	1.421.952,00	922.952,00	499.000,00	502.423,00	
161	10602939	SDN	SDN 22 BETUNG	BETUNG	96.633,00	122.880.000,00	7.200.000,00	86.762.466,00	28.869.600,00	122.832.066,00	144.567,00	1.070.000,00	200.000,00	870.000,00	1.014.567,00	
162	10602911	SDN	SDN 23 BETUNG	BETUNG	628.514,00	65.280.000,00	2.400.000,00	50.547.800,00	12.960.700,00	65.908.500,00	14,00	94.000,00	-	94.000,00	94.014,00	
163	10644702	SDN	SDN 24 BETUNG	BETUNG	250.872,00	227.360.000,00	6.000.000,00	151.510.872,00	70.080.000,00	227.590.872,00	20.000,00	1.977.272,00	1.977.272,00	-	20.000,00	
164	10644699	SDN	SDN 25 BETUNG	BETUNG	18.247,00	239.840.000,00	9.600.000,00	181.342.882,00	48.897.100,00	239.839.982,00	18.265,00	2.821.602,00	2.821.602,00	-	18.265,00	
165	10602898	SDN	SDN 26 BETUNG	BETUNG	78.453,00	213.920.000,00	8.400.000,00	145.378.071,00	60.190.100,00	213.968.171,00	30.282,00	4.932.397,00	4.756.897,00	175.500,00	205.782,00	
166	10602937	SDN	SDN 27 BETUNG	BETUNG	191.387,00	131.200.000,00	6.600.000,00	91.845.387,00	32.946.000,00	131.391.387,00	-	1.807.000,00	600.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	
167	10600374	SDN	SDN 1 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	239.205,00	241.280.000,00	3.600.000,00	191.006.605,00	46.862.600,00	241.469.205,00	50.000,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.100.000,00	
168	10644808	SDN	SDN 2 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	854.434,00	166.240.000,00	7.200.000,00	122.748.302,00	36.975.800,00	166.924.102,00	170.332,00	1.645.872,00	-	1.645.872,00	1.816.204,00	
169	10645914	SDN	SDN 3 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	253.734,00	267.520.000,00	8.300.000,00	216.325.934,00	43.147.800,00	267.773.734,00	-	5.426.483,00	-	5.426.483,00	5.426.483,00	
170	10602693	SDN	SDN 4 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	88.856,00	129.440.000,00	8.850.000,00	103.908.756,00	16.743.000,00	129.501.756,00	27.100,00	1.829.732,00	-	1.829.732,00	1.856.832,00	
171	10600335	SDN	SDN 5 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	191.194,00	116.320.000,00	2.400.000,00	96.901.594,00	17.209.600,00	116.511.194,00	-	485.490,00	80.490,00	405.000,00	405.000,00	
172	10600339	SDN	SDN 6 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	263.000,00	71.840.000,00	2.097.700,00	53.716.000,00	16.278.000,00	72.091.700,00	11.300,00	1.038.900,00	1.038.900,00	-	11.300,00	
173	10645877	SDN	SDN 7 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	37.917,00	48.960.000,00	2.400.000,00	36.037.917,00	10.560.000,00	48.997.917,00	-	-	-	-	-	
174	10600100	SDN	SDN 8 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	173.804,00	63.360.000,00	4.800.000,00	45.832.304,00	12.901.500,00	63.533.804,00	-	174.500,00	-	174.500,00	174.500,00	
175	10600171	SDN	SDN 9 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	52.283,00	123.200.000,00	6.000.000,00	95.172.883,00	22.079.400,00	123.252.283,00	-	653.000,00	-	653.000,00	653.000,00	
176	10602892	SDN	SDN 10 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	150.549,00	110.720.000,00	6.600.000,00	81.819.549,00	21.435.100,00	109.854.649,00	1.015.900,00	1.670.000,00	-	1.670.000,00	2.685.900,00	
177	10600176	SDN	SDN 11 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	249.689,00	85.600.000,00	1.080.000,00	71.442.400,00	13.167.600,00	85.690.000,00	159.689,00	297.400,00	-	297.400,00	457.089,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
178	10600106	SDN	SDN 12 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	174.667,00	75.200.000,00	3.000.000,00	58.475.967,00	13.898.700,00	75.374.667,00	-	742.136,00	-	742.136,00	742.136,00	
179	10600119	SDN	SDN 13 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	709.211,00	170.080.000,00	5.400.000,00	138.702.511,00	26.656.700,00	170.759.211,00	30.000,00	930.000,00	-	930.000,00	960.000,00	
180	10600166	SDN	SDN 14 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	2.728.795,00	153.920.000,00	4.800.000,00	121.989.800,00	29.858.200,00	156.648.000,00	795,00	1.460.000,00	-	1.460.000,00	1.460.795,00	
181	10600163	SDN	SDN 15 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	2.457.768,00	183.040.000,00	2.200.000,00	140.286.168,00	42.984.000,00	185.470.168,00	27.600,00	669.500,00	-	669.500,00	697.100,00	
182	10600225	SDN	SDN 16 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	96.881,00	48.320.000,00	-	38.137.200,00	10.182.800,00	48.320.000,00	96.881,00	130.000,00	-	130.000,00	226.881,00	
183	10602908	SDN	SDN 17 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	490.660,00	194.720.000,00	12.000.000,00	127.876.000,00	54.844.000,00	194.720.000,00	490.660,00	4.240.850,00	-	4.240.850,00	4.731.510,00	
184	10600219	SDN	SDN 18 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	108.757,00	84.480.000,00	5.400.000,00	64.317.757,00	14.821.000,00	84.538.757,00	50.000,00	360.000,00	-	360.000,00	410.000,00	
185	10600167	SDN	SDN 19 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	26.303,00	55.360.000,00	4.200.000,00	42.903.303,00	8.233.000,00	55.336.303,00	50.000,00	570.000,00	-	570.000,00	620.000,00	
186	10602813	SDN	SDN 1 MUARA PADANG	MUARA PADANG	186.182,00	261.120.000,00	12.600.000,00	197.681.682,00	51.024.500,00	261.306.182,00	-	1.829.050,00	1.326.800,00	502.250,00	502.250,00	
187	10600352	SDN	SDN 2 MUARA PADANG	MUARA PADANG	821.406,00	116.160.000,00	6.600.000,00	84.981.406,00	25.400.000,00	116.981.406,00	-	986.100,00	804.000,00	182.100,00	182.100,00	
188	10600326	SDN	SDN 3 MUARA PADANG	MUARA PADANG	406.947,00	148.000.000,00	3.600.000,00	100.502.799,00	44.303.400,00	148.406.199,00	748,00	2.364.776,00	1.616.431,00	748.345,00	749.093,00	
189	10600330	SDN	SDN 4 MUARA PADANG	MUARA PADANG	3.811.690,00	128.320.000,00	2.500.000,00	95.246.590,00	34.385.100,00	132.131.690,00	-	380.860,00	-	380.860,00	380.860,00	
190	10600154	SDN	SDN 5 MUARA PADANG	MUARA PADANG	1.270.137,00	144.960.000,00	3.260.000,00	110.647.250,00	31.820.300,00	145.727.550,00	502.587,00	388.790,00	263.000,00	125.790,00	628.377,00	
191	10600145	SDN	SDN 6 MUARA PADANG	MUARA PADANG	282.451,00	129.600.000,00	2.400.000,00	93.688.800,00	33.459.900,00	129.548.700,00	333.751,00	1.221.885,00	943.485,00	278.400,00	612.151,00	
192	10644792	SDN	SDN 7 MUARA PADANG	MUARA PADANG	101.085,00	113.280.000,00	1.800.000,00	86.801.085,00	24.780.000,00	113.381.085,00	-	1.018.200,00	1.018.200,00	-	-	
193	10600379	SDN	SDN 8 MUARA PADANG	MUARA PADANG	138.300,00	117.440.000,00	4.200.000,00	82.415.600,00	30.602.700,00	117.218.300,00	360.000,00	423.932,00	-	423.932,00	783.932,00	
194	10645277	SDN	SDN 9 MUARA PADANG	MUARA PADANG	78.673,00	110.400.000,00	5.100.000,00	81.138.650,00	23.550.000,00	109.788.650,00	690.023,00	1.137.700,00	1.137.700,00	-	690.023,00	
195	10600329	SDN	SDN 10 MUARA PADANG	MUARA PADANG	125.630,00	122.720.000,00	4.800.000,00	90.588.430,00	27.457.200,00	122.845.630,00	-	787.000,00	787.000,00	-	-	
196	10600231	SDN	SDN 11 MUARA PADANG	MUARA PADANG	231.215,00	99.840.000,00	3.600.000,00	76.009.667,00	20.429.400,00	100.039.067,00	32.148,00	1.573.750,00	1.573.750,00	-	32.148,00	
197	10644791	SDN	SDN 12 MUARA PADANG	MUARA PADANG	454.356,00	190.240.000,00	6.000.000,00	125.921.256,00	58.193.100,00	190.114.356,00	580.000,00	2.200.500,00	1.287.000,00	913.500,00	1.493.500,00	
198	10600152	SDN	SDN 13 MUARA PADANG	MUARA PADANG	480.799,00	126.880.000,00	32.615.000,00	65.829.999,00	28.915.800,00	127.360.799,00	-	508.000,00	185.000,00	323.000,00	323.000,00	
199	10600343	SDN	SDN 14 MUARA PADANG	MUARA PADANG	155.871,00	145.920.000,00	10.800.000,00	102.962.271,00	32.313.600,00	146.075.871,00	-	1.474.000,00	1.474.000,00	-	-	
200	10600173	SDN	SDN 15 MUARA PADANG	MUARA PADANG	133.692,00	92.320.000,00	3.300.000,00	71.857.092,00	17.296.600,00	92.453.692,00	-	837.000,00	525.000,00	312.000,00	312.000,00	
201	10600344	SDN	SDN 16 MUARA PADANG	MUARA PADANG	522.664,00	154.080.000,00	-	108.002.236,00	46.600.000,00	154.602.236,00	428,00	2.911.900,00	2.611.900,00	300.000,00	300.428,00	
202	10600155	SDN	SDN 17 MUARA PADANG	MUARA PADANG	8.261.545,00	141.760.000,00	30.700.000,00	71.510.800,00	45.290.000,00	147.500.800,00	2.520.745,00	1.149.795,00	1.149.795,00	-	2.520.745,00	
203	10600350	SDN	SDN 18 MUARA PADANG	MUARA PADANG	600.000,00	165.120.000,00	35.150.000,00	92.590.000,00	37.980.000,00	165.720.000,00	-	1.106.997,00	793.000,00	313.997,00	313.997,00	
204	10645868	SDN	SDN 19 MUARA PADANG	MUARA PADANG	172.942,00	111.200.000,00	3.900.000,00	87.068.800,00	19.918.200,00	110.887.000,00	485.942,00	326.250,00	326.250,00	-	485.942,00	
205	10645883	SDN	SDN 20 MUARA PADANG	MUARA PADANG	199.607,00	111.360.000,00	1.200.000,00	85.566.707,00	24.792.900,00	111.559.607,00	-	991.200,00	991.200,00	-	-	
206	10600158	SDN	SDN 21 MUARA PADANG	MUARA PADANG	5.765.140,00	167.680.000,00	3.600.000,00	125.878.500,00	43.381.322,00	172.859.822,00	585.318,00	1.346.000,00	1.346.000,00	-	585.318,00	
207	10602424	SDN	SDN 22 MUARA PADANG	MUARA PADANG	160.726,00	88.000.000,00	2.100.000,00	67.930.126,00	18.065.600,00	88.095.726,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	-	65.000,00	
208	10644795	SDN	SDN 1 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	6.397,00	130.080.000,00	2.700.000,00	99.245.897,00	28.140.500,00	130.086.397,00	-	416.673,00	281.673,00	135.000,00	135.000,00	
209	10644794	SDN	SDN 2 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	36.112,00	168.320.000,00	6.000.000,00	113.570.000,00	48.750.000,00	168.320.000,00	36.112,00	3.096.550,00	-	3.096.550,00	3.132.662,00	
210	10600110	SDN	SDN 3 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	105.704,00	140.480.000,00	1.800.000,00	108.435.704,00	30.350.000,00	140.585.704,00	-	2.980.150,00	1.276.000,00	1.704.150,00	1.704.150,00	
211	10602872	SDN	SDN 4 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	92.255,00	108.960.000,00	700.000,00	84.010.255,00	24.182.000,00	108.892.255,00	160.000,00	1.136.818,00	1.136.818,00	-	160.000,00	
212	10644799	SDN	SDN 5 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	11.673,00	148.320.000,00	10.800.000,00	104.325.300,00	30.509.700,00	145.635.000,00	2.696.673,00	2.656.233,00	-	2.656.233,00	5.352.906,00	
213	10600385	SDN	SDN 6 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	47.205,00	126.560.000,00	3.000.000,00	97.397.205,00	22.666.500,00	123.063.705,00	3.543.500,00	1.180.453,00	-	1.180.453,00	4.723.953,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
214	10600242	SDN	SDN 7 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	223.382,00	150.080.000,00	6.600.000,00	109.595.482,00	34.104.900,00	150.300.382,00	3.000,00	3.130.800,00	2.768.800,00	362.000,00	365.000,00	
215	10600130	SDN	SDN 8 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	144.179,00	67.040.000,00	900.000,00	53.268.179,00	12.996.000,00	67.164.179,00	20.000,00	320.727,00	145.000,00	175.727,00	195.727,00	
216	10600115	SDN	SDN 9 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	12.962,00	262.080.000,00	6.000.000,00	185.405.000,00	70.675.000,00	262.080.000,00	12.962,00	5.171.500,00	5.171.500,00	-	12.962,00	
217	10645938	SDN	SDN 10 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	50.554,00	168.000.000,00	3.600.000,00	125.880.554,00	38.550.000,00	168.030.554,00	20.000,00	1.178.000,00	998.000,00	180.000,00	200.000,00	
218	10645891	SDN	SDN 11 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	678.508,00	176.320.000,00	4.200.000,00	140.578.808,00	32.133.700,00	176.912.508,00	86.000,00	2.873.344,00	1.126.850,00	1.746.494,00	1.832.494,00	
219	10600221	SDN	SDN 12 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	14.432,00	172.800.000,00	3.000.000,00	134.844.432,00	34.970.000,00	172.814.432,00	-	1.375.000,00	895.000,00	480.000,00	480.000,00	
220	10644797	SDN	SDN 13 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	156.614,00	114.240.000,00	4.400.000,00	89.126.908,00	20.846.300,00	114.373.208,00	23.406,00	378.500,00	-	378.500,00	401.906,00	
221	10645886	SDN	SDN 14 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	142.885,00	155.360.000,00	4.800.000,00	113.925.885,00	36.250.600,00	154.976.485,00	526.400,00	2.787.291,00	-	2.787.291,00	3.313.691,00	
222	10644798	SDN	SDN 15 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	1.532.513,00	116.480.000,00	12.000.000,00	80.709.913,00	25.302.600,00	118.012.513,00	-	418.181,00	418.181,00	-	-	
223	10644801	SDN	SDN 16 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	566.609,00	123.840.000,00	2.800.000,00	88.405.359,00	33.107.000,00	124.312.359,00	94.250,00	2.863.329,00	2.863.329,00	-	94.250,00	
224	10600177	SDN	SDN 17 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	139.041,00	169.760.000,00	2.400.000,00	130.815.103,00	36.660.000,00	169.875.103,00	23.938,00	1.387.517,00	-	1.387.517,00	1.411.455,00	
225	10600376	SDN	SDN 18 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	139.879,00	99.520.000,00	12.000.000,00	69.081.479,00	18.578.400,00	99.659.879,00	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	
226	10600348	SDN	SDN 19 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	61.659,00	108.800.000,00	3.000.000,00	85.674.959,00	20.186.700,00	108.861.659,00	-	385.500,00	-	385.500,00	385.500,00	
227	10600241	SDN	SDN 20 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	40.242,00	92.160.000,00	2.400.000,00	69.958.042,00	19.842.200,00	92.200.242,00	-	161.181,00	161.181,00	-	-	
228	10600334	SDN	SDN 21 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	124.207,00	60.960.000,00	1.200.000,00	46.366.207,00	13.518.000,00	61.084.207,00	-	347.500,00	347.500,00	-	-	
229	10644802	SDN	SDN 22 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	1.131.009,00	74.560.000,00	5.400.000,00	45.531.000,00	24.300.000,00	75.231.000,00	460.009,00	1.110.000,00	-	1.110.000,00	1.570.009,00	
230	10644796	SDN	SDN 23 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	126.798,00	97.440.000,00	-	68.766.600,00	24.673.400,00	93.440.000,00	4.126.798,00	2.306.500,00	-	2.306.500,00	6.433.298,00	
231	10600338	SDN	SDN 24 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	370.878,00	116.000.000,00	3.600.000,00	79.267.700,00	33.229.800,00	116.097.500,00	273.378,00	1.484.500,00	1.484.500,00	-	273.378,00	
232	10646614	SDN	SDN 25 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	67.771,00	142.240.000,00	10.800.000,00	103.469.771,00	28.038.000,00	142.307.771,00	-	169.454,00	-	169.454,00	169.454,00	
233	10600143	SDN	SDN 1 MUARA TELANG	MUARA TELANG	2.818.052,00	207.680.000,00	4.200.000,00	151.990.000,00	53.427.100,00	209.617.100,00	880.952,00	2.729.180,00	195.455,00	2.533.725,00	3.414.677,00	
234	10644804	SDN	SDN 2 MUARA TELANG	MUARA TELANG	715.390,00	100.480.000,00	7.800.000,00	72.381.350,00	19.677.000,00	99.858.350,00	1.337.040,00	810.000,00	-	810.000,00	2.147.040,00	
235	10600218	SDN	SDN 3 MUARA TELANG	MUARA TELANG	311.523,00	231.840.000,00	7.800.000,00	167.950.972,00	55.873.200,00	231.624.172,00	527.351,00	2.571.254,00	-	2.571.254,00	3.098.605,00	
236	10600321	SDN	SDN 4 MUARA TELANG	MUARA TELANG	936.812,00	155.200.000,00	6.000.000,00	112.501.344,00	36.913.600,00	155.414.944,00	721.868,00	870.000,00	-	870.000,00	1.591.868,00	
237	10600103	SDN	SDN 5 MUARA TELANG	MUARA TELANG	39.285.243,00	281.280.000,00	10.800.000,00	214.238.354,00	93.477.060,00	318.515.414,00	2.049.829,00	3.193.159,00	-	3.193.159,00	5.242.988,00	
238	10602479	SDN	SDN 6 MUARA TELANG	MUARA TELANG	126.183,00	192.960.000,00	1.200.000,00	150.686.483,00	41.199.700,00	193.086.183,00	-	-	-	-	-	
239	10600246	SDN	SDN 7 MUARA TELANG	MUARA TELANG	501.440,00	230.400.000,00	7.800.000,00	174.381.140,00	48.720.300,00	230.901.440,00	-	1.741.909,00	1.741.909,00	-	-	
240	10600245	SDN	SDN 8 MUARA TELANG	MUARA TELANG	5.797.129,00	244.160.000,00	7.800.000,00	170.544.700,00	71.171.300,00	249.516.000,00	441.129,00	2.620.950,00	2.620.950,00	-	441.129,00	
241	10600322	SDN	SDN 9 MUARA TELANG	MUARA TELANG	1.088.668,00	158.080.000,00	8.400.000,00	115.509.000,00	34.171.000,00	158.080.000,00	1.088.668,00	1.849.100,00	-	1.849.100,00	2.937.768,00	
242	10600147	SDN	SDN 10 MUARA TELANG	MUARA TELANG	103.963,00	108.320.000,00	4.800.000,00	86.071.863,00	17.536.000,00	108.407.863,00	16.100,00	480.000,00	-	480.000,00	496.100,00	
243	10644806	SDN	SDN 11 MUARA TELANG	MUARA TELANG	3.135.573,00	198.880.000,00	7.800.000,00	132.066.817,00	61.999.300,00	201.866.117,00	149.456,00	4.410.313,00	-	4.410.313,00	4.559.769,00	
244	10600229	SDN	SDN 12 MUARA TELANG	MUARA TELANG	1.138.884,00	53.440.000,00	-	42.173.684,00	12.210.200,00	54.383.884,00	195.000,00	-	-	-	195.000,00	
245	10602572	SDN	SDN 13 MUARA TELANG	MUARA TELANG	617.355,00	291.360.000,00	5.400.000,00	218.642.700,00	67.934.600,00	291.977.300,00	55,00	5.139.830,00	318.200,00	4.821.630,00	4.821.685,00	
246	10644805	SDN	SDN 14 MUARA TELANG	MUARA TELANG	264.303,00	71.040.000,00	4.800.000,00	52.468.400,00	13.815.400,00	71.083.800,00	220.503,00	1.295.581,00	1.280.581,00	15.000,00	235.503,00	
247	10645880	SDN	SDN 15 MUARA TELANG	MUARA TELANG	2.645.878,00	217.440.000,00	5.400.000,00	141.876.302,00	72.256.200,00	219.532.502,00	553.376,00	2.164.364,00	-	2.164.364,00	2.717.740,00	
248	10600317	SDN	SDN 16 MUARA TELANG	MUARA TELANG	729.635,00	126.880.000,00	4.800.000,00	94.537.400,00	27.542.600,00	126.880.000,00	729.635,00	654.400,00	-	654.400,00	1.384.035,00	
249	10600170	SDN	SDN 17 MUARA TELANG	MUARA TELANG	1.428.037,00	73.600.000,00	3.360.000,00	57.951.737,00	13.716.300,00	75.028.037,00	-	886.120,00	-	886.120,00	886.120,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
250	10600168	SDN	SDN 18 MUARA TELANG	MUARA TELANG	604.533,00	158.240.000,00	8.400.000,00	109.186.550,00	41.225.400,00	158.811.950,00	32.583,00	945.000,00	609.500,00	335.500,00	368.083,00	
251	10644807	SDN	SDN 19 MUARA TELANG	MUARA TELANG	456.801,00	131.520.000,00	3.000.000,00	97.161.210,00	29.372.600,00	129.533.810,00	2.442.991,00	2.422.250,00	738.750,00	1.683.500,00	4.126.491,00	
252	10647283	SDN	SDN 20 MUARA TELANG	MUARA TELANG	1.021.946,00	83.040.000,00	4.800.000,00	62.089.546,00	16.504.400,00	83.393.946,00	668.000,00	-	-	-	668.000,00	
253	69756057	SDN	SDN 21 MUARA TELANG	MUARA TELANG	126.917,00	145.600.000,00	5.000.000,00	108.688.700,00	32.030.800,00	145.719.500,00	7.417,00	1.018.282,00	308.182,00	710.100,00	717.517,00	
254	10602391	SDN	SDN 1 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	94.938,00	80.800.000,00	1.200.000,00	71.371.938,00	8.323.000,00	80.894.938,00	-	-	-	-	-	
255	10645885	SDN	SDN 2 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	148.992,00	70.560.000,00	1.500.000,00	46.687.592,00	18.201.400,00	66.388.992,00	4.320.000,00	75.000,00	-	75.000,00	4.395.000,00	
256	10644686	SDN	SDN 3 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	199.412,00	135.520.000,00	1.400.000,00	106.211.412,00	28.108.000,00	135.719.412,00	-	-	-	-	-	
257	10602385	SDN	SDN 4 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	376.287,00	123.200.000,00	3.600.000,00	87.087.200,00	32.702.800,00	123.390.000,00	186.287,00	140.000,00	-	140.000,00	326.287,00	
258	10602634	SDN	SDN 5 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	8.495,00	73.440.000,00	-	73.448.495,00	-	73.448.495,00	-	-	-	-	-	
259	10602381	SDN	SDN 6 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	1.546.682,00	163.840.000,00	8.400.000,00	110.506.682,00	46.480.000,00	165.386.682,00	-	-	-	-	-	
260	10602386	SDN	SDN 7 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	120.217,00	66.720.000,00	1.200.000,00	51.418.617,00	14.221.600,00	66.840.217,00	-	-	-	-	-	
261	10602378	SDN	SDN 8 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	2.095.019,00	169.760.000,00	4.800.000,00	130.356.000,00	36.440.000,00	171.596.000,00	259.019,00	2.523.908,00	-	2.523.908,00	2.782.927,00	
262	10602590	SDN	SDN 9 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	157.374,00	205.920.000,00	10.800.000,00	150.137.000,00	44.085.600,00	205.022.600,00	1.054.774,00	1.313.100,00	-	1.313.100,00	2.367.874,00	
263	10602376	SDN	SDN 10 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	364.111,00	58.400.000,00	4.200.000,00	42.737.411,00	11.826.700,00	58.764.111,00	-	527.500,00	-	527.500,00	527.500,00	
264	10602377	SDN	SDN 11 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	505.962,00	145.120.000,00	5.400.000,00	105.757.662,00	34.468.300,00	145.625.962,00	-	1.668.050,00	-	1.668.050,00	1.668.050,00	
265	10602379	SDN	SDN 12 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	142.859,00	106.560.000,00	600.000,00	76.526.900,00	29.564.300,00	106.691.200,00	11.659,00	919.140,00	-	919.140,00	930.799,00	
266	10602384	SDN	SDN 13 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	59.802,00	139.520.000,00	7.800.000,00	102.467.202,00	29.312.600,00	139.579.802,00	-	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00	
267	10602382	SDN	SDN 14 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	305.304,00	242.880.000,00	10.800.000,00	177.151.704,00	52.353.600,00	240.305.304,00	2.880.000,00	2.651.580,00	-	2.651.580,00	5.531.580,00	
268	10602419	SDN	SDN 15 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	201.187,00	138.560.000,00	2.400.000,00	87.712.187,00	48.649.000,00	138.761.187,00	-	-	-	-	-	
269	10602579	SDN	SDN 16 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	925.459,00	108.320.000,00	2.040.000,00	80.809.159,00	26.396.300,00	109.245.459,00	-	1.123.700,00	-	1.123.700,00	1.123.700,00	
270	10644687	SDN	SDN 17 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	962.732,00	95.840.000,00	1.400.000,00	75.044.400,00	19.315.600,00	95.760.000,00	1.042.732,00	588.000,00	-	588.000,00	1.630.732,00	
271	10602707	SDN	SDN 18 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	56.185,00	102.080.000,00	-	73.155.000,00	28.745.200,00	101.900.200,00	235.985,00	640.000,00	-	640.000,00	875.985,00	
272	10645860	SDN	SDN 19 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	784.995,00	85.600.000,00	-	58.422.000,00	27.924.000,00	86.346.000,00	38.995,00	675.000,00	-	675.000,00	713.995,00	
273	10645884	SDN	SDN 20 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	473.891,00	64.000.000,00	2.400.000,00	47.409.791,00	14.664.100,00	64.473.891,00	-	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	
274	10602372	SDN	SDN 21 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	364.471,00	91.840.000,00	6.000.000,00	68.127.500,00	17.922.400,00	92.049.900,00	154.571,00	450.000,00	-	450.000,00	604.571,00	
275	10602632	SDN	SDN 22 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	12.658,00	57.280.000,00	-	44.215.258,00	13.077.400,00	57.292.658,00	-	-	-	-	-	
276	10602321	SDN	SDN 23 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	5.990,00	97.920.000,00	1.000.000,00	68.169.390,00	28.756.600,00	97.925.990,00	-	-	-	-	-	
277	10602697	SDN	SDN 24 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	115.257,00	124.160.000,00	2.400.000,00	97.297.357,00	24.577.900,00	124.275.257,00	-	-	-	-	-	
278	10645887	SDN	SDN 25 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	126.102,00	149.920.000,00	1.200.000,00	118.780.700,00	30.065.300,00	150.046.000,00	102,00	-	-	-	102,00	
279	10602574	SDN	SDN 26 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	237.336,00	138.240.000,00	4.200.000,00	102.691.080,00	31.584.100,00	138.475.180,00	2.156,00	954.546,00	-	954.546,00	956.702,00	
280	10645881	SDN	SDN 27 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	1.106.419,00	86.080.000,00	2.000.000,00	66.646.919,00	18.539.500,00	87.186.419,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	
281	10644688	SDN	SDN 28 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	212.108,00	72.640.000,00	2.400.000,00	54.842.108,00	15.610.000,00	72.852.108,00	-	538.500,00	-	538.500,00	538.500,00	
282	10602491	SDN	SDN 29 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	170.044,00	102.720.000,00	10.800.000,00	77.819.044,00	14.251.000,00	102.870.044,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
283	10645876	SDN	SDN 30 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	262.626,00	57.440.000,00	2.100.000,00	41.928.826,00	13.659.800,00	57.688.626,00	14.000,00	228.000,00	-	228.000,00	242.000,00	
284	10602373	SDN	SDN 31 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	1.257.794,00	194.400.000,00	4.800.000,00	130.426.516,00	60.099.400,00	195.325.916,00	331.878,00	-	-	-	331.878,00	
285	10644694	SDN	SDN 32 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	548.961,00	302.880.000,00	4.800.000,00	226.605.261,00	72.023.700,00	303.428.961,00	-	1.451.000,00	1.061.000,00	390.000,00	390.000,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
286	10644695	SDN	SDN 33 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	97.876,00	113.440.000,00	4.200.000,00	84.659.076,00	24.678.800,00	113.537.876,00	-	2.297.865,00	448.500,00	1.849.365,00	1.849.365,00	
287	10600142	SDN	SDN 1 RAMBUTAN	RAMBUTAN	89.049,00	156.480.000,00	6.000.000,00	116.336.929,00	34.228.500,00	156.565.429,00	3.620,00	1.384.520,00	-	1.384.520,00	1.388.140,00	
288	10644705	SDN	SDN 2 RAMBUTAN	RAMBUTAN	190.000,00	203.360.000,00	-	155.556.000,00	47.994.000,00	203.550.000,00	-	3.781.910,00	-	3.781.910,00	3.781.910,00	
289	10600325	SDN	SDN 3 RAMBUTAN	RAMBUTAN	973.255,00	256.320.000,00	2.700.000,00	162.270.521,00	92.321.870,00	257.292.391,00	864,00	6.726.850,00	2.945.975,00	3.780.875,00	3.781.739,00	
290	10600332	SDN	SDN 4 RAMBUTAN	RAMBUTAN	228.698,00	112.000.000,00	6.000.000,00	68.256.977,00	35.091.700,00	109.348.677,00	2.880.021,00	2.859.000,00	715.000,00	2.144.000,00	5.024.021,00	
291	10644706	SDN	SDN 5 RAMBUTAN	RAMBUTAN	9.702,00	174.400.000,00	7.200.000,00	112.816.697,00	54.389.600,00	174.406.297,00	3.405,00	5.053.700,00	1.280.000,00	3.773.700,00	3.777.105,00	
292	10602844	SDN	SDN 6 RAMBUTAN	RAMBUTAN	220.189,00	212.480.000,00	8.400.000,00	158.380.000,00	45.910.000,00	212.690.000,00	10.189,00	3.038.182,00	-	3.038.182,00	3.048.371,00	
293	10600112	SDN	SDN 7 RAMBUTAN	RAMBUTAN	154.468,00	172.320.000,00	6.000.000,00	127.342.310,00	35.051.190,00	168.393.500,00	4.080.968,00	1.826.500,00	-	1.826.500,00	5.907.468,00	
294	10602599	SDN	SDN 8 RAMBUTAN	RAMBUTAN	212.509,00	160.800.000,00	7.800.000,00	117.163.095,00	35.987.400,00	160.950.495,00	62.014,00	2.184.225,00	-	2.184.225,00	2.246.239,00	
295	10600141	SDN	SDN 9 RAMBUTAN	RAMBUTAN	125.232,00	69.440.000,00	2.800.000,00	52.831.832,00	13.889.600,00	69.521.432,00	43.800,00	928.181,00	-	928.181,00	971.981,00	
296	10600104	SDN	SDN 10 RAMBUTAN	RAMBUTAN	59.123,00	167.520.000,00	10.110.000,00	116.485.633,00	40.983.490,00	167.579.123,00	-	3.015.200,00	881.200,00	2.134.000,00	2.134.000,00	
297	10644704	SDN	SDN 11 RAMBUTAN	RAMBUTAN	1.076.227,00	114.240.000,00	10.800.000,00	79.712.300,00	24.376.500,00	114.888.800,00	427.427,00	-	-	-	427.427,00	
298	10600150	SDN	SDN 12 RAMBUTAN	RAMBUTAN	29.146,00	372.000.000,00	4.800.000,00	239.222.873,00	127.653.500,00	371.676.373,00	352.773,00	6.474.636,00	3.440.000,00	3.034.636,00	3.387.409,00	
299	10600151	SDN	SDN 13 RAMBUTAN	RAMBUTAN	263.841,00	126.080.000,00	19.200.000,00	79.161.400,00	27.949.900,00	126.311.300,00	32.541,00	912.840,00	-	912.840,00	945.381,00	
300	10600114	SDN	SDN 14 RAMBUTAN	RAMBUTAN	138.170,00	94.720.000,00	-	76.123.900,00	18.733.700,00	94.857.600,00	570,00	60.000,00	-	60.000,00	60.570,00	
301	10600157	SDN	SDN 15 RAMBUTAN	RAMBUTAN	117.997,00	157.760.000,00	5.600.000,00	115.645.809,00	36.619.600,00	157.865.409,00	12.588,00	2.385.955,00	-	2.385.955,00	2.398.543,00	
302	10600109	SDN	SDN 16 RAMBUTAN	RAMBUTAN	82.494,00	60.640.000,00	13.500.000,00	38.510.944,00	8.709.100,00	60.720.044,00	2.450,00	672.530,00	-	672.530,00	674.980,00	
303	10600228	SDN	SDN 17 RAMBUTAN	RAMBUTAN	176.002,00	173.600.000,00	4.000.000,00	132.164.802,00	37.611.200,00	173.776.002,00	-	2.076.000,00	-	2.076.000,00	2.076.000,00	
304	10600220	SDN	SDN 18 RAMBUTAN	RAMBUTAN	150.000,00	117.120.000,00	840.000,00	89.911.498,00	26.382.300,00	117.133.798,00	136.202,00	-	-	-	136.202,00	
305	10600136	SDN	SDN 19 RAMBUTAN	RAMBUTAN	134.079,00	56.000.000,00	2.400.000,00	42.352.800,00	11.252.700,00	56.005.500,00	128.579,00	-	-	-	128.579,00	
306	10600247	SDN	SDN 20 RAMBUTAN	RAMBUTAN	102.542,00	109.120.000,00	6.000.000,00	71.121.642,00	32.100.900,00	109.222.542,00	-	760.000,00	760.000,00	-	-	
307	10644707	SDN	SDN 21 RAMBUTAN	RAMBUTAN	161.322,00	135.680.000,00	4.200.000,00	102.863.230,00	28.760.000,00	135.823.230,00	18.092,00	-	-	-	18.092,00	
308	10600140	SDN	SDN 22 RAMBUTAN	RAMBUTAN	26.179,00	106.880.000,00	6.000.000,00	74.725.950,00	26.179.650,00	106.905.600,00	579,00	1.311.000,00	1.311.000,00	-	579,00	
309	10644074	SDN	SDN 23 RAMBUTAN	RAMBUTAN	48.638,00	100.000.000,00	7.400.000,00	66.818.638,00	25.830.000,00	100.048.638,00	-	484.000,00	484.000,00	-	-	
310	69756054	SDN	SDN 24 RAMBUTAN	RAMBUTAN	76.385,00	53.120.000,00	1.600.000,00	40.716.385,00	10.880.000,00	53.196.385,00	-	430.000,00	-	430.000,00	430.000,00	
311	10602692	SDN	SDN 1 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	261.457,00	112.800.000,00	6.000.000,00	83.922.552,00	23.138.200,00	113.060.752,00	705,00	928.000,00	928.000,00	-	705,00	
312	10602716	SDN	SDN 2 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	185.415,00	48.000.000,00	6.000.000,00	40.154.815,00	2.030.600,00	48.185.415,00	-	-	-	-	-	
313	10602709	SDN	SDN 3 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	136.443,00	271.520.000,00	12.000.000,00	191.688.343,00	67.318.100,00	271.006.443,00	650.000,00	2.645.000,00	2.554.000,00	91.000,00	741.000,00	
314	10644869	SDN	SDN 4 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	117.518,00	89.440.000,00	6.000.000,00	71.139.518,00	12.417.800,00	89.557.318,00	200,00	660.000,00	-	660.000,00	660.200,00	
315	10602703	SDN	SDN 5 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	73.736,00	104.320.000,00	28.969.117,00	47.334.142,00	27.717.000,00	104.020.259,00	373.477,00	409.091,00	-	409.091,00	782.568,00	
316	10602719	SDN	SDN 6 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	396.772,00	98.880.000,00	3.600.000,00	74.406.000,00	21.174.000,00	99.180.000,00	96.772,00	580.000,00	-	580.000,00	676.772,00	
317	10644871	SDN	SDN 7 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	5.911.999,00	169.440.000,00	6.000.000,00	126.165.476,00	42.414.500,00	174.579.976,00	772.023,00	3.287.400,00	3.287.400,00	-	772.023,00	
318	10602356	SDN	SDN 8 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	8.945.595,00	144.160.000,00	4.200.000,00	109.248.511,00	38.137.100,00	151.585.611,00	1.519.984,00	2.560.300,00	2.560.300,00	-	1.519.984,00	
319	10602510	SDN	SDN 9 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	142.470,00	126.880.000,00	21.000.000,00	81.080.000,00	24.800.000,00	126.880.000,00	142.470,00	450.000,00	450.000,00	-	142.470,00	
320	10602565	SDN	SDN 10 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	1.366.766,00	112.960.000,00	8.400.000,00	79.651.766,00	26.025.000,00	114.076.766,00	250.000,00	1.563.200,00	1.563.200,00	-	250.000,00	
321	10602637	SDN	SDN 11 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	201.612,00	102.400.000,00	13.200.000,00	59.135.612,00	26.206.000,00	98.541.612,00	4.060.000,00	1.371.455,00	1.371.455,00	-	4.060.000,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
322	10602461	SDN	SDN 12 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	489.524,00	91.040.000,00	-	73.594.500,00	17.935.000,00	91.529.500,00	24,00	-	-	-	24,00	
323	10602509	SDN	SDN 13 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	768.383,00	215.200.000,00	9.600.000,00	163.328.383,00	43.040.000,00	215.968.383,00	-	330.000,00	330.000,00	-	-	
324	10602459	SDN	SDN 14 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	166.717,00	56.640.000,00	2.400.000,00	42.286.717,00	12.120.000,00	56.806.717,00	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	
325	10602351	SDN	SDN 15 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	299.898,00	75.680.000,00	5.400.000,00	57.603.100,00	12.876.900,00	75.880.000,00	99.898,00	401.400,00	401.400,00	-	99.898,00	
326	10602901	SDN	SDN 16 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	108.543,00	53.120.000,00	4.200.000,00	42.910.243,00	6.108.300,00	53.218.543,00	10.000,00	390.000,00	390.000,00	-	10.000,00	
327	10644872	SDN	SDN 17 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	163.253,00	95.040.000,00	5.400.000,00	71.648.000,00	17.992.000,00	95.040.000,00	163.253,00	612.600,00	612.600,00	-	163.253,00	
328	10602881	SDN	SDN 18 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	62.321,00	72.960.000,00	4.800.000,00	53.805.771,00	14.396.400,00	73.002.171,00	20.150,00	240.000,00	240.000,00	-	20.150,00	
329	10644874	SDN	SDN 19 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	264.204,00	58.720.000,00	2.000.000,00	41.068.704,00	15.915.500,00	58.984.204,00	-	460.227,00	-	460.227,00	460.227,00	
330	10644875	SDN	SDN 20 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	104.682,00	97.920.000,00	3.000.000,00	72.401.100,00	22.518.900,00	97.920.000,00	104.682,00	664.000,00	664.000,00	-	104.682,00	
331	10602390	SDN	SDN 21 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	3.062.922,00	141.920.000,00	12.000.000,00	103.641.422,00	28.441.200,00	144.082.622,00	900.300,00	300.000,00	300.000,00	-	900.300,00	
332	10644870	SDN	SDN 22 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	399.142,00	83.520.000,00	3.600.000,00	63.146.942,00	17.172.200,00	83.919.142,00	-	-	-	-	-	
333	10602462	SDN	SDN 23 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	159.538,00	87.200.000,00	4.800.000,00	55.715.038,00	26.844.000,00	87.359.038,00	500,00	756.362,00	-	756.362,00	756.862,00	
334	10602708	SDN	SDN 24 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	126.368,00	48.000.000,00	3.000.000,00	40.049.600,00	5.076.400,00	48.126.000,00	368,00	235.000,00	-	235.000,00	235.368,00	
335	10602889	SDN	SDN 25 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	597.349,00	50.560.000,00	3.300.000,00	41.059.349,00	6.710.000,00	51.069.349,00	88.000,00	165.000,00	-	165.000,00	253.000,00	
336	10602880	SDN	SDN 26 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	56.450,00	48.000.000,00	4.200.000,00	34.962.300,00	8.847.800,00	48.010.100,00	46.350,00	510.000,00	-	510.000,00	556.350,00	
337	10602635	SDN	SDN 27 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	1.017.604,00	98.880.000,00	3.300.000,00	73.345.004,00	23.252.600,00	99.897.604,00	-	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	
338	10644873	SDN	SDN 28 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	328.450,00	65.280.000,00	3.600.000,00	51.327.900,00	6.105.000,00	61.032.900,00	4.575.550,00	240.000,00	240.000,00	-	4.575.550,00	
339	10602907	SDN	SDN 29 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	76.487,00	70.240.000,00	6.000.000,00	50.076.487,00	14.240.000,00	70.316.487,00	-	721.591,00	159.091,00	562.500,00	562.500,00	
340	10602953	SDN	SDN 31 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	168.399,00	60.000.000,00	4.200.000,00	50.720.000,00	5.080.000,00	60.000.000,00	168.399,00	380.000,00	380.000,00	-	168.399,00	
341	10602956	SDN	SDN 32 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	186.722,00	72.000.000,00	2.000.000,00	51.221.622,00	18.965.100,00	72.186.722,00	-	360.227,00	-	360.227,00	360.227,00	
342	10602612	SDN	SDN 33 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	110.796,00	229.760.000,00	6.600.000,00	152.975.748,00	65.750.300,00	225.326.048,00	4.544.748,00	6.270.850,00	5.668.350,00	602.500,00	5.147.248,00	
343	10602631	SDN	SDN 34 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	128.214,00	78.240.000,00	3.600.000,00	54.024.214,00	20.594.500,00	78.218.714,00	149.500,00	970.907,00	970.907,00	-	149.500,00	
344	10645950	SDN	SDN 35 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	37.185,00	51.840.000,00	1.800.000,00	41.213.203,00	8.847.900,00	51.861.103,00	16.082,00	350.000,00	350.000,00	-	16.082,00	
345	10602636	SDN	SDN 36 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	164.157,00	65.600.000,00	2.000.000,00	49.516.157,00	14.248.000,00	65.764.157,00	-	435.900,00	-	435.900,00	435.900,00	
346	10602943	SDN	SDN 37 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	45.518.148,00	221.920.000,00	5.700.000,00	99.882.684,00	62.525.900,00	168.108.584,00	99.329.564,00	3.022.900,00	2.909.900,00	113.000,00	99.442.564,00	
347	10644868	SDN	SDN 38 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	110.741,00	125.120.000,00	6.000.000,00	97.142.441,00	22.088.300,00	125.230.741,00	-	1.268.452,00	-	1.268.452,00	1.268.452,00	
348	10602715	SDN	SDN 1 SEMBAWA	SEMBAWA	192.788,00	57.760.000,00	14.400.000,00	31.278.990,00	12.272.600,00	57.951.590,00	1.198,00	1.095.000,00	960.000,00	135.000,00	136.198,00	
349	10602706	SDN	SDN 2 SEMBAWA	SEMBAWA	226.268,00	97.760.000,00	1.200.000,00	73.659.791,00	23.122.968,00	97.982.759,00	3.509,00	1.302.000,00	1.302.000,00	-	3.509,00	
350	10602704	SDN	SDN 3 SEMBAWA	SEMBAWA	142.103,00	100.320.000,00	4.416.000,00	70.485.650,00	25.545.200,00	100.446.850,00	15.253,00	1.223.600,00	1.223.600,00	-	15.253,00	
351	10602720	SDN	SDN 4 SEMBAWA	SEMBAWA	437.885,00	244.800.000,00	9.000.000,00	179.817.314,00	56.420.000,00	245.237.314,00	571,00	2.263.000,00	2.263.000,00	-	571,00	
352	10602411	SDN	SDN 5 SEMBAWA	SEMBAWA	158.763,00	166.080.000,00	-	151.194.763,00	15.044.000,00	166.238.763,00	-	1.410.340,00	1.410.340,00	-	-	
353	10602366	SDN	SDN 6 SEMBAWA	SEMBAWA	7.503,00	109.120.000,00	3.600.000,00	82.206.403,00	23.317.731,00	109.124.134,00	3.369,00	1.182.000,00	1.182.000,00	-	3.369,00	
354	10602601	SDN	SDN 7 SEMBAWA	SEMBAWA	92.556,00	77.440.000,00	4.200.000,00	60.971.730,00	12.360.500,00	77.532.230,00	326,00	1.249.150,00	1.249.150,00	-	326,00	
355	10602902	SDN	SDN 8 SEMBAWA	SEMBAWA	10.167.910,00	98.080.000,00	4.500.000,00	72.527.428,00	30.619.800,00	107.647.228,00	600.682,00	600.000,00	600.000,00	-	600.682,00	
356	10602354	SDN	SDN 9 SEMBAWA	SEMBAWA	17.398.943,00	119.520.000,00	10.800.000,00	90.152.069,00	35.915.276,00	136.867.345,00	51.598,00	2.913.500,00	2.913.500,00	-	51.598,00	
357	10602948	SDN	SDN 10 SEMBAWA	SEMBAWA	283.717,00	229.280.000,00	10.800.000,00	181.004.222,00	37.695.500,00	229.499.722,00	63.995,00	1.513.750,00	1.513.750,00	-	63.995,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
358	10602717	SDN	SDN 11 SEMBAWA	SEMBAWA	105.617,00	124.800.000,00	4.000.000,00	90.510.900,00	30.379.100,00	124.890.000,00	15.617,00	1.272.725,00	440.000,00	832.725,00	848.342,00	
359	10602487	SDN	SDN 12 SEMBAWA	SEMBAWA	787.704,00	274.720.000,00	10.150.000,00	182.706.350,00	82.516.000,00	275.372.350,00	135.354,00	6.547.100,00	6.547.100,00	-	135.354,00	
360	10602484	SDN	SDN 13 SEMBAWA	SEMBAWA	137.138,00	190.400.000,00	12.000.000,00	120.392.744,00	58.144.100,00	190.536.844,00	294,00	540.000,00	540.000,00	-	294,00	
361	10602576	SDN	SDN 14 SEMBAWA	SEMBAWA	263.915,00	203.680.000,00	10.800.000,00	141.901.961,00	45.967.300,00	198.669.261,00	5.274.654,00	4.593.800,00	4.593.800,00	-	5.274.654,00	
362	10602915	SDN	SDN 15 SEMBAWA	SEMBAWA	167.553,00	124.320.000,00	10.200.000,00	71.657.300,00	42.562.700,00	124.420.000,00	67.553,00	3.963.550,00	1.711.100,00	2.252.450,00	2.320.003,00	
363	10602359	SDN	SDN 16 SEMBAWA	SEMBAWA	159.432,00	95.360.000,00	3.810.000,00	68.869.342,00	22.366.800,00	95.046.142,00	473.290,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.473.290,00	
364	10602954	SDN	SDN 17 SEMBAWA	SEMBAWA	6.179,00	136.160.000,00	4.800.000,00	94.912.448,00	36.447.000,00	136.159.448,00	6.731,00	961.800,00	961.800,00	-	6.731,00	
365	10602486	SDN	SDN 18 SEMBAWA	SEMBAWA	78.704,00	136.160.000,00	4.800.000,00	88.129.904,00	43.308.800,00	136.238.704,00	-	1.027.400,00	1.027.400,00	-	-	
366	10602609	SDN	SDN 19 SEMBAWA	SEMBAWA	31.122,00	97.920.000,00	9.600.000,00	61.579.612,00	26.750.900,00	97.930.512,00	20.610,00	2.157.900,00	1.917.900,00	240.000,00	260.610,00	
367	10602393	SDN	SDN 20 SEMBAWA	SEMBAWA	172.674,00	48.000.000,00	6.000.000,00	31.811.047,00	10.186.300,00	47.997.347,00	175.327,00	900.000,00	-	900.000,00	1.075.327,00	
368	10602942	SDN	SDN 21 SEMBAWA	SEMBAWA	338.882,00	100.000.000,00	7.200.000,00	73.830.182,00	19.308.700,00	100.338.882,00	-	1.405.500,00	1.405.500,00	-	-	
369	10602934	SDN	SDN 22 SEMBAWA	SEMBAWA	141.671,00	181.280.000,00	4.200.000,00	130.379.040,00	46.086.000,00	180.665.040,00	756.631,00	4.963.400,00	-	4.963.400,00	5.720.031,00	
370	10602834	SDN	SDN 23 SEMBAWA	SEMBAWA	790.265,00	48.000.000,00	1.600.000,00	37.745.250,00	8.480.100,00	47.825.350,00	964.915,00	80.000,00	80.000,00	-	964.915,00	
371	10602501	SDN	SDN 24 SEMBAWA	SEMBAWA	106.656,00	48.000.000,00	-	38.502.256,00	9.604.400,00	48.106.656,00	-	120.000,00	120.000,00	-	-	
372	10602492	SDN	SDN 25 SEMBAWA	SEMBAWA	72.521,00	48.000.000,00	2.000.000,00	35.946.021,00	10.126.500,00	48.072.521,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	
373	10602870	SDN	SDN 1 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	391.845,00	120.640.000,00	4.800.000,00	78.871.745,00	37.360.100,00	121.031.845,00	-	1.335.000,00	300.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	
374	10602850	SDN	SDN 2 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	164.461,00	48.000.000,00	4.200.000,00	33.149.700,00	10.810.300,00	48.160.000,00	4.461,00	-	-	-	4.461,00	
375	10602621	SDN	SDN 3 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	1.308.177,00	205.440.000,00	6.000.000,00	157.778.000,00	42.728.600,00	206.506.600,00	241.577,00	2.691.000,00	2.225.000,00	466.000,00	707.577,00	
376	10602812	SDN	SDN 4 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	1.500.800,00	119.040.000,00	-	96.888.796,00	23.652.000,00	120.540.796,00	4,00	1.636.500,00	1.636.500,00	-	4,00	
377	10602569	SDN	SDN 5 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	1.834.105,00	182.560.000,00	2.400.000,00	140.616.500,00	39.017.600,00	182.034.100,00	2.360.005,00	1.265.500,00	1.265.500,00	-	2.360.005,00	
378	10602435	SDN	SDN 6 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	1.749.248,00	201.600.000,00	16.800.000,00	147.071.829,00	38.908.200,00	202.780.029,00	569.219,00	2.315.000,00	2.315.000,00	-	569.219,00	
379	10602887	SDN	SDN 7 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	408.348,00	87.840.000,00	6.000.000,00	66.165.600,00	16.068.317,00	88.233.917,00	14.431,00	497.000,00	-	497.000,00	511.431,00	
380	10602508	SDN	SDN 8 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	141.032,00	48.000.000,00	1.800.000,00	43.112.632,00	3.208.400,00	48.121.032,00	20.000,00	210.000,00	-	210.000,00	230.000,00	
381	10602454	SDN	SDN 9 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	349.299,00	48.000.000,00	300.000,00	42.253.799,00	5.795.500,00	48.349.299,00	-	-	-	-	-	
382	10602804	SDN	SDN 10 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	230.664,00	92.160.000,00	2.000.000,00	73.361.364,00	17.029.300,00	92.390.664,00	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	
383	10602835	SDN	SDN 11 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	141.671,00	72.800.000,00	5.700.000,00	50.209.000,00	16.960.000,00	72.869.000,00	72.671,00	665.000,00	-	665.000,00	737.671,00	
384	10602367	SDN	SDN 12 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	870.299,00	312.480.000,00	15.600.000,00	218.318.299,00	79.432.000,00	313.350.299,00	-	7.447.000,00	7.447.000,00	-	-	
385	10602596	SDN	SDN 13 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	110.911,00	83.040.000,00	4.000.000,00	62.880.000,00	16.160.000,00	83.040.000,00	110.911,00	250.000,00	250.000,00	-	110.911,00	
386	69851854	SDN	SDN 14 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	234.480,00	62.080.000,00	9.000.000,00	39.974.480,00	13.340.000,00	62.314.480,00	-	26.500,00	-	26.500,00	26.500,00	
387	69972058	SDN	SDN 15 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	-	87.200.000,00	6.840.000,00	62.723.400,00	17.616.600,00	87.180.000,00	20.000,00	483.318,00	483.318,00	-	20.000,00	
388	10600323	SDN	SDN 1 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	425.694,00	164.960.000,00	7.390.000,00	124.708.000,00	33.274.500,00	165.372.500,00	13.194,00	445.900,00	445.900,00	-	13.194,00	
389	10600373	SDN	SDN 2 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	242.070,00	133.280.000,00	1.600.000,00	101.169.617,00	30.510.300,00	133.279.917,00	242.153,00	840.000,00	-	840.000,00	1.082.153,00	
390	10600375	SDN	SDN 3 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	166.300,00	264.320.000,00	5.400.000,00	171.804.300,00	87.282.000,00	264.486.300,00	-	-	-	-	-	
391	10646137	SDN	SDN 4 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	89.123,00	130.880.000,00	-	100.067.123,00	30.902.000,00	130.969.123,00	-	-	-	-	-	
392	10600327	SDN	SDN 5 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	5.236.111,00	120.640.000,00	4.800.000,00	94.665.400,00	26.374.600,00	125.840.000,00	36.111,00	540.000,00	-	540.000,00	576.111,00	
393	10600340	SDN	SDN 6 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	73.060,00	300.480.000,00	11.825.000,00	192.972.019,00	95.756.000,00	300.553.019,00	41,00	2.560.000,00	850.000,00	1.710.000,00	1.710.041,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
394	10600319	SDN	SDN 7 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	1.504.142,00	92.640.000,00	-	69.538.242,00	24.605.900,00	94.144.142,00	-	-	-	-	-	-
395	10646358	SDN	SDN 8 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	3.358.136,00	148.800.000,00	1.500.000,00	118.111.536,00	32.546.600,00	152.158.136,00	-	788.825,00	788.825,00	-	-	-
396	10600230	SDN	SDN 9 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	409.489,00	195.040.000,00	4.500.000,00	152.906.700,00	37.903.300,00	195.310.000,00	139.489,00	412.500,00	-	412.500,00	551.989,00	-
397	10600224	SDN	SDN 10 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	15.345,00	276.320.000,00	8.400.000,00	198.166.145,00	65.289.200,00	271.855.345,00	4.480.000,00	4.953.750,00	4.953.750,00	-	4.480.000,00	-
398	10600161	SDN	SDN 11 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	556.286,00	113.920.000,00	6.000.000,00	81.153.486,00	27.322.800,00	114.476.286,00	-	1.941.813,00	1.941.813,00	-	-	-
399	10600162	SDN	SDN 12 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	112.054,00	115.840.000,00	3.600.000,00	92.204.000,00	20.136.000,00	115.940.000,00	12.054,00	520.500,00	-	520.500,00	532.554,00	-
400	10600153	SDN	SDN 13 SUMBER MARGA TELANG	SUMBER MARGA TELANG	240.337,00	206.880.000,00	4.800.000,00	156.656.462,00	44.883.800,00	206.340.262,00	780.075,00	3.350.087,00	-	3.350.087,00	4.130.162,00	-
401	10602688	SDN	SDN 1 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	116.923,00	541.760.000,00	10.800.000,00	292.447.882,00	238.524.600,00	541.772.482,00	104.441,00	20.046.850,00	20.046.850,00	-	104.441,00	-
402	10602659	SDN	SDN 2 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	17.202,00	844.320.000,00	20.400.000,00	502.784.672,00	321.095.400,00	844.280.072,00	57.130,00	30.230.160,00	29.565.720,00	664.440,00	721.570,00	-
403	10602689	SDN	SDN 3 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	535.749,00	155.680.000,00	9.000.000,00	100.947.666,00	46.268.000,00	156.215.666,00	83,00	3.507.317,00	-	3.507.317,00	3.507.400,00	-
404	10602885	SDN	SDN 4 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	566.732,00	281.920.000,00	8.400.000,00	217.344.598,00	56.736.500,00	282.481.098,00	5.634,00	2.264.450,00	2.264.450,00	-	5.634,00	-
405	10602339	SDN	SDN 5 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	6.141,00	245.440.000,00	12.000.000,00	169.296.580,00	64.077.800,00	245.374.380,00	71.761,00	2.685.900,00	1.203.900,00	1.482.000,00	1.553.761,00	-
406	10602653	SDN	SDN 6 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	59.389,00	304.000.000,00	9.600.000,00	197.759.689,00	96.699.700,00	304.059.389,00	-	3.834.000,00	3.834.000,00	-	-	-
407	10644814	SDN	SDN 7 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	70.645,00	512.160.000,00	12.900.000,00	350.998.226,00	148.331.600,00	512.229.826,00	819,00	16.293.675,00	16.293.675,00	-	819,00	-
408	10602884	SDN	SDN 8 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	403.240,00	519.040.000,00	18.000.000,00	361.594.577,00	138.221.300,00	517.815.877,00	1.627.363,00	1.858.100,00	-	1.858.100,00	3.485.463,00	-
409	10602638	SDN	SDN 9 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	775.594,00	205.600.000,00	9.630.000,00	144.703.588,00	51.789.200,00	206.122.788,00	252.806,00	2.937.950,00	2.480.600,00	457.350,00	710.156,00	-
410	10602801	SDN	SDN 10 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	242.776,00	486.720.000,00	23.250.000,00	304.990.286,00	155.202.000,00	483.442.286,00	3.520.490,00	1.424.000,00	-	1.424.000,00	4.944.490,00	-
411	10602640	SDN	SDN 11 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	97.222,00	241.440.000,00	8.891.000,00	141.686.222,00	84.880.000,00	235.457.222,00	6.080.000,00	2.483.650,00	-	2.483.650,00	8.563.650,00	-
412	10602952	SDN	SDN 12 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	248.432,00	470.880.000,00	10.800.000,00	334.196.142,00	126.131.100,00	471.127.242,00	1.190,00	11.745.720,00	11.745.720,00	-	1.190,00	-
413	10602951	SDN	SDN 13 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	306.619,00	337.920.000,00	9.000.000,00	231.631.234,00	97.570.200,00	338.201.434,00	25.185,00	3.237.000,00	3.237.000,00	-	25.185,00	-
414	10645935	SDN	SDN 14 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	7.668,00	243.040.000,00	8.400.000,00	159.791.410,00	74.856.200,00	243.047.610,00	58,00	4.205.000,00	3.705.000,00	500.000,00	500.058,00	-
415	10602895	SDN	SDN 15 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	432.191,00	244.160.000,00	6.600.000,00	163.797.461,00	74.194.000,00	244.591.461,00	730,00	2.358.900,00	2.208.900,00	150.000,00	150.730,00	-
416	10602691	SDN	SDN 16 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	415.583,00	369.600.000,00	12.000.000,00	270.640.934,00	87.373.900,00	370.014.834,00	749,00	7.886.500,00	7.886.500,00	-	749,00	-
417	10602925	SDN	SDN 17 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	11.848,00	235.360.000,00	4.800.000,00	187.331.542,00	43.240.202,00	235.371.744,00	104,00	4.655.490,00	4.655.490,00	-	104,00	-
418	10602936	SDN	SDN 18 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	468.382,00	265.280.000,00	8.200.000,00	171.120.982,00	86.404.500,00	265.725.482,00	22.900,00	5.001.125,00	5.001.125,00	-	22.900,00	-
419	10602938	SDN	SDN 19 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	15.272,00	470.720.000,00	13.200.000,00	334.391.013,00	122.074.100,00	469.665.113,00	1.070.159,00	8.732.775,00	3.873.000,00	4.859.775,00	5.929.934,00	-
420	10602924	SDN	SDN 20 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	102.690,00	445.440.000,00	13.200.000,00	309.511.852,00	119.309.600,00	442.021.452,00	3.521.238,00	8.171.725,00	2.480.000,00	5.691.725,00	9.212.963,00	-
421	10644810	SDN	SDN 21 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	1.168.054,00	392.480.000,00	12.600.000,00	247.309.114,00	123.490.000,00	383.399.114,00	10.248.940,00	5.194.500,00	5.194.500,00	-	10.248.940,00	-
422	10602946	SDN	SDN 22 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	40.007,00	415.040.000,00	13.200.000,00	271.869.207,00	130.010.800,00	415.080.007,00	-	3.390.000,00	3.390.000,00	-	-	-
423	10644811	SDN	SDN 23 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	527.993,00	484.160.000,00	10.200.000,00	363.751.974,00	110.736.000,00	484.687.974,00	19,00	9.599.730,00	7.312.000,00	2.287.730,00	2.287.749,00	-
424	10644812	SDN	SDN 24 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	1.379.646,00	535.200.000,00	15.600.000,00	337.025.404,00	183.571.600,00	536.197.004,00	382.642,00	6.894.100,00	6.894.100,00	-	382.642,00	-
425	10602827	SDN	SDN 25 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	398.487,00	262.560.000,00	14.300.000,00	167.875.608,00	80.384.000,00	262.559.608,00	398.879,00	5.755.100,00	5.619.100,00	136.000,00	534.879,00	-
426	10602935	SDN	SDN 26 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	667.056,00	252.640.000,00	8.400.000,00	175.779.103,00	69.127.500,00	253.306.603,00	453,00	5.616.200,00	5.616.200,00	-	453,00	-
427	10602826	SDN	SDN 27 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	220.617,00	270.880.000,00	10.800.000,00	170.488.958,00	89.592.900,00	270.881.858,00	218.759,00	5.469.725,00	5.469.725,00	-	218.759,00	-
428	10602830	SDN	SDN 28 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	171.056,00	160.960.000,00	8.400.000,00	123.451.200,00	29.238.800,00	161.090.000,00	41.056,00	3.430.705,00	-	3.430.705,00	3.471.761,00	-
429	10602832	SDN	SDN 29 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	18.580,00	285.760.000,00	7.800.000,00	201.425.580,00	68.233.000,00	277.458.580,00	8.320.000,00	4.252.650,00	4.252.650,00	-	8.320.000,00	-

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
430	10602886	SDN	SDN 30 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	207.003,00	253.120.000,00	9.000.000,00	169.728.575,00	74.581.600,00	253.310.175,00	16.828,00	4.274.179,00	1.806.271,00	2.467.908,00	2.484.736,00	
431	10602927	SDN	SDN 31 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	9.650,00	173.440.000,00	3.516.000,00	132.435.563,00	37.497.900,00	173.449.463,00	187,00	2.419.000,00	-	2.419.000,00	2.419.187,00	
432	10602823	SDN	SDN 32 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	329.915,00	576.640.000,00	16.800.000,00	360.961.394,00	198.360.340,00	576.121.734,00	848.181,00	17.232.150,00	-	17.232.150,00	18.080.331,00	
433	10602829	SDN	SDN 33 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	6.038,00	430.400.000,00	16.800.000,00	292.221.932,00	121.384.100,00	430.406.032,00	6,00	4.903.150,00	3.286.400,00	1.616.750,00	1.616.756,00	
434	10644809	SDN	SDN 34 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	14.959,00	370.880.000,00	10.800.000,00	234.385.311,00	123.949.600,00	369.134.911,00	1.760.048,00	5.370.363,00	5.370.363,00	-	1.760.048,00	
435	10644815	SDN	SDN 35 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	280.443,00	450.560.000,00	10.200.000,00	343.832.913,00	96.773.400,00	450.806.313,00	34.130,00	2.885.200,00	2.885.200,00	-	34.130,00	
436	10647742	SDN	SDN 36 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	752.843,00	85.920.000,00	6.600.000,00	58.820.543,00	21.252.300,00	86.672.843,00	-	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
437	69953661	SDN	SDN 37 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	10.645,00	102.720.000,00	400.000,00	63.396.645,00	38.934.000,00	102.730.645,00	-	1.543.500,00	1.543.500,00	-	-	
438	10602620	SDN	SDN 1 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	258.977,00	241.440.000,00	7.500.000,00	150.551.231,00	83.570.000,00	241.621.231,00	77.746,00	6.343.520,00	6.343.520,00	-	77.746,00	
439	10602586	SDN	SDN 2 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	73.827,00	153.760.000,00	7.200.000,00	113.557.651,00	32.353.500,00	153.111.151,00	722.676,00	972.375,00	-	972.375,00	1.695.051,00	
440	10600372	SDN	SDN 3 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	174.253,00	193.440.000,00	6.600.000,00	135.390.979,00	51.520.700,00	193.511.679,00	102.574,00	637.500,00	-	637.500,00	740.074,00	
441	10600320	SDN	SDN 4 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	135.443,00	138.560.000,00	300.000,00	108.439.743,00	29.893.800,00	138.633.543,00	61.900,00	2.869.370,00	2.869.370,00	-	61.900,00	
442	10600146	SDN	SDN 5 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	310.860,00	129.760.000,00	9.000.000,00	88.660.300,00	32.380.000,00	130.040.300,00	30.560,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.430.560,00	
443	10602467	SDN	SDN 6 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	144.308,00	226.080.000,00	6.000.000,00	171.728.381,00	48.492.600,00	226.220.981,00	3.327,00	420.000,00	420.000,00	-	3.327,00	
444	10602449	SDN	SDN 7 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	275.978,00	244.960.000,00	3.600.000,00	176.800.884,00	64.790.000,00	245.190.884,00	45.094,00	2.865.900,00	2.865.900,00	-	45.094,00	
445	10645910	SDN	SDN 8 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	666.141,00	257.440.000,00	10.800.000,00	186.055.441,00	61.250.700,00	258.106.141,00	-	1.602.500,00	1.602.500,00	-	-	
446	10602606	SDN	SDN 9 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	83.660,00	85.120.000,00	2.800.000,00	54.550.000,00	27.853.660,00	85.203.660,00	-	718.050,00	-	718.050,00	718.050,00	
447	10644813	SDN	SDN 10 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	114.607,00	132.000.000,00	8.400.000,00	97.780.980,00	25.842.000,00	132.022.980,00	91.627,00	2.186.634,00	-	2.186.634,00	2.278.261,00	
448	10602950	SDN	SDN 11 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	733.247,00	299.520.000,00	15.000.000,00	202.275.473,00	74.828.800,00	292.104.273,00	8.148.974,00	3.897.853,00	3.897.853,00	-	8.148.974,00	
449	10602325	SDN	SDN 12 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	16.074,00	176.320.000,00	9.600.000,00	121.189.988,00	45.528.400,00	176.318.388,00	17.686,00	1.133.500,00	-	1.133.500,00	1.151.186,00	
450	10602466	SDN	SDN 13 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	8.374,00	198.880.000,00	8.400.000,00	158.394.800,00	32.093.400,00	198.888.200,00	174,00	-	-	-	174,00	
451	10602362	SDN	SDN 14 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	76.327,00	130.080.000,00	8.400.000,00	97.947.427,00	23.808.875,00	130.156.302,00	25,00	1.683.816,00	1.683.816,00	-	25,00	
452	10602604	SDN	SDN 15 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	5.300,00	104.800.000,00	6.000.000,00	76.982.300,00	21.823.000,00	104.805.300,00	-	550.000,00	550.000,00	-	-	
453	10602514	SDN	SDN 16 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	151.845,00	170.880.000,00	6.000.000,00	132.209.246,00	32.822.200,00	171.031.446,00	399,00	679.542,00	679.542,00	-	399,00	
454	10600227	SDN	SDN 17 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	157.666,00	92.640.000,00	1.200.000,00	74.763.166,00	16.834.500,00	92.797.666,00	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	
455	10600336	SDN	SDN 18 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	64.312,00	48.000.000,00	1.200.000,00	34.964.312,00	11.900.000,00	48.064.312,00	-	270.000,00	270.000,00	-	-	
456	10602926	SDN	SDN 19 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	193.963,00	242.720.000,00	3.600.000,00	172.254.403,00	67.059.400,00	242.913.803,00	160,00	1.005.000,00	-	1.005.000,00	1.005.160,00	
457	10645879	SDN	SDN 20 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	91.816,00	243.200.000,00	8.400.000,00	176.493.900,00	58.310.000,00	243.203.900,00	87.916,00	1.527.500,00	-	1.527.500,00	1.615.416,00	
458	10646615	SDN	SDN 21 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	221.199,00	48.000.000,00	2.100.000,00	41.892.199,00	4.000.000,00	47.992.199,00	229.000,00	-	-	-	229.000,00	
459	10648073	SDN	SDN 22 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	12.713,00	238.080.000,00	14.400.000,00	178.198.513,00	45.494.200,00	238.092.713,00	-	4.554.000,00	4.554.000,00	-	-	
460	69756058	SDN	SDN 23 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	66.602,00	48.000.000,00	-	44.355.502,00	3.711.100,00	48.066.602,00	-	-	-	-	-	
461	69943387	SDN	SDN 24 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	108.353,00	146.880.000,00	-	101.238.353,00	45.750.000,00	146.988.353,00	-	1.523.500,00	1.523.500,00	-	-	
462	10602837	SDN	SDN 1 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	660.594,00	57.920.000,00	3.600.000,00	43.790.500,00	11.190.000,00	58.580.500,00	94,00	415.770,00	-	415.770,00	415.864,00	
463	10645889	SDN	SDN 2 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	14.239,00	100.160.000,00	10.800.000,00	78.910.000,00	10.321.700,00	100.031.700,00	142.539,00	911.780,00	-	911.780,00	1.054.319,00	
464	10602460	SDN	SDN 3 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	3.133.942,00	250.240.000,00	3.600.000,00	212.964.000,00	36.809.900,00	253.373.900,00	42,00	-	-	-	42,00	
465	10602403	SDN	SDN 4 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	185.511,00	123.360.000,00	7.200.000,00	92.018.500,00	24.160.000,00	123.378.500,00	167.011,00	-	-	-	167.011,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
466	10644689	SDN	SDN 5 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	233.008,00	135.520.000,00	5.400.000,00	109.930.908,00	20.422.100,00	135.753.008,00	-	-	-	-	-	-
467	10602690	SDN	SDN 6 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	1.077.299,00	111.520.000,00	-	91.133.999,00	21.463.300,00	112.597.299,00	-	520.000,00	-	520.000,00	520.000,00	-
468	10644690	SDN	SDN 7 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	202.884,00	105.280.000,00	7.200.000,00	79.722.800,00	18.560.000,00	105.482.800,00	84,00	-	-	-	84,00	-
469	10602417	SDN	SDN 8 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	142.979,00	132.000.000,00	3.600.000,00	107.705.679,00	20.837.300,00	132.142.979,00	-	-	-	-	-	-
470	10644691	SDN	SDN 9 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	603.953,00	131.200.000,00	4.800.000,00	100.746.753,00	26.257.200,00	131.803.953,00	-	-	-	-	-	-
471	10645882	SDN	SDN 10 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	101.029,00	58.560.000,00	3.600.000,00	43.504.200,00	11.556.800,00	58.661.000,00	29,00	-	-	-	29,00	-
472	10645865	SDN	SDN 11 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	394.556,00	99.040.000,00	8.400.000,00	78.105.200,00	12.929.300,00	99.434.500,00	56,00	-	-	-	56,00	-
473	10645864	SDN	SDN 12 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	1.585.072,00	65.760.000,00	-	50.252.772,00	17.092.300,00	67.345.072,00	-	-	-	-	-	-
474	10644692	SDN	SDN 13 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	189.390,00	196.640.000,00	8.000.000,00	153.640.000,00	35.000.000,00	196.640.000,00	189.390,00	-	-	-	189.390,00	-
475	10645592	SDN	SDN 14 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	462.364,00	144.320.000,00	-	115.662.364,00	29.120.000,00	144.782.364,00	-	-	-	-	-	-
476	10644693	SDN	SDN 15 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	1.775.817,00	212.160.000,00	4.800.000,00	167.205.000,00	41.930.000,00	213.935.000,00	817,00	1.772.500,00	-	1.772.500,00	1.773.317,00	-
477	10644698	SDN	SDN 16 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	406.102,00	60.960.000,00	4.200.000,00	43.991.302,00	3.674.800,00	51.866.102,00	9.500.000,00	-	-	-	9.500.000,00	-
478	10644886	SDN	SDN 17 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	130.810,00	70.880.000,00	2.400.000,00	63.037.690,00	5.485.810,00	70.923.500,00	87.310,00	-	-	-	87.310,00	-
479	10644696	SDN	SDN 18 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	182.905,00	174.080.000,00	10.800.000,00	125.377.750,00	36.483.400,00	172.661.150,00	1.601.755,00	1.378.900,00	-	1.378.900,00	2.980.655,00	-
480	10644889	SDN	SDN 19 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	109.009,00	101.600.000,00	4.200.000,00	78.488.909,00	19.020.100,00	101.709.009,00	-	-	-	-	-	-
481	10645909	SDN	SDN 20 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	182.695,00	99.520.000,00	8.400.000,00	71.167.900,00	20.134.100,00	99.702.000,00	695,00	-	-	-	695,00	-
482	10647743	SDN	SDN 21 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	336.746,00	116.320.000,00	4.800.000,00	101.072.750,00	10.783.100,00	116.655.850,00	896,00	1.138.000,00	1.138.000,00	-	896,00	-
483	69756060	SDN	SDN 22 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	18.538.253,00	222.720.000,00	3.600.000,00	182.776.253,00	54.882.000,00	241.258.253,00	-	-	-	-	-	-
484	69756061	SDN	SDN 23 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	209.676,00	199.840.000,00	-	153.254.900,00	46.571.100,00	199.826.000,00	223.676,00	870.600,00	745.600,00	125.000,00	348.676,00	-
485	69756062	SDN	SDN 24 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	237.486,00	129.280.000,00	7.200.000,00	96.486.600,00	25.830.400,00	129.517.000,00	486,00	-	-	-	486,00	-
JUMLAH SDN					371.668.502,00	77.113.440.000,00	2.933.320.817,00	55.722.597.633,00	18.491.029.478,00	77.146.947.928,00	338.160.574,00	926.466.837,00	532.439.940,00	394.026.897,00	732.187.471,00	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)																
1	10644929	SMPN	SMPN 1 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	335.471,00	360.600.000,00	16.800.000,00	266.690.066,00	77.105.700,00	360.595.766,00	339.705,00	4.087.911,00	4.087.911,00	-	339.705,00	-
2	10644979	SMPN	SMPN 2 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	62.386,00	118.800.000,00	13.200.000,00	76.562.247,00	28.949.400,00	118.711.647,00	150.739,00	1.266.000,00	1.110.000,00	156.000,00	306.739,00	-
3	69946736	SMPN	SMPN 3 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	81.709,00	105.600.000,00	4.800.000,00	77.035.983,00	23.845.300,00	105.681.283,00	426,00	1.797.700,00	1.420.500,00	377.200,00	377.626,00	-
4	69966238	SMPN	SMPN 4 AIR KUMBANG	AIR KUMBANG	71.936,00	66.000.000,00	400.000,00	53.745.150,00	11.926.600,00	66.071.750,00	186,00	375.199,00	375.199,00	-	186,00	-
5	10644940	SMPN	SMPN 1 AIR SALEH	AIR SALEH	361.768,00	439.400.000,00	23.684.000,00	280.620.352,00	135.030.400,00	439.334.752,00	427.016,00	8.383.750,00	2.622.000,00	5.761.750,00	6.188.766,00	-
6	10644952	SMPN	SMPN 2 AIR SALEH	AIR SALEH	3.138.069,00	334.000.000,00	18.050.000,00	231.023.224,00	87.900.300,00	336.973.524,00	164.545,00	3.003.725,00	418.725,00	2.585.000,00	2.749.545,00	-
7	10644953	SMPN	SMPN 3 AIR SALEH	AIR SALEH	85.662,00	243.000.000,00	10.800.000,00	166.425.562,00	65.860.100,00	243.085.662,00	-	7.025.841,00	-	7.025.841,00	7.025.841,00	-
8	10646189	SMPN	SMPN 4 AIR SALEH	AIR SALEH	61.906,00	325.400.000,00	12.240.000,00	227.421.470,00	84.605.400,00	324.266.870,00	1.195.036,00	7.070.175,00	2.575.000,00	4.495.175,00	5.690.211,00	-
9	10602554	SMPN	SMPN 1 BANYUASIN I	BANYUASIN I	775.037,00	648.000.000,00	32.990.000,00	472.474.417,00	142.926.500,00	648.390.917,00	384.120,00	3.008.750,00	3.008.750,00	-	384.120,00	-
10	10644930	SMPN	SMPN 2 BANYUASIN I	BANYUASIN I	17.043.373,00	531.000.000,00	43.380.000,00	377.679.036,00	126.723.500,00	547.782.536,00	260.837,00	9.834.157,00	6.698.357,00	3.135.800,00	3.396.637,00	-
11	10646344	SMPN	SMPN 3 BANYUASIN I	BANYUASIN I	1.065.925,00	305.600.000,00	6.600.000,00	234.442.585,00	65.075.000,00	306.117.585,00	548.340,00	6.902.690,00	2.635.000,00	4.267.690,00	4.816.030,00	-
12	10647784	SMPN	SMPN 4 BANYUASIN I	BANYUASIN I	268.220,00	386.600.000,00	6.000.000,00	275.130.989,00	104.456.600,00	385.587.589,00	1.280.631,00	2.677.400,00	692.400,00	1.985.000,00	3.265.631,00	-
13	69966125	SMPN	SMPN 5 BANYUASIN I	BANYUASIN I	21.975,00	68.800.000,00	3.620.000,00	43.523.150,00	21.062.919,00	68.206.069,00	615.906,00	1.043.500,00	1.043.500,00	-	615.906,00	-
14	10644931	SMPN	SMPN 1 BANYUASIN II	BANYUASIN II	171.054.513,00	785.000.000,00	10.800.000,00	734.211.500,00	206.742.000,00	654.753.500,00	5.204.013,00	12.088.004,00	-	12.088.004,00	10.480.104,00	-

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
15	10645972	SMPN	SMPN 2 BANYUASIN II	BANYUASIN II	91.122,00	223.000.000,00	23.100.000,00	162.494.200,00	36.054.829,00	221.649.029,00	1.442.093,00	4.613.939,00	3.768.939,00	845.000,00	2.287.093,00	
16	10646312	SMPN	SMPN 3 BANYUASIN II	BANYUASIN II	66.572,00	312.000.000,00	11.100.000,00	236.506.572,00	64.460.000,00	312.066.572,00	-	4.861.000,00	-	4.861.000,00	4.861.000,00	
17	69946435	SMPN	SMPN 4 BANYUASIN II	BANYUASIN II	183.544,00	67.600.000,00	5.750.000,00	57.421.100,00	4.500.000,00	67.671.100,00	112.444,00	222.000,00	-	222.000,00	334.444,00	
18	10602556	SMPN	SMPN 1 BANYUASIN III	BANYUASIN III	743.375,00	765.600.000,00	90.000.000,00	543.603.075,00	131.480.200,00	765.083.275,00	1.260.100,00	26.054.578,00	26.054.578,00	-	1.260.100,00	
19	10602529	SMPN	SMPN 2 BANYUASIN III	BANYUASIN III	22.122.483,00	588.000.000,00	22.100.000,00	513.222.989,00	74.724.000,00	610.046.989,00	75.494,00	30.995.460,00	30.995.460,00	-	75.494,00	
20	10644933	SMPN	SMPN 3 BANYUASIN III	BANYUASIN III	295.101,00	60.000.000,00	7.800.000,00	35.100.000,00	17.100.000,00	60.000.000,00	295.101,00	450.000,00	-	450.000,00	745.101,00	
21	10648060	SMPN	SMPN 4 BANYUASIN III	BANYUASIN III	172.845,00	270.600.000,00	24.735.000,00	163.705.145,00	82.332.270,00	270.772.415,00	430,00	9.621.232,00	5.688.244,00	3.932.988,00	3.933.418,00	
22	69946174	SMPN	SMPN 5 BANYUASIN III	BANYUASIN III	325.464,00	225.800.000,00	3.600.000,00	143.978.463,00	78.547.001,00	226.125.464,00	-	4.540.277,00	2.871.218,00	1.669.059,00	1.669.059,00	
23	10644390	SMPN	SMPN 1 BETUNG	BETUNG	819.835,00	644.000.000,00	12.450.000,00	472.542.515,00	159.818.600,00	644.811.115,00	8.720,00	9.021.150,00	9.021.150,00	-	8.720,00	
24	10644938	SMPN	SMPN 2 BETUNG	BETUNG	361.749,00	219.400.000,00	-	158.765.250,00	60.466.000,00	219.231.250,00	530.499,00	3.179.185,00	-	3.179.185,00	3.709.684,00	
25	69756064	SMPN	SMPN 3 BETUNG	BETUNG	116.435,00	199.400.000,00	-	157.061.000,00	42.423.000,00	199.484.000,00	32.435,00	936.134,00	-	936.134,00	968.569,00	
26	10644951	SMPN	SMPN 1 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	555.419,00	536.000.000,00	17.200.000,00	445.381.990,00	73.928.000,00	536.509.990,00	45.429,00	8.414.332,00	-	8.414.332,00	8.459.761,00	
27	10646048	SMPN	SMPN 2 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	103.330,00	118.000.000,00	3.840.000,00	89.719.270,00	24.529.800,00	118.089.070,00	14.260,00	1.451.500,00	415.000,00	1.036.500,00	1.050.760,00	
28	10646181	SMPN	SMPN 3 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	566.431,00	184.200.000,00	6.600.000,00	133.679.331,00	44.487.100,00	184.766.431,00	-	3.310.737,00	-	3.310.737,00	3.310.737,00	
29	10647693	SMPN	SMPN 4 MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA	107.192,00	130.200.000,00	6.000.000,00	106.580.292,00	17.706.900,00	130.287.192,00	20.000,00	1.229.400,00	-	1.229.400,00	1.249.400,00	
30	10644941	SMPN	SMPN 1 MUARA PADANG	MUARA PADANG	401.192,00	321.200.000,00	15.600.000,00	211.369.740,00	94.631.200,00	321.600.940,00	252,00	4.911.400,00	4.653.000,00	258.400,00	258.652,00	
31	10644942	SMPN	SMPN 2 MUARA PADANG	MUARA PADANG	283.126,00	372.200.000,00	13.200.000,00	272.525.318,00	82.868.900,00	368.594.218,00	3.888.908,00	3.887.045,00	3.887.045,00	-	3.888.908,00	
32	10644943	SMPN	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	246.485,00	283.800.000,00	9.600.000,00	186.631.000,00	87.815.000,00	284.046.000,00	485,00	6.177.174,00	-	6.177.174,00	6.177.659,00	
33	10644944	SMPN	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	164.299,00	391.200.000,00	14.400.000,00	285.900.000,00	90.900.000,00	391.200.000,00	164.299,00	8.000.908,00	-	8.000.908,00	8.165.207,00	
34	10644945	SMPN	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	555.998,00	204.200.000,00	3.000.000,00	152.515.998,00	49.240.000,00	204.755.998,00	-	2.682.136,00	1.791.226,00	890.910,00	890.910,00	
35	10644946	SMPN	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	566.281,00	225.400.000,00	8.400.000,00	167.073.062,00	50.453.219,00	225.926.281,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	
36	69946737	SMPN	SMPN 5 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	46.274,00	60.800.000,00	-	48.800.000,00	12.000.000,00	60.800.000,00	46.274,00	-	-	-	46.274,00	
37	69946984	SMPN	SMPN 6 MUARA SUGIHAN	MUARA SUGIHAN	60.961,00	60.000.000,00	1.200.000,00	45.865.961,00	12.973.500,00	60.039.461,00	21.500,00	60.000,00	-	60.000,00	81.500,00	
38	10644947	SMPN	SMPN 1 MUARA TELANG	MUARA TELANG	5.067.745,00	536.800.000,00	17.520.000,00	347.344.830,00	171.325.300,00	536.190.130,00	5.677.615,00	18.031.877,00	16.183.377,00	1.848.500,00	7.526.115,00	
39	10646368	SMPN	SMPN 2 MUARA TELANG	MUARA TELANG	541.353,00	226.600.000,00	10.800.000,00	153.215.800,00	62.491.200,00	226.507.000,00	634.353,00	4.302.000,00	-	4.302.000,00	4.936.353,00	
40	10647941	SMPN	SMPN 3 MUARA TELANG	MUARA TELANG	217.996,00	101.800.000,00	3.000.000,00	73.656.496,00	25.336.900,00	101.993.396,00	24.600,00	-	-	-	24.600,00	
41	10644934	SMPN	SMPN 1 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	343.249,00	397.200.000,00	12.400.000,00	271.448.149,00	113.694.600,00	397.542.749,00	500,00	6.594.660,00	-	6.594.660,00	6.595.160,00	
42	10644935	SMPN	SMPN 2 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	380.568,00	406.800.000,00	21.600.000,00	329.969.468,00	55.580.100,00	407.149.568,00	31.000,00	5.348.550,00	-	5.348.550,00	5.379.550,00	
43	10644936	SMPN	SMPN 3 PULAU RIMAU	PULAU RIMAU	3.078.459,00	299.400.000,00	15.293.451,00	235.932.271,00	51.251.163,00	302.476.885,00	1.574,00	5.157.810,00	5.157.810,00	-	1.574,00	
44	10644939	SMPN	SMPN 1 RAMBUTAN	RAMBUTAN	1.155.166,00	706.400.000,00	41.600.000,00	489.762.956,00	175.992.000,00	707.354.956,00	200.210,00	7.925.700,00	7.925.700,00	-	200.210,00	
45	10644985	SMPN	SMPN 2 RAMBUTAN	RAMBUTAN	418.045,00	357.600.000,00	10.755.000,00	261.480.199,00	85.757.000,00	357.992.199,00	25.846,00	5.998.750,00	4.596.250,00	1.402.500,00	1.428.346,00	
46	10645962	SMPN	SMPN 3 RAMBUTAN	RAMBUTAN	16.106,00	97.200.000,00	12.600.000,00	62.612.406,00	21.992.500,00	97.204.906,00	11.200,00	1.214.800,00	630.000,00	584.800,00	596.000,00	
47	10644954	SMPN	SMPN 1 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	37.731.773,00	254.800.000,00	8.700.000,00	164.897.236,00	113.929.773,00	287.527.009,00	5.004.764,00	3.693.589,00	2.671.500,00	1.022.089,00	6.026.853,00	
48	10645824	SMPN	SMPN 2 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	62.477,00	83.200.000,00	18.000.000,00	47.400.000,00	17.000.000,00	82.400.000,00	862.477,00	-	-	-	862.477,00	
49	10645110	SMPN	SMPN 3 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	377.110,00	318.800.000,00	42.750.000,00	219.484.400,00	56.565.600,00	318.800.000,00	377.110,00	8.343.600,00	-	8.343.600,00	8.720.710,00	
50	10644652	SMPN	SMPN 4 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	229.917,00	155.800.000,00	10.600.000,00	112.600.200,00	32.599.800,00	155.800.000,00	229.917,00	984.000,00	-	984.000,00	1.213.917,00	

NO	NPSN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA				SALDO AKHIR	NON ANGGARAN		SALDO PAJAK	TOTAL SALDO KAS AKHIR	KET
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL REALISASI		PENERIMAAN PAJAK	PENGELUARAN PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (8+9+10)	12 = (6+7) - 11	13	14	15 = (13-14)	16 = (12+15)	17
51	10645897	SMPN	SMPN 5 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	11.543.272,00	132.400.000,00	6.100.000,00	93.694.388,00	44.124.000,00	143.918.388,00	24.884,00	872.500,00	872.500,00	-	24.884,00	
52	10646284	SMPN	SMPN 6 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	98.610,00	181.600.000,00	8.400.000,00	141.311.053,00	31.987.400,00	181.698.453,00	157,00	1.055.000,00	-	1.055.000,00	1.055.157,00	
53	69966123	SMPN	SMPN 7 RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR	19.460,00	111.800.000,00	6.400.000,00	94.033.360,00	11.386.100,00	111.819.460,00	-	360.000,00	360.000,00	-	-	
54	10602561	SMPN	SMPN 1 SEMBAWA	SEMBAWA	43.604.092,00	927.600.000,00	31.800.000,00	670.515.728,00	268.849.100,00	971.164.828,00	39.264,00	37.436.115,00	37.436.115,00	-	39.264,00	
55	10602544	SMPN	SMPN 2 SEMBAWA	SEMBAWA	183.587,00	675.800.000,00	22.650.000,00	517.808.911,00	135.524.600,00	675.983.511,00	76,00	16.301.880,00	16.301.880,00	-	76,00	
56	10646188	SMPN	SMPN 3 SEMBAWA	SEMBAWA	19.114.026,00	108.400.000,00	18.800.000,00	64.776.426,00	42.889.200,00	126.465.626,00	1.048.400,00	864.000,00	-	864.000,00	1.912.400,00	
57	10644937	SMPN	SMPN 1 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	950.339,00	403.000.000,00	17.100.000,00	281.005.679,00	105.843.200,00	403.948.879,00	1.460,00	7.574.921,00	855.000,00	6.719.921,00	6.721.381,00	
58	10647507	SMPN	SMPN 2 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	85.526,00	168.600.000,00	11.700.000,00	119.840.526,00	37.145.000,00	168.685.526,00	-	1.811.701,00	-	1.811.701,00	1.811.701,00	
59	69888890	SMPN	SMPN 3 SUAK TAPEH	SUAK TAPEH	186.288,00	255.200.000,00	12.000.000,00	191.550.288,00	51.449.313,00	254.999.601,00	386.687,00	4.437.188,00	3.079.688,00	1.357.500,00	1.744.187,00	
60	10645991	SMPN	SMPN 1 SUMBER MARGA TELAN	SUMBER MARGA TELANG	223.370,00	102.200.000,00	1.200.000,00	81.384.170,00	19.839.200,00	102.423.370,00	-	765.628,00	-	765.628,00	765.628,00	
61	10644950	SMPN	SMPN 2 SUMBER MARGA TELAN	SUMBER MARGA TELANG	1.811.186,00	182.000.000,00	12.300.000,00	129.031.400,00	39.979.300,00	181.310.700,00	2.500.486,00	1.727.227,00	-	1.727.227,00	4.227.713,00	
62	10647414	SMPN	SMPN 3 SUMBER MARGA TELAN	SUMBER MARGA TELANG	5.407.123,00	181.200.000,00	7.200.000,00	139.219.723,00	40.162.400,00	186.582.123,00	25.000,00	1.230.300,00	-	1.230.300,00	1.255.300,00	
63	10602557	SMPN	SMPN 1 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	27.102.925,00	915.000.000,00	26.400.000,00	690.865.370,00	223.965.000,00	941.230.370,00	872.555,00	34.986.670,00	34.986.670,00	-	872.555,00	
64	10644653	SMPN	SMPN 2 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	37.606.558,00	158.600.000,00	17.422.500,00	104.604.506,00	70.178.900,00	192.205.906,00	4.000.652,00	2.471.892,00	550.700,00	1.921.192,00	5.921.844,00	
65	69946433	SMPN	SMPN 3 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	46.487,00	199.200.000,00	10.800.000,00	131.482.000,00	56.916.883,00	199.198.883,00	47.604,00	4.058.631,00	1.140.000,00	2.918.631,00	2.966.235,00	
66	69966124	SMPN	SMPN 4 TALANG KELAPA	TALANG KELAPA	73.556,00	116.400.000,00	10.200.000,00	78.316.256,00	27.957.300,00	116.473.556,00	-	2.037.500,00	1.550.000,00	487.500,00	487.500,00	
67	10644948	SMPN	SMPN 1 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	832.251,00	442.800.000,00	25.200.000,00	290.848.273,00	126.773.100,00	442.821.373,00	810.878,00	5.908.245,00	-	5.908.245,00	6.719.123,00	
68	10602562	SMPN	SMPN 2 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	1.598.007,00	520.800.000,00	42.880.000,00	357.309.383,00	121.139.000,00	521.328.383,00	1.069.624,00	10.659.991,00	8.589.791,00	2.070.200,00	3.139.824,00	
69	10644654	SMPN	SMPN 3 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	165.701,00	179.800.000,00	4.500.000,00	127.216.901,00	48.248.800,00	179.965.701,00	-	3.851.500,00	1.125.000,00	2.726.500,00	2.726.500,00	
70	10647473	SMPN	SMPN 4 TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO	106.428,00	119.000.000,00	13.380.000,00	84.288.528,00	21.437.400,00	119.105.928,00	500,00	-	-	-	500,00	
71	10645894	SMPN	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	334.681,00	309.400.000,00	10.800.000,00	228.596.081,00	70.338.600,00	309.734.681,00	-	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
72	10646306	SMPN	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	5.293.554,00	243.400.000,00	9.600.000,00	175.065.954,00	63.843.600,00	248.509.554,00	184.000,00	4.514.657,00	-	4.514.657,00	4.698.657,00	
73	69978379	SMPN	SMPN 3 TUNGKAL ILIR	TUNGKAL ILIR	-	55.600.000,00	900.000,00	47.700.000,00	7.000.000,00	55.600.000,00	-	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	
JUMLAH SMPN					430.290.454,00	21.812.600.000,00	1.056.389.951,00	15.917.697.317,00	5.226.142.570,00	22.200.229.838,00	42.660.616,00	416.550.358,00	259.845.183,00	156.705.175,00	199.365.791,00	
TOTAL SDN + SMPN					801.958.956,00	98.926.040.000,00	3.989.710.768,00	71.640.294.950,00	23.717.172.048,00	99.347.177.766,00	380.821.190,00	1.343.017.195,00	792.285.123,00	550.732.072,00	931.553.262,00	

RINCIAN BELANJA HIBAH UANG PPKD TAHUN 2018

LAMPIRAN : 2

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Belanja Hibah	87.356.900.170,00	85.416.433.683,00	1.940.466.487,00	97,78
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	73.667.789.170,00	73.128.733.683,00	539.055.487,00	99,27
Hibah Kepada Pemerintah Pusat	73.667.789.170,00	73.128.733.683,00	539.055.487,00	99,27
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan	20.154.105.000,00	19.955.795.750,00	198.309.250,00	99,02
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Banyuasin	43.113.684.170,00	43.112.533.933,00	1.150.237,00	100,00
- Polres Banyuasin	8.500.000.000,00	8.160.404.000,00	339.596.000,00	96,00
- Kodim Muba	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	100,00
- Kodim Banyuasin Karya Bhakti TNI Gelebak Dalam Kec. Rambutan	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	3.565.500.000,00	3.565.500.000,00	-	100,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	3.565.500.000,00	3.565.500.000,00	-	100,00
- Badan Narkotika (BNK) Kab. Banyuasin	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
- Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Banyuasin	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Banyuasin	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banyuasin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banyuasin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
- Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kab. Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
- Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Banyuasin	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
- Pramuka Kwartir Kab. Banyuasin	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00
- Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kab. Banyuasin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
- Lembaga Pembina Adat (LPA) Kab. Banyuasin	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
- Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kab. Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kab. Banyuasin	177.656.000,00	177.656.000,00	-	100,00
- Ikatan Cendekiawan Muslim Se Indonesia (ICMI) Kab. Banyuasin	337.844.000,00	337.844.000,00	-	100,00
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	9.838.611.000,00	8.437.200.000,00	1.401.411.000,00	85,76
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	9.838.611.000,00	8.437.200.000,00	1.401.411.000,00	85,76
- Sharing Sekolah Gratis	1.321.011.000,00	-	1.321.011.000,00	0,00
- BOP PAUD	8.517.600.000,00	8.437.200.000,00	80.400.000,00	99,06
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	285.000.000,00	285.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Banyuasin I	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Nurul Huda Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Banyuasin III	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Nurul Fadillah Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Betung	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Al-Hidayah Desa Sni Kembang Kec. Betung	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Rantau Bayur	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Nurul Iman Desa Srijaya Kec. Rantau Bayur	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Pulau Rimau	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid At-Taqwa Desa Sumber Mulyo Kec. Pulau Rimau	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Talang Kelapa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Babul Jannah Kelurahan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Rambutan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Pembela Agung Al-Husna Desa Pangkalan Glebak Kec. Rambutan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Tungal Ilir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Al-Muttaqin Dsn III Desa Karang Anyar Kec. Tungal Ilir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Tanjung Lago	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Jaron Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Sembawa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Nurul Iman Desa Lima Kec. Sembawa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Suak Tapeh	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Jamik Desa Tanjung Laut Kec. Suak Tapeh	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Banyuasin II	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Nurul Fallah Desa Sungai IV Kec. Banyuasin II	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Makarti Jaya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Nurul Hikmah Desa Upang Makmur Kec. Makarti Jaya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Muara Padang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Nur Istiqomah Desa Muara Padang Kec. Muara Padang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Muara Sugihar	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Al-Hidayah Desa Rejosari Kec. Muara Sugihar	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Muara Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Al-Muhajirin Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Air Salek	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid Darussalam Dsn I Kandang Jaya Desa Upang Kec. Air Salek	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
- Masjid At-Taqwa Desa Muara Telang Kec. Sumber Marga Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Kecamatan Air Kumbang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00

**RINCIAN BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN
PER 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN: 3

NO	URAIAN	REALISASI
1	Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat	7.659.884.669,30
	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	5.042.732.959,00
	Penyelenggaraan PPD-AKN Bannyuasin	5.042.732.959,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.422.551.710,30
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	2.422.551.710,30
	Sekretariat Daerah	194.600.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Penerima Dana Bantuan	194.600.000,00
2	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	68.618.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan	25.618.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.813.000,00
	Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil Pertanian	9.805.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43.000.000,00
	Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	43.000.000,00
3	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	2.373.786.100,00
	Dinas Perikanan	1.324.492.100,00
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	308.977.100,00
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	515.317.000,00
	Penerapan Teknologi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	199.270.000,00
	Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	300.928.000,00
	Dinas Pertanian	1.049.294.000,00
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	548.880.000,00
	Pengolahan Lahan dan Air	283.210.000,00
	Pengembangan Tanaman Holtikultura	39.884.000,00
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	177.320.000,00
4	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	3.838.992.750,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.838.992.750,00
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	3.838.992.750,00
5	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang	7.722.435.409,13
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.122.835.409,13
	Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum	9.847.350,00
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	7.112.988.059,13
	Sekretariat Daerah	599.600.000,00
	Implementasi Pengamalan Agama melalui Safari Ramadan dan Tarawih Keliling	128.500.000,00
	Pelaksanaan STQ/MTQ	293.500.000,00
	Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Ibadah Haji	177.600.000,00
6	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	1.174.274.100,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.174.274.100,00
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	1.174.274.100,00
7	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidik	1.172.777.977,45
	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.172.777.977,45
	Pembangunan Gedung Sekolah	111.483.950,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	126.497.350,00
	Penambahan Ruang Guru Sekolah	9.918.400,00
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	891.739.977,45
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)	9.723.850,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	23.414.450,00
8	Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Desa	6.947.905.900,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.965.426.150,00
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	4.568.560.150,00
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	396.866.000,00
	Dinas Perhubungan	1.982.479.750,00
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.982.479.750,00
9	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	387.580.000,00

NO	URAIAN	REALISASI
	Dinas Kesehatan	172.540.000,00
	Pemilihan Pegawai Teladan	125.740.000,00
	Pemilihan Posyandu Terbaik, Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan Kader Remaja Sehat	25.000.000,00
	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	12.300.000,00
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	9.500.000,00
	Dinas Sosial	130.690.000,00
	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bagi Penyandang Cacat	123.190.000,00
	Pelaksanaan Seleksi Karang Taruna dan PSM	4.500.000,00
	Pelaksanaan Seleksi Organisasi Sosial	3.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.500.000,00
	Sosialisasi Gerakan PKK	3.500.000,00
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.500.000,00
	Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan	12.000.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	50.000.000,00
	Sosialisasi Hukum dan Pencegahan KDRT	15.500.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.350.000,00
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	3.350.000,00
TOTAL REALISASI		31.346.254.905,88

259.849.000,00

DAFTAR BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	BELANJA MODAL YG TIDAK MENJADI ASET				TOTAL BM YG TIDAK MENJADI ASET 9=(5+6+7+8)	TOTAL BM MENJADI ASET 10=(4-9)
				PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	EXTRACONTABLE	HUTANG 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PENDIDIKAN	31.954.257.400,00	31.403.500.548,00	-	-	1.594.880.794,00	-	1.594.880.794,00	29.808.619.754,00
2	KESEHATAN	19.972.375.060,00	19.078.641.595,38	-	-	473.475.702,56	-	473.475.702,56	18.605.165.892,82
3	RSUD	7.279.496.111,00	5.082.016.778,60	-	-	67.598.879,00	311.087.110,60	378.685.989,60	4.703.330.789,00
4	PERKIMTAM	153.300.000,00	153.300.000,00	-	-	-	-	-	153.300.000,00
5	PU TATA RUANG	1.109.100.000,00	1.034.455.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1.031.955.000,00
6	BNPBD,KESBANG	10.284.520.000,00	10.005.694.040,00	-	-	34.485.000,00	-	34.485.000,00	9.971.209.040,00
7	SAT POL PP	55.570.000,00	55.570.000,00	-	-	19.520.000,00	-	19.520.000,00	36.050.000,00
8	DINSOS	61.500.000,00	61.500.000,00	-	-	-	-	-	61.500.000,00
9	DISNAKERTRAN	98.530.511,00	95.833.040,00	-	-	-	-	-	95.833.040,00
10	DISKETPAN	55.868.965,33	55.468.000,00	-	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	52.668.000,00
11	DLH	339.616.174,67	338.592.000,00	-	-	16.050.000,00	-	16.050.000,00	322.542.000,00
12	DUK CAPIL	606.624.950,00	603.908.000,00	-	-	1.962.500,00	-	1.962.500,00	601.945.500,00
13	DPMD	104.550.000,00	104.200.000,00	-	-	900.000,00	-	900.000,00	103.300.000,00
14	DPPKB PPKA	97.000.000,00	91.450.000,00	-	-	15.325.000,00	-	15.325.000,00	76.125.000,00
15	DISHUB	299.500.000,00	297.500.000,00	-	-	-	-	-	297.500.000,00
16	DISKOMINFO	543.450.000,00	514.953.700,00	-	-	-	-	-	514.953.700,00
17	KO,UKM ,PERINDAG	874.649.661,31	866.212.000,00	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	836.212.000,00
18	DPKD	20.000.000,00	19.956.500,00	-	-	-	-	-	19.956.500,00
19	PERIKANAN	240.444.850,00	96.100.000,00	-	-	42.750.000,00	-	42.750.000,00	53.350.000,00
20	PERTANIAN	21.000.000,00	20.950.000,00	-	-	900.000,00	-	900.000,00	20.050.000,00
21	SETDAH	5.900.117.270,00	5.752.462.503,00	-	-	169.660.200,00	-	169.660.200,00	5.582.802.303,00
22	SET DPRD	885.637.711,33	846.902.000,00	-	-	45.180.000,00	-	45.180.000,00	801.722.000,00
23	DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	136.600.000,00	123.245.000,00	-	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	119.645.000,00
25	BANYUASIN II	115.750.000,00	112.645.000,00	-	-	3.175.000,00	-	3.175.000,00	109.470.000,00
26	BETUNG	59.500.000,00	59.283.818,00	-	-	-	-	-	59.283.818,00
27	RANTAU BAYUR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
28	PULAU RIMAU	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	750.000,00	-	750.000,00	17.000.000,00
29	TALANG KELAPA	110.100.000,00	110.028.000,00	-	-	9.240.000,00	-	9.240.000,00	100.788.000,00
30	RAMBUTAN	128.855.000,00	128.780.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.580.000,00
31	TUNGKAL ILIR	7.000.000,00	6.991.818,00	-	-	-	-	-	6.991.818,00
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	14.450.000,00	14.371.681,00	-	-	-	-	-	14.371.681,00
36	MAKARTI JAYA	92.750.000,00	92.750.000,00	-	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00	81.750.000,00
37	MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	33.764.000,00	31.639.000,00	-	-	-	-	-	31.639.000,00
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	14.775.000,00	14.775.000,00	-	-	-	-	-	14.775.000,00
43	SELAT PENUGUAN	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	13.500.000,00
44	KARANG AGUNG ILIR	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	-	-	-	12.200.000,00
45	INSPEKTORAT	607.200.000,00	554.216.962,00	-	-	-	-	-	554.216.962,00
46	BAPPEDA	172.000.000,00	165.039.000,00	-	-	-	-	-	165.039.000,00
47	BPKAD	1.381.198.200,00	1.350.538.800,00	-	-	32.970.000,00	-	32.970.000,00	1.317.568.800,00
48	BKPSDM	87.650.000,00	83.440.000,00	-	-	-	-	-	83.440.000,00
	JUMLAH	83.967.350.864,64	79.475.359.783,98	-	-	2.549.923.075,56	341.087.110,60	2.891.010.186,16	76.584.349.597,82

DAFTAR BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	BELANJA MODAL YG TIDAK MENJADI ASET				TOTAL BM YG TIDAK MENJADI ASET 9=(5+6+7+8)	TOTAL BM MENJADI ASET 10=(4-9)
				PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	EXTRACONTABLE	HUTANG 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDIDIKAN	19.173.175.737,00	18.764.069.900,00	-	149.663.000,00	-	669.133.900,00	818.796.900,00	17.945.273.000,00
2	KESEHATAN	10.088.954.211,00	9.185.808.928,07	-	-	-	-	-	9.185.808.928,07
3	RSUD	3.720.419.000,00	3.533.835.000,00	-	-	-	161.505.228,00	161.505.228,00	3.372.329.772,00
4	PERKIMTAM	5.862.923.806,09	5.343.921.401,12	-	198.920.000,00	-	45.661.715,09	244.581.715,09	5.099.339.686,03
5	PU TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BNPBD,KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAT POL PP	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	31.344.778,00	-	31.344.778,00	88.655.222,00
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPM	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKB PPKA	126.416.905,00	113.107.415,00	-	-	-	27.207.415,00	27.207.415,00	85.900.000,00
15	DISHUB	272.249.295,00	267.907.565,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	247.907.565,00
16	DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KO,UKM ,PERINDAG	2.808.676.762,00	2.804.216.648,28	-	-	-	1.071.191.544,02	1.071.191.544,02	1.733.025.104,26
18	DPKD	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PERTANIAN	15.442.750,00	-	-	-	-	-	-	-
21	SETDAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SET DPRD	87.500.000,00	83.205.000,00	-	-	14.280.000,00	-	14.280.000,00	68.925.000,00
23	DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	-	-	-	-	10.490.000,00	-	10.490.000,00	(10.490.000,00)
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	42.275.758.466,09	40.216.071.857,47	-	348.583.000,00	76.114.778,00	1.974.699.802,11	2.399.397.580,11	37.816.674.277,36

DAFTAR BELANJA MODAL JJI SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	BELANJA MODAL YG TIDAK MENJADI ASET				TOTAL BM YG TIDAK MENJADI ASET 9=(5+6+7+8)	TOTAL BM MENJADI ASET 10=(4-9)
				PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	EXTRACONTABLE	HUTANG 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KESEHATAN	154.830.000,00	74.198.834,00	-	-	-	-	-	74.198.834,00
3	RSUD	1.280.000.100,87	1.280.000.100,87	-	-	-	1.177.728.092,81	1.177.728.092,81	102.272.008,06
4	PERKIMTAM	49.186.713.035,94	45.399.536.280,76	-	-	-	350.266.385,94	350.266.385,94	45.049.269.894,82
5	PU TATA RUANG	99.962.307.675,00	91.675.273.466,52	-	-	-	953.306.737,50	953.306.737,50	90.721.966.729,02
6	BNPBD,KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAT POL PP	16.928.109,00	16.928.109,00	-	-	-	-	-	16.928.109,00
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKERTRAN	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPM	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISHUB	6.187.032.000,00	6.048.275.818,34	-	-	-	-	-	6.048.275.818,34
16	DISKOMINFO	15.000.000,00	14.998.000,00	-	-	-	-	-	14.998.000,00
17	KO,UKM ,PERINDAG	222.000.000,00	217.254.000,00	-	-	-	-	-	217.254.000,00
18	DPKD	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PERIKANAN	53.251.800,00	-	-	-	-	-	-	-
20	PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SETDAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SET DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	157.090.562.720,81	144.726.464.609,49	-	-	-	2.481.301.216,25	2.481.301.216,25	142.245.163.393,24

DAFTAR BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	BELANJA MODAL YG TIDAK MENJADI ASET				TOTAL BM YG TIDAK MENJADI ASET 9=(5+6+7+8)	TOTAL BM MENJADI ASET 10=(4-9)
				PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	EXTRACONTABLE	HUTANG 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDIDIKAN	1.163.906.123,00	1.162.906.123,00	-	-	261.908.000,00	280.006.123,00	541.914.123,00	620.992.000,00
2	KESEHATAN	17.000.000,00	14.242.500,00	-	-	-	-	-	14.242.500,00
3	RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PERKIMTAM	25.000.000,00	23.500.000,00	-	-	-	-	-	23.500.000,00
5	PU TATA RUANG	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	BNPBD,KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPMD	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISHUB	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DISKOMINFO	230.000.000,00	228.065.235,00	-	49.923.535,00	-	-	49.923.535,00	178.141.700,00
17	KO,UKM ,PERINDAG	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DPKD	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PERIKANAN	185.575.000,00	184.529.500,00	92.454.500,00	-	92.075.000,00	-	184.529.500,00	-
20	PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SETDAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SET DPRD	461.455.875,00	375.145.000,00	-	335.460.000,00	33.785.000,00	-	369.245.000,00	5.900.000,00
23	DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	5.400.000,00	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-
27	RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	17.600.000,00	17.495.000,00	-	17.495.000,00	-	-	17.495.000,00	-
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.155.936.998,00	2.011.283.358,00	92.454.500,00	408.278.535,00	387.768.000,00	280.006.123,00	1.168.507.158,00	842.776.200,00

DAFTAR TOTAL BELANJA MODAL SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	BELANJA MODAL YG TIDAK MENJADI ASET				TOTAL BM YG TIDAK MENJADI ASET 9=(5+6+7+8)	TOTAL BM MENJADI ASET 10=(4-9)
				PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	EXTRACONTABLE	HUTANG 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10=(4-9)
1	PENDIDIKAN	52.291.339.260,00	51.330.476.571,00	-	149.663.000,00	1.856.788.794,00	949.140.023,00	2.955.591.817,00	48.374.884.754,00
2	KESEHATAN	30.233.159.271,00	28.352.891.857,45	-	-	473.475.702,56	-	473.475.702,56	27.879.416.154,89
3	RSUD	12.279.915.211,87	9.895.851.879,47	-	-	67.598.879,00	1.650.320.431,41	1.717.919.310,41	8.177.932.569,06
4	PERKIMTAM	55.228.136.842,03	50.920.257.681,88	-	198.920.000,00	-	395.928.101,03	594.848.101,03	50.325.409.580,85
5	PU TATA RUANG	101.121.407.675,00	92.709.728.466,52	-	-	2.500.000,00	953.306.737,50	955.806.737,50	91.753.921.729,02
6	BNPBD,KESBANG	10.284.520.000,00	10.005.694.040,00	-	-	34.485.000,00	-	34.485.000,00	9.971.209.040,00
7	SAT POL PP	192.498.109,00	192.498.109,00	-	-	50.864.778,00	-	50.864.778,00	141.633.331,00
8	DINSOS	61.500.000,00	61.500.000,00	-	-	-	-	-	61.500.000,00
9	DISNAKERTRAN	111.030.511,00	95.833.040,00	-	-	-	-	-	95.833.040,00
10	DISKETPAN	55.468.000,00	55.468.000,00	-	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	52.668.000,00
11	DLH	339.616.174,67	338.592.000,00	-	-	16.050.000,00	-	16.050.000,00	322.542.000,00
12	DUK CAPIL	606.624.950,00	603.908.000,00	-	-	1.962.500,00	-	1.962.500,00	601.945.500,00
13	DPM	104.200.000,00	104.200.000,00	-	-	900.000,00	-	900.000,00	103.300.000,00
14	DPPKB PPKA	223.416.905,00	204.557.415,00	-	-	15.325.000,00	27.207.415,00	42.532.415,00	162.025.000,00
15	DISHUB	6.758.781.295,00	6.613.683.383,34	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	6.593.683.383,34
16	DISKOMINFO	788.450.000,00	758.016.935,00	-	49.923.535,00	-	-	49.923.535,00	708.093.400,00
17	KO,UKM ,PERINDAG	3.905.326.423,31	3.887.682.648,28	-	-	-	1.101.191.544,02	1.101.191.544,02	2.786.491.104,26
18	DPKD	20.000.000,00	19.956.500,00	-	-	-	-	-	19.956.500,00
19	PERIKAMAN	479.271.650,00	280.629.500,00	92.454.500,00	-	134.825.000,00	-	227.279.500,00	53.350.000,00
20	PERTANIAN	36.442.750,00	20.950.000,00	-	-	900.000,00	-	900.000,00	20.050.000,00
21	SETDAH	5.900.117.270,00	5.752.462.503,00	-	-	169.660.200,00	-	169.660.200,00	5.582.802.303,00
22	SET DPRD	1.434.593.586,33	1.305.252.000,00	-	335.460.000,00	93.245.000,00	-	428.705.000,00	876.547.000,00
23	DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	136.600.000,00	123.245.000,00	-	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	119.645.000,00
25	BANYUASIN II	115.750.000,00	112.645.000,00	-	-	3.175.000,00	-	3.175.000,00	109.470.000,00
26	BETUNG	64.900.000,00	64.683.818,00	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	59.283.818,00
27	RANTAU BAYUR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
28	PULAU RIMAU	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	750.000,00	-	750.000,00	17.000.000,00
29	TALANG KELAPA	110.100.000,00	110.028.000,00	-	-	9.240.000,00	-	9.240.000,00	100.788.000,00
30	RAMBUTAN	128.855.000,00	128.855.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	127.580.000,00
31	TUNGKAL ILIR	7.000.000,00	6.991.818,00	-	-	-	-	-	6.991.818,00
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	14.450.000,00	14.371.681,00	-	-	-	-	-	14.371.681,00
36	MAKARTI JAYA	92.750.000,00	92.750.000,00	-	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00	81.750.000,00
37	MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	51.364.000,00	49.134.000,00	-	17.495.000,00	10.490.000,00	-	27.985.000,00	21.149.000,00
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	14.775.000,00	14.775.000,00	-	-	-	-	-	14.775.000,00
43	SELAT PENUGUAN	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	13.500.000,00
44	KARANG AGUNG ILIR	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	-	-	-	12.200.000,00
45	INSPEKTORAT	607.200.000,00	554.216.962,00	-	-	-	-	-	554.216.962,00
46	BAPPEDA	172.000.000,00	165.039.000,00	-	-	-	-	-	165.039.000,00
47	BPKAD	1.381.198.200,00	1.350.538.800,00	-	-	32.970.000,00	-	32.970.000,00	1.317.568.800,00
48	BKPSDM	87.650.000,00	83.440.000,00	-	-	-	-	-	83.440.000,00
	JUMLAH	285.489.609.049,54	266.429.179.608,94	92.454.500,00	756.861.535,00	3.013.805.853,56	5.077.094.251,96	8.940.216.140,52	257.488.963.468,42

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BANYUASIN
PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN : 5

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	Anggaran 2018	Penyaluran Tahun 2018 (Sesuai Perbup)	Total	REALISASI					TOTAL REALISASI	SISA
							Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tidak Terduga		
							Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5		
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.01.	PEMERINTAH DESA SUNGAI REBO	1.368.242.738,00	1.368.242.738,00	1.368.242.738,00	-	1.089.513.737,00	-	265.174.950,00	-	1.354.688.687,00	13.554.051,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.02.	PEMERINTAH DESA SUNGAI GERONG	888.854.790,00	888.854.790,00	888.854.790,00	-	625.957.518,00	-	162.738.560,00	-	788.696.078,00	100.158.712,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.03.	PEMERINTAH DESA MERAH MATA	1.201.356.763,00	1.201.356.763,00	1.201.356.763,00	-	965.921.500,00	-	151.900.000,00	-	1.117.821.500,00	83.535.263,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.04.	PEMERINTAH DESA PERAJEN	877.236.676,00	877.236.676,00	877.236.676,00	-	715.603.450,00	-	95.207.000,00	-	810.810.450,00	66.426.226,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.05.	PEMERINTAH DESA CINTA MANIS LAM	1.005.231.395,00	1.005.231.395,00	1.005.231.395,00	-	852.236.200,00	-	148.804.000,00	-	1.001.040.200,00	4.191.195,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.06.	PEMERINTAH DESA PERAMBAHAN	988.928.051,00	988.928.051,00	988.928.051,00	-	840.547.221,00	-	147.831.000,00	-	988.378.221,00	549.830,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.07.	PEMERINTAH DESA PEMATANG PALA	1.081.709.032,00	1.081.709.032,00	1.081.709.032,00	-	913.943.350,00	-	153.171.932,00	-	1.067.115.282,00	14.593.750,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.08.	PEMERINTAH DESA TIRTO SARI	782.654.098,00	782.654.098,00	782.654.098,00	-	644.896.000,00	-	137.100.567,00	-	781.996.567,00	657.531,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.09.	PEMERINTAH DESA PULAU BORANG	1.510.849.974,00	1.510.849.974,00	1.510.849.974,00	-	1.373.000.000,00	-	87.045.879,00	-	1.460.045.879,00	50.804.095,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.10.	PEMERINTAH DESA PERAMBAHAN BA	735.233.110,00	735.233.110,00	735.233.110,00	-	624.036.250,00	-	109.693.500,00	-	733.729.750,00	1.503.360,00
1	KECAMATAN BANYUASIN I	01.11.	PEMERINTAH DESA DUREN IJO	733.506.707,00	733.506.707,00	733.506.707,00	-	519.107.243,00	-	205.000.000,00	-	724.107.243,00	9.399.464,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.01.	PEMERINTAH DESA SUNGSANG I	1.238.214.222,00	1.238.214.222,00	1.238.214.222,00	-	988.085.150,00	-	247.627.000,00	-	1.235.712.150,00	2.502.072,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.02.	PEMERINTAH DESA SUNGSANG II	1.319.391.222,00	1.319.391.222,00	1.319.391.222,00	-	988.401.300,00	-	303.628.000,00	-	1.292.029.300,00	27.361.922,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.03.	PEMERINTAH DESA SUNGSANG III	1.000.207.089,00	1.000.207.089,00	1.000.207.089,00	-	833.754.640,00	-	136.952.449,00	-	970.707.089,00	29.500.000,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.04.	PEMERINTAH DESA SUNGSANG IV	1.114.633.335,00	1.114.633.335,00	1.114.633.335,00	-	797.876.000,00	-	242.933.300,00	-	1.040.809.300,00	73.824.035,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.05.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	814.927.658,00	814.927.658,00	814.927.658,00	-	714.927.658,00	-	201.677.100,00	-	814.927.600,00	179.071,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.06.	PEMERINTAH DESA MAJU RIA	797.407.031,00	797.407.031,00	797.407.031,00	-	479.852.750,00	-	317.554.200,00	-	797.406.950,00	81,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.07.	PEMERINTAH DESA SRI AGUNG	783.251.067,00	783.251.067,00	783.251.067,00	-	531.999.999,00	-	251.251.067,00	-	783.251.066,00	1,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.08.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	827.641.116,00	827.641.116,00	827.641.116,00	-	617.974.217,00	-	209.666.600,00	-	827.640.817,00	299,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.09.	PEMERINTAH DESA TABALA JAYA	789.485.788,00	789.485.788,00	789.485.788,00	-	592.114.100,00	-	197.371.000,00	-	789.485.100,00	688,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.10.	PEMERINTAH DESA TELUK PAYO	1.054.331.489,00	1.054.331.489,00	1.054.331.489,00	-	683.437.350,00	-	347.894.139,00	-	1.031.331.489,00	23.000.000,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	02.11.	PEMERINTAH DESA TANAH PILIH	838.963.143,00	838.963.143,00	838.963.143,00	-	723.583.800,00	-	93.179.343,00	-	816.763.143,00	22.200.000,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	03.01.	PEMERINTAH DESA JATI SARI	949.446.500,00	949.446.500,00	949.446.500,00	-	845.756.400,00	-	103.688.000,00	-	949.444.400,00	2.100,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	03.02.	PEMERINTAH DESA PERAJEN JAYA	753.937.287,00	753.937.287,00	753.937.287,00	-	648.900.000,00	-	105.028.000,00	-	753.928.000,00	9.287,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	03.03.	PEMERINTAH DESA RIMAU SUNGSAN	839.477.331,00	839.477.331,00	839.477.331,00	-	700.763.100,00	-	138.714.000,00	-	839.477.100,00	231,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	03.04.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	787.005.020,00	787.005.020,00	787.005.020,00	-	619.001.529,00	-	168.001.500,00	-	787.003.029,00	1.991,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	03.05.	PEMERINTAH DESA MARGA SUNGSAN	941.511.274,00	941.511.274,00	941.511.274,00	-	678.187.437,00	-	257.931.274,00	-	936.118.711,00	5.392.563,00
2	KECAMATAN BANYUASIN II	03.06.	PEMERINTAH DESA MUARA SUNGSAN	903.163.957,00	903.163.957,00	903.163.957,00	-	470.000.000,00	-	433.133.957,00	-	903.133.957,00	30.000,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	03.07.	PEMERINTAH DESA LANGKAN	980.145.839,00	980.145.839,00	980.145.839,00	-	787.061.800,00	-	133.084.000,00	-	920.145.800,00	60.000.039,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	03.08.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN PAN	770.444.540,00	770.444.540,00	770.444.540,00	-	545.798.000,00	-	159.000.000,00	-	704.798.000,00	65.646.540,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	03.09.	PEMERINTAH DESA LUBUK SAUNG	723.517.686,00	723.517.686,00	723.517.686,00	-	578.814.000,00	-	105.400.000,00	-	684.214.000,00	39.243.686,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	03.10.	PEMERINTAH DESA UJUNG TANJUNG	919.087.395,00	919.087.395,00	919.087.395,00	-	733.208.763,00	-	182.659.000,00	-	915.867.763,00	3.219.632,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	03.11.	PEMERINTAH DESA SIDANG MAS	705.119.921,00	705.119.921,00	705.119.921,00	-	564.095.900,00	-	141.023.391,00	-	705.119.291,00	630,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.01.	PEMERINTAH DESA GALANG TINGGI	727.754.200,00	727.754.200,00	727.754.200,00	-	614.836.168,00	-	109.426.200,00	-	724.262.368,00	3.491.832,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.02.	PEMERINTAH DESA PETALING	703.748.417,00	703.748.417,00	703.748.417,00	-	563.000.000,00	-	140.748.417,00	-	703.748.417,00	-
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.03.	PEMERINTAH DESA RIMBA ALAI	730.902.584,00	730.902.584,00	730.902.584,00	-	592.232.300,00	-	133.670.248,00	-	725.902.548,00	5.000.036,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.04.	PEMERINTAH DESA PELAJAU ILIR	691.104.868,00	691.104.868,00	691.104.868,00	-	554.704.779,00	-	136.221.018,00	-	690.925.797,00	179.071,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.05.	PEMERINTAH DESA REGAN AGUNG	708.491.496,00	708.491.496,00	708.491.496,00	-	566.794.000,00	-	141.697.496,00	-	708.491.496,00	-
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.06.	PEMERINTAH DESA SUKA MULYA	715.670.032,00	715.670.032,00	715.670.032,00	-	572.153.905,00	-	143.134.006,00	-	715.287.911,00	382.121,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.07.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG	698.206.937,00	698.206.937,00	698.206.937,00	-	608.468.887,00	-	89.606.937,00	-	698.075.824,00	131.113,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.08.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MENAN	710.563.357,00	710.563.357,00	710.563.357,00	-	610.716.853,00	-	110.386.504,00	-	710.563.357,00	-
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.09.	PEMERINTAH DESA SRI BANDUNG	748.454.826,00	748.454.826,00	748.454.826,00	-	562.318.350,00	-	186.136.476,00	-	748.454.826,00	-
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.10.	PEMERINTAH DESA PELAJAU	691.326.635,00	691.326.635,00	691.326.635,00	-	591.639.700,00	-	99.686.935,00	-	691.326.635,00	300,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.11.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BERING	679.800.613,00	679.800.613,00	679.800.613,00	-	541.650.900,00	-	135.322.000,00	-	676.972.900,00	2.827.713,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	04.12.	PEMERINTAH DESA TERENTANG	714.064.672,00	714.064.672,00	714.064.672,00	-	571.485.500,00	-	112.545.289,00	-	684.030.789,00	30.033.883,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	05.01.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEPAY	705.310.208,00	705.310.208,00	705.310.208,00	-	504.627.712,00	-	200.678.683,00	-	705.306.395,00	3.813,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	05.02.	PEMERINTAH DESA SUKARAJA BARU	723.244.979,00	723.244.979,00	723.244.979,00	-	614.656.700,00	-	172.542.540,00	-	723.244.979,00	702.439,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	05.03.	PEMERINTAH DESA TERLANGU	722.831.396,00	722.831.396,00	722.831.396,00	-	574.132.650,00	-	148.424.037,00	-	722.556.687,00	274.709,00
3	KECAMATAN BANYUASIN III	05.04.	PEMERINTAH DESA RIMBA BALAI	704.952.989,00	704.952.989,00	704.952.989,00	-	620.920.000,00	-	461.132.318,00	-	704.052.318,00	900.671,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	05.05.	PEMERINTAH DESA TELUK BETUNG	923.485.873,00	923.485.873,00	923.485.873,00	-	738.788.698,00	-	148.379.435,00	-	886.168.133,00	38.317.740,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	05.06.	PEMERINTAH DESA PENUGUAN	1.169.424.327,00	1.169.424.327,00	1.169.424.327,00	-	930.694.100,00	-	206.699.383,00	-	1.137.593.483,00	31.830.844,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	05.07.	PEMERINTAH DESA MUKUT	753.912.543,00	753.912.543,00	753.912.543,00	-	603.130.034,00	-	150.782.509,00	-	753.912.543,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	05.08.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	921.720.426,00	921.720.426,00	921.720.426,00	-	670.000.000,00	-	215.854.999,00	-	885.854.999,00	35.865.427,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	05.09.	PEMERINTAH DESA DANA MULYA	710.362.458,00	710.362.458,00	710.362.458,00	-	487.359.600,00	-	122.072.858,00	-	609.432.458,00	100.930.000,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.01.	PEMERINTAH DESA WANA MUKTI	743.430.249,00	743.430.249,00	743.430.249,00	-	594.744.199,00	-	148.686.050,00	-	743.430.249,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.02.	PEMERINTAH DESA BUDI ASIH	788.277.438,00	788.277.438,00	788.277.438,00	-	630.621.950,00	-	157.655.487,00	-	788.277.437,00	1,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.03.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJO	760.865.834,00	760.865.834,00	760.865.834,00	-	60					

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	Anggaran 2018	Penyaluran Tahun 2018 (Sesuai Perbup)	Total	REALISASI					TOTAL REALISASI	SISA
							Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tidak Terduga		
							Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5		
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.08.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	763.427.701,00	763.427.701,00	763.427.701,00	-	610.741.026,00	-	152.685.500,00	-	763.426.526,00	1.175,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.01.	PEMERINTAH DESA WONODADI	730.452.366,00	730.452.366,00	730.452.366,00	-	587.057.050,00	-	143.395.000,00	-	730.452.050,00	316,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.02.	PEMERINTAH DESA MAJATRA	740.283.685,00	740.283.685,00	740.283.685,00	-	593.224.303,00	-	147.059.382,00	-	740.283.685,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.03.	PEMERINTAH DESA WONOSARI	757.836.798,00	757.836.798,00	757.836.798,00	-	658.069.438,00	-	99.767.360,00	-	757.836.798,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.04.	PEMERINTAH DESA BUMI REJO	789.255.872,00	789.255.872,00	789.255.872,00	-	647.789.815,00	-	142.066.000,00	-	789.255.815,00	57,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.05.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	939.226.450,00	939.226.450,00	939.226.450,00	-	740.226.450,00	-	199.000.000,00	-	939.226.450,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.06.	PEMERINTAH DESA SONGO MAKMUR	730.418.927,00	730.418.927,00	730.418.927,00	-	620.856.088,00	-	109.562.839,00	-	730.418.927,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.07.	PEMERINTAH DESA SUMBER MULYA	735.280.267,00	735.280.267,00	735.280.267,00	-	598.112.107,00	-	147.056.053,00	-	735.166.160,00	112.107,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	07.08.	PEMERINTAH DESA RAWA BANDA	737.327.130,00	737.327.130,00	737.327.130,00	-	589.861.704,00	-	147.465.426,00	-	737.327.130,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	08.01.	PEMERINTAH DESA KARANG MANUNG	1.028.991.537,00	1.028.991.537,00	1.028.991.537,00	-	823.193.230,00	-	205.798.298,00	-	1.028.991.528,00	9,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.09.	PEMERINTAH DESA PURWODADI	749.516.849,00	749.516.849,00	749.516.849,00	-	599.613.479,00	-	149.903.370,00	-	749.516.849,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.10.	PEMERINTAH DESA RINGIN HARJO	838.668.332,00	838.668.332,00	838.668.332,00	-	670.934.666,00	-	167.733.666,00	-	838.668.332,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.11.	PEMERINTAH DESA SENDA MUKTI	737.006.087,00	737.006.087,00	737.006.087,00	-	585.000.000,00	-	152.006.087,00	-	737.006.087,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	06.12.	PEMERINTAH DESA TIRTA MULYA	710.796.921,00	710.796.921,00	710.796.921,00	-	598.637.537,00	-	112.159.384,00	-	710.796.921,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	08.02.	PEMERINTAH DESA BANJAR SARI	711.888.804,00	711.888.804,00	711.888.804,00	-	569.000.000,00	-	142.888.804,00	-	711.888.804,00	-
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	08.03.	PEMERINTAH DESA BUANA MUKTI	743.548.371,00	743.548.371,00	743.548.371,00	-	594.838.697,00	-	148.704.674,00	-	743.548.371,00	5.000,00
4	KECAMATAN PULAU RIMAU	08.04.	PEMERINTAH DESA TABUAN ASRI	694.550.739,00	694.550.739,00	694.550.739,00	-	554.999.000,00	-	139.550.739,00	-	694.549.791,00	948,00
5	KECAMATAN BETUNG	08.05.	PEMERINTAH DESA PULAU RAJAK	696.897.992,00	696.897.992,00	696.897.992,00	-	554.727.697,00	-	139.379.599,00	-	694.107.296,00	2.790.696,00
5	KECAMATAN BETUNG	08.06.	PEMERINTAH DESA BUKIT	847.691.365,00	847.691.365,00	847.691.365,00	-	712.061.365,00	-	135.630.000,00	-	847.691.365,00	-
5	KECAMATAN BETUNG	08.07.	PEMERINTAH DESA SRI KEMBANG	787.761.323,00	787.761.323,00	787.761.323,00	-	630.209.058,00	-	157.552.265,00	-	787.761.323,00	-
5	KECAMATAN BETUNG	08.08.	PEMERINTAH DESA LUBUK KARET	819.023.647,00	819.023.647,00	819.023.647,00	-	507.609.459,00	-	180.185.202,00	-	687.794.661,00	131.228.986,00
5	KECAMATAN BETUNG	08.09.	PEMERINTAH DESA TAJA MULYA	1.164.999.079,00	1.164.999.079,00	1.164.999.079,00	-	695.620.156,00	-	416.990.000,00	-	1.112.610.156,00	52.388.923,00
5	KECAMATAN BETUNG	08.10.	PEMERINTAH DESA TAJA RAYA I	979.531.831,00	979.531.831,00	979.531.831,00	-	783.623.985,00	-	195.907.000,00	-	979.530.985,00	846,00
5	KECAMATAN BETUNG	09.01.	PEMERINTAH DESA TAJA INDAH	1.216.935.477,00	1.216.935.477,00	1.216.935.477,00	-	973.548.381,00	-	243.387.096,00	-	1.216.935.477,00	-
5	KECAMATAN BETUNG	09.02.	PEMERINTAH DESA TAJA RAYA II	937.779.003,00	937.779.003,00	937.779.003,00	-	772.378.480,00	-	165.400.523,00	-	937.779.003,00	-
5	KECAMATAN BETUNG	09.03.	PEMERINTAH DESA SUKA MULYA	792.007.069,00	792.007.069,00	792.007.069,00	-	594.005.302,00	-	198.001.767,00	-	792.007.069,00	-
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.04.	PEMERINTAH DESA KEBON SAHANG	731.416.057,00	731.416.057,00	731.416.057,00	-	585.130.000,00	-	143.483.211,00	-	728.613.211,00	2.802.846,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.05.	PEMERINTAH DESA SIJU	994.676.666,00	994.676.666,00	994.676.666,00	-	795.031.950,00	-	197.326.650,00	-	992.358.600,00	2.318.066,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.06.	PEMERINTAH DESA TANAH LEMBAK	923.706.250,00	923.706.250,00	923.706.250,00	-	738.703.500,00	-	183.141.250,00	-	921.844.750,00	1.861.500,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.07.	PEMERINTAH DESA PARIT	731.025.080,00	731.025.080,00	731.025.080,00	-	594.809.790,00	-	143.305.495,00	-	728.115.285,00	2.909.795,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.08.	PEMERINTAH DESA PELAJAU	945.807.935,00	945.807.935,00	945.807.935,00	-	755.628.200,00	-	187.210.500,00	-	943.738.700,00	3.069.235,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.09.	PEMERINTAH DESA SUKA PINDAH	966.046.921,00	966.046.921,00	966.046.921,00	-	820.134.500,00	-	143.210.900,00	-	963.345.400,00	2.701.521,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.10.	PEMERINTAH DESA BARU	728.012.833,00	728.012.833,00	728.012.833,00	-	615.175.433,00	-	107.042.000,00	-	722.217.433,00	3.795.400,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	09.11.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERAN	975.499.607,00	975.499.607,00	975.499.607,00	-	780.398.929,00	-	191.249.905,00	-	971.648.834,00	3.850.773,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	10.01.	PEMERINTAH DESA RAMBUTAN	800.303.893,00	800.303.893,00	800.303.893,00	-	553.541.090,00	-	187.051.000,00	-	740.592.090,00	59.711.803,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	10.02.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MERBU	949.013.369,00	949.013.369,00	949.013.369,00	-	664.137.316,00	-	284.704.011,00	-	948.841.327,00	172.042,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	10.03.	PEMERINTAH DESA SAKO	733.192.980,00	733.192.980,00	733.192.980,00	-	549.847.268,00	-	182.498.770,00	-	732.346.038,00	846.942,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	10.04.	PEMERINTAH DESA GELEBAK DALAM	760.167.839,00	760.167.839,00	760.167.839,00	-	646.143.076,00	-	113.524.924,00	-	759.668.000,00	499.839,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	10.05.	PEMERINTAH DESA MENTEN	943.760.170,00	943.760.170,00	943.760.170,00	-	658.225.974,00	-	282.727.134,00	-	940.953.108,00	2.807.062,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	10.06.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN GEL	936.482.058,00	936.482.058,00	936.482.058,00	-	749.185.616,00	-	187.296.442,00	-	936.482.058,00	-
6	KECAMATAN RAMBUTAN	11.01.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	1.010.374.307,00	1.010.374.307,00	1.010.374.307,00	-	707.262.015,00	-	303.112.292,00	-	1.010.374.307,00	-
6	KECAMATAN RAMBUTAN	11.02.	PEMERINTAH DESA SUNGAI PINANG	1.103.614.469,00	1.103.614.469,00	1.103.614.469,00	-	840.811.366,00	-	219.744.400,00	-	1.060.555.766,00	43.058.703,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	11.03.	PEMERINTAH DESA SUNGAI KEDUKAN	1.105.027.284,00	1.105.027.284,00	1.105.027.284,00	-	884.000.016,00	-	220.005.237,00	-	1.104.005.253,00	1.022.031,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	11.04.	PEMERINTAH DESA DURIAN GADIS	709.203.125,00	709.203.125,00	709.203.125,00	-	602.632.656,00	-	104.370.385,00	-	707.003.041,00	2.200.084,00
6	KECAMATAN RAMBUTAN	11.05.	PEMERINTAH DESA PULAU PARANG	763.679.150,00	763.679.150,00	763.679.150,00	-	610.404.572,00	-	151.636.150,00	-	762.076.722,00	1.602.428,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.06.	PEMERINTAH DESA MUARA PADANG	1.079.230.763,00	1.079.230.763,00	1.079.230.763,00	-	862.113.000,00	-	215.811.000,00	-	1.077.924.000,00	1.306.763,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.07.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BARU	964.970.490,00	964.970.490,00	964.970.490,00	-	578.982.294,00	-	-	-	578.982.294,00	-
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.08.	PEMERINTAH DESA KARUNG ANYAR	789.722.286,00	789.722.286,00	789.722.286,00	-	669.971.200,00	-	111.251.086,00	-	781.222.286,00	8.500.000,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.09.	PEMERINTAH DESA PURWODADI	1.010.192.775,00	1.010.192.775,00	1.010.192.775,00	-	782.145.000,00	-	223.900.000,00	-	1.006.045.000,00	4.147.775,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.10.	PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR	991.337.687,00	991.337.687,00	991.337.687,00	-	783.140.000,00	-	200.335.687,00	-	983.475.687,00	7.862.000,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.11.	PEMERINTAH DESA AIR GADING	742.243.044,00	742.243.044,00	742.243.044,00	-	555.318.000,00	-	185.740.000,00	-	741.058.000,00	1.185.044,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.12.	PEMERINTAH DESA TIRTO RAHARJO	1.018.509.518,00	1.018.509.518,00	1.018.509.518,00	-	736.168.282,00	-	270.093.800,00	-	1.006.262.082,00	12.247.436,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.13.	PEMERINTAH DESA DAYA UTAMA	744.658.774,00	744.658.774,00	744.658.774,00	-	572.415.000,00	-	144.658.774,00	-	717.069.000,00	27.589.774,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.14.	PEMERINTAH DESA DAYA MAKMUR	1.036.692.080,00	1.036.692.080,00	1.036.692.080,00	-	821.322.300,00	-	164.332.000,00	-	985.654.300,00	51.037.780,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.15.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO 18	753.238.286,00	753.238.286,00	753.238.286,00	-	638.778.650,00	-	112.937.500,00	-	751.716.150,00	1.522.136,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.16.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	993.066.566,00	993.066.566,00	993.066.566,00	-	868.597.000,00	-	123.000.000,00	-	991.597.000,00	1.469.566,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.17.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO 20	968.509.451,00	968.509.451,00	968.509.451,00	-	774.807.341,00	-	193.701.890,00	-	968.509.231,00	220,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.18.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO 2	964.808.012,00	964.808.012,00	964.808.012,00	-	790.538.353,00	-	164.455.000,00	-	954.993.353,00	9.814.659,00
7	KECAMATAN MUARA PADANG	11.19.	PEMERINTAH DESA MARGO										

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	Anggaran 2018	Penyaluran Tahun 2018 (Sesuai Perbup)	Total	REALISASI					TOTAL REALISASI	SISA
							Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tidak Terduga		
							Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5		
8	KECAMATAN MUARA TELANG	12.06.	PEMERINTAH DESA TELANG MAKMUR	890.598.131.00	890.598.131.00	890.598.131.00	-	711.587.400.00	-	179.000.000.00	-	890.587.400.00	10.731.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	12.07.	PEMERINTAH DESA TELANG KARYA	1.141.691.474.00	1.141.691.474.00	1.141.691.474.00	-	868.520.650.00	-	273.039.104.00	-	1.141.559.754.00	131.720.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	12.08.	PEMERINTAH DESA PANCA MUKTI	984.439.230.00	984.439.230.00	984.439.230.00	-	677.368.300.00	-	304.698.000.00	-	982.066.300.00	2.372.930.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	13.01.	PEMERINTAH DESA MUKTI JAYA	967.760.769.00	967.760.769.00	967.760.769.00	-	677.432.700.00	-	290.328.069.00	-	967.760.769.00	-
8	KECAMATAN MUARA TELANG	13.02.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	1.054.858.260.00	1.054.858.260.00	1.054.858.260.00	-	895.014.760.00	-	158.257.826.00	-	1.053.272.586.00	1.585.674.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	13.03.	PEMERINTAH DESA TALANG INDAH	858.933.736.00	858.933.736.00	858.933.736.00	-	730.550.000.00	-	128.373.696.00	-	858.923.696.00	10.040.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	13.04.	PEMERINTAH DESA MEKAR MUKTI	950.743.976.00	950.743.976.00	950.743.976.00	-	570.446.385.00	-	4.960.000.00	-	343.230.997.00	227.215.389.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	13.05.	PEMERINTAH DESA UPANG JAYA	1.214.207.569.00	1.214.207.569.00	1.214.207.569.00	-	1.032.073.400.00	-	181.876.000.00	-	1.213.949.400.00	258.169.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	13.06.	PEMERINTAH DESA UPANG KARYA	993.543.594.00	993.543.594.00	993.543.594.00	-	769.511.650.00	-	224.031.594.00	-	993.543.244.00	350.00
8	KECAMATAN MUARA TELANG	14.01.	PEMERINTAH DESA UPANG CEMARA	928.296.839.00	928.296.839.00	928.296.839.00	-	709.296.839.00	-	219.000.000.00	-	928.296.839.00	-
8	KECAMATAN MUARA TELANG	14.02.	PEMERINTAH DESA UPANG CERIA	1.167.529.208.00	1.167.529.208.00	1.167.529.208.00	-	401.333.575.00	-	417.657.875.00	-	818.991.450.00	348.537.758.00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	14.03.	PEMERINTAH DESA DELTA UPANG	721.911.126.00	721.911.126.00	721.911.126.00	-	577.497.000.00	-	144.411.000.00	-	721.908.000.00	3.126.00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.01.	PEMERINTAH DESA PENDOWO HARJA	933.735.897.00	933.735.897.00	933.735.897.00	-	746.895.462.00	-	181.747.179.00	-	928.642.641.00	5.093.256.00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.02.	PEMERINTAH DESA PANGESTU	753.316.213.00	753.316.213.00	753.316.213.00	-	640.310.300.00	-	112.998.521.00	-	753.308.821.00	7.392.00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.03.	PEMERINTAH DESA TIRTA KENCANA	962.231.317.00	962.231.317.00	962.231.317.00	-	769.785.051.00	-	192.446.250.00	-	962.231.301.00	16.00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.04.	PEMERINTAH DESA UPANG MAKMUR	949.015.632.00	949.015.632.00	949.015.632.00	-	768.702.662.00	-	180.312.970.00	-	949.015.632.00	-
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.05.	PEMERINTAH DESA UPANG MULYA	758.642.461.00	758.642.461.00	758.642.461.00	-	606.913.968.00	-	151.728.493.00	-	758.642.461.00	-
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.06.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	735.910.119.00	735.910.119.00	735.910.119.00	-	588.728.095.00	-	147.182.024.00	-	735.910.119.00	-
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.07.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS	993.498.813.00	993.498.813.00	993.498.813.00	-	794.721.890.00	-	198.699.572.00	-	993.421.462.00	77.351.00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	15.08.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BARU	732.842.382.00	732.842.382.00	732.842.382.00	-	468.273.906.00	-	146.568.476.00	-	732.842.382.00	-
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	16.01.	PEMERINTAH DESA SUNGAI SEMUT	797.081.084.00	797.081.084.00	797.081.084.00	-	637.684.866.00	-	159.416.217.00	-	797.081.083.00	1.00
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	16.02.	PEMERINTAH DESA MUARA BARU	934.396.366.00	934.396.366.00	934.396.366.00	-	747.517.092.00	-	186.879.274.00	-	934.396.366.00	-
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	16.03.	PEMERINTAH DESA SUNGAI RENGIT	810.853.952.00	810.853.952.00	810.853.952.00	-	594.265.500.00	-	184.807.000.00	-	779.072.500.00	31.781.452.00
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	16.04.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BEN	754.505.882.00	754.505.882.00	754.505.882.00	-	632.844.000.00	-	102.105.500.00	-	734.949.500.00	19.556.382.00
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	16.05.	PEMERINTAH DESA GASING	1.179.307.998.00	1.179.307.998.00	1.179.307.998.00	-	822.766.555.00	-	121.682.200.00	-	944.448.755.00	234.859.243.00
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	16.06.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH	739.528.152.00	739.528.152.00	739.528.152.00	-	432.144.150.00	-	297.614.850.00	-	729.759.000.00	9.769.152.00
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	16.07.	PEMERINTAH DESA SUNGAI RENGIT M	756.720.776.00	756.720.776.00	756.720.776.00	-	546.499.900.00	-	136.383.500.00	-	683.883.400.00	73.837.376.00
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	16.08.	PEMERINTAH DESA KENTEN LAUT	1.081.619.437.00	1.081.619.437.00	1.081.619.437.00	-	738.485.500.00	-	211.439.000.00	-	949.924.500.00	131.694.937.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	16.09.	PEMERINTAH DESA MUARA ABAB	786.477.016.00	786.477.016.00	786.477.016.00	-	629.182.000.00	-	157.295.016.00	-	786.477.016.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	16.10.	PEMERINTAH DESA TANJUNG PASIR	817.321.862.00	817.321.862.00	817.321.862.00	-	653.837.490.00	-	163.484.372.00	-	817.321.862.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	16.11.	PEMERINTAH DESA TANJUNG TIGA	869.960.764.00	869.960.764.00	869.960.764.00	-	695.968.611.00	-	173.992.153.00	-	869.960.764.00	54.621.072.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.01.	PEMERINTAH DESA RANTAU BAYUR	830.618.216.00	830.618.216.00	830.618.216.00	-	684.178.709.00	-	146.439.507.00	-	830.618.216.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.02.	PEMERINTAH DESA PAGAR BULAN	989.509.299.00	989.509.299.00	989.509.299.00	-	841.082.900.00	-	148.426.394.00	-	989.509.294.00	5.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.03.	PEMERINTAH DESA KEMANG BEJALU	799.695.093.00	799.695.093.00	799.695.093.00	-	639.756.000.00	-	159.939.093.00	-	799.695.093.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.04.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MENAN	1.171.972.715.00	1.171.972.715.00	1.171.972.715.00	-	936.671.500.00	-	235.301.215.00	-	1.171.972.715.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.05.	PEMERINTAH DESA SRI JAYA	1.102.831.629.00	1.102.831.629.00	1.102.831.629.00	-	620.815.000.00	-	296.164.629.00	-	916.779.629.00	186.052.000.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.06.	PEMERINTAH DESA SEJAGUNG	1.143.808.398.00	1.143.808.398.00	1.143.808.398.00	-	915.046.000.00	-	173.970.017.00	-	1.089.016.017.00	54.792.381.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.07.	PEMERINTAH DESA SUNGAI PINANG	859.761.371.00	859.761.371.00	859.761.371.00	-	688.119.000.00	-	171.642.371.00	-	859.761.371.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.08.	PEMERINTAH DESA SEMUNTUL	982.018.127.00	982.018.127.00	982.018.127.00	-	688.770.000.00	-	293.248.127.00	-	982.018.127.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.09.	PEMERINTAH DESA LEBUNG	1.198.054.348.00	1.198.054.348.00	1.198.054.348.00	-	1.018.346.000.00	-	179.707.709.00	-	1.198.053.709.00	639.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.10.	PEMERINTAH DESA LUBUK RENGAS	762.827.437.00	762.827.437.00	762.827.437.00	-	485.302.950.00	-	271.824.050.00	-	757.127.000.00	5.700.437.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	17.11.	PEMERINTAH DESA PALDAS	1.061.835.277.00	1.061.835.277.00	1.061.835.277.00	-	849.368.000.00	-	212.367.055.00	-	1.061.735.055.00	100.222.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	02.12.	PEMERINTAH DESA TEBING ABANG	1.054.282.254.00	1.054.282.254.00	1.054.282.254.00	-	842.325.804.00	-	192.171.950.00	-	1.034.497.754.00	19.784.500.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	02.13.	PEMERINTAH DESA TALANG KEMANG	760.141.964.00	760.141.964.00	760.141.964.00	-	680.113.000.00	-	152.028.964.00	-	760.141.964.00	-
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	02.14.	PEMERINTAH DESA RANTAU HARAPA	1.155.257.015.00	1.155.257.015.00	1.155.257.015.00	-	980.250.900.00	-	175.006.000.00	-	1.155.256.900.00	115.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	02.15.	PEMERINTAH DESA PENANDINGAN	747.903.463.00	747.903.463.00	747.903.463.00	-	598.322.770.00	-	149.580.530.00	-	747.903.300.00	163.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	02.16.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAIK	718.555.807.00	718.555.807.00	718.555.807.00	-	601.454.035.00	-	82.783.372.00	-	684.237.407.00	34.318.400.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	02.17.	PEMERINTAH DESA SUNGAI LILIN	1.114.078.224.00	1.114.078.224.00	1.114.078.224.00	-	751.712.000.00	-	355.622.086.00	-	1.107.334.086.00	6.745.138.00
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	03.12.	PEMERINTAH DESA SUKA RELA	764.904.254.00	764.904.254.00	764.904.254.00	-	650.168.400.00	-	114.735.854.00	-	764.904.254.00	-
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.13.	PEMERINTAH DESA TELANG SARI	763.493.019.00	763.493.019.00	763.493.019.00	-	732.226.400.00	-	16.532.619.00	-	748.759.019.00	14.734.000.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.14.	PEMERINTAH DESA MULYA SARI	764.329.539.00	764.329.539.00	764.329.539.00	-	574.500.000.00	-	153.595.539.00	-	728.095.539.00	36.234.000.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.15.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	915.046.716.00	915.046.716.00	915.046.716.00	-	823.987.274.00	-	76.325.442.00	-	900.312.716.00	14.734.000.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.16.	PEMERINTAH DESA SRI MENANTI	745.102.092.00	745.102.092.00	745.102.092.00	-	492.094.300.00	-	592.025.692.00	-	703.312.000.00	155.076.400.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.17.	PEMERINTAH DESA SEBALIK	1.012.049.521.00	1.012.049.521.00	1.012.049.521.00	-	860.213.975.00	-	134.901.546.00	-	995.115.521.00	16.934.000.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.18.	PEMERINTAH DESA TANJUNG LAGO	1.286.906.310.00	1.286.906.310.00	1.286.906.310.00	-	1.093.870.364.00	-	51.167.000.00	-	1.145.037.364.00	141.868.946.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.19.	PEMERINTAH DESA KUALA PUNTIAN	1.181.325.595.00	1.181.325.595.00	1.181.325.595.00	-	1.003.990.239.00	-	139.055.056.00	-	1.143.045.295.00	38.280.300.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.20.	PEMERINTAH DESA SUKA TANI	776.683.216.00	776.683.216.00	776.683.216.00	-	659.507.550.00	-	102.441.666.00	-	761.949.216.00	14.734.000.00
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO	03.21.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	911.066.852.00	911.06								

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	Anggaran 2018	Penyaluran Tahun 2018 (Sesuai Perbup)	Total	REALISASI					TOTAL REALISASI	SISA	
							Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tidak Terduga			
							Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5			
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.20.	PEMERINTAH DESA REJO SARI	923.417.065,00	923.417.065,00	923.417.065,00	-	739.153.500,00	-	-	136.981.500,00	-	876.135.000,00	47.282.065,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.21.	PEMERINTAH DESA DAYA MURNI	993.369.935,00	993.369.935,00	993.369.935,00	-	716.386.500,00	-	-	186.162.500,00	-	902.549.000,00	90.820.935,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.22.	PEMERINTAH DESA DAYA BANGUN HARJO	943.375.778,00	943.375.778,00	943.375.778,00	-	725.574.600,00	-	-	167.801.000,00	-	893.375.600,00	50.000.178,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.23.	PEMERINTAH DESA SUMBER MULYO	943.603.914,00	943.603.914,00	943.603.914,00	-	725.073.000,00	-	-	114.287.500,00	-	839.360.500,00	104.243.414,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.24.	PEMERINTAH DESA SUGIH WARAS	741.566.784,00	741.566.784,00	741.566.784,00	-	600.754.650,00	-	-	140.812.000,00	-	741.566.650,00	134,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.25.	PEMERINTAH DESA INDRAPURA	954.623.431,00	954.623.431,00	954.623.431,00	-	674.833.300,00	-	-	279.703.000,00	-	954.536.300,00	87.131,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.26.	PEMERINTAH DESA CENDANA	751.169.832,00	751.169.832,00	751.169.832,00	-	613.410.000,00	-	-	112.759.500,00	-	726.169.500,00	25.000.332,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.27.	PEMERINTAH DESA ARGO MULYO	755.539.469,00	755.539.469,00	755.539.469,00	-	594.893.000,00	-	-	155.512.469,00	-	750.405.469,00	5.134.000,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.28.	PEMERINTAH DESA TIRTA HARJO	749.737.286,00	749.737.286,00	749.737.286,00	-	592.520.900,00	-	-	142.668.200,00	-	735.189.100,00	14.548.186,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	04.29.	PEMERINTAH DESA TIRTA MULYO	709.006.403,00	709.006.403,00	709.006.403,00	-	310.000.000,00	-	-	134.006.000,00	-	444.006.000,00	265.000.403,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	06.13.	PEMERINTAH DESA DAYA KESUMA	734.858.980,00	734.858.980,00	734.858.980,00	-	592.389.319,00	-	-	142.469.000,00	-	734.858.319,00	661,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	06.14.	PEMERINTAH DESA MARGO RUKUN	932.535.684,00	932.535.684,00	932.535.684,00	-	798.080.600,00	-	-	134.454.889,00	-	932.535.489,00	195,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	06.15.	PEMERINTAH DESA GANESA MUKTI	926.768.725,00	926.768.725,00	926.768.725,00	-	723.919.000,00	-	-	202.270.000,00	-	926.189.000,00	579.725,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	06.16.	PEMERINTAH DESA TIMBUL JAYA	744.435.443,00	744.435.443,00	744.435.443,00	-	482.769.427,00	-	-	111.665.843,00	-	594.435.270,00	150.000.173,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	06.17.	PEMERINTAH DESA JALUR MULYA	955.870.145,00	955.870.145,00	955.870.145,00	-	779.823.900,00	-	-	176.045.000,00	-	955.868.900,00	1.245,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	06.18.	PEMERINTAH DESA GILIRANG	1.065.645.313,00	1.065.645.313,00	1.065.645.313,00	-	890.000.000,00	-	-	173.236.954,00	-	1.063.236.954,00	2.408.359,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	06.19.	PEMERINTAH DESA JURU TARO	1.240.561.278,00	1.240.561.278,00	1.240.561.278,00	-	1.052.126.468,00	-	-	186.083.500,00	-	1.238.209.968,00	2.351.310,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	07.09.	PEMERINTAH DESA KUALA SUGIHAN	812.721.964,00	812.721.964,00	812.721.964,00	-	1.063.918.200,00	-	-	260.721.000,00	-	1.232.639.200,00	82.764,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	07.10.	PEMERINTAH DESA BERINGIN AGUNG	924.500.488,00	924.500.488,00	924.500.488,00	-	751.514.094,00	-	-	172.836.244,00	-	924.350.338,00	150.150,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	07.11.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	760.263.470,00	760.263.470,00	760.263.470,00	-	486.191.000,00	-	-	124.077.000,00	-	610.268.000,00	149.995.470,00
13	KECAMATAN MUARA SUGIHAN	07.12.	PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR	714.322.842,00	714.322.842,00	714.322.842,00	-	499.999.300,00	-	-	214.323.000,00	-	714.322.300,00	542,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	07.13.	PEMERINTAH DESA AIR SOLOK BATU	846.100.253,00	846.100.253,00	846.100.253,00	-	719.185.223,00	-	-	126.915.030,00	-	846.100.253,00	-
14	KECAMATAN AIR SALEK	07.14.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	850.172.179,00	850.172.179,00	850.172.179,00	-	714.555.900,00	-	-	136.616.161,00	-	850.172.061,00	118,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	07.15.	PEMERINTAH DESA SRI KATON	1.007.827.992,00	1.007.827.992,00	1.007.827.992,00	-	814.712.300,00	-	-	193.115.500,00	-	1.007.827.800,00	192,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	08.11.	PEMERINTAH DESA SIDO HARJO	1.007.837.483,00	1.007.837.483,00	1.007.837.483,00	-	847.829.976,00	-	-	160.066.943,00	-	1.007.836.919,00	564,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	08.12.	PEMERINTAH DESA BINTARAN	780.432.033,00	780.432.033,00	780.432.033,00	-	656.700.000,00	-	-	123.732.033,00	-	780.432.033,00	-
14	KECAMATAN AIR SALEK	08.13.	PEMERINTAH DESA DAMAR WULAN	972.253.317,00	972.253.317,00	972.253.317,00	-	797.182.000,00	-	-	172.421.327,00	-	969.603.327,00	2.649.990,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	08.14.	PEMERINTAH DESA ENGGAL REJO	979.488.558,00	979.488.558,00	979.488.558,00	-	783.590.846,00	-	-	191.502.278,00	-	971.093.124,00	4.395.434,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	08.15.	PEMERINTAH DESA SALEH JAYA	1.135.366.555,00	1.135.366.555,00	1.135.366.555,00	-	965.061.372,00	-	-	170.304.983,00	-	1.135.366.355,00	200,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	08.16.	PEMERINTAH DESA SALEH AGUNG	960.135.277,00	960.135.277,00	960.135.277,00	-	768.135.066,00	-	-	192.027.000,00	-	960.135.066,00	211,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	11.21.	PEMERINTAH DESA SALEH MULYA	701.333.626,00	701.333.626,00	701.333.626,00	-	561.066.750,00	-	-	140.265.553,00	-	701.332.303,00	1.323,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	12.09.	PEMERINTAH DESA SALEH MUKTI	1.031.505.437,00	1.031.505.437,00	1.031.505.437,00	-	825.204.000,00	-	-	206.301.000,00	-	1.031.505.000,00	437,00
14	KECAMATAN AIR SALEK	12.10.	PEMERINTAH DESA SALEH MAKMUR	936.835.034,00	936.835.034,00	936.835.034,00	-	755.347.500,00	-	-	181.487.534,00	-	936.835.034,00	-
14	KECAMATAN AIR SALEK	12.11.	PEMERINTAH DESA UPANG	1.095.103.085,00	1.095.103.085,00	1.095.103.085,00	-	930.838.300,00	-	-	164.264.785,00	-	1.095.103.085,00	-
14	KECAMATAN AIR SALEK	12.12.	PEMERINTAH DESA UPANG MARGA	1.223.938.813,00	1.223.938.813,00	1.223.938.813,00	-	978.927.000,00	-	-	244.686.000,00	-	1.223.613.000,00	325.813,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	12.13.	PEMERINTAH DESA BENTAYAN	1.042.659.498,00	1.042.659.498,00	1.042.659.498,00	-	886.128.573,00	-	-	156.530.827,00	-	1.042.659.400,00	98,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	12.14.	PEMERINTAH DESA TELUK TENGGUL	1.002.850.609,00	1.002.850.609,00	1.002.850.609,00	-	733.257.000,00	-	-	269.393.609,00	-	1.002.650.609,00	200.000,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	12.15.	PEMERINTAH DESA SUKA MULYA	997.320.922,00	997.320.922,00	997.320.922,00	-	678.889.300,00	-	-	318.400.000,00	-	997.289.300,00	31.622,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.07.	PEMERINTAH DESA SUKA RAJA	694.329.840,00	694.329.840,00	694.329.840,00	-	555.463.800,00	-	-	128.065.900,00	-	683.529.700,00	10.800.140,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.08.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	716.692.059,00	716.692.059,00	716.692.059,00	-	559.689.284,00	-	-	156.672.059,00	-	716.361.343,00	330.716,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.09.	PEMERINTAH DESA KARANG ASEM	721.851.501,00	721.851.501,00	721.851.501,00	-	577.481.200,00	-	-	144.370.300,00	-	721.851.500,00	1,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.10.	PEMERINTAH DESA MARGA RAHAYU	747.754.767,00	747.754.767,00	747.754.767,00	-	598.202.000,00	-	-	149.550.000,00	-	747.752.000,00	2.767,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.11.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	753.942.012,00	753.942.012,00	753.942.012,00	-	360.200.000,00	-	-	393.737.000,00	-	753.937.000,00	5.012,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.12.	PEMERINTAH DESA KELUANG	885.499.638,00	885.499.638,00	885.499.638,00	-	752.674.500,00	-	-	132.824.000,00	-	885.498.500,00	1.138,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.13.	PEMERINTAH DESA BUMI SERDANG	728.169.022,00	728.169.022,00	728.169.022,00	-	465.827.600,00	-	-	259.114.782,00	-	724.942.382,00	3.226.640,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.14.	PEMERINTAH DESA KARANG MULYA	927.601.869,00	927.601.869,00	927.601.869,00	-	742.081.000,00	-	-	185.520.000,00	-	927.601.000,00	869,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.15.	PEMERINTAH DESA SUKA KARYA	726.958.290,00	726.958.290,00	726.958.290,00	-	545.218.700,00	-	-	181.637.300,00	-	726.856.000,00	102.290,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.16.	PEMERINTAH DESA PANCA MULYA	711.620.572,00	711.620.572,00	711.620.572,00	-	490.634.000,00	-	-	220.979.000,00	-	711.613.000,00	7.572,00
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	13.17.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	707.465.828,00	707.465.828,00	707.465.828,00	-	530.014.700,00	-	-	177.450.800,00	-	707.465.500,00	328,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	13.18.	PEMERINTAH DESA TALANG IPUH	718.809.149,00	718.809.149,00	718.809.149,00	-	591.189.500,00	-	-	125.470.000,00	-	716.859.500,00	2.149.649,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	13.19.	PEMERINTAH DESA DURIAN DAUN	700.482.738,00	700.482.738,00	700.482.738,00	-	395.482.000,00	-	-	305.000.000,00	-	700.482.000,00	738,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	13.20.	PEMERINTAH DESA LUBUK LANCANG	1.031.643.958,00	1.031.643.958,00	1.031.643.958,00	-	854.276.857,00	-	-	177.367.060,00	-	1.031.643.957,00	1,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	13.21.	PEMERINTAH DESA BINYUK	753.950.728,00	753.950.728,00	753.950.728,00	-	566.647.855,00	-	-	163.050.873,00	-	719.698.728,00	34.252.000,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	13.22.	PEMERINTAH DESA BENGKUANG	717.120.030,00	717.120.030,00	717.120.030,00	-	483.312.000,00	-	-	233.808.030,00	-	717.120.030,00	-
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	14.04.	PEMERINTAH DESA RIMBA TERAP	726.468.330,00	726.468.330,00	726.468.330,00	-	604.978.975,00	-	-	77.300.000,00	-	682.278.975,00	44.189.355,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	14.05.	PEMERINTAH DESA SEDANG	801.625.744,00	801.625.744,00	801.625.744,00	-	681.381.880,00	-	-	120.243.706,00	-	801.625.586,00	158,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	14.06.	PEMERINTAH DESA TANJUNG LAUT	871.254.937,00	871.254.937,00	871.254.937,00	-	678.426.930,00	-	-	188.795.937,00	-	867.222.867,00	4.032.070,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	14.07.	PEMERINTAH DESA AIR SENGGERIS	689.614.262,00	689.614.262,00	689.614.262,00	-	689.614.262,00	-	-	120.729.000,00	-	689.609.000,00	5.262,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	14.08.	PEMERINTAH DESA MERANTI	739.162.803,00	739.162.803,00	739.162.803,00	-	597.162.800,00	-	-	131.999.000,00	-	729.161.800,00	10.001.003,00
16	KECAMATAN SUAK TAPEH	14.09.	PEMERINTAH DESA SUKA RAJA	717.896.366,00	717.896.366,00	717.896.366,00	-	517.896.366,00	-	-	104.495.000,00	-	714.706.000,00	3.190.366,00
17	KECAMATAN SEMBAWA	14.10.	PEMERINTAH DESA MAINAN	814.357.478,00	814.357.478,00	814.3								

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	Anggaran 2018	Penyaluran Tahun 2018 (Sesuai Perbup)	Total	REALISASI					TOTAL REALISASI	SISA
							Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tidak Terduga		
							Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5		
17	KECAMATAN SEMBAWA	15.09.	PEMERINTAH DESA MUARA DAMAI	741.153.948,00	741.153.948,00	741.153.948,00	-	555.865.461,00	-	185.288.487,00	-	741.153.948,00	-
17	KECAMATAN SEMBAWA	15.10.	PEMERINTAH DESA PULAU HARAPAN	788.901.625,00	788.901.625,00	788.901.625,00	-	590.923.036,00	-	192.825.406,00	-	783.748.442,00	5.153.183,00
17	KECAMATAN SEMBAWA	15.11.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	730.937.815,00	730.937.815,00	730.937.815,00	-	348.073.429,00	-	95.153.888,00	-	443.227.317,00	287.710.498,00
17	KECAMATAN SEMBAWA	15.12.	PEMERINTAH DESA LIMBANG MULIA	704.725.214,00	704.725.214,00	704.725.214,00	-	496.061.056,00	-	206.885.573,00	-	702.946.629,00	1.778.585,00
17	KECAMATAN SEMBAWA	15.13.	PEMERINTAH DESA SAKO MAKMUR	708.179.708,00	708.179.708,00	708.179.708,00	-	495.726.708,00	-	212.453.000,00	-	708.179.708,00	-
17	KECAMATAN SEMBAWA	15.14.	PEMERINTAH DESA PULAU MUNING	715.351.231,00	715.351.231,00	715.351.231,00	-	572.280.985,00	-	143.070.215,00	-	715.351.200,00	31,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.01.	PEMERINTAH DESA TERUSAN DALAM	995.458.240,00	995.458.240,00	995.458.240,00	-	648.036.892,00	-	120.800.000,00	-	768.836.892,00	226.621.348,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.02.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	1.110.910.942,00	1.110.910.942,00	1.110.910.942,00	-	888.728.754,00	-	176.500.000,00	-	1.065.228.754,00	45.682.188,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.03.	PEMERINTAH DESA MUARA TELANG	1.159.314.647,00	1.159.314.647,00	1.159.314.647,00	-	919.265.118,00	-	231.862.929,00	-	1.151.128.047,00	8.186.600,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.04.	PEMERINTAH DESA TERUSAN TENGAH	1.011.199.312,00	1.011.199.312,00	1.011.199.312,00	-	808.392.050,00	-	195.239.862,00	-	1.003.631.912,00	7.567.400,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.05.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	857.299.153,00	857.299.153,00	857.299.153,00	-	685.839.322,00	-	171.459.830,00	-	857.299.152,00	1,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.06.	PEMERINTAH DESA KARANG BARU	1.144.062.596,00	1.144.062.596,00	1.144.062.596,00	-	915.250.077,00	-	228.812.519,00	-	1.144.062.596,00	-
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.07.	PEMERINTAH DESA MUARA TELANG	1.020.276.792,00	1.020.276.792,00	1.020.276.792,00	-	816.025.234,00	-	204.055.360,00	-	1.020.080.594,00	196.198,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.08.	PEMERINTAH DESA TERUSAN MUARA	1.023.781.909,00	1.023.781.909,00	1.023.781.909,00	-	819.025.527,00	-	204.756.382,00	-	1.023.781.909,00	-
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.09.	PEMERINTAH DESA TALANG LUBUK	999.250.454,00	999.250.454,00	999.250.454,00	-	799.400.363,00	-	199.750.091,00	-	999.150.454,00	100.000,00
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TEL	18.10.	PEMERINTAH DESA SRI TIGA	1.019.421.185,00	1.019.421.185,00	1.019.421.185,00	-	815.536.800,00	-	203.884.200,00	-	1.019.421.000,00	185,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.01.	PEMERINTAH DESA CINTA MANIS BAHU	833.546.000,00	833.546.000,00	833.546.000,00	-	599.210.750,00	-	218.006.000,00	-	817.216.750,00	16.329.250,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.02.	PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR	740.305.686,00	740.305.686,00	740.305.686,00	-	656.175.887,00	-	73.627.271,00	-	729.803.158,00	10.502.528,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.03.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	988.106.584,00	988.106.584,00	988.106.584,00	-	754.484.693,00	-	183.944.860,00	-	938.429.553,00	49.677.031,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.04.	PEMERINTAH DESA NUSA MAKMUR	1.010.185.765,00	1.010.185.765,00	1.010.185.765,00	-	858.225.081,00	-	151.277.500,00	-	1.009.502.581,00	683.184,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.05.	PEMERINTAH DESA RIMBA JAYA	1.025.464.951,00	1.025.464.951,00	1.025.464.951,00	-	714.490.910,00	-	302.605.739,00	-	1.017.096.649,00	8.368.302,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.06.	PEMERINTAH DESA TELUK TENGGIRI	1.154.938.875,00	1.154.938.875,00	1.154.938.875,00	-	979.317.912,00	-	168.299.501,00	-	1.147.617.413,00	7.321.462,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.07.	PEMERINTAH DESA SEBUBUS	771.776.626,00	771.776.626,00	771.776.626,00	-	634.208.578,00	-	100.279.000,00	-	734.487.578,00	37.289.048,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.08.	PEMERINTAH DESA PADANG REJO	686.896.337,00	686.896.337,00	686.896.337,00	-	411.853.390,00	-	271.608.384,00	-	683.461.774,00	3.434.563,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.09.	PEMERINTAH DESA KUMBANG PADANG	725.187.087,00	725.187.087,00	725.187.087,00	-	605.459.207,00	-	115.822.477,00	-	721.281.684,00	3.905.403,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.10.	PEMERINTAH DESA MUARA BARU	727.765.336,00	727.765.336,00	727.765.336,00	-	563.540.188,00	-	163.190.183,00	-	726.730.371,00	1.034.965,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.11.	PEMERINTAH DESA TIRTA MAKMUR	735.996.511,00	735.996.511,00	735.996.511,00	-	515.049.978,00	-	216.998.355,00	-	732.048.333,00	3.948.178,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.12.	PEMERINTAH DESA PANCA MULYA	736.490.589,00	736.490.589,00	736.490.589,00	-	598.515.245,00	-	122.806.000,00	-	721.321.245,00	15.169.344,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.13.	PEMERINTAH DESA BUDI MULYA	732.364.383,00	732.364.383,00	732.364.383,00	-	511.495.158,00	-	213.654.052,00	-	725.149.210,00	7.215.173,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.14.	PEMERINTAH DESA PANCA DESA	758.373.673,00	758.373.673,00	758.373.673,00	-	647.279.500,00	-	103.573.106,00	-	750.852.606,00	7.521.067,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.15.	PEMERINTAH DESA AIR KUMBANG BARU	701.576.274,00	701.576.274,00	701.576.274,00	-	559.842.861,00	-	84.314.500,00	-	643.797.361,00	57.778.913,00
19	KECAMATAN AIR KUMBANG	19.16.	PEMERINTAH DESA SEBOKOR	985.304.072,00	985.304.072,00	985.304.072,00	-	788.472.346,00	-	170.304.427,00	-	958.776.773,00	26.527.299,00
JUMLAH				253.420.207.000,00	252.653.921.213,00	252.653.921.213,00	-	196.221.863.561,00	-	50.128.846.465,00	-	246.350.710.026,00	6.303.211.188,00

DAFTAR PIUTANG TP/TGR
Per 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN : 6

(dalam rupiah)

No.	Nama	SKPD	Jenis Kasus (tahun)	Jumlah Kerugian	Saldo Awal 2018	Mutasi Tambah 2018	Tgl. Angsuran	Angsuran Tahun 2018	Saldo Per 31 Desember 2018	Keterangan
A. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN										
	Idris Sutakakki	Dinas Pertanian	TP 2006	28.314.525	18.814.525	-		-	18.814.525	
	Sub Jumlah TP			28.314.525	18.814.525	-		-	18.814.525	
B. TUNTUTAN GANTI RUGI										
1	Haryanto	Disnakertrans	TGR 2013	13.200.000	11.550.000	-		-	11.550.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Agustus 2013 s.d. bulan September 2015.
2	Sabikan	BPMPD	TGR 2011	4.900.000	1.900.000	-	04/06/2018	200.000	800.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2015 s.d. bulan Juni 2017
						-	26/07/2018	500.000		
						-	12/11/2018	400.000		
3	Ali Ahmad Turmudzi, S.Th.I	Dinas Sosial	TGR 2014	7.500.000	5.200.000	-	04/06/2018	500.000	3.500.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2015 s.d. bulan Juni 2017
							02/07/2018	200.000		
							01/08/2018	200.000		
							03/09/2018	200.000		
							01/10/2018	200.000		
							01/11/2018	200.000		
							03/12/2018	200.000		
4	Jimmy Abdul Wahid	Pemda Kab Banyuasin	TGR 2015	10.800.000	8.350.000	-	23/03/2018	1.500.000	3.850.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Mei 2016 s.d. bulan April 2018
							18/12/2018	3.000.000		
5	Harobin Mustopa	Mantan Kepala BPMD	TGR 2015	229.700.000	20.000.000	-	05/04/2018	5.000.000	-	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2015 s.d. bulan Juni 2017
							22/11/2018	15.000.000		
6	Amir Apriyan, SE/ Muklis. S	Staf Lurah P. Balai Kec. BA III	TGR 2015	4.800.000	2.600.000	-	15/01/2018	200.000	600.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Februari 2017 s.d. bulan Januari 2019
							06/02/2018	200.000		
							06/03/2018	200.000		
							07/05/2018	400.000		
							02/07/2018	400.000		
							07/08/2018	200.000		
							12/10/2018	400.000		
7	Santo, S.Sos., M.Si	Staf Lurah Seterio Kec. BA III	TGR 2015	6.500.000	3.530.000	-	15/01/2018	270.000	830.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Februari 2017 s.d. bulan Januari 2019
							06/02/2018	270.000		
							06/03/2018	270.000		
							07/05/2018	540.000		
							02/07/2018	540.000		
							07/08/2018	270.000		
							12/10/2018	540.000		
8	Nasukin, S.Sos	Staf Bagian Umum Setda Kab. Banaasin	TGR 2016	7.000.000	5.248.000	-	03/01/2018	292.000	1.744.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Februari 2017 s.d. bulan Januari 2019
							01/02/2018	292.000		
							01/03/2018	292.000		
							02/04/2018	292.000		
							02/05/2018	292.000		
							04/06/2018	292.000		
							02/07/2018	292.000		
							01/08/2018	292.000		
							03/09/2018	292.000		
							01/10/2018	292.000		
							01/11/2018	292.000		
							03/12/2018	292.000		

No.	Nama	SKPD	Jenis Kasus (tahun)	Jumlah Kerugian	Saldo Awal 2018	Mutasi Tambah 2018	Tgl. Angsuran	Angsuran Tahun 2018	Saldo Per 31 Desember 2018	Keterangan
9	H.M. Sanusi Hamid, MM	Ketua BAZ Kab. Banyuasin	TGR 2014	12.000.000	11.500.000	-		-	11.500.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2017 s.d Juni 2019
10	Rayen Supriyan	Penyuluh, Pertanian dan Peternakan D	TGR 2015	10.000.000	9.166.000	-	09/01/2018	300.000	7.366.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2017 s.d Juni 2019
							27/03/2018	300.000		
							23/05/2018	300.000		
							03/07/2018	300.000		
							09/08/2018	300.000		
							01/10/2018	300.000		
11	Erzozanto, SE., M.Si	Kasi Pelaporan BPKAD Kab. Banyuasin	TGR 2017	13.100.000	2.735.000	-	23/03/2018	400.000	1.735.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2017 s.d Juni 2019
							06/08/2018	120.000		
							05/09/2018	120.000		
							03/10/2018	120.000		
							01/11/2018	120.000		
							04/12/2018	120.000		
12	Adam, S.Pd., M.Si	Guru SDN 19 Talang Kelapa pindah ke SDN 33 Tlg Kelapa	TGR 2017	179.810.560	179.310.560	-	08/01/2018	300.000	176.760.560	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2017 s.d Juni 2019
							26/06/2018	1.000.000		
							05/07/2018	1.000.000		
							10/12/2018	250.000		
13	Munawaroh, A. Ma.Pd.	Kepala Sekolah SDN 2 Lubuk Lancang Kec. Betung	TGR -2004	-	12.769.500	-		-	12.769.500	
14	Imelda Delima Anggraeni, S.P	Penyuluh Pertanian Air Kumbang	TGR -2018	5.635.393,00		5.635.393	06/06/2018	250.000	4.930.393	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juni 2018 s.d Mei 2019
							15/08/2018	455.000		
15	Rizaludin, Sh., M.Si	Kasi Penata Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuasin	TGR -2018	14.000.000	-	14.000.000	08/05/2018	11.700.000	1.600.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juni 2018 s.d Mei 2020
							01/11/2018	600.000		
							03/12/2018	100.000		
16	Amir Hamzah, S.Pd.i	Kepala Seksi PMD Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin	TGR -2018	11.000.000	-	11.000.000	02/08/2018	460.000	8.700.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juni 2018 s.d Mei 2020
							03/09/2018	460.000		
							01/10/2018	460.000		
							02/11/2018	460.000		
							03/12/2018	460.000		
17	Firmansyah, S.Thi	Kepala UPT DPPKBPP dan PA Kecamatan Sumber Marga Telang (2016- 2017)	TGR -2018	3.562.000	-	3.562.000	08/06/2018	200.000	2.362.000	Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juni 2018 s.d Mei 2020
							20/07/2018	200.000		
							08/08/2018	200.000		
							13/09/2018	200.000		
							17/10/2018	200.000		
							13/12/2018	200.000		
18	Zainal Makmun, S.Sos, MH	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin	TGR -2018	9.250.000	-	9.250.000	20/12/2018	5.000.000	4.250.000	Jangka waktu 6 (enam) bulan tmt bulan Desember 2018 s.d Mei 2019
19	Tri Yudha Rasman, A.Md	Penyuluhan Perikanan Kecamatan Tanjung Lago BRPPUPP Jakabaring	TGR -2018	5.000.000	-	5.000.000			5.000.000	Jangka waktu 6 (enam) bulan tmt bulan Desember 2018 s.d Mei 2019
					(3.000.000)					
Sub Jumlah/TGR				547.757.953	270.859.060	48.447.393		62.459.000	259.847.453	
Sub Jumlah TPTGR				576.072.478	289.673.585	48.447.393		62.459.000	278.661.978	

Catatan :
3.000.000 merupakan setoran Tgl 27 Mei 2016 yang belum diketahui penyetornya (Koreksi di Tahun 2018 atas piutang yang sudah diakui namun belum diketahui penyetornya)

**TP/TGR (KASUS KERUGIAN DAERAH YANG SEDANG DALAM PROSES PENETAPAN PEMBEBANAN)
Per 31 DESEMBER 2018**

NO	NAMA	SKPD	TP/TGR	PENJELASAN	NILAI ASET
1	Arif Maulana	Lurah Makarti Jaya yang Mutasi ke BKD Muba	TGR (2005)	Pengambilan barang inventaris berupa motor dinas Yamaha RXS BG. 8491 BZ.	-
2	Pahrudin Putra Jaya bin Marzuki	TNI AD	TGR 2008	Kehilangan motor dinas Sekretariat Daerah Merk Honda Mega Pro Tahun 2005 BG. 5372 JZ pada Hari minggu tanggal 11 Mei 2008	15.000.000,00
3	Munawaroh, A.Ma.Pd	Kepala Sekolah SDN 2 Lubuk Lancang Kec. Betung	TGR (2004)	Pembayaran gaji kepada Pegawai yang tidak melaksanakan tugas an. Pardi	12.769.500,00
4	Indirwan	Plt. Kepala Desa Prajen Jaya Kecamatan Banyuasin II (2015)	TGR (2018)	Penyimpangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan PPN serta PPh Tahun 2015	-
Jumlah					27.769.500,00

**DAFTAR REKAPITULASI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 ATAS KELEBIHAN BELANJA PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB. BANYUASIN
 TAHUN ANGGARAN 2003 S/D TAHUN ANGGARAN 2008 PER 31 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN : 8

No.	Nama	TOTAL PIUTANG					ANGSURAN 2008		ANGSURAN 2010		ANGSURAN 2012		ANGSURAN 2013		ANGSURAN 2014		ANGSURAN 2016		ANGSURAN 2018		JUMLAH ANGSURAN	SALDO	KET						
		Thn. 2003	Thn. 2004	Thn. 2005	Thn. 2006	Thn. 2008	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor									
1	Zaimul Bachri Haz	95.228.347	95.544.520																		-	190.772.867							
2	Letkol (CHB) Muhadi, ST., MM	92.007.555	22.172.520																		-	114.180.075							
3	Mustofa Hansaria	89.103.205	95.391.520																		-	184.494.725	meninggal dunia						
4	Rusdi Alam	84.604.375	95.842.520																		-	180.446.895							
5	Abdullah A. Gani	89.881.379	95.776.520																		-	185.657.899							
6	Heryati, A.Md	84.428.805	97.362.420	10.390.000	15.000.000																-	207.181.225							
7	Darmawan Hulik	17.428.805	97.362.420	15.000.000	15.000.000																-	144.791.225							
8	A. Rival Jafar	89.428.805	96.053.420																		-	185.482.225							
9	Drs. Bambang Edi Agusno	89.183.455	95.283.420																		-	184.466.875							
10	Drs. H. Zawawi Mukhtar	83.090.805	82.131.692																		-	165.222.497							
																					14.000.000	23-04-2014 STS REK. 167-300-0002	42.000.000	123.222.497					
																					14.000.000	05-03-2014 STS REK. 167-300-0002							
																					14.000.000	12-08-2014 STS REK. 167-300-0002							
11	Lili Antala Dewa, SH	5.552.995	97.635.960	17.990.000	15.000.000																-	2.016.400	10-01-2014	260.000	26-12-2016	138.455.355	-	lunas	
																						-	15.000.000	10-01-2014				-	
																						-	17.990.000	10-01-2014				-	
																						-	2.115.000	10-01-2014				-	
																						-	95.520.960	10-01-2014				-	
																						-	5.552.995	10-01-2014				-	
12	H. Nafian Ham	89.325.455	95.722.420																		-	185.047.875							
13	Aswarini Mustofa	84.517.995	95.507.420																		-	180.025.415							
14	Mareta Herawati, SH	89.377.145	94.542.420																		-	183.919.565							
15	H. Muslim Bukhari, SH., MM	90.312.329	95.791.960																		-	186.104.289							
16	HM. Rasyid Yusuf	84.428.805	95.410.420																		-	179.839.225							
17	Amriadi, S.ip	88.606.995	95.887.960																		-	184.494.955							
18	Martini Senen	89.215.615	95.379.420																		-	184.595.035							
19	Drs. Nur Wahid	10.177.805	58.788.960	14.920.000	12.000.000																-	97.648.765							
20	A.A. Demiyati Mahasar	88.580.217								5.000.000	23-07-2012										-	88.580.217							
21	Sugeng, SE	92.358.805	28.912.420	15.000.000	15.000.000																-	152.425.225							
22	Arbain Syahri, SH	88.261.139	95.929.960																		-	184.191.099							
23	Gunaryo	92.054.805	95.885.420																		-	187.940.225							
24	Ir. A.A. Masruri, M.Sc	93.402.217	87.460.420																		-	180.862.637							
																					-	1.000.000	06-02-2014				8.000.000	172.862.637	
																					-	1.000.000	06-03-2014					-	
																					-	1.000.000	24-03-2014					-	
																					-	4.000.000	07-07-2014					-	
																					-	1.000.000	04-09-2014					-	
25	A. Haris, SH	92.921.981	96.097.960																		-	189.019.941							
26	Burhanudin HN	87.304.805	95.611.420																		-	184.930.625							
27	Drs. H. Soemadi,AS	45.538.895	95.519.520	13.769.000	15.000.000																-	169.827.415							
28	Irian Setiawan, SH	53.215.615	75.997.420	11.190.000	10.000.000					5.000.000	23/03/2010										-	152.174.335							
																					-	5.000.000	24-04-2013					-	
																					-	2.000.000	24-05-2013					-	
																					-	11.190.000	24-04-2013					-	
																					-	1.000.000	21-05-2013					-	
																					-	66.882.420	25-11-2013					-	
																					-	40.000.000	22-11-2013					-	
29	Rozal Rahmat	86.020.805																			-	86.020.805							
30	Akmal Maas	88.393.805	95.885.960																		-	184.279.765							
																					-	500.000	07-03-2014					-	
																					-	500.000	07-04-2014					-	
31	Suis Tiqlal Effendi	89.496.815	94.857.960																		-	184.354.775							
32	Kapt. Inf. Tusiran	87.993.789	95.943.420																		-	183.937.209							
33	Kapt. (Sus) Abdul Atik, S.Ag., S.Sc	92.309.115	95.485.960																		-	187.795.075							
34	Darmadi	89.271.955	95.655.420																		-	184.927.375							
35	Napoleon, BA	6.492.250																			-	6.492.250							
36	Drs. Amir Hamzah Yusuf	75.625.685																			-	75.625.685							
37	HASAN HM		89.783.520	15.000.000	15.000.000																-	123.979.920							
38	JUNAIDI		95.684.520	15.000.000	15.000.000																-	128.394.520							
39	BAMBANG SUNGKOWO		96.918.420	19.000.000	15.000.000																-	130.918.420							
40	DONI ANTHONI		2.115.000	19.250.000	15.000.000																-	41.240.800							
41	DR. (HC) SYAMSURI H.A. JAHR		75.064.420	15.000.000	15.000.000																-	1.800.800							
42	RUDIYANTO		2.115.000	19.000.000	15.000.000																-	38.823.300							
43	DRS. RUSDI HASIR		97.853.420	17.000.000	15.000.000																-	132.734.020							
44	DRS. AGUS MUHAEMIN		2.115.000	19.390.000	15.000.000																-	36.505.000							
45	NURMALA DEWI		95.237.960	17.000.000	15.000.000				</																				

No.	Nama	TOTAL PIUTANG					ANGSURAN 2008		ANGSURAN 2010		ANGSURAN 2012		ANGSURAN 2013		ANGSURAN 2014		ANGSURAN 2016		ANGSURAN 2018		JUMLAH ANGSURAN	SALDO	KET	
		Thn. 2003	Thn. 2004	Thn. 2005	Thn. 2006	Thn. 2008	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor				
50	AGUS WAHYU NUGROHO		50.603.420				50.603.420														-	50.603.420		
51	AH. DEMYATI MAHASAR		96.520.420				96.520.420														-	96.520.420		
52	YUDHI TRI SETYA DARMA, ST		67.313.000				67.313.000														-	67.313.000		
53	ARKONI, MD			22.004.000	21.000.000		43.004.000						2.000.000	09-04-2013				4.000	12-10-2018		43.004.000	-	lunas	
													21.000.000	09-04-2013							-	-		
													20.000.000	03-04-2013							-	-		
54	JOKO AMINOTO			13.000.000	14.000.000	2.070.900	29.070.900								29.070.900	28-01-2014					29.070.900	-	lunas	
55	ANDRIYADI, S.KOM			15.000.000	13.000.000	954.100	28.954.100								954.100	09-01-2014					28.954.100	-	lunas	
															13.000.000	09-01-2014					-	-		
															15.000.000	09-01-2014					-	-		
56	AMRAN MUSLIM			15.990.000	15.000.000	4.989.500	35.979.500														-	35.979.500		
57	H.A. GOFAR PASOLONG			17.000.000	15.000.000	2.251.000	34.251.000								4.251.000	04-03-2014					4.251.000	-	30.000.000	
58	DARWIN A. ROHIM			17.000.000	15.000.000	2.793.000	34.793.000														-	34.793.000		
59	ANSORI, SH			19.600.000	15.000.000	5.438.300	40.038.300								1.000.000	19-03-2014					1.000.000	-	39.038.300	
60	DIAN TURIS KAEMIRAWATI			17.000.000	15.000.000	3.450.600	35.450.600														-	35.450.600		
61	HJ. FITRIANA,SE			15.000.000	15.000.000	1.949.400	31.949.400								3.920.000	06-02-2014					33.920.000	-	lebih setor 1.970.600 (koreksi tahun 2018 atas kesalahan pencatatan 4.000)	
															30.000.000	14-04-2014					-	-		
62	JAMALUDDIN			17.390.000	15.000.000	4.524.000	36.914.000								1.000.000	04-04-2014					1.000.000	-	35.914.000	
63	LEDI RISDYANTO			19.000.000	15.000.000	2.053.200	36.053.200								5.000.000	06-03-2014					5.000.000	-	31.053.200	
64	NASRUL HALIM, SH			18.390.000	14.000.000	2.620.500	35.010.500								2.620.500	20-06-2013					35.010.500	-	lunas	
															14.000.000	20-06-2013					-	-		
															15.290.000	20-06-2013					-	-		
															3.100.000	21-05-2013					-	-		
65	H. HAZWAR HAMID			17.600.000	15.000.000	3.435.800	36.035.800								3.000.000	04-03-2014					3.000.000	-	33.035.800	
66	BANBANG BEROHIM			15.990.000	15.000.000		30.990.000														-	30.990.000		
67	SARJANI			17.390.000	15.000.000	3.319.000	35.709.000														-	35.709.000		
68	SLAMET SOMO SENTONO				13.500.000	4.107.000	17.607.000	5.500.000	09-10-2008					4.107.000	04-11-2013						17.607.000	-	lunas (koreksi tahun 2018 atas kesalahan pencatatan 196.000)	
								5.000.000	02-05-2008												-	-		
								1.500.000	09-09-2008												-	-		
								1.500.000	22-09-2008												-	-		
69	SUNARDI STEPHANUS HARIADI/ SITI KARYANI				15.000.000		15.000.000														-	15.000.000		
70	A. KORDIAN, AR				15.000.000		15.000.000								1.500.000	10-03-2014					7.000.000	-	8.000.000	
															3.500.000	01-04-2014					-	-		
															2.000.000	06-05-2014					-	-		
71	ROILAN H. ROZALI				7.500.000	2.103.700	9.603.700								7.500.000	13-02-2014					7.500.000	-	2.103.700	
72	JUFRIANTO				15.000.000	2.905.700	17.905.700								2.905.700	27-01-2014					17.905.700	-	lunas	
															6.094.300	27-01-2014					-	-		
															8.905.700	14-11-2014					-	-		
73	A. YANI					2.793.000	2.793.000														-	2.793.000	-	PNS/meninggal dunia
74	ABD. RIFQEE S					2.805.000	2.805.000														-	2.805.000	-	PNS/belum bayar
75	AMINUDDIN, S.Sos					732.700	732.700								732.700	06-05-2013					732.700	-	PNS/lunas	
76	Drs. Nazaruddin					220.400	220.400								220.400	06-05-2013					220.400	-	PNS/lunas	
77	Fihrin Siregar, SH					515.500	515.500								515.500	23-01-2014					515.500	-	PNS/lunas	
78	Gatot Setioko					723.400	723.400								723.400	07-01-2014					723.400	-	PNS/lunas	
79	H. Agus Salam					2.298.500	2.298.500								2.298.500	28-03-2013					2.298.500	-	lunas	
80	H. Hendri Z, S. Ag					3.911.600	3.911.600								3.911.600	28-01-2014					3.911.600	-	lunas	
81	H. M. Basjir DA					815.600	815.600								815.600	28-03-2013					815.600	-	lunas	
82	Hierawati					565.500	565.500								565.500	22-01-2014					565.500	-	lunas	
83	Ihram Haidi, S. Hut					2.188.300	2.188.300								2.188.300	14-02-2014					2.188.300	-	lunas	
84	Ir. Wala K, MM					331.900	331.900								331.900	11-11-2013					331.900	-	lunas	
	JUMLAH	2.795.143.373	3.720.588.692	568.093.000	570.000.000	105.873.200	7.759.698.265	13.500.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	220.689.020	-	640.206.810	-	260.000	-	4.000	-	884.659.830	6.877.009.035.000	-

NO	Kode SKPD	Nama SKPD	Bahan Habis Pakai						Bahan material					Bahan Yang akan diserahkan			Jumlah Persediaan
			ATK	Alat Listrik	Alat Kebersihan	Bahan Bakar Minyak	Habis Pakai Lainnya	Jumlah	Bibit Tanaman dan Ternak	Obat-obatan dan Bahan Kimia	Bahan Makanan	Material Lainnya	Jumlah	Hibah	Bantuan Sosial	Jumlah	
44	4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.099.125,00	-	-	-	-	4.099.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.099.125,00
45	4.04.09.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	359.847.595,00	-	-	-	294.327.140,00	654.174.735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	654.174.735,00
46	4.04.09.02	Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	4.05.07.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.307.000,00	-	-	-	165.500,00	1.472.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.472.500,00
JUMLAH			637.120.708,00	18.678.630,00	155.548.650,00	317.852.540,00	2.994.946.416,00	4.124.146.944,00	1.282.000,00	10.463.923.386,06	115.594.500,00	0,00	10.580.799.886,06	0,00	487.370.166,00	487.370.166,00	15.192.316.996,06

KABUPATEN BANYUASIN
REKAPITULASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN : 10

No	Nama Persediaan	Saldo Awal	Uraian Belanja	Belanja Persediaan	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Beban Subsidi	Reklas dari belanja moda	Hutang Tahun Lalu	Hutang Berjalan	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke aset Tetap	Beban Persediaan	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Subsidi	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	827.351.813	Belanja Alat Tulis Kantor	9.558.323.499,00	-	-	-	2.500.000,00	-	-	9.560.823.499,00	-	9.751.054.604,00	-	-	-	9.751.054.604,00	637.120.708,00
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	25.185.000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.108.035.692,00	-	-	-	-	-	-	2.108.035.692,00	28.600.000,00	2.085.942.062,00	-	-	-	2.114.542.062,00	18.678.630,00
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.179.000	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.546.000,00	-	-	-	-	-	-	260.546.000,00	-	260.416.000,00	-	-	-	260.416.000,00	1.309.000,00
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	212.252.950	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.710.909.150,00	-	-	-	4.000.000,00	-	-	1.714.909.150,00	8.000.000,00	1.763.613.450,00	-	-	-	1.771.613.450,00	155.548.650,00
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.904.743.509,00	-	-	-	-	-	-	1.904.743.509,00	-	1.586.890.969,00	-	-	-	1.586.890.969,00	317.852.540,00
6	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.615.000,00	-	-	-	-	-	-	6.615.000,00	-	6.615.000,00	-	-	-	6.615.000,00	-
7	Persediaan Isi tabung gas	-	Belanja Pengisian Tabung Gas	253.805.000,00	-	-	-	-	-	-	253.805.000,00	-	253.805.000,00	-	-	-	253.805.000,00	-
8	Persediaan habis pakai lainnya	4.000.000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.388.850.359,00	-	-	-	-	-	-	4.388.850.359,00	-	4.392.850.359,00	-	-	-	4.392.850.359,00	-
9	Persediaan habis pakai lainnya	1.692.308.727	Belanja Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan lainnya	6.988.540.950,76	-	-	-	37.896.656,90	(512.271.150,65)	526.639.152,62	7.040.805.609,63	144.692.730,38	6.557.938.130,24	-	-	-	6.702.631.860,63	2.030.482.476,00
10	Persediaan Bahan baku bangunan	-	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.800.000,00	-	-	-	-	-	-	23.800.000,00	-	23.800.000,00	-	-	-	23.800.000,00	-
11	Persediaan Bahan/bibit tanaman	-	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	27.350.000,00	-	-	-	-	-	-	27.350.000,00	-	27.350.000,00	-	-	-	27.350.000,00	-
12	Persediaan Bibit ternak	6.010.000	Belanja Bibit Ternak	81.760.000,00	-	-	-	-	-	-	81.760.000,00	-	86.488.000,00	-	-	-	86.488.000,00	1.282.000,00
13	Persediaan Bahan obat-obatan	10.306.424.455	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.589.302.655,74	-	-	-	-	-	-	8.589.302.655,74	-	8.434.453.724,31	-	-	-	8.434.453.724,31	10.461.273.386,06
14	Persediaan Bahan kimia	-	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	278.253.000,00	-	-	-	-	-	-	278.253.000,00	-	275.603.000,00	-	-	-	275.603.000,00	2.650.000,00
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok	58.762.450	Belanja Persediaan Makanan Pokok	731.913.129,72	-	-	-	92.454.500,00	-	-	824.367.629,72	-	767.535.579,72	-	-	-	767.535.579,72	115.594.500,00
16	Persediaan Material/Bahan Lainnya	-	Belanja Hadiah	1.100.305.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100.305.000,00	-	1.100.305.000,00	-	-	-	1.100.305.000,00	-
17	Persediaan Material/Bahan Lainnya	-	Belanja Bahan Percontohan	378.833.000,00	-	-	-	-	-	-	378.833.000,00	-	378.833.000,00	-	-	-	378.833.000,00	-
18	Persediaan Barang Cetak	924.636.888	Belanja Cetak	9.786.127.911,00	-	-	-	-	-	-	9.786.127.911,00	186.400.000,00	9.561.329.059,00	-	-	-	9.747.729.059,00	963.035.740,00
19	Persediaan Barang Cetak	107.000	Belanja Penggandaan	4.305.491.258,00	-	-	-	-	-	-	4.305.491.258,00	-	4.305.479.058,00	-	-	-	4.305.479.058,00	119.200,00
20	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	695.860.000,00	-	-	-	-	-	-	695.860.000,00	-	695.860.000,00	-	-	-	695.860.000,00	-
21	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	408.459.000,00	-	-	-	-	-	-	408.459.000,00	-	408.459.000,00	-	-	-	408.459.000,00	-
22	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	398.779.840,00	-	-	-	-	-	-	398.779.840,00	-	398.779.840,00	-	-	-	398.779.840,00	-
23	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.218.296.000,00	-	-	-	-	-	-	1.218.296.000,00	-	1.218.296.000,00	-	-	-	1.218.296.000,00	-
24	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-
25	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	251.886.000,00	-	-	-	-	-	-	251.886.000,00	-	251.886.000,00	-	-	-	251.886.000,00	-
26	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Dinas Lapangan (PDL)	1.657.287.560,00	-	-	-	-	-	-	1.657.287.560,00	-	1.657.287.560,00	-	-	-	1.657.287.560,00	-
27	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.358.190.770,00	-	-	-	5.000.000,00	-	-	1.358.190.770,00	-	1.358.190.770,00	-	-	-	1.358.190.770,00	-
28	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Tas Kerja	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-	16.500.000,00	-	16.500.000,00	-	-	-	16.500.000,00	-
29	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.850.000,00	-	-	-	-	-	-	17.850.000,00	-	17.850.000,00	-	-	-	17.850.000,00	-
30	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Batik Tradisional	614.999.932,00	-	-	-	-	-	-	614.999.932,00	-	614.999.932,00	-	-	-	614.999.932,00	-
31	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Olahraga	572.600.000,00	-	-	-	-	-	-	572.600.000,00	-	572.600.000,00	-	-	-	572.600.000,00	-
32	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Barang Dana BOS	75.726.284.991,09	-	-	-	-	-	-	75.726.284.991,09	-	75.726.284.991,09	-	-	-	75.726.284.991,09	-
33	Persediaan Barang Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan	603.169.693	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	387.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	574.358.165,00	574.358.165,00	416.391.528,00
34	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat	-	7.659.884.669,30	-	-	-	(121.266.794,20)	-	7.538.617.875,10	-	-	7.538.617.875,10	-	-	7.538.617.875,10	-
35	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	68.618.000,00	-	-	-	(25.618.000,00)	-	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00	-
36	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perkonomian	-	2.373.786.100,00	-	-	-	(8.740.000,00)	-	2.365.046.100,00	-	-	2.365.046.100,00	-	-	2.365.046.100,00	-
37	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	-	3.838.992.750,00	-	-	-	(9.929.050,00)	14.889.400,00	3.843.953.100,00	-	-	3.843.953.100,00	-	-	3.843.953.100,00	-
38	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	-	7.722.435.409,13	-	-	-	(74.069.591,34)	7.439.600,00	7.655.805.417,79	-	-	7.655.805.417,79	-	-	7.655.805.417,79	-
39	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	-	1.174.274.100,00	-	-	-	(2.469.100,00)	-	1.171.805.000,00	-	-	1.171.805.000,00	-	-	1.171.805.000,00	-

No	Nama Persediaan	Saldo Awal	Uraian Belanja	Belanja Persediaan	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Beban Subsidi	Reklas dari belanja moda	Hutang Tahun Lalu	Hutang Berjalan	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke aset Tetap	Beban Persediaan	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Subsidi	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	14	15	16	17	18	19	20	21
40	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	-	1.172.777.977,45	-	-	-	(71.038.000,00)	-	1.101.739.977,45	-	-	1.101.739.977,45	-	-	1.101.739.977,45	-
41	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Adat Istiadat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Desa	-	6.947.905.900,00	-	-	-	-	-	6.947.905.900,00	-	-	6.947.905.900,00	-	-	6.947.905.900,00	-
43	Persediaan Barang Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan	-	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Kemiskina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Persediaan Barang Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan	-	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	-	-	82.705.000,00	-	-	-	-	82.705.000,00	-	-	-	11.726.362,00	-	11.726.362,00	70.978.638,00
45	Persediaan Barang Hadiah Yang Akan Diserahkan	-	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga	64.500.000,00	-	-	-	-	-	-	64.500.000,00	-	64.500.000,00	-	-	-	64.500.000,00	-
46	Persediaan Barang Hadiah Yang Akan Diserahkan	-	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Masyarakat	9.100.000,00	-	-	-	-	-	-	9.100.000,00	-	9.100.000,00	-	-	-	9.100.000,00	-
	Jumlah	14.661.387.975,63		135.504.099.207,31	30.958.674.905,88	82.705.000,00	387.580.000,00	141.851.156,90	(825.401.686,19)	548.968.152,62	166.798.476.736,52	367.692.730,38	134.645.897.088,36	30.667.873.370,34	11.726.362,00	574.358.165,00	166.267.547.716,09	15.192.316.996,06

KABUPATEN BANYUASIN
REKAPTULASI PERSEDIAAN PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN : 11

NO.	KODE SKPD	NAMA SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang					Saldo Akhir Persediaan			
				Realisasi LRA				Reklas dari Belanja Modal	Hutang Tahun Lalu	Hutang Berjalan	Jumlah Mutasi Tambah	Reklas Persediaan ke Aset Tetap	Beban Persediaan	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial		Beban Subsidi	Jumlah Mutasi Kurang	
				Belanja Persediaan	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Subsidi												5
1	1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.146.716.639,03	11.163.736.267,00	-	-	172.540.000,00	-	-	-	-	11.336.276.267,00	46.751.130,38	10.905.714.514,59	-	-	172.540.000,00	11.125.005.644,97	9.357.987.261,06
2	1.02.01.01	Dinas Kesehatan	2.895.242.943,60	6.606.099.116,22	-	-	-	910.000,00	(512.271.150,65)	526.639.152,62	6.621.377.118,19	-	6.226.113.174,79	-	-	-	6.226.113.174,79	3.290.506.887,00	
3	1.02.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah	312.000,00	1.919.537.500,00	-	-	-	-	(152.960.635,54)	22.329.000,00	21.312.985.983,89	-	1.919.329.500,00	19.393.448.483,89	-	-	-	21.312.777.983,89	520.000,00
4	1.03.01.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	1.246.342.750,00	-	-	-	-	-	-	1.246.342.750,00	-	867.707.810,00	-	-	-	-	867.707.810,00	378.634.940,00
5	1.03.02.01	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	91.863,00	603.883.350,00	-	-	82.705.000,00	-	2.500.000,00	-	689.088.350,00	-	606.157.213,00	-	11.726.362,00	-	-	617.883.575,00	71.296.638,00
6	1.05.01.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	394.337.100,00	-	-	-	-	-	-	394.337.100,00	-	394.337.100,00	-	-	-	-	394.337.100,00	-
7	1.05.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	71.104.080,00	578.863.960,00	-	-	130.690.000,00	-	-	-	709.553.960,00	-	522.317.940,00	-	-	131.035.000,00	653.352.940,00	127.305.100,00	
8	1.06.01.01	Dinas Sosial	-	117.648.250,00	-	-	-	-	-	-	117.648.250,00	-	117.648.250,00	-	-	-	-	117.648.250,00	-
9	2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	427.765.085,00	25.618.000,00	-	-	-	(25.618.000,00)	-	427.765.085,00	-	427.765.085,00	-	-	-	-	427.765.085,00	-
10	2.03.01.01	Dinas Keluhan Pangan	2.650.500,00	742.554.200,00	-	-	-	-	-	-	742.554.200,00	186.400.000,00	554.641.450,00	-	-	-	-	741.041.450,00	4.163.250,00
11	2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup	921.637.188,00	2.223.174.420,00	-	-	-	-	-	-	2.223.174.420,00	-	2.573.615.008,00	-	-	-	-	2.573.615.008,00	571.196.600,00
12	2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	454.912.900,00	-	-	3.500.000,00	-	5.000.000,00	-	463.412.900,00	-	459.912.900,00	-	-	3.500.000,00	463.412.900,00	-	
13	2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	535.579.693,00	746.536.877,00	-	-	77.500.000,00	-	-	-	824.036.877,00	-	744.737.677,00	-	-	263.933.165,00	1.008.670.842,00	350.945.728,00	
14	2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.798.500,00	522.577.600,00	1.982.479.750,00	-	-	-	4.000.000,00	-	2.509.057.350,00	36.600.000,00	489.977.100,00	1.982.479.750,00	-	-	-	2.509.056.850,00	1.799.000,00
15	2.09.01.01	Dinas Perhubungan	6.865.400,00	1.785.016.980,00	-	-	-	-	-	-	1.785.016.980,00	-	1.791.552.380,00	-	-	-	-	1.791.552.380,00	330.000,00
16	2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1.399.031.563,00	43.000.000,00	-	-	-	-	-	1.442.031.563,00	39.000.000,00	1.357.901.763,00	43.000.000,00	-	-	-	1.439.901.763,00	2.129.800,00
17	2.11.01.01	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.140.750,00	429.254.500,00	-	-	-	-	-	-	429.254.500,00	-	407.921.400,00	-	-	-	-	407.921.400,00	22.473.850,00
18	2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	39.802.500,00	569.855.772,00	1.324.492.100,00	-	-	-	92.454.500,00	(8.740.000,00)	1.978.062.372,00	-	690.810.272,00	1.315.752.100,00	-	-	-	2.006.562.372,00	11.302.500,00
19	3.01.01.01	Dinas Perikanan	316.727.945,00	774.423.795,00	1.049.294.000,00	-	-	-	-	-	1.823.717.795,00	-	970.814.295,00	1.049.294.000,00	-	-	-	2.020.108.295,00	120.337.445,00
20	3.03.01.01	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	4.01.01.01	DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	4.01.02.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	171.700.300,00	6.870.025.852,00	794.200.000,00	-	-	-	-	-	7.664.225.852,00	58.941.600,00	6.809.762.777,00	794.200.000,00	-	-	-	7.662.904.377,00	173.021.775,00
23	4.01.03.01	Sekretariat Daerah	-	6.258.389.565,00	-	-	-	-	-	-	6.258.389.565,00	-	6.223.134.178,00	-	-	-	-	6.223.134.178,00	35.255.387,00
24	4.01.04.01	Sekretariat DPRD	-	495.260.250,00	-	-	-	-	-	-	495.260.250,00	-	491.626.400,00	-	-	-	-	491.626.400,00	3.633.850,00
25	4.01.05.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	178.454.560,00	-	-	-	-	-	-	178.454.560,00	-	178.132.560,00	-	-	-	-	178.132.560,00	322.000,00
26	4.01.06.01	Kecamatan Banyuwangi I	-	472.258.320,00	-	-	-	-	-	-	472.258.320,00	-	470.758.320,00	-	-	-	-	470.758.320,00	1.500.000,00
27	4.01.07.01	Kecamatan Banyuwangi III	-	217.759.132,00	-	-	-	-	-	-	217.759.132,00	-	217.378.882,00	-	-	-	-	217.378.882,00	380.250,00
28	4.01.08.01	Kecamatan Betung	-	219.223.206,00	-	-	-	-	-	-	219.223.206,00	-	219.223.206,00	-	-	-	-	219.223.206,00	-
29	4.01.09.01	Kecamatan rantau Bayur	-	246.531.000,00	-	-	-	-	-	-	246.531.000,00	-	246.141.250,00	-	-	-	-	246.141.250,00	389.750,00
30	4.01.10.01	Kecamatan Pulau Rimau	-	297.027.000,00	-	-	-	-	-	-	297.027.000,00	-	296.592.000,00	-	-	-	-	296.592.000,00	435.000,00
31	4.01.11.01	Kecamatan Talang Kelapa	-	203.413.640,00	-	-	-	-	-	-	203.413.640,00	-	203.046.640,00	-	-	-	-	203.046.640,00	367.000,00
32	4.01.12.01	Kecamatan Rambutan	-	164.309.600,00	-	-	-	-	-	-	164.309.600,00	-	164.309.600,00	-	-	-	-	164.309.600,00	-
33	4.01.13.01	Kecamatan Tungkal Ilir	-	145.087.800,00	-	-	-	-	-	-	145.087.800,00	-	145.087.800,00	-	-	-	-	145.087.800,00	-
34	4.01.14.01	Kecamatan Tanjung Lago	-	203.430.150,00	-	-	-	-	-	-	203.430.150,00	-	201.336.150,00	-	-	-	-	201.336.150,00	2.094.000,00
35	4.01.15.01	Kecamatan Sembawa	1.093.000,00	119.938.165,00	-	-	-	-	-	-	119.938.165,00	-	120.606.040,00	-	-	-	-	120.606.040,00	425.125,00
36	4.01.16.01	Kecamatan Suak Tapeh	-	156.346.920,00	-	-	-	-	-	-	156.346.920,00	-	156.346.920,00	-	-	-	-	156.346.920,00	-
37	4.01.17.01	Kecamatan Banyuwangi II	332.500,00	127.104.200,00	-	-	-	-	-	-	127.104.200,00	-	127.114.200,00	-	-	-	-	127.114.200,00	322.500,00
38	4.01.18.01	Kecamatan Makarti Jaya	-	194.294.193,00	-	-	-	-	-	-	194.294.193,00	-	194.294.193,00	-	-	-	-	194.294.193,00	-
39	4.01.19.01	Kecamatan Muara Padang	-	220.331.750,00	-	-	-	-	-	-	220.331.750,00	-	220.331.750,00	-	-	-	-	220.331.750,00	-
40	4.01.20.01	Kecamatan Muara Sugihan	-	168.021.600,00	-	-	-	-	-	-	168.021.600,00	-	168.021.600,00	-	-	-	-	168.021.600,00	-
41	4.01.21.01	Kecamatan Muara Telang	-	150.517.380,00	-	-	-	-	-	-	150.517.380,00	-	150.517.380,00	-	-	-	-	150.517.380,00	-
42	4.01.22.01	Kecamatan Air Salek	-	112.980.100,00	-	-	-	-	-	-	112.980.100,00	-	112.980.100,00	-	-	-	-	112.980.100,00	-
43	4.01.23.01	Kecamatan Sumber Marga Telang	-	144.612.315,00	-	-	-	-	-	-	144.612.315,00	-	144.612.315,00	-	-	-	-	144.612.315,00	-

NO.	KODE SKPD	NAMA SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah								Mutasi Kurang					Saldo Akhir Persediaan	
				Realisasi LRA				Reklas dari Belanja Modal	Hutang Tahun Lalu	Hutang Berjalan	Jumlah Mutasi Tambah	Reklas Persediaan ke Aset Tetap	Beban Persediaan	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Subsidi		Jumlah Mutasi Kurang
				Belanja Persediaan	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Subsidi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
44	4.01.24.01	Kecamatan Air Kumbang	-	9.722.500,00	-	-	-	-	-	9.722.500,00	-	9.722.500,00	-	-	-	9.722.500,00	-	
45	4.01.25.01	Kecamatan Setat Penuguan	-	2.750.000,00	-	-	-	-	-	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-	-	-	2.750.000,00	-	
46	4.01.26.01	Kecamatan Karang Agung Ilir	4.644.000,00	570.471.183,00	-	-	-	-	-	570.471.183,00	-	571.620.183,00	-	-	-	571.620.183,00	3.495.000,00	
47	4.02.01.01	Inspektorat Daerah	4.043.464,00	1.178.262.950,00	-	-	3.350.000,00	-	-	1.181.612.950,00	-	1.178.207.289,00	-	-	3.350.000,00	1.181.557.289,00	4.099.125,00	
48	4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	538.439.990,00	2.176.220.000,00	-	-	-	36.986.656,90	-	2.213.206.656,90	-	2.097.471.911,90	-	-	-	2.097.471.911,90	654.174.735,00	
49	4.04.01.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	4.04.01.02	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.464.720,00	871.176.900,00	-	-	-	-	-	871.176.900,00	-	871.169.120,00	-	-	-	871.169.120,00	1.472.500,00	
51	4.05.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	14.661.387.975,63	54.879.472.216,22	24.743.163.969,43	82.705.000,00	387.580.000,00	141.851.156,90	548.968.152,62	80.084.150.708,98	367.692.730,38	54.021.270.097,27	24.578.174.333,89	11.726.362,00	574.358.165,00	79.553.221.688,55	15.192.316.996,06	

DAFTAR MUTASI ASET TANAH SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2017 (AUDITED)	TANAH Mutasi Tambah																				
			Belanja Modal	Jasa Perencanaan	Kapitalisasi Jasa Pengawas	Honor Tim Pengadaan	DED	Jamsos	Aset Nilai 1	Penambahan BAST	Piutang	Hibah	Reklas dari Barang Jasa	Kapitalisasi dari Barang Jasa	Hutang Barang Jasa	Reklas Aset Desa	Penilaian	Hutang 2018	Bantuan Sosial	Pindah SKPD	Reklas Hutang	Lobih Catat	Reklas dari Aset Tetap
1	PENDIDIKAN	25.628.117.596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.480.064.700,00	-	-	-	-	-	-	-
2	KESEHATAN	7.595.894.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000,00	-	-	-
3	RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PERKIMTAM	4.942.447.345,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PU TATA RUANG	101.057.473.969,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BNPBD KESBANG	1.240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKERTRAN	6.010.879.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETPAN	551.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DLH	3.167.600.378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	552.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPM	563.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKS PPKA	590.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISHUB	9.079.229.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.656.000,00	-	-	-	-	-	-	-
16	DISKOMINFO	541.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KO UKM PERINDA	2.731.696.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DPKD	623.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PERIKANAN	940.500.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PERTANIAN	2.419.879.162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SETDAH	176.488.774.122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SET DPRD	3.670.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	5.444.433.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	155.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RANTAU BAYUR	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	1.639.000.000,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUTAN	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGKAL ILIR	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	34.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	320.736.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	41.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	171.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA	807.016.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	843.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	541.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEDA	490.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BPKAD	543.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BKPSDM	552.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		359.129.458.167,96	-	-	-	-	-	3,00	-	-	7.656.000,00	-	-	-	7.480.064.700,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	-	TOTAL MUTASI TAMBAH	10.487.720.703,00

TANAH	SKPD	Mutasi Kurang													Saldo Akhir UNAUDITED 2019	
		Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel	Kurvol	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Reklas Hutang	Plutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat		Koreksi LK 2017
PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	(178.038.150,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.930.144.146,00
KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.595.894.000,00
RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERKMITAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.942.447.346,00
PULITATA RUJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.057.473.965,96
BNPBD,KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000.000,00
SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.010.679.671,00
DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.000.000,00
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.167.600.378,00
DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.000.000,00
DPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.000.000,00
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.000.000,00
DISHUB	-	(3.000.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.006.984.810,00
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000.000,00
KO,UKM ,PERINDAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.731.696.000,00
DPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.000.000,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940.500.428,00
PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.419.879.162,00
SETDAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.488.774.122,00
SET DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.670.000.000,00
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.444.433.940,00
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.400.000,00
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000,00
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639.000.002,00
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000,00
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.700.000,00
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.736.750,00
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.300.000,00
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.000.000,00
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807.016.000,00
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.480.000,00
SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000.000,00
BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490.000.000,00
BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543.200.000,00
BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.000.000,00
JUMLAH	-	(3.000.000.000,00)	-	-	-	-	(178.038.150,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	366.439.140.720,98
TOTAL MUTASI KURANG															(3.178.038.150,00)	

DAFTAR MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	PERALATAN DAN MESIN																							
		Saldo 31 Desember 2017 (AUDITED)	Mutasi Tambah																						
			Belanja Modal	Jasa Perencanaan	Kapitalisasi Jasa Pengawas	Honor Tim Pengadaan	DED	Jamsos	Kurvol	Penambahan BAST	Plutang	Hibah	Reklas dari Barang Jasa	Kapitalisasi dari Barang Jasa	Hutang Barang Jasa	Reklas Aset Desa	Penilaian Kembali	Hutang 2018	Bantuan Sosial	Pindah SKPD	Reklas Hutang	Lebih Catatan	Reklas dari Aset Tetap	Koreksi LK 2017	
1	PENDIDIKAN	136.778.801.474,87	29.808.619.754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000.000,00	-	-	1.592.700.000,00	-		
2	KESEHATAN	83.839.897.644,85	18.605.165.892,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.540.000,00	-	-	5.749.974,00	-		
3	RSUD	28.664.632.291,94	4.703.330.789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.587.000,00	-	-	-	-		
4	PERKANTAM	8.130.539.606,48	153.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500.000,00	-		
5	PU TATA RUANG	24.978.056.243,00	1.031.955.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.229.672,00	-	-	-	-		
6	BNPBD, KESBANG	6.126.040.596,00	9.971.209.040,00	-	-	-	10.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	SAT POL PP	7.433.220.870,00	36.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.500.000,00	-	-	18.655.222,00	-		
8	DINSOS	2.668.183.816,00	61.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	DISNAKERTRAN	7.802.553.500,00	95.833.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	DISKETPAN	3.753.948.109,10	52.668.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	DLH	18.579.603.623,00	322.542.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	DUK CAPIL	6.323.180.337,20	601.945.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	DPMD	4.950.555.592,00	103.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	DPPKB PPKA	10.570.109.048,00	78.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.625.000,00	-	-	-	-		
15	DISHUB	9.894.887.400,00	297.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000,00	-	-	-	-		
16	DISKOMINFO	11.378.771.599,02	514.953.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	KG, UKM, PERINDAG	7.917.722.538,00	836.212.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	DPKD	6.821.046.435,00	19.956.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	PERIKANAN	7.752.520.073,00	53.350.000,00	-	-	-	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	PERTANIAN	22.283.533.567,00	20.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	SETDAH	76.986.097.335,00	5.582.802.303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	SET DPRD	31.986.337.248,23	801.722.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	DPM DAN PTSPP	4.369.894.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	BANYUASIN I	577.367.500,00	119.645.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	BANYUASIN II	752.232.750,00	109.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	BETUNG	452.002.209,00	59.283.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	RANTAU BAYUR	866.487.500,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	PULAU RIMAU	953.941.100,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	TALANG KELAPA	634.984.000,00	100.798.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	RAMBLUTAN	642.551.000,00	127.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	TUNGKAL ILIR	689.591.680,00	6.991.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	TANJUNG LAGO	651.380.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	SEMBAWA	670.854.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	SUAK TAPEH	637.843.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	BANYUASIN II	783.049.408,00	14.371.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	MAKARTI JAYA	913.049.100,00	81.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	MUARA PADANG	990.399.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	MUARA SUGIHAN	791.768.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	MUARA TELANG	800.560.500,00	31.639.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	AIR SALEK	849.051.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	SUMBER MARGA TE	833.425.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	AIR KUMBANG	709.545.000,00	14.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	SELAT PENUGUAN	-	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	KARANG AGUNG ILIR	-	12.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	INSPEKTORAT	5.053.809.119,00	554.216.962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	BAPPEDA	5.324.306.067,00	165.039.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	BPKAD	10.745.423.702,00	1.317.568.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.400.000,00	-	-	-	-		
48	BKPSDM	4.197.025.110,20	83.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.447.250,00	-	-	-	-		
	JUMLAH	570.480.781.507,89	76.584.349.597,82	-	-	-	12.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975.000,00	-	-	6.364.727.922,00	-	1.709.530.196,00	87.381.873.800,99

TOTAL MUTASI TAMBAH 87.381.873.800,99

SKPD	Mutasi Kurang														Saldo Akhir UNAUDITED 2018
	Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel	Kurvol	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Reklas Hutang	Piutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat	Koreksi LK 2017	
PENDIDIKAN	-	-	(373.026.838,00)	(854.806.700,00)	-	(1.095.293.495,00)	(22.232.062.034,00)	-	-	-	-	-	-	-	143.799.932.161,87
KESEHARAN	-	-	-	(116.954.118,30)	-	(238.653.957,00)	(109.890.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	102.242.606.566,76
RSUD	-	-	-	-	-	(910.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	35.951.923.435,73
PERKIMTAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.297.339.606,48
PU TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.510.240.915,00
BNPBD.KESBANG	-	-	-	-	-	(2.500.000,00)	-	-	-	-	-	-	(53.747.592,00)	-	16.051.752.044,00
SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.590.426.092,00
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.565.000,00)	-	2.734.119.816,00
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.898.386.540,00
DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.806.616.109,10
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.133.545.623,00
DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.925.125.837,20
DPMO	-	(500.229.672,00)	-	-	-	(5.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.548.625.920,00
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.682.859.046,00
DISHUB	-	-	-	-	-	-	(198.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	10.004.987.400,00
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	(19.500.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	11.874.225.299,02
KO.UKM .PERINDAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.043.861.538,00
DPKD	-	(285.997.250,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.999.245.685,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	(9.450.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.798.070.073,00
PERTANIAN	-	(831.870.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.471.713.587,00
SETDAH	(261.800.000,00)	(1.296.454.000,00)	-	-	-	-	(35.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	84.068.999.238,00
SET DPRD	(766.000.000,00)	(2.417.124.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.644.835.248,23
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.838.629.672,00
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.012.500,00
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.702.750,00
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511.286.027,00
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871.487.500,00
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970.941.100,00
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735.772.000,00
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.131.000,00
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.583.498,00
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.380.500,00
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670.854.100,00
SUKT TAPAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.843.000,00
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807.421.089,00
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994.799.100,00
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.399.500,00
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791.768.800,00
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	(10.490.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	821.709.500,00
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849.051.000,00
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833.425.225,00
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724.320.000,00
SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00
KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000,00
INSPEKTORAT	-	(372.450.000,00)	-	-	-	(168.740.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.066.636.081,00
BAPPEDA	-	-	-	-	-	(9.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	(154.325.000,00)	-	5.326.020.067,00
BPKAD	-	(113.153.000,00)	-	-	-	(36.986.656,90)	(68.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	12.036.252.845,10
BKPSDM	-	(547.450.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.391.462.360,20
JUMLAH	(1.027.800.000,00)	(6.364.727.922,00)	(373.026.838,00)	(971.760.818,30)	-	(1.566.534.108,89)	(22.672.942.034,00)	-	-	-	-	-	(213.637.592,00)	-	624.672.225.995,69
														(33.190.429.313,19)	
											TOTAL MUTASI KURANG				

DAFTAR MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2017 (AUDITED)	GEDUNG DAN BANGUNAN																						
			Mutasi Tambah																						
			Belanja Modal	Jasa Perencanaan	Kapitalisasi Jasa Pengawasan	Honor Tim Pengadaan	DED	Jamsos	Kurvol	Penambahan BAST	Piutang	Hibah	Reklas dari Barang Jasa	Kapitalisasi dari Barang Jasa	Hutang Barang Jasa	Reklas Aset Desa	Penilaian Kembali	Hutang 2018	Bantuan Sosial	Pindah SKPD	Reklas Hutang	Lobih Catat	Reklas dari Aset Tetap	Koreksi LK 2017	
1	PENDIDIKAN	469.641.511.484,08	17.945.273.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.516.191.645,16	-
2	KESEHATAN	148.410.186.922,71	9.185.808.928,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.281.508.681,95	-	-	-	-	-	29.400.000,00	-	-	-	-	-
3	RSUD	9.278.959.550,00	3.372.329.772,00	-	-	-	-	199.685.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.505.228,00	-
4	PERKIMTAM	55.836.671.211,80	5.099.339.686,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.384.850,00	-	-	-	-	-	-
5	PO TATA RUANG	5.026.702.085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BNPBD KESBANG	7.039.343.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAT POL PP	2.786.468.500,00	88.655.222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINSOS	1.751.384.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKERTRAN	28.231.362.243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.884.172.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETIFAN	8.404.713.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DILI	6.226.169.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	4.180.179.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPM	4.748.430.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKB PPKA	8.867.991.400,00	85.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISHUB	16.647.450.529,62	247.907.565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DISKOMINFO	9.769.902.373,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KO.UKM.PERINDAG	68.399.899.876,25	1.733.025.104,26	85.833.000,00	9.622.790,00	-	-	-	-	-	-	9.590.768.000,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	7.680.781.215,10
18	DPKD	10.272.616.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PERIKANAN	14.223.690.083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PERTANIAN	32.658.040.217,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SETDAH	75.143.932.466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.144.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SET DPRD	44.469.990.164,00	68.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DPM DAN PTSP	3.098.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	875.669.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	3.076.826.004,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	1.505.353.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	3.258.451.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	1.798.724.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.234.064,89	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUTAN	344.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGKAL ILIR	1.487.963.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	1.717.819.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SLIAK TAPEH	1.614.720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	747.776.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	248.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	2.316.012.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	1.172.478.000,00	(10.490.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	AIR SALEK	136.232.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.490.000,00	-
41	SUMBER MARGA TE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	1.657.937.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	4.187.961.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEDA	4.223.621.576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BPKAD	5.386.479.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BKPSDM	4.180.381.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.071.651.247.696,27	37.816.674.277,36	85.833.000,00	9.622.790,00	-	-	199.685.000,00	-	-	-	11.474.940.000,01	220.144.600,00	7.281.508.681,95	-	-	-	17.384.850,00	-	430.634.064,89	-	-	9.388.968.088,26	66.925.395.352,47	
																							TOTAL MUTASI TAMBAH		

GEDUNG DAN BANGUNAN

LAMPIRAN : 14

SKPD	Mutasi Kurang														Saldo Akhir UNAUDITED 2018
	Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel	Kurvoi	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Reklas Hutang	Piutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat	Koreksi LK 2017	
PENDIDIKAN	-	-	-	(82.040.000,00)	-	-	(1.592.700.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	487.428.236.109,24
KESKIHARAN	-	-	-	-	(623.010.915,79)	(79.129.000,00)	(4.532.842.105,24)	-	-	-	-	-	-	-	159.671.922.511,70
RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.012.479.550,00
PERKIMTAM	-	(401.234.064,89)	-	-	(91.834.051,28)	-	(1.478.051.000,00)	(12.951.933.000,00)	-	-	-	-	-	-	46.030.343.631,66
PIU TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.626.702.085,00
BNPBD KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.039.343.030,00
SAT POL PP	-	-	-	-	-	(70.000.000,00)	(18.655.222,00)	-	-	-	-	-	-	-	2.786.468.500,00
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751.384.000,00
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.115.534.243,00
DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.404.713.000,00
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.226.169.000,00
DIK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.180.179.000,00
DPMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.748.430.500,00
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.953.891.400,00
DISHUB	-	(29.400.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.887.958.094,62
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.789.902.373,25
KO UKM PERINDAG	-	-	-	-	-	-	(112.200.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	87.387.729.865,72
DPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.272.616.000,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.223.690.083,00
FERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.658.040.217,21
SETDAH	-	-	-	-	-	-	-	(102.800.000,00)	-	-	-	-	-	-	75.239.277.066,00
SET DPRD	-	-	-	-	-	-	(68.925.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	44.469.980.164,00
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.098.510.000,00
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875.869.000,00
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.076.626.004,35
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505.353.000,00
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.258.451.000,00
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.199.958.084,89
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.840.000,00
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.487.963.000,00
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.717.819.000,00
SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.614.720.000,00
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.776.600,00
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.900.000,00
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.316.012.000,00
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161.988.000,00
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.722.000,00
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.657.937.000,00
SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.187.961.000,00
BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.223.621.576,00
BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.386.479.000,00
BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.180.381.900,00
JUMLAH	-	(430.634.064,89)	-	(82.040.000,00)	(714.844.967,07)	(149.129.000,00)	(7.803.373.327,24)	(13.054.733.000,00)	-	-	-	-	-	-	1.116.341.888.689,64
TOTAL MUTASI KURANG														(22.234.754.359,20)	

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2017 (AUDITED)	JALAN JARINGAN IRIGASI																					
			Mutasi Tambah																					
			Belanja Modal	Jasa Perencanaan	Kapitalisasi Jasa Pengawas	Honor Tim Pengadaan	DED	Jamsos	Kurvol	Penambahan BAST	Piutang	Hibah	Reklas dari Barang Jasa	Kapitalisasi dari Barang Jasa	Hutang Barang Jasa	Reklas Aset Desa	Penilaian Kembali	Hutang 2018	Bantuan Sosial	Pindah SKPD	Reklas Hutang	Lobih Catat	Reklas dari Aset Tetap	Koreksi LK 2017
1	PENDIDIKAN	687.725.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.024.100,00	-	-	-	-	-
2	KESEHATAN	7.445.507.529,00	74.198.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD	981.416.810,00	102.272.008,06	3.448.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.642.732.105,24	-
4	PERKIMTAM	373.276.284.273,66	45.049.269.894,82	-	-	-	-	-	-	-	-	1.353.139.629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PU TATA RUANG	2.058.572.244.848,95	90.721.966.729,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.366.854,01	-	-	-	-	-	-
6	BNPBD KESBANG	91.134.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.220.900,00	-	-	-	-	-	-
7	SAT POL PP	40.999.000,00	16.928.109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINSOS	184.448.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKERTRAN	37.205.007.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETIFAN	74.894.332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DILI	1.677.411.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	407.932.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPM	319.812.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKB PPKA	15.895.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISHUB	27.874.214.071,56	6.048.275.818,34	-	-	-	-	194.020.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DISKOMINFO	5.122.046.397,80	14.998.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KO UKM PERINDAG	982.337.885,00	217.254.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DPKD	130.861.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.200.000,00	-
19	PERIKANAN	10.819.643.878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PERTANIAN	8.200.038.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SEIDAH	3.324.363.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SET DPRD	1.633.337.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DPM DAN PTSP	86.445.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	2.171.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUJAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGKAL ILIR	3.110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	61.566.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	8.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	5.355.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TE	34.991.457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	36.870.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	49.767.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEDA	66.678.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BPKAD	680.879.811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BKPSDM	205.191.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.540.324.081.269,97	142.245.163.393,24	3.448.484,00	-	-	-	194.020.500,00	-	-	-	1.353.139.629,00	-	-	-	-	-	709.587.754,01	79.024.100,00	-	-	-	6.022.260.714,05	150.606.652.574,30
																							TOTAL MUTASI TAMBAH	

JJI

SKPD	Mutasi Kurang														Saldo Akhir UNAUDITED 2018
	Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel	Kurvol	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Reklas Hutang	Piutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat	Koreksi LK 2017	
PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.749.600,00
KESEHARAN	-	-	-	-	-	(1.156.000,00)	(5.749.974,00)	-	-	-	-	-	-	-	12.155.532.494,24
RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.354.473.710,87
PERKIMTAM	-	-	-	-	(49.138.279,15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.269.922.372,34
PU TAJA RUJANG	-	-	-	-	(1.247.839.050,43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.148.115.593.427,54
BNPBD KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.134.100,00
SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.927.109,00
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.448.600,00
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.205.007.634,00
DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.884.332,00
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.677.411.938,00
DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.932.000,00
DPMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.812.000,00
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.895.000,00
DISHUB	-	-	-	-	(496.657.747,74)	(20.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	33.599.852.642,16
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.137.044.397,80
KO.UKM .PERINDAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311.791.885,00
DPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.861.176,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.819.643.878,00
PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.200.038.081,00
SETOAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.324.363.475,00
SET DFRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.633.337.000,00
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.445.000,00
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.171.600,00
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110.000,00
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.566.200,00
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.510.000,00
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.355.000,00
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.991.457,00
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.870.400,00
SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.767.000,00
BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.878.564,00
BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680.879.811,00
BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.191.000,00
JUMLAH	-	-	-	-	(1.793.635.077,32)	(1.156.000,00)	(25.749.974,00)	-	-	-	-	-	-	-	2.689.110.192.782,95
TOTAL MUTASI KURANG														(1.820.541.051,32)	

DAFTAR MUTASI ASET TETAP LAINNYA SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2017 (AUDITED)	ASET TETAP LAINNYA																						
			Mutasi Tambah																						
			Belanja Modal	Jasa Perencanaan	Kapitalisasi Jasa Pengawas	Honor Tim Pengadaan	DED	Jamsos	Kurvol	Penambahan BAST	Piutang	Hibah	Reklas dari Barang Jasa	Kapitalisasi dari Barang Jasa	Hutang Barang Jasa	Reklas Aset Desa	Penilaian Kembali	Hutang 2018	Bantuan Sosial	Pindah SKPD	Reklas Hutang	Lebih Catat	Reklas dari Aset Tetap	Koreksi LK 2017	
1	PENDIDIKAN	64.660.028.614,40	620.992.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.147.528.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KESEHATAN	107.378.000,00	14.242.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD	151.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PERKANTORAN	15.183.226.126,59	23.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PU TATA RUANG	155.332.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BNPBD KESBANG	11.366.319.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAT POL PP	932.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKERTRAN	394.140.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETIFAN	57.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DLH	176.706.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	40.957.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPMD	112.605.836,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKB PPKA	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISHUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	178.141.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KO.UKM.PERINDAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DPKD	3.655.570.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PERTANIAN	330.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SETDAH	1.300.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SET DPRD	1.482.630.300,00	5.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	DPM DAN PTSP	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMBER MARGA TE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	74.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEDA	301.035.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BPKAD	32.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BKPSDM	184.327.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	100.837.446.747,49	842.776.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.147.528.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.723.000,00	20.007.027.340,00
																								TOTAL MUTASI TAMBAH	20.007.027.340,00

ASET TETAP LAINNYA

LAMPIRAN : 16

SKPD	Mutasi Kurang														Saldo Akhir UNAUDITED 2018
	Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel	Kurvoi	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Reklas Hutang	Piutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat	Koreksi LK 2017	
PENDIDIKAN	-	-	(536.265.000,00)	(19.059.128.140,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.849.878.614,40
KESIHATAN	-	-	-	-	-	(14.242.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	107.378.000,00
RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.440.000,00
PERKIMTAM	-	-	-	-	-	-	(23.500.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	15.183.226.126,59
PU TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.332.000,00
BNPBD KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.386.319.000,00
SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932.625.000,00
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.140.500,00
DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.500.000,00
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.706.000,00
DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.957.500,00
DPMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.605.836,50
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000,00
DISHUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.141.700,00
KO UKM PERINDAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.655.570.500,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.260.000,00
SETDAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.435.000,00
SET DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488.530.300,00
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SELAT PENUGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.000.000,00
BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.035.200,00
BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.930.000,00
BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.327.170,00
JUMLAH	-	-	(536.265.000,00)	(19.059.128.140,00)	-	(14.242.500,00)	(23.500.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	101.211.338.447,49
TOTAL MUTASI KURANG														(19.633.135.640,00)	

KDP

SKPD	Mutasi Kurang														Saldo Akhir UNAUDITED 2018
	Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel Penilaian	Kurvol	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Reklas Hutang	Piutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat	Koreksi LK 2016	
PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	(1.220.480.745,16)	-	-	-	-	-	-	-	-
KESEHARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.514.936.900,00
RSUD	-	-	-	-	-	-	(1.428.841.836,81)	-	-	-	-	-	-	-	1.312.400.000,00
PERKIMTAM	-	-	-	-	-	-	(245.440.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	20.525.431.000,00
PU TAJA RUJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.365.428.240,51
BNPBD KESBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737.802.000,00
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311.534.000,00
DISKETPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISHUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.347.500,00
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KO.UKM_PERINDAG	-	-	-	-	-	-	(7.680.781.215,10)	-	-	-	-	-	-	-	302.175.500,00
DPKD	-	-	-	-	-	-	(593.725.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	165.285.000,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.271.000,00
PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETOAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SET DFRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.480.000,00
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	(11.169.268.797,07)	-	-	-	-	-	-	-	136.219.091.140,51
								TOTAL MUTASI KURANG							(11.169.268.797,07)

ASET LAINNYA

SKPD	Mutasi Kurang													Saldo Akhir UNAUDITED 2018	
	Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel Penilaian	Kurvol	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Reklas Hutang	Plutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat		Koreksi LK 2016
PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.074.874.448,78
KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.356.415,79
RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERKIMTAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.698.322.707,43
PULITATA RUANG	-	-	-	-	(933.416.296,94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.253.243.872,07
BNPBD,KESEBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.597.592,00
SAT POL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.565.000,00
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.711.000,00
DISKETPAN	(14.123.486.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.687.031.802,98
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.001.533.000,00
DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.772.500,00
DPMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.150.000,00
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.799.000,00
DISHUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.064.559.019,74
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.457.495.076,00
KO,UKM ,PERINDAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.169.000,00
DPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709.675.000,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.283.773,00
PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.700.000,00
SETDAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.630.085.103,00
SET DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.697.000,00
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.670.000,00
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00
SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARAN AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566.847.500,00
BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.776.406.500,00
BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.550.000,00
JUMLAH	(14.123.486.000,00)	-	-	-	(933.416.296,94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.769.093.310,78
TOTAL MUTASI KURANG															(15.056.902.296,94)

DAFTAR TOTAL MUTASI ASET TETAP SKPD PER 31 DESEMBER 2018

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2017 (AUDITED)	TOTAL ASET TETAP PER SKPD 2018																					
			Mutasi Tambah																					
			Belanja Modal	Jasa Perencanaan	Kapitalisasi Jasa Pengawas	Jasa Tim Pengadaan	DED	Jamsos	Kurvol	Penan bahan BAST	Plutang	Hibah	Reklas dari Barang Jasa	Kapitalisasi dari Barang Jasa	Hutang Barang Jasa	Reklas Aset Desa	Penilaian Kembali	Hutang 2018	Bantuan Sosial	Pindah SKPD	Reklas Hutang	Lebih Catatan	Reklas dari Aset Tetap	Koreksi LK 2017
1	PENDIDIKAN	715.820.425.799,29	48.374.884.754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.169.028.140,00	-	-	-	-	7.480.064.700,00	-	79.024.100,00	175.000.000,00	-	-	5.975.228.689,16	-
2	KESEHATAN	249.055.368.596,56	27.879.416.154,89	-	-	-	-	119.777.900,00	-	623.010.915,79	-	-	46.751.130,38	7.281.508.681,95	-	-	-	-	-	3.239.940.000,00	-	-	4.648.482.079,24	-
3	RSUD	41.817.690.288,75	8.177.932.569,06	3.448.484,00	-	-	-	-	2.223.968.354,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.587.000,00	-	-	1.428.841.836,81	-
4	PERKIMTAM	656.681.275.940,53	50.325.409.580,85	-	-	-	-	-	-	-	-	330.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.746.991.000,00	-
5	PU TATA RUANG	2.355.694.056.502,00	91.753.921.729,02	-	-	-	-	-	-	-	-	140.972.331,43	-	-	-	-	-	-	-	657.751.704,01	-	-	-	-
6	BNPBD KESBANG	25.895.686.726,00	9.971.209.040,00	-	-	-	10.750.000,00	-	-	-	-	1.247.839.050,43	-	-	-	-	-	-	-	69.220.900,00	-	-	53.747.592,00	-
7	SAT POL PP	12.931.115.370,00	141.633.331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINSOS	4.604.016.416,00	61.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.500.000,00	18.655.222,00	-
9	DISNAKERTRAN	81.723.988.548,00	95.833.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.884.172.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DISKETIPAN	42.652.563.244,08	52.668.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DLH	30.839.023.837,00	322.942.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUK CAPIL	11.777.021.337,20	601.945.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPM	10.835.553.828,50	103.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DPPKB PPKA	20.548.794.448,00	162.025.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISHUB	65.865.682.083,19	6.593.883.383,34	-	-	-	-	358.368.000,00	-	496.657.747,74	-	-	7.656.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.000.000,00
16	DISKOMINFO	27.248.715.446,07	708.093.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.500.000,00
17	KO UKM PERINDAG	87.807.606.514,35	2.786.491.104,26	85.833.000,00	9.622.790,00	-	-	-	-	-	-	9.640.268.000,01	39.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	201.427.000,00	-	-	7.792.981.215,10
18	DPKD	22.276.512.111,00	19.956.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.450.000,00	-	-	593.725.000,00
19	PERIKANAN	35.040.909.235,00	53.350.000,00	-	-	-	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PERTANIAN	65.928.451.647,21	20.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SETDAH	359.735.887.901,00	6.582.902.303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.086.200,00	102.800.000,00	-	35.000.000,00
22	SET DPRD	83.288.991.712,23	876.547.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.925.000,00
23	DPM DAN PTSP	7.660.519.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BANYUASIN I	1.453.036.500,00	119.645.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BANYUASIN II	9.273.492.694,35	109.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BETUNG	2.112.755.209,00	69.293.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RANTAU BAYUR	991.487.500,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PULAU RIMAU	4.222.063.700,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TALANG KELAPA	4.072.708.000,00	100.788.000,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RAMBUJAN	1.013.391.000,00	127.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	TUNGGALILIR	2.188.054.880,00	6.991.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TANJUNG LAGO	651.380.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SEMBAWA	2.403.673.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUAK TAPEH	2.314.129.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BANYUASIN II	1.575.526.008,00	14.371.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MAKARTI JAYA	1.452.685.850,00	81.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MUARA PADANG	3.356.221.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MUARA SUGIHAN	791.768.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MUARA TELANG	2.149.393.500,00	21.149.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	AIR SALEH	995.283.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.490.000,00
41	SUMBER MARGA TE	1.675.432.882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	AIR KUMBANG	3.253.832.400,00	14.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SELAT PENUGUAN	-	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KARANG AGUNG ILLI	-	12.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	INSPEKTORAT	9.906.937.119,00	554.216.962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BAPPEKA	10.818.163.907,00	185.039.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.325.000,00	-	-
47	BPKAD	20.097.319.013,00	1.317.568.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000.000,00
48	BKPSDM	9.836.955.180,20	83.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	5.112.333.157.344,50	257.488.963.468,42	89.281.484,00	9.622.790,00	12.400.000,00	1.212.553.400,00	2.223.968.354,79	2.508.480.047,39	-	-	32.054.263.769,01	856.252.330,38	7.281.508.681,95	-	13.054.733.000,00	7.480.064.700,00	727.947.604,01	79.024.100,00	9.795.361.986,89	-	213.637.692,00	22.624.620.042,31	357.712.883.351,15
																								TOTAL MUTASI TAMBAH

TOTAL

SKPD	Mutasi Kurang														Saldo Akhir UNAUDITED 2018
	Penghapusan	Pindah SKPD	Hibah	Ekstracomptabel Penilaian	Kurvol	Reklas ke Barang Jasa	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Aset Desa	Hutang	Piutang	Reklas ke aset lainnya/Rusak	Koreksi Belanja	Lebih Catat	Koreksi LK 2017	
PENDIDIKAN	-	-	(909.291.838,00)	(19.995.974.840,00)	-	(1.095.293.495,00)	(25.223.280.929,16)	-	-	-	-	-	-	-	749.849.815.080,29
KESEHARAN	-	-	-	(116.954.118,30)	(623.010.915,79)	(333.181.457,00)	(4.648.482.079,24)	-	-	-	-	-	-	-	287.172.626.888,49
RSUD	-	-	-	-	-	(910.000,00)	(1.428.841.836,81)	-	-	-	-	-	-	-	52.812.716.696,60
PERKIMTAM	-	(401.234.064,89)	-	-	(140.972.330,43)	-	(1.746.991.000,00)	(12.951.933.000,00)	-	-	-	-	-	-	708.947.032.790,50
FUJATA RUJANG	-	-	-	-	(2.181.255.347,37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.447.084.012.906,08
ENPBB KESBANG	-	-	-	-	-	(2.500.000,00)	-	-	-	-	-	-	(53.747.592,00)	-	35.866.145.766,00
SAT POL PP	-	-	-	-	-	(70.000.000,00)	(18.655.222,00)	-	-	-	-	-	-	-	13.105.248.701,00
DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.565.000,00)	-	4.665.516.416,00
DISNAKERTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.703.993.588,00
DISKETIPAN	(14.123.486.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.581.745.244,08
DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.392.966.837,00
DUK CAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.378.966.837,20
DPMD	-	(500.229.672,00)	-	-	-	(5.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.433.624.256,50
DPPKB PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.747.444.446,00
DISHUB	-	(3.029.400.000,00)	-	-	(496.657.747,74)	-	(218.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	69.808.589.466,52
DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	(19.500.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	27.976.808.846,07
KO.UKM.PERINDAG	-	-	-	-	-	-	(7.792.981.215,10)	-	-	-	-	-	-	-	100.872.423.908,72
DPKD	-	(285.997.250,00)	-	-	-	-	(593.725.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	22.556.253.361,00
PERIKANAN	-	-	-	-	-	(9.450.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	35.086.459.235,00
FERTANIAN	-	(831.870.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.110.531.047,21
SETDAH	(281.800.000,00)	(1.236.454.000,00)	-	-	-	-	(35.000.000,00)	(102.800.000,00)	-	-	-	-	-	-	387.051.934.004,00
SET DPRD	(766.000.000,00)	(2.417.124.000,00)	-	-	-	-	(68.925.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	80.983.389.712,23
DPM DAN PTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.129.254.672,00
BANYUASIN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572.681.500,00
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.362.962.694,35
BETUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.172.039.027,00
RANTAU BAYUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.487.500,00
PULAU RIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.239.063.700,00
TALANG KELAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.574.730.066,89
RAMBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.971.000,00
TUNGKAL ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193.056.498,00
TANJUNG LAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.380.500,00
SEMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.403.673.100,00
SUAK TAPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.314.129.200,00
BANYUASIN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.589.897.688,00
MAKARTI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564.435.850,00
MUARA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.356.221.500,00
MUARA SUGIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791.768.800,00
MUARA TELANG	-	-	-	-	-	-	(10.490.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	2.160.052.500,00
AIR SALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896.773.000,00
SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.676.432.682,00
AIR KUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.268.607.400,00
SELAT PENUGUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00
KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000,00
INSPEKTORAT	-	(372.450.000,00)	-	-	-	(168.740.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.919.564.081,00
BALPEDA	-	-	-	-	-	(9.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	(154.325.000,00)	-	10.974.202.907,00
BPKAD	-	(113.153.000,00)	-	-	-	(36.986.656,90)	(68.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	21.456.148.156,10
BKPSDM	-	(547.450.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.031.392.430,20
JUMLAH	(15.151.286.000,00)	(9.795.361.986,89)	(909.291.838,00)	(20.112.928.958,30)	(3.441.896.341,33)	(1.731.061.608,89)	(41.872.872.282,31)	(13.054.733.000,00)	-	-	-	-	(213.637.592,00)	(106.283.069.607,72)	5.363.762.971.088,03
													TOTAL MUTASI KURANG		

REKAPITULASI MUTASI DED KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2018

PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN : 19

Nama SKPD	Tahun Perolehan	Saldo Awal KDP	Saldo Awal Aset Lainnya	Total Saldo Awal	Mutasi Tambah KDP	Mutasi Tambah Aset Lainnya	Total Mutasi Tambah	Mutasi Kurang KDP	Mutasi Kurang Aset Lainnya	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir KDP	Saldo Akhir Aset Lainnya	Saldo Akhir
Dinas Lingkungan Hidup		-	793.468.000,00	793.468.000,00	-	-	-	-	-	-	-	793.468.000,00	793.468.000,00
Hasil Kajian (DED)													
DED TPA Regional Sistem Sanitary Landfill di Kec. BA III	2010	-	345.818.000,00	345.818.000,00	-	-	-	-	-	-	-	345.818.000,00	345.818.000,00
DED TPA Regional Sistem Sanitary Landfill di Kec. Talang Kelapa	2010	-	298.435.000,00	298.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	298.435.000,00	298.435.000,00
Landscape Pertamanan	2010	-	149.215.000,00	149.215.000,00	-	-	-	-	-	-	-	149.215.000,00	149.215.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		3.499.952.200,00	149.420.000,00	3.649.372.200,00	-	-	-	-	-	-	3.499.952.200,00	149.420.000,00	3.649.372.200,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan													
Belanja Jasa DED Jalan Baru Pengumbuk - Pangkalan Balai	2014	398.640.000,00	-	398.640.000,00	-	-	-	-	-	-	398.640.000,00	-	398.640.000,00
Belanja Jasa DED Jalan Lingkar Kota Betung	2014	418.500.000,00	-	418.500.000,00	-	-	-	-	-	-	418.500.000,00	-	418.500.000,00
Belanja Jasa DED Jalan Rantau Bayur - Gelumbang (Kabupaten Muara Enim)	2014	222.940.000,00	-	222.940.000,00	-	-	-	-	-	-	222.940.000,00	-	222.940.000,00
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa upang Jaya Kec. Muara Telangx	2014	492.900.000,00	-	492.900.000,00	-	-	-	-	-	-	492.900.000,00	-	492.900.000,00
Belanja Jasa Perencanaan Dokumen Lingkungan dan FS Jalan Lingkar Kota Betung	2014	494.120.000,00	-	494.120.000,00	-	-	-	-	-	-	494.120.000,00	-	494.120.000,00
Pengawasan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rantau Bayur	2016	297.600.000,00	-	297.600.000,00	-	-	-	-	-	-	297.600.000,00	-	297.600.000,00
Perencanaan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Boom Berlian Kabupaten Banyuasin	2017	484.632.500,00	-	484.632.500,00	-	-	-	-	-	-	484.632.500,00	-	484.632.500,00
Perencanaan Pengembangan Daerah Rawa pasang Surut di DIR Upang Jaya.	2017	132.660.000,00	-	132.660.000,00	-	-	-	-	-	-	132.660.000,00	-	132.660.000,00
Perencanaan Pengembangan Daerah Rawa Perencanaan Pengembangan Daerah Rawa Pasang Surut di DIR Rimba Alai, DIR Ujung Tanjung dan DIR Pagar Bulan	2017	93.285.500,00	-	93.285.500,00	-	-	-	-	-	-	93.285.500,00	-	93.285.500,00
Perencanaan Tebal Perkerasan jalan (Wilayah-1) untuk Data Pendukung DAK	2017	49.020.000,00	-	49.020.000,00	-	-	-	-	-	-	49.020.000,00	-	49.020.000,00
Perencanaan Tebal Perkerasan jalan (Wilayah 2) untuk Data Pendukung DAK	2017	49.000.000,00	-	49.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49.000.000,00	-	49.000.000,00
Review Desain Jembatan Rantau Bayur.	2017	366.654.200,00	-	366.654.200,00	-	-	-	-	-	-	366.654.200,00	-	366.654.200,00
Hasil Kajian (DED)													
DED Pembuatan Jembatan Desa Tanjung Laut Kec. Suak Tapeh	2014	-	149.420.000,00	149.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	149.420.000,00	149.420.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		-	798.068.000,00	798.068.000,00	-	377.575.000,00	377.575.000,00	-	-	-	-	1.175.643.000,00	1.175.643.000,00
Hasil Kajian (DED)													
DED Gedung Olahraga	2009	-	-	-	-	377.575.000,00	377.575.000,00	-	-	-	-	377.575.000,00	377.575.000,00
DED Gedung Kantor Permanen	2010	-	98.000.000,00	98.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	98.000.000,00	98.000.000,00
DED Studion Olahraga	2010	-	323.356.000,00	323.356.000,00	-	-	-	-	-	-	-	323.356.000,00	323.356.000,00
DED Museum Kebudayaan	2011	-	144.314.000,00	144.314.000,00	-	-	-	-	-	-	-	144.314.000,00	144.314.000,00
DED Tribun Lapangan Sepak Bola	2012	-	48.620.000,00	48.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.620.000,00	48.620.000,00
DED Pembangunan Lapangan Munal Serumpun	2012	-	48.400.000,00	48.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.400.000,00	48.400.000,00
DED Pembangunan Gedung Serbaguna	2012	-	23.281.000,00	23.281.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.281.000,00	23.281.000,00
DED Tribun Lapangan Sepak Bola	2012	-	48.334.000,00	48.334.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.334.000,00	48.334.000,00
Pembuatan DED Gedung Kantor Badan Keluarga Berencana	2012	-	48.328.000,00	48.328.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.328.000,00	48.328.000,00
Pembuatan DED Gedung AKLON Badan Keluarga Berencana	2012	-	15.435.000,00	15.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.435.000,00	15.435.000,00
Dinas Perhubungan		-	-	-	164.347.500,00	-	164.347.500,00	-	-	-	164.347.500,00	-	164.347.500,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan													
DED Pembangunan Dermaga/tambatan perahu dana	2018	-	-	-	91.335.000,00	-	91.335.000,00	-	-	-	91.335.000,00	-	91.335.000,00
DED Pembangunan/peningkatan Jalan Non Status	2018	-	-	-	73.012.500,00	-	73.012.500,00	-	-	-	73.012.500,00	-	73.012.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		-	-	-	-	593.725.000,00	593.725.000,00	-	-	-	-	593.725.000,00	593.725.000,00
Hasil Kajian (DED)													
DED Pembangunan Perpustakaan Daerah	2013	-	-	-	-	593.725.000,00	593.725.000,00	-	-	-	-	593.725.000,00	593.725.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		344.381.000,00	1.354.040.000,00	1.698.421.000,00	138.100.000,00	245.440.000,00	383.540.000,00	-	-	-	482.481.000,00	1.599.480.000,00	2.081.961.000,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan													
Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kec. Muara Padang	2015	49.000.000,00	-	49.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49.000.000,00	-	49.000.000,00
Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kec. Air Saleh	2015	48.973.000,00	-	48.973.000,00	-	-	-	-	-	-	48.973.000,00	-	48.973.000,00
Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Bersih Kec. Muara Sugihan	2015	49.181.000,00	-	49.181.000,00	-	-	-	-	-	-	49.181.000,00	-	49.181.000,00

Nama SKPD	Tahun Perolehan	Saldo Awal KDP	Saldo Awal Aset Lainnya	Total Saldo Awal	Mutasi Tambah KDP	Mutasi Tambah Aset Lainnya	Total Mutasi Tambah	Mutasi Kurang KDP	Mutasi Kurang Aset Lainnya	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir KDP	Saldo Akhir Aset Lainnya	Saldo Akhir
DED Gedung Kantor DPPKAD Kabupaten Banyuasin	2017	49.375.000,00	-	49.375.000,00	-	-	-	-	-	-	49.375.000,00	-	49.375.000,00
Perencanaan Desain Pool Damkar Kab. Banyuasin	2017	49.440.000,00	-	49.440.000,00	-	-	-	-	-	-	49.440.000,00	-	49.440.000,00
Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Kumbang	2018	-	-	-	39.150.000,00	-	39.150.000,00	-	-	-	39.150.000,00	-	39.150.000,00
Penyusunan DED Pipa Distribusi Pipa Sukajadi	2018	-	-	-	49.672.000,00	-	49.672.000,00	-	-	-	49.672.000,00	-	49.672.000,00
Penyusunan DED SPAM Muara Padang	2018	-	-	-	49.278.000,00	-	49.278.000,00	-	-	-	49.278.000,00	-	49.278.000,00
Hasil Kajian (DED)													
Pengawasan dan supervisi Pembangunan Jaringan Sistem Air Bersih Unit Betung, Lubuk Lancang dan Kenten Laut	2010	-	827.910.000,00	827.910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	827.910.000,00	827.910.000,00
Perencanaan Lapangan tenis dan tribun banyuasin	2012	-	29.850.000,00	29.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	29.850.000,00	29.850.000,00
DED Balai Sikiat dan Mess	2012	-	199.070.000,00	199.070.000,00	-	-	-	-	-	-	-	199.070.000,00	199.070.000,00
Perencanaan gerbang perbatasan wilayah antara banyuasin-palembang dan Banyuasin - Muba	2012	-	98.370.000,00	98.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	98.370.000,00	98.370.000,00
Perencanaan Pemindahan Utilitas PDAM yang terkena proyek pelebaran jalan raya Palembang - Betung Lokasi Pangkalan balai	2012	-	198.840.000,00	198.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	198.840.000,00	198.840.000,00
Perencanaan Gedung Kesenian Dinas Pariwisata	2013	-	-	-	-	99.300.000,00	99.300.000,00	-	-	-	-	99.300.000,00	99.300.000,00
Perencanaan Tribun dan Fasilitas Umum Lapangan Olahraga Komplek Perumahan Dinas Pemkab Banyuasin	2013	-	-	-	-	49.750.000,00	49.750.000,00	-	-	-	-	49.750.000,00	49.750.000,00
Perencanaan Stadion dan Tribun Kec Betung Kab. Banyuasin	2013	-	-	-	-	96.390.000,00	96.390.000,00	-	-	-	-	96.390.000,00	96.390.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.311.534.000,00	768.711.000,00	2.080.245.000,00	-	-	-	-	-	-	1.311.534.000,00	768.711.000,00	2.080.245.000,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan													
DED Peningkatan jalan desa ke UPT Jati Sari	2014	49.735.000,00	-	49.735.000,00	-	-	-	-	-	-	49.735.000,00	-	49.735.000,00
DED Peningkatan jalan depan pasar KTM	2014	49.501.000,00	-	49.501.000,00	-	-	-	-	-	-	49.501.000,00	-	49.501.000,00
DED Jalan Penghubung Desa Telang Sari ke Tanjung Lago	2014	48.000.000,00	-	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00	-	48.000.000,00
DED Jalan Poros I Desa Sumber Mulya ke Desa Kelapa II Kec. Pulau Rimau	2014	332.700.000,00	-	332.700.000,00	-	-	-	-	-	-	332.700.000,00	-	332.700.000,00
DED Jalan Penghubung Desa Bangun Sari ke Kantor Kec. Tanjung Lago	2014	117.300.000,00	-	117.300.000,00	-	-	-	-	-	-	117.300.000,00	-	117.300.000,00
DED Jembatan Beton (non standar) penyeberangan dari UPT Tabala Jaya	2014	98.630.000,00	-	98.630.000,00	-	-	-	-	-	-	98.630.000,00	-	98.630.000,00
DED Pembuatan FS jaringan SAB KTM desa Telang Sari	2014	49.438.000,00	-	49.438.000,00	-	-	-	-	-	-	49.438.000,00	-	49.438.000,00
Pembuatan DED Peningkatan Jalan Penghubung ke Arah Dermaga di Desa Sri Menanti Kec. Tanjung Lago.	2015	29.500.000,00	-	29.500.000,00	-	-	-	-	-	-	29.500.000,00	-	29.500.000,00
Pembuatan DED Peningkatan Jalan Ruas II, Jalan Penghubung di Desa Telang Sari ke Desa Sri Menanti	2015	67.390.000,00	-	67.390.000,00	-	-	-	-	-	-	67.390.000,00	-	67.390.000,00
Pembuatan DED Peningkatan Jalan Ruas II, Jalan Penghubung di Desa Purwasari ke Desa Sri Menanti	2015	58.200.000,00	-	58.200.000,00	-	-	-	-	-	-	58.200.000,00	-	58.200.000,00
Pembuatan DED Peningkatan Jalan Ruas Penghubung di Desa Bunga Karang dan Telang Sari	2015	116.050.000,00	-	116.050.000,00	-	-	-	-	-	-	116.050.000,00	-	116.050.000,00
Pembuatan DED Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Sri Agung Kecamatan Banyuasin II	2016	98.130.000,00	-	98.130.000,00	-	-	-	-	-	-	98.130.000,00	-	98.130.000,00
Pembuatan DED Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Majuria Kecamatan Banyuasin II	2016	49.000.000,00	-	49.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49.000.000,00	-	49.000.000,00
Pembuatan DED Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Banyu Urip ke Pusat KTM Kecamatan Tanjung Lago	2016	147.960.000,00	-	147.960.000,00	-	-	-	-	-	-	147.960.000,00	-	147.960.000,00
Hasil Kajian (DED)													
Pembuatan DED Gedung Kantor BLK 1 Paket	2010	-	768.711.000,00	768.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-	768.711.000,00	768.711.000,00
JUMLAH		5.155.867.200,00	3.863.707.000,00	9.019.574.200,00	302.447.500,00	1.216.740.000,00	1.519.187.500,00	-	-	-	5.458.314.700,00	5.080.447.000,00	10.538.761.700,00

